

KALEIDOSKOP

2016 Pemberitaan Media

KEMENDIKBUD



“ Ing Ngarso Sung Tulodho Ing Madyo Mangun Karso Tut Wuri Handayani ”

*Didepan memberi contoh
Ditengah memberi semangat
Dibelakang memberi kekuatan*





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl Jenderal Sudirman,
Senayan
Jakarta
10270

WWW.KEMDIKBUD.GO.ID

Editorial

Pengarah & Penanggung

Jawab
Didik Suhardi

Ketua
Eka Nugrahini

Wakil Ketua
Andi Wibowo

Redaksional
Mangara S
Ratih

Pengumpul Materi

Lani
Aisyah
Hafid
Jumari
Adang
Yus Fajarudin
Rika
Wira

Desain
Zainudin
Septian

Pengantar

Kaleidoskop ini menyoroti tujuh isu atau program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terangkum di dalam media mainstream (media daring dan media cetak). Melalui rekam media tersebut, kita dapat mengetahui potret Kemendikbud dalam kaca mata media.

Data berasal dari pemberitaan 40.819 di media daring dan 19.786 di media cetak, baik lokal maupun nasional, yang dihimpun sepanjang tahun 2016 tertanggal 01 Januari - 08 Desember 2016. Adapun tujuh isu yang diambil sebagai data meliputi topik tentang guru, ujian nasional (UN), sekolah, kebudayaan, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pendidikan vokasi/SMK, dan Kurikulum 2013.

Seluruh data dikumpulkan dan langsung dianalisis secara kuantitatif oleh mesin Intelligence Media Management (IMM) yang berbasis Artificial Intelligence secara real time. Analisis data kuantitatif tersebut kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis wacana untuk mendapatkan suatu informasi.

Hasil analisis data merupakan data dari keseluruhan media (universe), bukan sampling dari seluruh wilayah di Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tahunan, sekaligus kajian strategi untuk menyosialisasikan berbagai program dengan lebih baik dan terukur di waktu yang akan datang.



Daftar Isi

MONITOING MEDIA 2016	1
PROFESIONALISME GURU	7
UJIAN NASIONAL	31
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER	56
REVITALISASI SMK / VOKASI	73
KARTU NDONESIA PINTAR	97
KURIKULUM 2013	115
KEBUDAYAAN	139

MONITORING MEDIA 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berisi ringkasan hasil monitoring pemberitaan media pada periode waktu 2016 yang digambarkan dengan bentuk *graphic* dan juga ringkasan singkat

RINGKASAN

Total ekspos pemberitaan di media cetak dan daring mengenai tujuh topik utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama satu tahun berjumlah 40.819 berita.

Dari tujuh isu utama, isu seputar guru masih menjadi perhatian awak media daring. Sepanjang tahun 2016 dengan persentase 23.729 berita (58%), diikuti oleh topik sekolah dan ujian nasional.

Berbeda halnya dengan peringkat di media daring, top isu di media cetak didominasi oleh Ujian Nasional, guru, sekolah, pendidikan vokasi, Kartu Indonesia Pintar, kebudayaan dan kurikulum. Dengan tren ekspos yang fluktuatif, pergerakan volume mengalami peningkatan kuantitas pasca pelantikan Mendikbud Muhadjir Effendy. Ekspos tertinggi terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan tersebut, baik media cetak maupun online, kerap menyoroti wacana Full Day School dan isu pemotongan anggaran Tunjangan Profesi Guru.

Sepanjang tahun 2016, sentimen yang diperoleh Kemendikbud didominasi oleh sentimen netral dan positif berdasarkan judul berita. Kedua sentimen tersebut diperoleh dari pemberitaan seputar kesuksesan program pendidikan Kemendikbud, sedangkan sentimen negatif diperoleh dari pemberitaan seputar buku yang mengandung ajaran radikalisme, kasus penyiksaan guru maupun murid di sekolah, tunjangan guru, polemik Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), pernyataan yang kontra terhadap rencana moratorium UN, cagar budaya yang tidak terurus, serta permasalahan distribusi KIP yang masih terganjal di beberapa daerah.

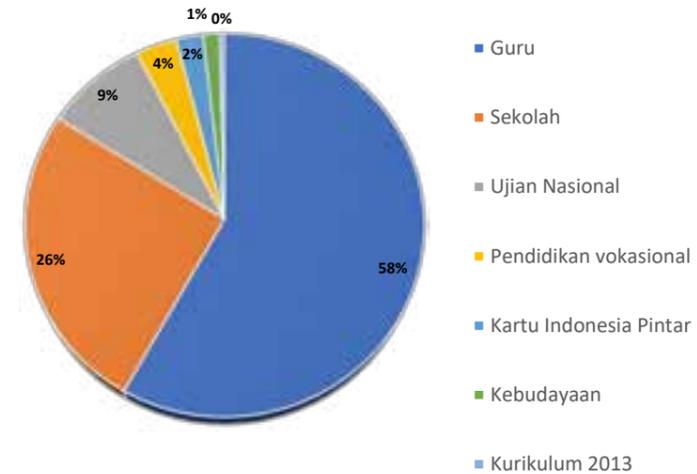
ISU UTAMA 2016 (MEDIA ONLINE)

Dari pantauan tujuh topik utama, isu seputar guru merupakan topik yang paling banyak disoroti oleh media *online* dalam kurun waktu satu tahun (23.729 berita). Pemberitaan isu guru banyak berisi seputar permasalahan tunjangan sertifikasi guru.

Selanjutnya diikuti oleh problematika sekolah (10.538 berita), dimana sebagian besar konten yang diambil media online secara masif menyoal tentang perdebatan sistem *Full day School* yang bertahan dalam tajuk berita di media online hingga empat bulan lamanya.

Untuk isu Ujian Nasional (3.509 berita) trennya meningkat di waktu pra pelaksanaan hingga proses pelaksanaan UN di bulan April dan Mei, kemudian terekspos kembali di bulan November akibat adanya wacana moratorium UN.

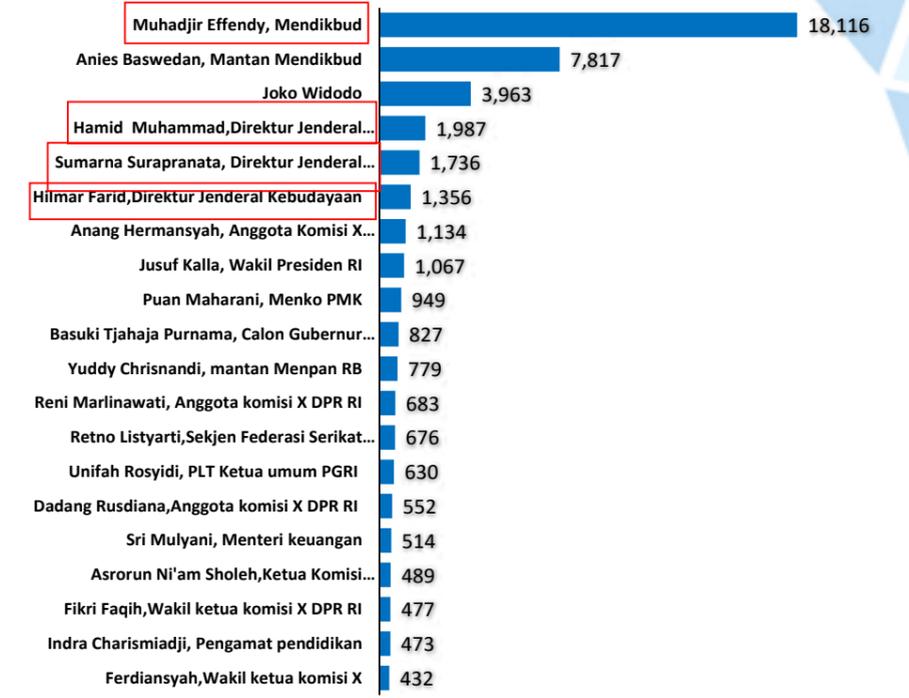
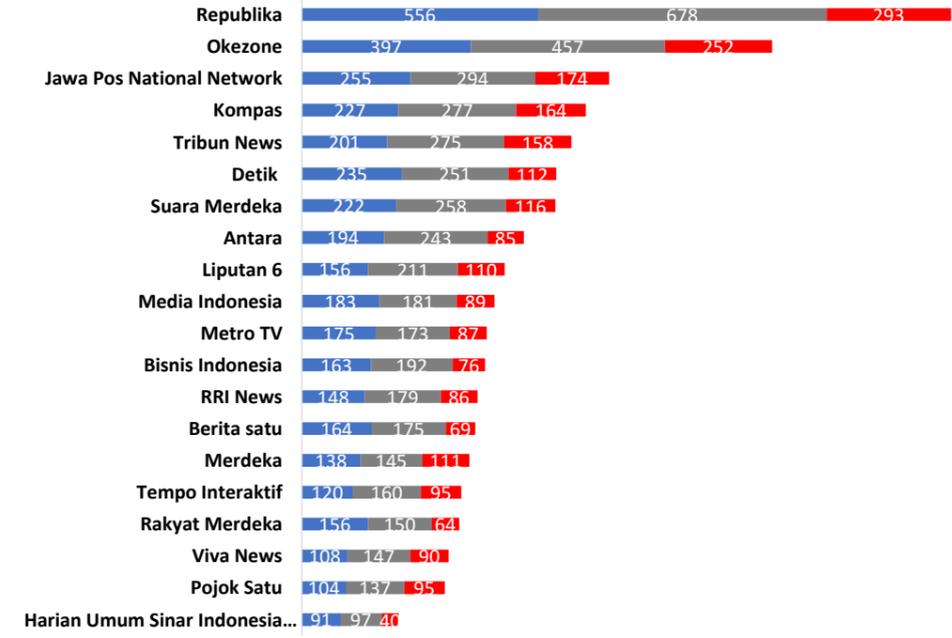
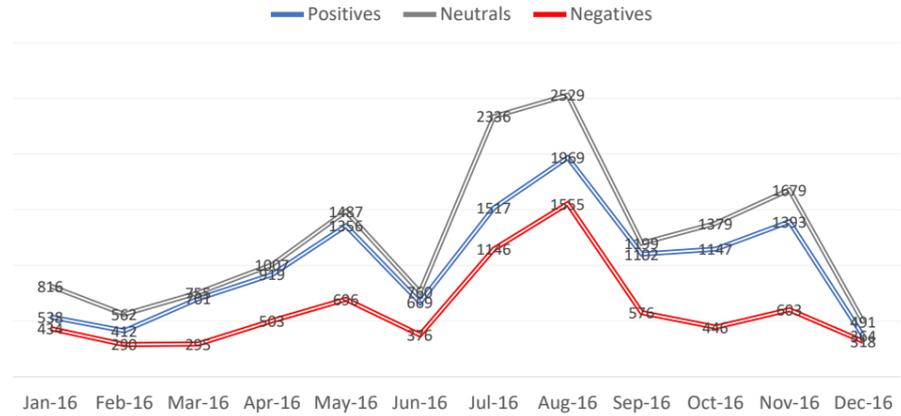
Na = 40.819
NTotal = 40.819



SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Hingga penghujung tahun Kemendikbud didominasi oleh sentimen netral sebanyak 15.000 berita (43,53%), diikuti sentimen positif, 12.087 berita(35,18%), dan beberapa sentimen negatif, 7.238 berita (21,29%).

Memuncaknya sentimen negatif berada di bulan Agustus, pada bulan ini, Isu seputar Full day School (FDS) memicu serangan yang ditujukan ke Kemendikbud, beberapa influencer yang kontra memperlakukan demografi, psikologis siswa, kesiapan sekolah hingga faktor ekonomi. Namun, Mendikbud telah menjelaskan bahwa sistem tersebut, lebih berfokus pada pendidikan karakter siswa. Mendikbud juga telah memberikan opsi meliburkan sekolah pada hari Sabtu – Minggu dan rehabilitasi beberapa bangunan sekolah sebagai penunjang pendidikan tersebut.



MEDIA SHARE (MEDIA ONLINE)

Sepanjang tahun 2016, terdapat 885 media *online* yang memberikan perhatian terhadap tujuh topik utama Kemendikbud. Dua puluh (20) media online teratas merupakan media online berskala nasional, atau dapat diartikan persoalan Kemendikbud telah menjadi perhatian publik luas.

Republika menempatkan posisinya menjadi media teratas dengan tingkat keterbacaan paling tinggi, sekaligus menjadi media yang menyajikan headline berita dengan sentimen negatif dan positif terbesar diantara media lainnya. Hampir semua membeberkan permasalahan Kemendikbud secara berimbang (dilihat dari jumlah per-sentimen).

INFLUENCER (MEDIA ONLINE)

Terdapat empat figur internal kemendikbud dalam jajaran Top Influencers, yang saat ini masih aktif menjabat. Menteri Muhadjir berada di posisi pertama dengan dibayangi oleh mantan Menteri Anies Baswedan. Konten yang banyak diulas oleh figur internal Kemendikbud antara lain permasalahan Ujian Nasional, KIP, penguatan pendidikan vokasi, program Full Day School, dinamika persoalan guru, revitalisasi museum hingga penyelenggaraan festival kebudayaan.

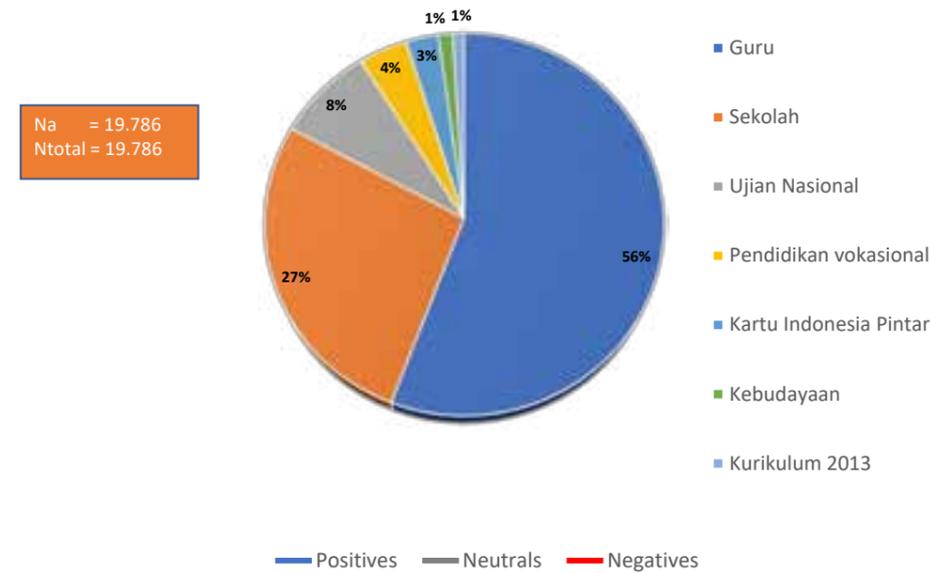
Sedangkan Presiden Jokowi banyak mengeluarkan statement mengenai program pendidikan penguatan vokasi, revitalisasi bangunan sekolah, pendistribusian KIP, pendidikan karakter, kebudayaan), dan beberapa Peringatan Nasional, banyak terekam dalam konten media online.

ISU UTAMA 2016 (MEDIA CETAK)

Dari pantauan tujuh topik utama, isu seputar Guru menjadi topik yang paling banyak diekspos oleh media cetak, dalam kurun waktu satu tahun (19.786 berita). Bukan hanya media nasional saja, namun media cetak daerah turut ramai dalam mengekspos problematika yang ada di dalam permasalahan guru.

Serupa dengan ekspos di media online, Isu seputar sekolah yang erat kaitannya dengan *Full Day School* maupun revitalisasi sekolah menempati peringkat ke dua. Perolehan beritanya sebanyak 5.365 di sepanjang tahun 2016.

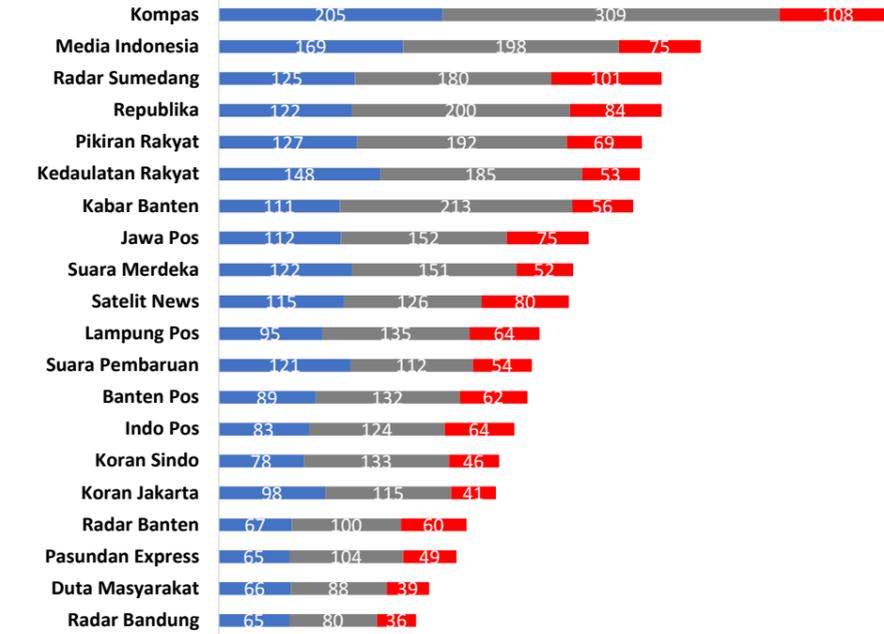
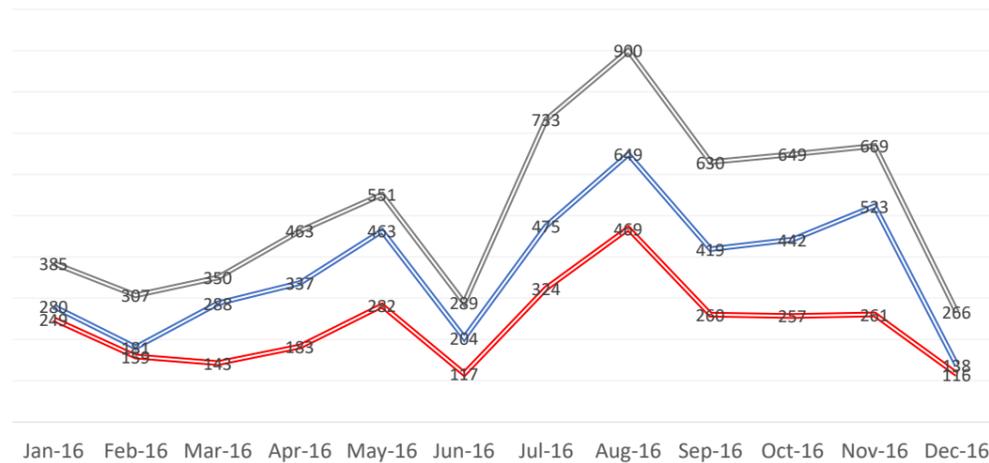
Di posisi selanjutnya, Ujian Nasional dengan persentase 27% (1617 berita), menjadi salah satu magnet penarik bagi awak media cetak, pergerakannya cenderung fluktuatif dari bulan ke bulan, namun hanya mengalami lonjakan di bulan bulan tertentu.



SENTIMEN (MEDIA CETAK)

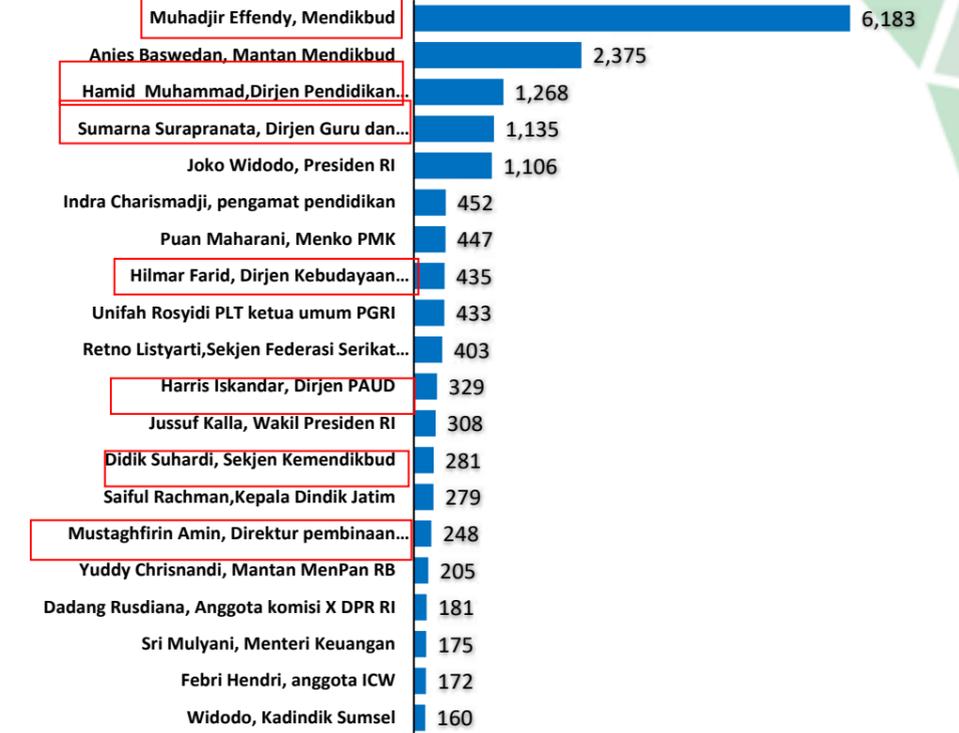
Serupa dengan media online, sentimen media cetak banyak didominasi oleh judul netral sebanyak 6.356 berita (46,19%), diikuti sentimen positif 4.516 berita (32,87%), dan sentimen negatif 2870 berita (20,93%). Berdasarkan persentase, sentimen negatif yang ada pada media cetak, cenderung lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan media online, hal ini disebabkan oleh penulisan judul berita yang lebih berani.

Konten berita yang disajikan oleh media cetak tidak jauh berbeda dengan konten berita media online, polemik Full day School juga menjadi primadona, di kalangan awak media online. Sifatnya yang menimbulkan pro – kontra di masyarakat, membuat isu ini terus bertahan lama selama beberapa bulan.



MEDIA SHARE (MEDIA CETAK)

Sepanjang tahun 2016, terdapat 130 media cetak yang memberikan perhatian terhadap tujuh topik utama Kemendikbud. Diantara 20 media cetak teratas, Radar Sumedang menjadi media cetak daerah yang berada di peringkat ke tiga, diikuti oleh Kabar Banten yang berada di peringkat ke tujuh. Hal ini menunjukkan bahwa isu – isu seputar pendidikan dan Kemendikbud, mendapat perhatian yang lebih di wilayah Jawa Barat.



INFLUENCER (MEDIA CETAK)

Berbeda dengan influencers media online, pada jajaran lima besar di media cetak, banyak didominasi oleh figur internal Kemendikbud. Terdapat Tujuh tokoh pejabat Kemendikbud, yang paling banyak dikutip statemennya oleh media cetak.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh para figur internal masih seputar dengan permasalahan yang ada di top isu (Ujian Nasional, Guru, KIP, pembangunan sekolah, SMK, festival kebudayaan, revitalisasi museum dan pendidikan anak usia dini).

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. Peredaran buku bermuatan radikalisme 2. Kurikulum 2013	Januari	1. Peredaran buku bermuatan radikalisme 2. Kurikulum 2013
Februari	1. Permasalahan guru honorer 2. Persiapan ujian nasional	Februari	1. Persiapan UN/ UNBK
Maret	1. Persiapan UNBK 2. Gerakan literasi	Maret	1. Persiapan UNBK 2. Gerakan Literasi
April	1. Pelaksanaan UN SMA dan sederajat 2. Rencana pendistribusian KIP	April	1. Pelaksanaan UN SMA dan sederajat 2. Seputar TPG dan sertifikasi guru
Mei	1. Persoalan Guru 2. Pelaksanaan UN SMP dan sederajat	Mei	1. Persoalan Guru 2. Pelaksanaan UN SMP dan sederajat
Juni	1. Hasil dari penyelenggaraan UN 2. Pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah	Juni	1. Hasil dari penyelenggaraan UN 2. Pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah
Juli	1. Penghapusan MOS/pelaksanaan PLS 2. Gerakan antar anak ke sekolah	Juli	1. Penghapusan MOS/pelaksanaan PLS 2. Gerakan antar anak ke sekolah
Agustus	1. Full Day School 2. Tarik ulur TPG	Agustus	1. Full Day School 2. Distribusi KIP
September	1. Full Day School 2. Distribusi KIP	September	1. Full Day School 2. Distribusi KIP
Oktober	1. Polemik Distribusi KIP 2. Pelaksanaan World Culture Forum 3. Full Day School	Oktober	1. Distribusi KIP 2. Pelaksanaan World Culture Forum
November	1. Wacana Moratorium UN 2. Permasalahan seputar guru	November	1. Moratorium UN 2. Permasalahan seputar guru
Desember	1. Pembatalan Moratorium UN 2. Rencana pembangunan Sekolah rusak di Aceh	Desember	1. Pembatalan Moratorium UN

PROFESIONALISME GURU

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S-1. Guru juga harus memiliki pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

RINGKASAN

Topik mengenai guru diberitakan sebanyak 23.729 oleh media daring dan 11.036 oleh media cetak. Isu yang diberitakan beragam, namun yang paling banyak mendapat perhatian adalah tentang pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG) oleh Kementerian Keuangan karena dianggap jumlahnya membengkak dari yang seharusnya. Namun, permasalahan ini langsung ditanggapi Kemendikbud yang memastikan para guru tetap memperoleh haknya mendapatkan TPG.

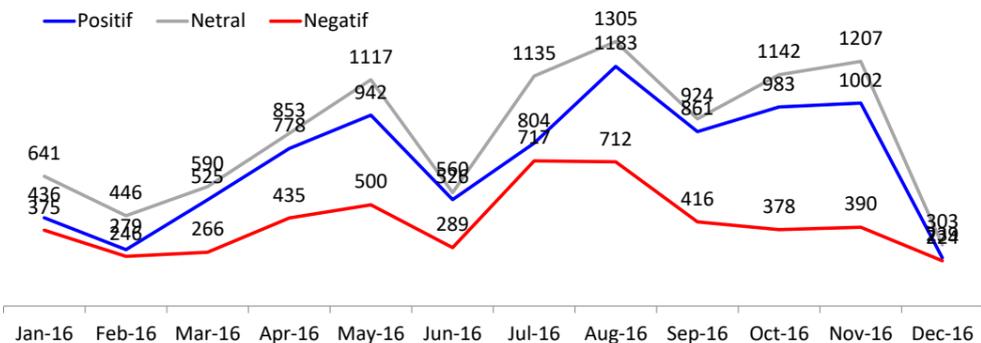
Isu tersebut diberitakan sebanyak 283 berita di media daring dan 1.378 berita di media cetak. Puncak pemberitaan terjadi pada Agustus 2016. Sementara itu, nama Anies Baswedan dan Menteri Muhadjir Effendy menjadi top influencer pada kedua media tersebut. Anies Baswedan banyak berbicara pada periode Januari-Juni 2016. Sementara Muhadjir Effendy banyak berbicara pada periode Juli-Desember 2016.

Topik mengenai guru didominasi oleh sentimen netral oleh kedua media ini. Sebanyak 10.222 berita pada media daring, sementara pada media cetak sebanyak 5.096 berita. Untuk sentimen positif terpantau berjumlah 8.557 berita di media daring, sementara pada media cetak ada sebanyak 3.621 berita. Adapun berita dengan sentimen negatif berjumlah 4.950 berita pada media daring dan 2.320 berita pada media cetak.

SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Selama satu tahun, sentimen Netral lebih dominan dengan 42.83%. Sentimen pada pemberitaan meningkat signifikan pada Agustus 2016, dimana jumlah sentiment Netral sebanyak 1.305 berita, sentiment Positif sebanyak 1.183 berita, dan sentimen Negatif sebanyak 712 berita. Pemberitaan bernada Negatif yang muncul pada Agustus 2016 banyak terkait dengan judul berita "Tunjangan Sertifikasi Guru Dipotong karena Alasan Ini" dan "Kementerian dan Lembaga Ini Kena Potong Anggaran Terbesar".

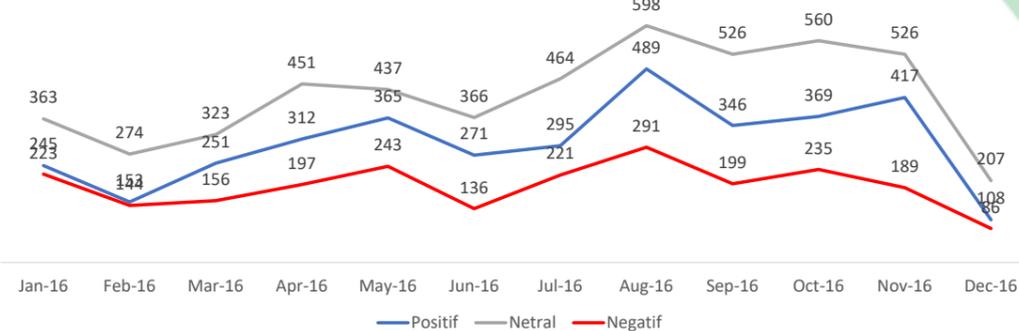
Aksi: Kemendikbud berjanji tidak akan memotong Tunjangan Profesi Guru. Melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Supranata, TPG PNSD 2016 tetap dijamin akan dibayar sesuai ketentuan undang-undang.



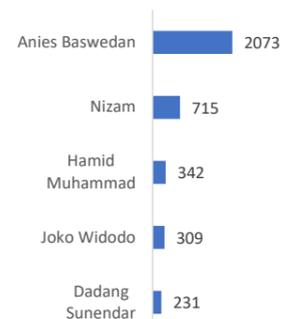
SENTIMEN (MEDIA CETAK)

Sama seperti di media online, sentimen Netral lebih dominan dengan 46.14%. Sentimen pada pemberitaan meningkat signifikan pada Agustus 2016, dimana jumlah sentimen Netral sebanyak 598 berita, sentimen Positif sebanyak 489 berita, dan sentimen Negatif sebanyak 291 berita. Pemberitaan bernada Negatif yang muncul pada Agustus 2016 juga memiliki kesamaan dengan yang terjadi di media online yakni polemik terkait Tunjangan Profesi/Sertifikasi Guru yang terkena imbas atas kebijakan Kementerian Keuangan tersebut.

Aksi: Melalui Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi menjamin menyatakan seluruh guru akan menerima TPG tahun ini sesuai undang-undang yang berlaku.

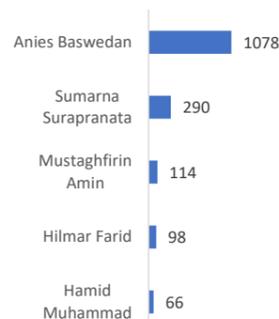


Influencer Jan-Mar



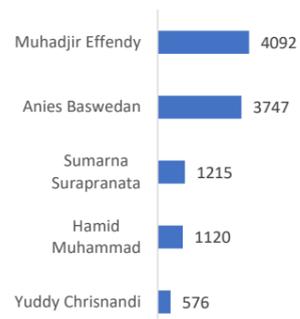
Periode Januari-Maret 2016, Anies Baswedan menjadi top influencer dengan 2073 pernyataan. Salah satu yang Anies bicarakan adalah mengenai keberhasilan PAUD Jawa Barat dalam meraih penghargaan UNESCO yang bertajuk UNESCO-Japan Prize 2015.

Influencer Apr-Jun



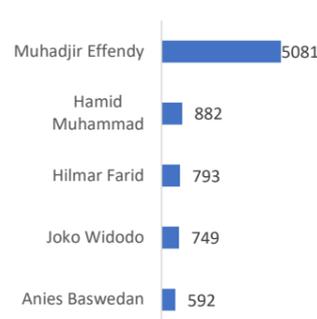
Selama periode April-Juni 2016, mantan Mendikbud Anies Baswedan menjadi top influencer dengan 1.078 pernyataan. Pada posisi kedua sampai dengan kelima pun diisi dengan figur-figur internal Kemendikbud.

Influencer Jul-Sept



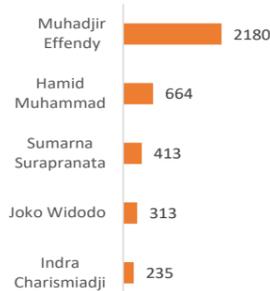
Menteri Muhadjir Effendy menjadi influencer terbanyak dengan 4.092 pernyataan dalam periode ini. Ada juga pernyataan dari mantan Mendikbud Anies Baswedan yang berjumlah 3.747 berada di bawah posisi Menteri Muhadjir.

Influencer Okt-Des



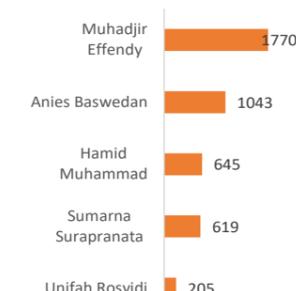
Menteri Muhadjir masih menjadi influencer terbanyak dengan 5.081 pernyataan dalam periode ini. Mendikbud banyak berbicara mengenai moratorium UN. Disamping figur-figur internal Kemendikbud, Presiden Joko Widodo juga menjadi salah satu influencer dalam periode ini dengan 749 pernyataan.

Influencer Okt-Des



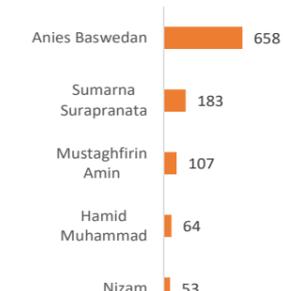
Menteri Muhadjir berada di posisi pertama dengan 2.180 pernyataan pada periode ini. Pernyataan banyak terkait penghapusan UN yang ditolak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan, Muhadjir mengatakan UN saat ini berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan siswa. Ia ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru.

Influencer Jul-Sept



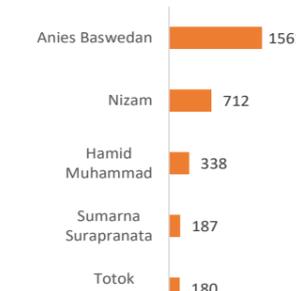
Juli-September 2016, Menteri Muhadjir Effendy banyak berbicara mengenai Kemendikbud mengirim guru untuk mengajar anak-anak TKI. Jumlah pernyataan Menteri Muhadjir adalah 1.770 pernyataan.

Influencer Apr-Jun



Influencer pada periode April-Juni 2016 banyak didominasi oleh internal Kemendikbud. Teratas, ada Anies Baswedan yang pada saat itu masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies banyak berbicara mengenai penghapusan kegiatan Masa Orientasi Siswa yang kerap memakan korban jiwa.

Influencer Jan-Mar



Periode Januari-Maret 2016, Anies Baswedan terlihat yang paling banyak berbicara di media cetak, dengan jumlah 1561 pernyataan. Salah satu yang ia bicarakan adalah keberhasilan PAUD Jawa Barat dalam meraih penghargaan UNESCO yang bertajuk UNESCO-Japan Prize 2015.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. Uji Kompetensi Guru 2. Dana BOS	Januari	1. Uji Kompetensi Guru
Februari	1. Guru Honorer	Februari	1. Guru honorer 2. Ujian Nasional Perbaikan
Maret	1. Kesejahteraan Guru Honorer	Maret	1. Pelatihan Guru Kurikulum 2013 2. Kesejahteraan Guru Honorer
April	1. Tunjangan Profesi Guru Cair	April	1. Tunjangan Profesi Guru 2. UNBK
Mei	1. Guru Garis Depan 2. Gerakan Literasi Sekolah	Mei	1. Guru Garis Depan 2. TPG Tidak Keluar
Juni	1. Tunjangan Profesi Guru	Juni	1. Tunjangan Profesi Guru Cair Akhir Juni 2. Kekeerasan Seksual
Juli	1. Lowongan CPNS Guru Garis Depan	Juli	1. Guru Garis Depan
Agustus	1. Tunjangan Profesi Guru tidak dipotong 2. Ribuan Guru Garis Depan siap dikirim	Agustus	1. Tunjangan Profesi Guru tidak dipotong 2. Guru Garis Depan
September	1. 115 Guru ke Malaysia	September	1. 115 Guru ke Malaysia 2.
Oktober	1. 136 Guru ke Australia	Oktober	1. 136 Guru ke Australia
November	1. Hari Guru Nasional	November	1. Hari Guru Nasional
Desember	-	Desember	-

TOP ISSUE CETAK



Hanya 7 Provinsi yang Raih Nilai UKG Baik (JPNN, Januari 2016)

JAKARTA- Tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) 2015. Nilai yang diraih tersebut sesuai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.

Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).

Uji kompetensi guru (UKG) 2015 menguji dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02.

Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar

kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional. Yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, jika dirinci lagi untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94.

Yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91).

“Pedagogik berarti cara mengajarnya yang kurang baik, cara mengajarnya harus diperhatikan,” ujar Pranata, Kamis (7/1). (esy/jpnn)



Pelatihan Guru Dibagi Menjadi Tiga Jenis (MediaIndonesia, Januari 2016)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan tiga jenis pelatihan bagi para guru yang akan diselenggarakan pada Mei 2016. Ketiga jenis pelatihan itu ialah tatap muka, dalam jaringan (online), dan campuran.

“Ketiga jenis pelatihan ini merupakan tindak lanjut hasil uji kompetensi guru (UKG) yang berlangsung pada 2015 lalu,” ungkap Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata, di Jakarta, kemarin.

Pranata, begitu ia dipanggil, menjelaskan pelatihan yang akan diberikan bagi total 2,9 juta guru seluruh Indonesia itu masing-masing terdiri atas 400 ribu guru untuk

pelatihan tatap muka, 1,9 juta guru untuk pelatihan jaringan atau online, dan sekitar 600 ribu untuk pelatihan campuran yang mengombinasikan pelatihan tatap muka dan dalam jaringan.

Menurut dia, kategori pelatihan tatap muka akan diberikan kepada guru yang secara geografis atau tempat tinggalnya jauh dan tidak memiliki akses dengan jaringan internet.

“Adapun pelatihan dengan metode campuran akan diberikan kepada guru yang nilai UKG-nya rendah sehingga perlu kombinasi metode pelatihan tatap muka dan dalam jaringan,” pungkas dia.

Seperti diketahui, hasil UKG yang diselenggarakan pada November 2015 menunjukkan separuh dari 2,9 juta guru meraih nilai di bawah standar yang ditetapkan, yakni 5,5. Nilai rata-rata hasil UKG di seluruh Indonesia ialah 53,02.

Pranata menambahkan pelatihan nantinya diwajibkan bagi guru. Namun, ia meminta sekolah, organisasi, profesi, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung agar ada peningkatan kompetensi guru baik secara profesional maupun pedagogis.

Koordinator Education Forum Suparman berharap meningkatkan kompetensi guru tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga mesti diiringi dengan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas pendukung untuk pembelajaran yang selama ini masih kerap jadi kendala guru dalam mengajar. (Mlt/Bay/H-2)



Honorer K2 Mustahil Diangkat PNS

(Sumatra Ekspres online, Februari 2016)

JAKARTA – Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi PNS secara langsung sudah tidak mungkin dilakukan. Selain karena persoalan anggaran, yang utama adalah tidak ada celah hukum untuk mengangkat mereka secara langsung. Karena itu, tenaga honorer ditawarkan ikut seleksi CPNS umum dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK).

Pertemuan antara perwakilan tenaga honorer dengan Mensesneg Pratikno di kantor Setneg kemarin (11/2) buntu. Permintaan para tenaga honorer untuk langsung diangkat menjadi PNS sudah tidak mungkin dikabulkan. Selain Pratikno, hadir pula Kabiro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman.

Usai pertemuan, Pratikno menjelaskan bahwa keinginan para honorer K2 untuk bertemu Presiden Joko Widodo sulit terealisasi akibat padatnya jadwal. "Kami akan melaporkan secepatnya ke bapak Presiden mengenai

aspirasi rekan-rekan honorer," ujarnya.

Di tempat yang sama, Herman menjelaskan bahwa sampai 2014 lalu pihaknya sudah mengangkat lebih dari satu juta tenaga honorer menjadi PNS. Mereka mengisi hampir 30 persen PNS di seluruh Indonesia. secara hukum, persoalan honorer K2 sendiri sudah selesai pada Desember 2014 seiring berakhirnya PP nomor 56 Tahun 2012.

Berdasarkan data, jumlah tenaga honorer yang masih tercecer mencapai 600 ribu. "Kesepakatan pemerintah dan DPR waktu itu, dilaksanakannya seleksi untuk mendapatkan kuota 30 persen sesuai kapasitas fiskal negara," terangnya.

Dari seleksi itu dihasilkan 210 ribu honorer yang lolos. Namun, setelah diverifikasi, ada sekitar 30 ribu yang bodong sehingga

tidak memenuhi persyaratan.

Dia menuturkan, KemenPAN-RB sudah mengupayakan celah hukum agar sekitar 400 ribu honorer itu bisa diangkat otomatis menjadi PNS. Selain itu, tidak tersedia pula anggaran untuk tahun 2016. Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbit pada 2014, ditegaskan bahwa rekrutmen PNS harus menggunakan seleksi

sehingga tidak mungkin serta merta pemerintah mengangkat PNS tanpa proses seleksi. Karena itu, pihaknya menawarkan dua alternatif bagi para honorer K2 yang sesuai dengan UU ASN. Pertama, bagi honorer yang berusia 35 tahun ke bawah bisa mengikuti tes CPNS jalur umum. "Kedua, bagi yang usianya di atas 35 tahun, mengikuti seleksi PPPK," lanjutnya.

Keduanya sama-sama ASN, namun berbeda status. PNS berlaku permanen, sedangkan PPPK bersifat kontrak. Meski begitu, pihaknya tetap akan menunggu keputusan presiden setelah mendapatkan

laporan mengenai aspirasi para tenaga honorer tersebut.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan mengangkat langsung para tenaga honorer K2 menjadi CPNS memang sulit. Selain itu juga tidak ada payung hukumnya. Namun bagi para tenaga honorer K2 yang berprofesi sebagai guru, dia mengatakan boleh mendaftar untuk ikut seleksi PNS Guru Garis Depan (GGD). "Selama memenuhi syarat dan kompetensinya sebagai guru itu bagus, ada peluang diterima GGD," katanya.

Anies mengatakan urusan tenaga honorer K2, khususnya yang bekerja sebagai guru, memang sangat pelik. Dia menuturkan masalah mungkin bisa diatasi, jika para tenaga honorer itu siap dikirim ke tempat-tempat yang kekurangan guru. Dia mengatakan telah terjadi ledakan jumlah guru yang luar biasa.

Data dari Kemendikbud menyebutkan jumlah guru honorer periode 1999/2000 adalah 84.600 orang. Kemudian pada periode 2014/2015 jumlahnya naik mencapai 812.064 orang atau naik sebesar 860 persen. Angka kenaikan ini tidak sebanding dengan kenaikan jumlah siswa yang hanya 17 persen,

di periode yang sama.

Menurut Anies kondisi Indonesia saat ini tidak kekurangan guru. Masalahnya hanya populasinya menumpuk di daerah-daerah perkotaan. Jika dihitung secara nasional, perbandingan guru dan siswa adalah 1:14 untuk SD, 1:13 di SMP, 1:14 di SMA, dan 1:12 di SMK. "Perbandingan ini mengalahkan perbandingan guru dan siswa di negara-negara maju," jelasnya. Di banyak negara maju perbandingan guru dan siswa di sekitar 1:20-an.

Mantan rektor Universitas Paramadinaitumengatakan masalah utama tuntutan pengangkatan CPNS oleh para honorer ini disebabkan karena rekrutmen yang tidak tepat. Para tenaga honorer ini diangkat seenaknya oleh pemda, sekolah, bahkan yayasan.

Kemudian setelah jumlah mereka banyak dan mengabdikan lama, menuntut ke pemerintah pusat diangkat menjadi CPNS. "Kenapa menuntutnya tidak kepada si pemberi kerja dulu. Saya kasihan dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang ditagih padahal tidak ikut mengangkat," jelasnya. (byu/wan/air/ce2)



Guru Honorer Tuntut Jadi PNS, Mendikbud: Jika Mau di Daerah Langsung Diangkat

(Detiknews, Februari 2016)

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah tidak keberatan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah akan mengangkat mereka menjadi PNS di daerah pelosok yang memang masih sangat membutuhkan guru.

Namun permasalahannya para guru dan tenaga honorer itu hanya mau diangkat di daerah asalnya. Sementara di daerah asalnya tersebut sudah kelebihan guru. "Kalau mereka mau jadi guru di daerah yang kekurangan guru, maka sudah langsung diangkat (PNS)," kata Anies melalui keterangan tertulisnya Kamis (11/2/2016).

Masalah yang kini dihadapi dunia pendidikan, kata Anies, adalah

distribusi guru yang tidak merata dan bukan kekurangan guru. Untuk mengatasi hal tersebut tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merekrut 3.500 tenaga pengajar untuk ikut program Guru Garis Depan (GGD).

"Nah guru honorer ini bisa kemudian jadi CPNS bila bersedia diangkat untuk daerah terdepan," kata Anies. Program Guru Garis Depan, kata Anies, mirip dengan Indonesia Mengajar sebuah gerakan bagi sarjana untuk mengajar di daerah terpencil yang diinisiasi Anies sebelum menjadi menteri. "Bedanya Indonesia Mengajar hanya setahun (temporer) sementara GGD jadi guru permanen," kata dia.

Tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberangkatkan 798 orang untuk ikut program Guru Garis Depan. Mereka langsung diangkat sebagai PNS di daerah pelosok.



Alhamdulillah, Insentif Guru Non PNS Cair

(Jawapos, Maret 2016)

awaPos.com - Guru non PNS dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga SMA akan mendapat haknya berupa insentif bulanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Supranata menyebutkan, pihaknya mengalokasikan Rp396 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk insentif 108.384 guru TK hingga SMA.

Pemberian insentif ini terkait permasalahan kesejahteraan guru non PNS. Nantinya setiap guru akan memperoleh Rp200 hingga Rp 400 ribu/bulan dan dibayarkan pada tiap triwulan sekali. "Tahun 2016 ini sudah berjalan. April mendatang

akan dibayarkan," ujar Sumarna Supranata dilansir Indopos (Jawa Pos Group), Selasa (15/3).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Indonesia memiliki jumlah guru di atas kebutuhan sebenarnya. Saat ini jumlah guru SD di Indonesia mencapai 1.167.356 orang.

Angka jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan guru di negeri ini cuma 1.008.034 orang.

Semua itu terdiri dari guru PNS, non PNS, honor daerah (honda) dan honor lainnya. Sayangnya belum semua dari guru tersebut memiliki kualifikasi pendidikan sarjana atau strata 1 (S1).

Khusus untuk guru non PNS akan mendapatkan tambahan kesejahteraan dengan menerima insentif dari pemerintah pusat. Sedangkan guru PNS mendapatkan tunjangan sertifikasi. (nas/iil/JPG)

Pak Guru, Bu Guru, Kabar Baik nih, Caiirr...

(JPNN, April 2016)

JAKARTA— Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mendistribusikan dana tunjangan profesi guru (TPG)

triwulan pertama 2016 ke sejumlah daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap bisa segera disalurkan ke guru penerima.

Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Tagor Alamsyah Harahap mengatakan, anggaran TPG triwulan pertama ini untuk membayar tunjangan periode Januari sampai Maret.

"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pembayaran dirapel tiga bulanan," kata Tagor, kemarin (8/4).Tunjangan yang mulai dicairkan itu merupakan bagian dari alokasi TPG selama 2016 sekitar Rp 80 triliun. Tagor menuturkan Kemendikbud berharap pemda segera merealisasikan pencairan TPG triwulan pertama itu.

Sebab dananya sudah ditransfer ke rekening masing-masing pemda. Dia menegaskan guru-guru yang sudah mengantongi surat keputusan pencairan tunjangan profesi (SKTP), TPG-nya harus segera dicairkan.

Sebaliknya bagi yang sudah bersertifikat profesi tetapi belum mengantongi SKTP diharap segera

memrosesnya.

"Data di dapodik (data pokok pendidikan, red) harus diperbaiki supaya bisa mendapatkan SKPT," katanya. Tagor menuturkan pencairan TPG tidak bisa asal-asalan.

Untuk bisa mendapatkan SKPT banyak sekali syaratnya. Diantaranya adalah guru harus mendapatkan sertifikat profesi mengajar. Kemudian guru wajib mengajar minimal 24 jam pelajaran per pekan. "Selama persyaratannya klir, SK pencairan tunjangan bisa diterbitkan," tandasnya.

Tagor mengingatkan, perbaikan data guru di dapodik tidak boleh melewati Mei depan. Kemendikbud menerapkan skema siapa cepat dia dapat. Secara berkala Kemendikbud akan mengecek seberapa banyak lembar SKTP yang sudah diterbitkan ke guru.

Dirjen GTK Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan, pencairan TPG harus tepat sasaran dan tepat jumlah. "Jika sembarangan dicairkan, saya bisa kena pidana memperkaya orang lain," jelasnya.

Untuk itu pejabat yang akrab disapa Pranata itu berharap guru-guru yang

merasa SKTP-nya belum terbit untuk proaktif mencari tahu penyebabnya. Sehingga bisa segera dilengkapi dan diterbitkan SKTP-nya.

Pranata membantah ada masalah pengisian dapodik lantaran perbedaan sekolah yang menerapkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Dia menjelaskan sistem pengisian data di dapodik terus diperbaharui supaya tidak sampai merugikan guru. Dia menjelaskan, pencairan TPG untuk guru-guru PNS daerah (PNSD) berada di pemkab atau pemkot sesuai domisili.

Sementara untuk pencairan TPG bagi guru non-PNS ada di Kemendikbud. Jadi uang dari Kemendikbud akan langsung ditransfer ke guru. "Baik guru PNSD maupun non-PNS harus pegang dulu SKTP, baru tunjangannya bisa diterima," katanya.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti berharap pencairan TPG triwulan pertama berjalan lancar. Sebab dia mencapatakan informasi bahwa banyak guru yang tidak mendapatkan SKTP sehingga TPG-nya tidak akan bisa dicairkan. "Ironisnya SKTP itu tidak cair karena ada kurikulum

ganda saat ini," jelasnya.

Menurut Retno, data pokok pendidikan (Dapodik) saat ini tidak peka terhadap beragamnya mata pelajaran yang ada di Kurikulum 2013.

Dia mencontohkan ada mata pelajaran bahasa Inggris utama dan peminatan. Nah dapodik hanya bisa membaca beban mengajar bahasa Inggris utama saja. Sehingga ada guru yang dinilai jam mengajarnya kurang dari 24 tatap muka per pekan. (wan/agm/sam/jpnn)



Kemdikbud rekrut 7.000 guru garis depan

(Antarnews, Mei 2016)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merekrut sebanyak 7.000 Guru Garis Depan (GGD) yang akan dikirim ke 93

kabupaten yang tersebar di 28 provinsi di seluruh Tanah Air.

"Tahun ini memang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, karena memang kebutuhannya akan guru itu besar," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Jakarta, Jumat. Program GGD merupakan solusi dari permasalahan kekurangan guru di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

Pada tahun sebelumnya, jumlah GGD yang direkrut sebanyak 798 guru. Permintaan terbanyak berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu prasyarat keikutsertaan GGD adalah pernah mengikuti Sarjana Mengajar Mendidik di Daerah 3T dan mengikuti Pelatihan Pendidikan Guru.

Editor: Aditia Maruli

Pemerintah Siapkan Rp425,6 M untuk Tunjangan Guru

(Okezone, Juni 2016)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membayar tunjangan para guru di triwulan kedua ini. Rencananya pembayaran tunjangan

bagi guru non-PNS di triwulan kedua ini akan dilakukan lebih cepat.

"Kemendikbud menyiapkan Rp425,6 miliar untuk tunjangan guru bukan PNS, tunjangan profesi guru bukan PNS, serta intensif guru bukan PNS," Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Sumarna Surapranata di Kemdikbud, Senin (20/6/2016).

Pranata memaparkan, dari jumlah tersebut Rp1,7 miliar di antaranya akan diberikan kepada 68.028 guru non-PNS. Kemudian, besaran tunjangan profesi guru non-PNS adalah Rp4,9 miliar untuk 207.596 guru. Sedangkan untuk intensif guru bukan PNS, anggaran yang disiapkan Rp419 miliar untuk 116.411 guru.

"Jadi jangan bilang kalau guru itu tidak ada tunjangannya, kasihan mereka. Biarkan para guru fokus untuk mendidik siswanya," tegasnya. (rfa)



Menpan Minta Pemda Tunda Rekrut CPNS Baru
(Kompas, Juli 2016)

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menunda penerimaan pegawai negeri sipil baru tahun ini.

Hal itu ditegaskan Yuddy melalui Surat Menteri mengenai Informasi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2016, tertanggal 25 Juli 2016.

“Kami minta agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan redistribusi pegawai, baik secara internal maupun antarinstansi seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelejen Negara,” ungkap Yuddy di Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Yuddy menuturkan, kebijakan penundaan penerimaan CPNS tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dan arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet/Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2016.

Dalam arahnya, Presiden menegaskan agar setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan penghematan penggunaan anggaran, dan lebih diarahkan untuk memperbesar belanja modal. Di samping itu, Presiden juga mengingatkan agar anggaran bisa dijalankan dengan efisien dan dijaga dengan penuh integritas dalam mendukung Nawacita.

Untuk itu, Menteri Yuddy mengajak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melakukan efisiensi penggunaan anggaran belanja di luar belanja modal, antara lain dengan cara menunda melakukan penerimaan pegawai baru dalam tahun 2016.

Pembatasan penerimaan pegawai dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, Guru Garis Depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta

Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian. “Mereka harus lulus seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT),” ujarnya.

Dia menambahkan, tambahan pegawai baru juga berasal dari lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan formasi tahun 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya ditunda.

Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa penerimaan pegawai baru diizinkan untuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk tahun 2012.
Editor : Krisiandi
Sumber : Antaranews.com

Mendikbud Perketat Pengawasan Tunjangan Profesi Guru (Kompas, Agustus 2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Kemendikbud akan memperketat mekanisme pengawasan terhadap distribusi Tunjangan Profesi Guru

(TPG). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kelebihan anggaran yang disebabkan kesalahan pendataan.

Adanya sisa anggaran tunjangan yang tidak terpakai dari tahun sebelumnya, membuat Kementerian Keuangan harus memotong anggaran tunjangan di tahun berikutnya.

“Ya kami akan tingkatkan pengawasan, jangan sampai ada sisa anggaran tunjangan yang terlalu besar,” ujar Muhadjir saat ditemui di gedung Kementerian Pendidikan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Muhadjir menjelaskan, awalnya ditemukan anggaran tunjangan bagi guru dan PNS yang berlebihan. Berdasarkan penelusuran, pihaknya menemukan bahwa tunjangan guru dan PNS tidak sebesar itu.

Seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pihaknya pun memangkas anggaran yang berlebihan tersebut. Jumlahnya diakui cukup fantastis, yakni Rp 23,3 triliun. Namun, jumlah itu bukan hanya didasarkan pada tahun anggaran 2016, melainkan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya yang tidak terpakai.

“Itu dari sekian tahun, baru kemudian dilaporkan pada 2016. Jadi karena berdasarkan sekian tahun, kelihatan jumlahnya jadi besar,” ungkapnya. Selain itu, dia pun membantah akan memotong TPG. Menurutnya anggaran guru dan PNS akan tetap dipenuhi.

Malah, distribusinya saat ini diyakini semakin tepat sasaran dan efektif. “Tidak akan ada pemotongan itu. Tenang saja jangan resah. Jadi yang dipotong bukan tunjangannya, tapi anggaran tunjangan yang berlebih,” kata Muhadjir. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK). Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

“Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi

belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri,” kata Sri Mulyani.
Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Krisiandi



Mendikbud berharap bisa kirim guru ke Arab Saudi
(Antaranews, September 2016)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berharap Indonesia bisa mengirim guru tidak hanya ke Malaysia tetapi juga ke Arab Saudi. “Arab Saudi termasuk negara yang banyak anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” ujar Mendikbud di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa selama ini anak-anak para pahlawan devisa

tersebut bersekolah di sekolah yang diselenggarakan negara tempat ayah dan ibunya bekerja. Tapi sayangnya, pendidikan yang diselenggarakan tersebut berbeda dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan mereka tidak mengenal negara asal mereka.

“Tentu saja, saat kita berada di wilayah negara lain, kita jadi mengerti betapa pentingnya nasionalisme dan martabat bangsa.” Sebelumnya, Kemdikbud mengirim sebanyak 115 guru yang akan mengajar di sekolah Indonesia di Malaysia. Dari sekian banyak negara, Kemdikbud baru bisa mengirimkan guru ke Malaysia karena sudah ada kerja sama antarnegara.

“Saya ingin menekankan bahwa ada tiga hal yang harus dimiliki ketika menjadi guru. Pertama, tidak boleh berhenti belajar saat mengajar ketika anda menjadi guru. Kedua, memperkokoh tanggung jawab sosial serta seorang guru yang profesional harus memiliki rasa kesejawatan menjadikan pekerjaan guru sebagai panggilan jiwa, sesama guru membangun kerja sama yang harmonis sehingga tercipta kerja sama yang kokoh,”

imbuh dia.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata, mengatakan pihaknya berharap bisa menjalin kerja sama dengan negara-negara lain sehingga bisa mengirim para guru.

“Dari 52.000 anak TKI yang tidak bisa sekolah di Malaysia, separuhnya sudah mendapatkan akses pendidikan. Masih banyak anak Indonesia di luar negeri yang belum mendapatkan layanan pendidikan,” kata Pranata. Hingga saat ini baru terdapat 223 guru yang bertugas di Malaysia.
Pewarta: Indriani
ditor: Suryanto

Kemendikbud Kirim 136 Guru SD dan SMP ke Universitas Melbourne (Republika, Oktober 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama Kedutaan Besar Australia di Jakarta mengirimkan sebanyak 136 guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mengikuti kursus singkat di Universitas Melbourne selama tiga

pekan.

“Para guru akan mengalami langsung praktik edukasi terbaik Australia. Studi singkat ini akan memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana peserta program dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran mereka,” ujar Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemdikbud, Poppy Dewi Puspita Sari, Kamis (27/10).

Dia mengatakan sebanyak 136 guru tersebut, merupakan hasil seleksi dari 3.200 guru berprestasi yang dinilai dari prestasi dan hasil uji kompetensi guru. “Mereka bukan orang tiba-tiba yang terpilih, tapi memang orang-orang terpilih,” tambah dia.

Para guru akan mengalami langsung praktik edukasi terbaik Australia. Studi singkat itu akan memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana peserta program dapat mengimplementasikan hasil pembelajaran mereka. “Diharapkan mereka akan dapat memberikan inspirasi dan gagasan baru dengan sesama guru dan kepala sekolah mereka sekembalinya ke Indonesia,” katanya.

Dia menjelaskan sudah beberapa

kali mengirim para guru untuk program penjaminan mutu tenaga pendidikan. Para guru tersebut akan tinggal di sejumlah rumah penduduk. Menurut dia, ada nilai lebih karena mereka melihat langsung kehidupan di negara asing.

Konselor Bidang Kerja Sama Kedutaan Besar Australia, Sarah Lendon, mengatakan hubungan antara Australia dan Indonesia telah lama terjalin di bidang pendidikan.

“Australia merupakan tujuan pilihan masyarakat Indonesia yang belajar di luar negeri. Seperempat dari orang Indonesia yang belajar di luar negeri memilih belajar di Australia. 19. 300 orang Indonesia terdaftar di lembaga pendidikan Australia pada 2015,” kata Lendon.

Melalui pendidikan, kata Lendon, tidak hanya berbagi gagasan, namun juga memperoleh wawasan tentang gaya hidup, kebudayaan dan nilai-nilai masyarakat masing-masing. Hubungan bilateral Australia dan Indonesia didasari oleh keterikatan yang kuat dalam bidang pendidikan. Setiap tahun, sekitar 500 orang Indonesia berpartisipasi alam program Studi Singkat di lembaga pendidikan Australia.

“Setelah kembali, kami tetap

menjalin hubungan baik dengan sekolah, dengan guru kedua negara dan orang per orang,” kata Lendon.

Sumber : antara
Red: Esthi Maharani



HARI GURU NASIONAL: Pesan Mendikbud untuk Para Guru (Okezone, November 2016)

AKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku salut dengan kinerja para guru, sebab profesi guru merupakan penentu masa depan bangsa. Dia mengaku salut atas kinerja guru, apalagi profesi ini merupakan penentu masa depan bangsa.

“Melalui anak-anak peserta didik di sekolah, di sanggar-sanggar belajar, kita akan menentukan masa depan bangsa,” kata Muhadjir dalam sambutannya di Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2016

di halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2016).

Menurutnya, banyak orang sukses di dunia ini tak lepas dari peran para guru. Oleh karenanya, guru merupakan sosok penting bagi kehidupan tiap manusia “Tidak ada sosok sukses yang tidak melewati sentuhan seorang guru. Kita bisa berdiri tegak saat ini juga karena pernah ditempa oleh para guru,” tutur mantan Rektor Muhamadiyah Malang (UMM) ini.

Di dalam kesempatan itu juga, Muhadjir mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para guru atas dedikasi, komitmen, dan ikhtiarnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Guru memiliki peran yang amat mulia dan amat strategis. Berbanggalah menjadi seorang guru. Sebab di tangan para guru, pamong, dan tenaga kependidikan, masa depan bangsa kita menjadi taruhan,” ungkapnya. “Saya ucapkan selamat memperingati Hari Guru Nasional tahun 2016,” tuturnya. (sus)

Kedaulatan Rakyat
Januari 2016

RAPOR UKG DIBAGI PERTENGAHAN JANUARI Hasil Rerata Masih di Bawah Standar

JAKARTA- Hasil rerata uji kompetensi guru (UKG), saat ini masih di bawah standar. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan pelatihan bagi para guru.

“Kita tahu rata-rata nilai UKG Nasional adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sementara nilai rata-rata kompetensi paedagogik 48,94,” kata Mendikbud Anies Rasyid Baswedan, Minggu (3/1)

Mendikbud mengatakan, dari hasil UKG, setiap guru akan mendapatkan rapor yang di dalamnya terdapat data guru beserta 10 komponen penilaian.

“Komponen yang masih berwarna merah menandakan guru itu perlu mendapatkan pelatihan di bidang tersebut, sampai akhirnya

menjadi sempurna,” kata Anies.

Namun begitu Mendikbud mengingatkan, agar hasil UKG tidak dijadikan sebagai alat hukuman untuk guru. Karena dari hasil itu akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. “Pengembangan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru,” tuturnya.

Sedangkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata, menuturkan rapor hasil UKG akan dibagikan ke sekolah pada pertengahan Januari 2016. Sedangkan pelatihan untuk para guru direncanakan dilakukan pada Mei 2016.

“Target hasil akan disebarakan pada pertengahan Januari, semoga tidak ada kendala. Sekarang tinggal menunggu hasil dari beberapa daerah yang menggunakan UKG offline. Pelatihan bagi peserta rencananya Mei 2016,” tegas Pranata.

(Ati)-g

Uji Kompetensi Guru Akan Diperluas

JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana memperluas penerapan uji kompetensi guru (UKG). Tahun ini yang akan diuji ialah tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan.

Kepala Subdirektorat (Kasubdir) Penempatan, Kebutuhan, dan Pengembangan Kelembagaan Riset dan Inovasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Ferry Yulmading, mengungkapkan ada peningkatan kompetensi kelembagaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bagi tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan melalui UKG. Tiga tenaga keprofesionalan ini akan diujikan.

Menurut dia, uji kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) agar dapat menjalankan tugas-tugasnya secara profesional. "Meski hanya menjadi unit pendukung, peran mereka sangat vital. Kegiatan mereka sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah," katanya saat menjadi pembicara di Rapat Pimpinan Pengurus Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (AKTAS) & Kantor Perwakilan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta kemarin.

"Meski hanya menjadi unit pendukung, peran mereka sangat vital."

FERRY YULMADING
Kasubdir Ditjen GTK, Kemendikbud

Tahun lalu UKG sudah dilaksanakan sehingga tahun ini uji kompetensi akan menyasar ke tenaga pendidik lain seperti tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan. Dia menjelaskan, uji kompetensi ialah alat untuk

meningkatkan tingkat profesionalisme dan pedagogis, sementara penilaian kinerja ialah melihat prestasi kerja dan ketepatan waktu pada tenaga pendidik itu. Ia mengatakan ada beberapa indikator yang harus dimiliki guru, yakni kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial, dan personal. "Terdapat tiga indikator yang harus dimiliki guru, yakni kompetensi pedagogik, profesionalisme, dan sosial. Kompetensi pedagogik ialah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, kompetensi profesionalisme ialah kemampuan guru dalam menguasai materi ajar, dan kompetensi sosial ialah kemampuan guru dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Di menyoal, Kemendikbud juga tengah menggelar pelatihan mengenai tingkat tenaga administrasi sekolah. Saat ini terdapat 100.000 tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan. "Dukungan yang akan diberikan Kemendikbud ialah pelatihan dan bimbingan teknis yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Asosiasi Kepala Tenaga Administrasi Sekolah (AKTAS) akan menyelenggarakan uji kompetensi dan kinerja bagi tenaga administrasi itu juga dilakukan tahun ini. Seperti halnya guru, tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya memang perlu diketahui kualitas kompetensinya. Namun, berbeda dengan guru, uji kompetensi tenaga administrasi bukan dari pedagogisnya, namun pengujian profesionalisme ke-

Masalah Pustakawan
• Banyak sekolah yang memiliki pustakawan yang tidak layak untuk bekerja
• Sekolah yang memiliki pustakawan cenderung tenaga pustakawan guru
• Keterbatasan buku
• Keterbatasan dana

administratifnya. Setelah itu, diharapkan ada pelatihan mengenai lambingan teknis yang sesuai kebutuhan. Pengujianya dilaksanakan dengan tiga tahap, yakni administrasi, keprofesionalan, dan wawasan, katanya. Dia menambahkan, uji yang menjadi penilaian bagi tenaga



PUSTAKAWAN
Kebanyakan pustakawan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Mereka memiliki tugas yang berat, yakni mengelola perpustakaan sekolah. Untuk itu, mereka harus memiliki kompetensi yang memadai, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan literasi, dan kemampuan teknologi informasi.

Tenaga Administrasi Sekolah
Kebanyakan tenaga administrasi sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Mereka memiliki tugas yang berat, yakni mengelola administrasi sekolah. Untuk itu, mereka harus memiliki kompetensi yang memadai, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan literasi, dan kemampuan teknologi informasi.



Laboran juga memepuk
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran

Laboran juga memepuk
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran



Tenaga Administrasi Sekolah
Kebanyakan tenaga administrasi sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Mereka memiliki tugas yang berat, yakni mengelola administrasi sekolah. Untuk itu, mereka harus memiliki kompetensi yang memadai, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan literasi, dan kemampuan teknologi informasi.

Tenaga Administrasi Sekolah
Kebanyakan tenaga administrasi sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Mereka memiliki tugas yang berat, yakni mengelola administrasi sekolah. Untuk itu, mereka harus memiliki kompetensi yang memadai, seperti kemampuan komunikasi, kemampuan literasi, dan kemampuan teknologi informasi.



Laboran juga memepuk
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran
• Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai laboran

Koran Sindo
Januari 2016

Pikiran Rakyat
Februari, 2016

Perekrutan Masif, Masalah Utama Guru Honorer

JAKARTA, (PR)—Permasalahan guru honorer yang terjadi saat ini perlu disikapi dengan bijak oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Bukan hanya pemerintah pusat, juga tingkat

pemerintah daerah, bahkan sekolah dan kepala sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memutarakan, permasalahan guru honorer selama ini hanya dilihat di hilir atau di ranah pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan. Padahal, hulu permasalahan adalah pengangkatan atau perekrutan masif oleh kepala daerah atau sekolah tanpa melihat konsekuensi yang lebih jauh. "Masalah guru honorer ini ke depan, perlu diatur bukan hanya di hilirnya, tetapi juga di hulu, yakni saat perekrutan guru honorer. Nanti bisa mengatur ini, ini ranahnya Kemendikbud, Kamis (11/2/2016).

Seperti diketahui pada Rabu (10/2/2016), ribuan guru honorer berunjuk rasa di Istana Negara. Mereka yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka bahkan kembali melakukan unjuk rasa pada Kamis (11/2/2016), namun tidak mendapatkan kepastian apa pun dari Presiden.

Berdasarkan data Kemendikbud, dalam 15 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah siswa sebanyak 17 persen, guru PNS 23 persen. Namun jumlah guru honorer meledak hingga 850 persen, dari 84.600 menjadi 812.064 orang.

Pertumbuhan guru honorer jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan siswa. Selain itu juga tidak menggambarkan peningkatan kebutuhan karena perubahan jumlah siswa. Menurutnya, masalah guru honorer tidak akan pernah selesai bila terus terjadi perekrutan masif tanpa perencanaan yang baik. Apalagi, perekrutan di daerah sering kali dikaitkan dengan pilkada daerah.

Anies melihat, yang terjadi saat ini adalah distribusi yang tidak merata, bukan harus mengangkat bagi guru, melainkan memastikan di setiap daerah yang kekurangan guru bisa dipenuhi.

Tingkatkan anggaran
Kemendikbud juga telah berupaya membenahi guru honorer atau non-PNS dengan meningkatkan anggaran insentifnya. Untuk tahun ini sebesar



*GURU honorer memakai seragam sekolah dasar saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil.**

Rp 380 miliar, meningkat dari tahun lalu Rp 155 miliar. Adapun jumlah guru non-PNS yang dianggarkan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tersebut adalah 108.000 guru. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yaitu sebanyak 42.000 guru. Juru bicara Menteri PAN-RI, Herman Suryatman menuturkan, saat ini permasalahan be-

lum diangkatnya guru honorer K-2 memang belum ada solusi permanen. "Kendalanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan terbatasnya alokasi anggaran," ujarnya. Pemerintah telah melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer K-2. (Siska Nir-mala)***

Mulai Pelatihan Tingkat Daerah

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kian intensif melakukan pelatihan Kurikulum 2013. Pelatihan itu ditujukan kepada instruktur tingkat provinsi, guru, serta kepala sekolah di kabupaten/kota. Pelatihan jenjang daerah tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir Juli untuk menyambut tahun pelajaran baru 2016-2017 yang semakin dekat.



Anies Baswedan

Mendikbud Anies Baswedan menuturkan, sesuai kalender akademik, tahun pelajaran baru dimulai akhir Juli 2016. "Untuk itu, pelatihan K-13 di level daerah dimulai pekan kedua April," katanya di Jakarta kemarin. Dia menuturkan, sasaran pelatihan sangat banyak karena jumlah sekolah yang mengimplementasikan K-13 tahun ini naik dari 9 persen menjadi 25 persen.

Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengatakan, sasaran pelatihan kelompok instruktur provinsi (IP) adalah 3.661 orang. Kemendikbud sudah menyiapkan 632 instruktur nasional (IN) untuk melatih mereka. Setelah menjalani pelatihan dan lulus tes sebagai IP, mereka wajib melatih instruktur kabupaten/kota (IK). Kemendikbud me-

matok jumlah IK sebanyak 66.564 orang. "Baru setelah itu, tugas IK yang melatih guru-guru dan kepala sekolah," kata Anies. Total guru dan kepala sekolah yang akan dilatih K-13 tahun ini adalah 285.698 orang. Anies menekankan, dalam setiap kegiatan pelatihan, instruktur harus menjadi fasilitator. Tidak boleh menggurui peserta pelatihan.

Pelatihan K-13 juga tidak boleh dijalankan asal-asalan dan dilaksanakan selama 52 jam pelajaran. Dengan demikian, tidak ada lagi gejolak guru belum siap atau kerepotan dalam mengajar berbasis K-13 yang sudah diperbaiki itu. (wan/c10/sof)

KESEJAHTERAAN

Tiga Bulan Dana Tunjangan Profesi Guru Tertahan

JAKARTA, KOMPAS — Ribuan guru di sejumlah daerah belum menerima tunjangan profesi guru atau TPG sepanjang triwulan I-2016. Birokrasi di daerah memuding data TPG tertahan di pemerintah pusat. Sebaliknya, Mendikbud Anies Baswedan menuding pemerintah daerah menahan dana tersebut.

Kepala SDN 5 Bukit Tinggi, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangkaraya Mahlani menyatakan, keterlambatan itu terjadi, antara lain, karena adanya berkas-berkas yang belum lengkap.

Operator Tunjangan Profesi untuk Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangkaraya Sub Mardiana menambahkan, berkas yang diperlukan untuk pencairan tunjangan sertifikasi adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah pada jenjang pendidikan dasar di Kota Palangkaraya.

"Surat keputusan itu terbit secara bertahap dan kami masih menunggu pengiriman surat itu," kata Mardiana. Dia mengatakan, kelengkapan berkas dan validasi data pada data pokok pendidikan (dapodik) juga perlu waktu beberapa hari. Sementara mekanisme dapodik juga membuat tunjangan profesi guru di Kalimantan Barat tertahan. Bahkan, ada yang sampai lima-cara bulan baru dicairkan. Keterlambatan proses memisahkan data dapodik memengaruhi proses verifikasi data.

Sistem guru SDN 04 Nanga Tayap, Kabupaten Kutapang, menuturkan, tunjangan profesi di terima setiap tiga bulan sekali. Namun, beberapa kali tunjangan itu tertahan cari.

Pihak dinas pendidikan setempat menyatakan rumitnya proses verifikasi data dapodik. Padahal, sejumlah data administrasi yang diperlukan sebagai persyaratan pencairan sertifikasi sudah diserahkan kepada operator yang bertugas menginput data di aplikasi khusus sesuai format yang ditentukan.

Saat dinas pendidikan memperbarui data, guru pun prosedif menyerahkan berkas kepada pi-

hak dinas. Namun, guru-guru juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses birokrasi di pemerintahan sehingga pencairan menjadi lama. "Data administrasi guru terkadang ada yang sudah sehingga ada kejadian guru menerima tunjangan sampai dua kali, sementara guru lain belum menerima karena kesalahan data. Makanya, diverifikasi," kata Mahlani.

Dari 62.928 guru di Kalbar, baru 24.000 guru yang tersertifikasi. Mereka tersebut di 14 kabupaten/kota.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menjelaskan, pengiriman TPG untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta memiliki mekanisme yang berbeda. Bagi guru PNS, TPG dikirim melalui Kementerian Keuangan ke pemerintah daerah. Kemudian, pemda mencairkannya kepada guru PNS. Sementara untuk guru swasta, TPG dikirim langsung dari pusat ke rekening guru.

Anies menuturkan, keterlambatan pengiriman TPG bagi guru PNS lebih sering terjadi. "Sering kali yang terjadi dana itu mandek

di pemda karena dipaki untuk berbagai macam urusan lain," ujarnya di Kemdikbud, Jakarta, Jumat sore.

Menurut Anies, para guru PNS perlu mendapat sosialisasi bahwa keterlambatan TPG merupakan tanggung jawab pemda setempat, bukan Kemdikbud. "Tapi agar para guru (PNS) menagih ke orang yang tepat. Kalau menagih ke Kemdikbud juga enggak ada artinya," katanya.

Saat ditanya tentang kemungkinan pengiriman TPG dilakukan sebelum sekali, Anies mengatak-kan, untuk saat ini, Kemdikbud tak hanya membiarkan mengenai hal itu. Kemdikbud tengah membiarkan konsolidasi sistem agar mekanismenya berjalan secara sederhana dan tak menyulitkan semua pihak.

Anies menuturkan, pihaknya masih harus membiarkan mengenai koneksi pada proses pengajuan, perhitungan, dan pencairannya. "Ketika ini rampung, kita akan tahu apakah pengiriman TPG akan bulanan atau tetap triwulanan," ujar Anies.

Anies menuturkan, belum ada target mengenai kapan pemboran sistem itu akan rampung. Namun, perubahan pada mekanisme pembayaran biasanya terjadi per tahun anggaran baru.

Sebelum terbit, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Sumarto Suprapranta mengatakan, keterlambatan pencairan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Anggaran TPG bagi guru PNSD disalurkan ke pemerintah daerah.

Sedang pengawasan Kemdikbud dan kemungkinan pemberian sanksi terhadap daerah yang menahan TPG, Sumarto mengatak-kan, mekanisme pengawasan tentu saja sesuai dengan prosedur yang ada.

(02N/004/TLO/INA/ EGU/0KA/ETA/01Y)

Jawapos
Maret 2016

Kompas
April 2016

Republika
Mei 2016

7.000 GGD Siap Dikirim

● DYAH RATNA META NOVIA

Tenaga honorer daerah tidak bisa ikut seleksi GGD

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, penyelesaian masalah pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) masuk dalam program Nawacita ketiga Presiden Jokowi. Poin tersebut berisi membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

"Nawacita akan dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Termasuk di daerah terdepan, serta memberikan layanan pendidikan, mengatasi kekurangan guru dan pemerataan guru di seluruh wilayah Indonesia," katanya, Jumat (13/5) malam.

Pemerintah menyiapkan program khusus untuk menempatkan guru yang ditugaskan di daerah khusus. Mereka dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional melalui program Guru Garis Depan (GGD). Program ini merupakan kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru PNS di daerah terdepan dan terluar.

Tahun 2016 ini, akan direkrut 7

ribu GGD yang akan dikirim ke 93 kabupaten. Semuanya tersebar di 28 provinsi. Penempatan GGD ini berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu juga berdasarkan usulan daerah.

"Keberhasilan pelaksanaan program GGD ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program GGD," ujarnya.

Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan memperjuangkan guru honorer untuk bisa mengikuti pendidikan sertifikasi. Mereka meminta guru mendaftar online untuk diangkat menjadi CPNS guru terdepan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Rahmat, di Amuntai, mengkhawatirkan pengangkatan dan penempatan CPNS guru garis depan dari Kemendikbud memicu kecemburuan guru honorer di daerah, terutama yang sudah mengabdikan puluhan tahun.

Rahmat, yang juga ikut menghadiri penandatanganan nota kesepahaman pelaksanaan CPNS guru garis depan 2016 di Hotel Sahid Jaya Jakarta mengatakan, Kemendikbud untuk tahap kedua tahun ini kembali akan menyeleksi penerimaan tenaga guru.

Seleksi dilakukan secara online oleh Kemendikbud. Pesertanya bisa berasal dari daerah mana pun, namun, syaratnya berijazah S1 pendid-

dikan dan pendidikan sertifikasi.

Jika melihat syarat tersebut, kata dia, berarti tenaga honorer daerah tidak bisa ikut seleksi. Sebabnya, yang memiliki pendidikan sertifikasi saat ini adalah guru berstatus PNS.

Rahmat berharap, Kemendikbud bisa mempertimbangan keberadaan tenaga guru honorer di daerah, khususnya yang sudah mengabdikan puluhan tahun. Mereka harus bisa ikut seleksi pengangkatan tenaga CPNS guru garis depan di tahun berikutnya. "Jika memang harus memenuhi syarat yang ditetapkan, maka perlu bantuan agar Dinas bisa membantu tenaga honorer memperoleh pendidikan sertifikasi," ujarnya.

Kabupaten HSU, lanjutnya, satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang mendapat jatah formasi sebanyak 10 orang. Mereka ditempatkan di daerah terpencil di Kecamatan Paminggir. Program ini memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di daerah terpencil, di mana di daerah itu masih kekurangan tenaga guru dan fasilitas pendidikan.

Bantuan untuk guru

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat memberikan bantuan bulanan Rp 250 ribu kepada guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK). Bantuan ini merupakan bentuk terima kasih atas pengabdian

menidik anak.

"Walaupun mereka tidak digaji oleh pemerintah, namun mereka tetap memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Makanya, kita memberikan mereka penghargaan," kata Bupati Kubu Raya Rusman Ali di Sungai Raya.

Dia mengatakan, apa yang diberikan pihaknya kepada tenaga pengajar tersebut memang tidak seberapa dibanding pengabdian mereka selama ini. Dia berjanji, ke depan akan terus menambah bantuan tersebut.

Rusman Ali berharap, para guru yang ada di kabupaten itu, baik dari tingkat PAUD sampai SMA, untuk terus memupuk akhlak anak dengan baik. Anak-anak diharapkan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Frans Randus mengatakan, bantuan diberikan kepada 580 tenaga pengajar. Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan. Pihaknya hanya memfokuskan bantuan itu untuk guru TK dan PAUD non-PNS, karena para guru tersebut hanya mengandalkan gaji dari pemilik lembaga belajar TK dan PAUD.

Gaji mereka sangat kecil, sehingga belum tentu bisa memenuhi kebutuhan hidup. "Mudah-mudahan, dengan bantuan ala kadarnya ini, bisa memberikan semangat bagi mereka dalam mengajar," kata Frans.

■ antara edy nasyid

ANGGARAN KEMENDIKBUD

Setelah Dipotong, Kini Ditambah Rp1 Triliun

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya berhasil mendapat tambahan anggaran Rp1 triliun yang diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan pendidikan.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, awalnya anggaran di kementerian dipotong sebesar Rp6,5 triliun sehingga dari anggaran Rp49,2 triliun hanya mendapat alokasi anggaran Rp42,6 triliun. Namun pada akhirnya anggaran tersebut mengalami penambahan sebesar Rp1 triliun, maka anggaran Kemendikbud tahun 2016 menjadi Rp43 triliun.

"Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Komisi X DPR. Khususnya yang juga berada di Komisi Badan Anggaran DPR yang telah bekerja pantang-mundur membantu meningkatkan perhatian pada dunia pendidikan," katanya di Jakarta kemarin.

Alokasi penambahan anggaran Rp1 triliun itu akan digunakan sebagai anggaran peningkatan mutu pendidikan yang dibagi dalam empat kelompok alokasi. Kelompok pertama akan dialokasikan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp47,1 miliar seperti dukungan manajemen bagi sekolah Indonesia di Singapura yang masih membutuhkan dukungan perpanjang-

an lahan. Dengan dukungan alokasi anggaran ini, pelayanan

bagi siswa dapat meningkat. Khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang banyak mengambil program kesetaraan dan masih banyak membutuhkan dukungan peningkatan mutu pendidikan.



ANIES BASWEDAN
Mendikbud

Alokasi kedua, penambahan anggaran sebesar Rp356 miliar dialokasikan untuk program pendidikan dasar dan menengah. Penambahan alokasi anggaran diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Kemendikbud berharap di daerah-daerah yang selama ini jangkauannya sulit akan coba dibantu dengan akses teknologi informasi agar tidak tertinggal pembelajarannya dengan daerah lain.

Pada kelompok ketiga, Anies menyampaikan, alokasi sebesar Rp50 miliar akan diarahkan pada program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat, khususnya pada peningkatan mutu layanan pendidikan kesetaraan dan

kursus. "Pendidikan kesetaraan sangat penting ditingkatkan mutu pendidikannya untuk merajangkau adiknya yang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan kesetaraan, khususnya di daerah yang sulit terjangkau," tuturnya.

Alokasi anggaran pada kelompok terakhir adalah program guru dan tenaga kependidikan. Pada program ini melalui penambahan anggaran, Kemendikbud mengalokasikan anggaran terbesar untuk guru Rp546,7 miliar. Dia menjelaskan, penambahan alokasi anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi kekurangan tunjangan profesi guru di program guru dan tenaga kependidikan, untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

"Dengan pengalokasian melalui empat kelompok tersebut, insya Allah dalam enam bulan ke depan dapat benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif dan memiliki dampak yang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia," imbuhnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Suranatanam mengatakan, tambahan anggaran itu bisa dipakai untuk tambahan tunjangan profesi yang kekurangan satu bulan untuk guru non-PNS. Kemendikbud berjuang untuk mendapat tambahan anggaran itu karena tidak ingin tunjangan profesi guru dipotong.

■ neneng subaidah

Koran Sindo
Juni 2016

Jawapos
Juli 2016

CPNS

Demi Hemat Anggaran, Tunda Rekrutmen 2016

JAKARTA - Tertutup sudah kesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) tahun ini. Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan surat penundaan rekrutmen CPNS 2016.

Surat penundaan itu ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Alasan utama penundaan tersebut adalah arahan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet 7 Juni lalu. Presiden berpesan supaya kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah daerah menghemat anggaran.

"Arahan presiden saat itu perbesar alokasi untuk belanja modal," tutur Yuddy di Jakarta, kemarin (26/7). Jika tidak ada penundaan penerimaan CPNS tahun ini, jelas dia, pos untuk belanja pegawai bakal terus membengkak.

Meski begitu, penundaan rekrutmen CPNS 2016 tersebut dikecualikan untuk sejumlah program atau formasi. Di antaranya, pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidang pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan. Termasuk program guru garis depan (GGD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga harian lepas dan tenaga bantuan (THL-TB) penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian.

Formasi CPNS baru juga masih terbuka untuk lulusan sekolah kedinasan dan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah otonomi baru (DOB). Kaltara terbentuk pada 2012.

Yuddy mengakui, ada usulan permintaan CPNS baru yang sudah masuk ke panitia seleksi nasional. Sebagai solusinya, instansi yang meminta jatah formasi CPNS baru itu diminta melakukan penataan ulang atau redistribusi pegawai. "Program redistribusi pegawai bisa mencontoh Ditjen Pajak atau Badan Intelijen Negara (BIN)," tutur menteri dari Partai Hanura itu. (wan/c7/pri)

Kompas
Agustus 2016

Perlu Komunikasi Intensif dengan Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Kelebihan pagu tunjangan profesi guru atau TPG senilai Rp 23,4 triliun dijadikan pelajaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komunikasi dengan instansi pendidikan di daerah akan diintensifkan untuk pemutakhiran data guru.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Nurzaman mengatakan, proyeksi jumlah guru penerima TPG berasal dari laporan daerah. Pelaporan itu menggunakan sistem pendataan skala nasional atau data pokok pendidikan (dapodik).

"Aktual atau tidaknya data tergantung dari sekolah dan instansi di daerah yang memperbarui. Ini jadi pembelajaran untuk intens memantau berapa yang terserap dan berapa sisanya," ujar Nurzaman di Gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/8).

Nurzaman mencontohkan, pada 2016, data dari daerah seharusnya lengkap pada bulan April. Namun, hingga Mei belum lengkap. Kemdikbud pun bertemu dengan pemerintah daerah terkait, Kemenkeu, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pem-

angunan, sehingga ditemukan kelebihan pagu.

Koordinasi

Guna menghindari terulangnya kelebihan pagu dengan jumlah tidak wajar, Kemdikbud akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan instansi di sejumlah daerah. "Koordinasinya akan dipercepat sehingga (kelebihan pagu) akan lebih awal diketahui," ucapnya.

Kemenkeu menunda penyaluran TPG senilai Rp 23,4 triliun. Alasannya, guru yang berhak menyerap tunjangan itu berkurang dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang.

Menurut Nurzaman, ada 33.000 guru yang tidak berhak mendapat TPG karena tidak memenuhi syarat mengajar tatap muka 24 jam. Kemudian, ada 26.000 guru yang tidak sesuai antara apa yang diajarkan dengan sertifikasi yang dimilikinya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, selain berkurangnya jumlah guru yang berhak, ada sisa TPG sampai 2015 yang mengendap di kas daerah Rp 19,6 triliun. (LAS/C03)

Pikiran Rakyat
September 2016

Pendidikan Anak TKI Terkendala

Kurang dari 50% yang Sudah Memperoleh Layanan Pendidikan

JAKARTA, (PR).-

Akses pendidikan bagi anak-anak dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara masih terkendala. Masih banyak anak-anak TKI belum mendapatkan atau bahkan belum tersentuh layanan pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per September 2015, di Malaysia saja tercatat ada 53.687 anak TKI. Namun kurang dari 50 persen di antaranya atau sebanyak 24.856 anak yang baru mendapatkan layanan pendidikan.

Hal tersebut diutarakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata. Ia mengakui, perluasan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia yang tinggal di negara lainnya masih perlu terus ditingkatkan melalui kerja sama antar-

pemerintah.

"Masih banyak anak-anak kita, yang karena orangtuanya bekerja sebagai TKI di negara lain membutuhkan akses dan layanan pendidikan. Untuk Malaysia, kita sudah ada kerja sama *government to government* (antarpemerintah), tapi untuk di negara lainnya itu memang belum, seperti Vietnam, Hong Kong, hingga Arab Saudi," tuturnya ketika ditemui se usai melepas guru-guru Indonesia ke Malaysia, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/9/2016) malam.

Kemendikbud menempatkan 115 guru di Malaysia untuk memfasilitasi pendidikan bagi para anak TKI. Ke-115 guru tersebut terdiri atas 101 guru jenjang pendidikan dasar, dan 14 guru jenjang pendidikan menengah.

Pranata menuturkan, ke-115 guru tersebut melengkapi tugas guru-guru lainnya yang telah lebih dulu berada di Malaysia. Sudah ada 223 guru yang sedang bertugas di Malaysia sehingga dengan dikirimkannya 115 guru tersebut terdapat total 338 guru yang bertugas di Malaysia.

Dia menjelaskan, para guru tersebut disebar ke berbagai daerah di Malaysia, yakni di Sekolah Indonesia

Kota Kinabalu (SIKK), Community Learning Center (CLC) Kota Kinabalu, CLC Tawau, Pusat Belajar Humana, Johor Bahru, Kelang, dan Sarawak. Adapun ke-115 guru tersebut diseleksi dari tiga Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LP-TK), yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Makassar.

Kontrak 2 tahun

Pranata menjelaskan, guru-guru tersebut berstatus tenaga kontrak dan akan bertugas selama dua tahun di Malaysia. Adapun saat ini Kemendikbud tengah mengupayakan fasilitas untuk kemudahan para guru tersebut mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). "Jadi setelah selesai mengabdikan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia, kami mengupayakan mereka untuk mendapatkan PPG," tuturnya.

Pengiriman guru ke Malaysia sangat penting untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak para TKI yang bekerja di sana. Ketimpangan pendidikan para anak TKI harus menjadi salah satu perhatian, karena

seluruh anak Indonesia harus diberikan layanan pendidikan tanpa kecuali. Ke depan, Kemendikbud akan mengupayakan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya yang mempekerjakan para TKI.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, pengiriman guru ke Malaysia telah dilakukan sejak tahun 2009 lalu. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani kesepakatan dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Haji Ahmad Badawi. Dalam kesepakatan tersebut Malaysia mengizinkan SIKK sebagai tempat pendidikan anak-anak pekerja Indonesia.

Mudhadzir menuturkan, pengiriman guru tersebut tidak hanya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak TKI. Namun juga dapat membentengi para anak TKI yang tinggal di negara lain untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. "Saya percaya melalui guru-guru ini, bisa membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik dan juga untuk menjadikan mereka menjadi anak yang berakhlak mulia, dan menjadi pembelajar sepanjang hidup," ucapnya. (Siska Nirmala)***

Media Indonesia
Oktober

Kemendikbud Kirim 136 Guru ke Australia

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kedubes Australia di Jakarta memberangkatkan 136 guru SD dan SMP untuk mengikuti kursus singkat di Universitas Melbourne, Australia.

"Guru-guru kita akan mendapat pengalaman secara langsung tentang praktik terbaik pendidikan di Australia. Studi singkat ini memberikan contoh praktis sehingga peserta program dapat mengimplementasikan hasil pembelaja-

ran mereka selama belajar di Australia," kata Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat GTK Kemendikbud, Poppy Dewi Puspita Sari, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin, saat melepas para guru tersebut.

Poppy berharap sebanyak 136 guru hasil seleksi dari 3.200 guru berprestasi itu dapat menginspirasi dan memberi gagasan baru bagi sesama guru dan kepala sekolah mereka sekembalinya ke Tanah Air. (Bay/H-2)

Kompas
November 2016

Tanamkan Nilai Keberagaman

Saling Menghujat Bukan Karakter Bangsa Indonesia

BOGOR, KOMPAS — Guru sebagai pendidik generasi penerus bangsa diharapkan bisa menanamkan penghargaan terhadap keberagaman di Nusantara kepada para anak didik mereka. Penanaman nilai ini berperan penting dalam membentuk karakter serta keindonesiaan siswa.

"Keberagaman bangsa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang Mahakuasa. Tidak ada negara di dunia ini yang serupa dengan Indonesia," kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Ulang Tahun Ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Sentul Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11). Acara diikuti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Presiden Jokowi mengatakan, kekayaan Indonesia antara lain bahasa ribu pulau, 700 suku bangsa, 1100 bahasa, dan adat

istiadat yang tidak terhitung jumlahnya. "Dari seluruh sudut Nusantara, keberagaman memperlukanya kebudayaan kita," ujarnya.

Oleh karena itu, guru harus bisa membuka wawasan siswa mengenai harta kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Siswa jangan sampai berpikiran tertutup sehingga begitu mudah berprasangka buruk kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka.

"Ini bagian dari penguatan tata krama Indonesia karena karakter positif, seperti saling menghargai, bekerja keras, jujur, disiplin, dan optimatis, adalah modal kita untuk berliprah di dalam persaingan global yang kian meng-

kat," ujar Jokowi.

Presiden menekankan, situasi persaingan saat ini sudah berat. Pada tahun 2030, tantangan akan semakin banyak. Pada masa itu, diperkirakan 60 persen penduduk Indonesia berusia produktif. Hanya guru yang bisa memastikan bahwa tenaga kerja pada saat itu bermutu dan memberi bangsa bonus demografi, bukan bencana demografi.

"Guru yang membuat seseorang bisa menjadi presiden, jenderal, ataupun menegasi cita-cita lainnya," kata Jokowi. Sebagai bentuk penghormatan kepada pendidik, ia membungkukkan badan di hadapan 16.300 guru dan tenaga kependidikan yang menghadiri acara tersebut.

Media sosial

Dalam pidatonya, presiden juga mengingatkan guru agar mengawasi pemakaian media sosial oleh para siswa. "Saling menghujat dan menaruh fitnah bukan tata krama bangsa Indonesia, tetapi kini hal tersebut marak terjadi di media sosial," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan apabila ada pembauran dan tidak ada panduan cara memakai internet secara bijak, persatuan bangsa bisa retak.

Pada kesempatan itu Presiden juga menandatangani Satya Lencana Pendidikan untuk 52 guru dan tenaga kependidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, Indonesia memiliki 3,3 juta guru dan tenaga kependidikan. Mereka membimbing sekitar 53 juta siswa di seluruh jenjang pendidikan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapramata menjelaskan, saat ini sedang dilakukan revisi Standar Kompetensi Guru dan Standar Kompetensi Lulusan Guru. "Keduanya disinkronkan agar para guru lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.

Selama ini, Standar Kompetensi Guru diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

sementara Standar Kompetensi Lulusan Guru diatur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ada beberapa poin yang berbeda. Hal ini berakibat para lulusan Pendidikan Profesi Guru belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang idealnya dimiliki secara spesifik oleh guru.

"Aturan tersebut kini disegerakan. Para guru yang baru lulus pendidikan harus memiliki kompetensi guru pemula," ucap Sumarna.

Sementara itu, acara puncak peringatan Hari Guru Nasional berlangsung meriah. Para guru dan tenaga kependidikan yang hadir merupakan perwakilan 13 organisasi profesi guru. Beberapa di antaranya adalah Ikatan Guru Indonesia, Serikat Guru Indonesia, dan Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HNE/SON).



Lihat Video Terkait
"Joko Widodo pada
Peringatan Hari Guru"
di [kompasprint.com/vod/
peringatanhari guru](http://kompasprint.com/vod/peringatanhari guru)

UJIAN NASIONAL

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu UN digunakan juga untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa di Indonesia.

Sejak tahun 2014, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Fokus UN dialihkan pada integritas siswa dan sekolah. Dengan tidak lagi menjadi penentu kelulusan, siswa diharapkan lebih percaya diri dalam menghadapi UN. Lewat integritas yang tinggi, pemetaan terhadap mutu pada setiap satuan pendidikan di Indonesia dapat terlihat jelas. Pemerintah kemudian memiliki dasar untuk menentukan intervensi

RINGKASAN

Pada topik ini, ada dua isu utama yang mengisi pemberitaan di media daring maupun cetak. Pertama, tentang pelaksanaan UN yang banyak diberitakan pada April 2016. Kedua, mengenai ditolaknya moratorium UN yang mendapat ekspos cukup tinggi di bulan Desember 2016.

Pemberitaan pada April 2016 banyak diisi dengan isu beredarnya kunci jawaban UN. Khusus untuk isu ini, ada sebanyak 828 berita pada media daring. Sementara pada media cetak, terpantau sebanyak 351 berita. Sementara itu pada isu kedua, terpantau sebanyak 410 berita di media daring, hanya dalam hitungan 8 hari di bulan Desember 2016. Dalam kurun waktu yang sama, ada sebanyak 213 berita di media cetak yang memberitakan tentang isu ditolaknya moratorium UN.

Pada topik ini pula, nama Anies Baswedan dan Menteri Muhadjir Effendy mendominasi top influencer pada media daring. Khusus di media cetak, selain Mendikbud Muhadjir Effendy, nama Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Nizam, menjadi top influencer. Nizam mendominasi pemberitaan pada periode April-September 2016.

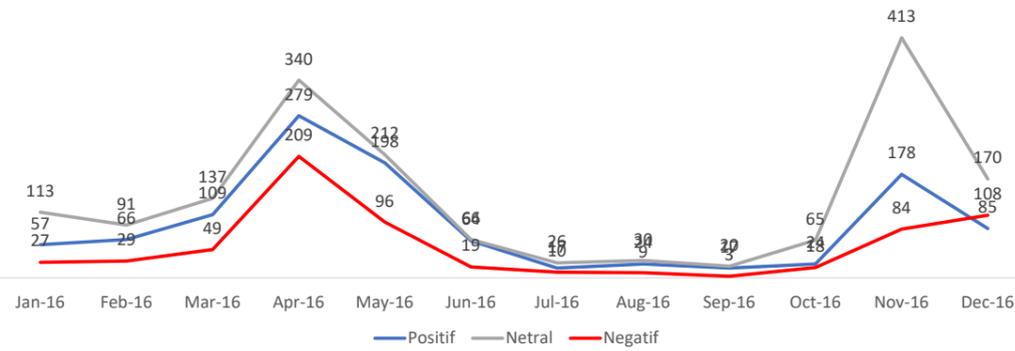
Berita dengan sentimen netral mendominasi pada dua jenis media ini. Media daring sebanyak 1.683 berita, sementara media cetak berjumlah 869 berita. Berita dengan sentimen positif berjumlah 1.118 pada media daring dan 482 berita. Sementara untuk berita dengan sentimen negatif terpantau sebanyak 661 berita pada media daring dan 407 berita pada media cetak.



SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

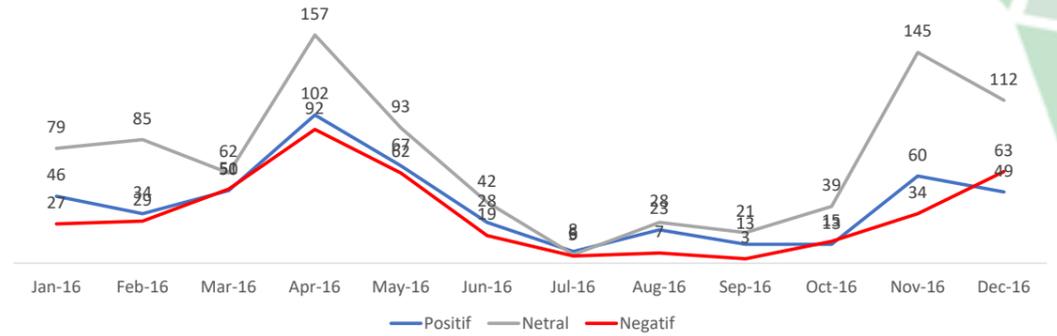
Selama 1 tahun, sentimen Netral lebih dominan dengan 48.33%. Sentimen pada pemberitaan meningkat signifikan pada April 2016, dimana jumlah sentimen Netral 340 berita, sentimen Positif sebanyak 279 berita, dan sentimen Negatif sebanyak 209 berita. Pemberitaan bernada Negatif yang muncul pada April 2016 dengan judul berita "Ada 187 Pengaduan Terkait UN Masuk ke Mendikbud".

Untuk sentimen pemberitaan Negatif muncul dari judul berita "Siswa Difabel Kesulitan Ikuti Ujian Nasional". Dalam berita tersebut ditulis bahwa siswa difabel kesulitan dalam mengikuti UN karena kekurangan pasokan soal atau tidak mendapatkan soal dalam bentuk braille.

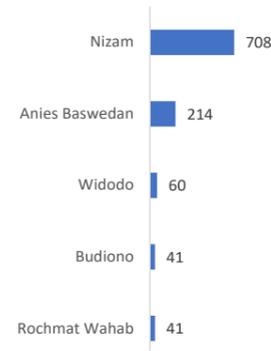


SENTIMEN (MEDIA CETAK)

Sepanjang tahun 2016, sentimen Netral di media cetak juga lebih dominan. Sentimen pada pemberitaan meningkat signifikan pada April 2016, dimana jumlah sentiment Netral sebanyak 157 berita, sentiment Positif sebanyak 102 berita, dan sentiment Negatif sebanyak 92 berita. Pemberitaan bernada Negatif banyak berasal dari judul berita "Siswa Difabel Kesulitan Ikuti UN". Aksi: Menanggapi permasalahan tersebut, Anies Baswedan yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membantah pelaksanaan UN tidak ramah bagi kalangan difabel. Pemberitaan bernada Negatif selanjutnya muncul dengan judul "Listrik Ancaman UNBK". Artikel tersebut membahas salah satu kendala pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan komputer adalah listrik mati.

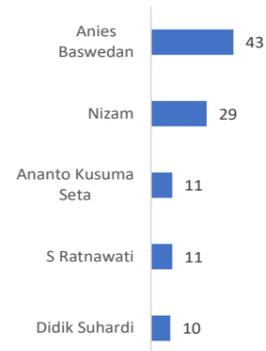


Influencer Jan-Mar



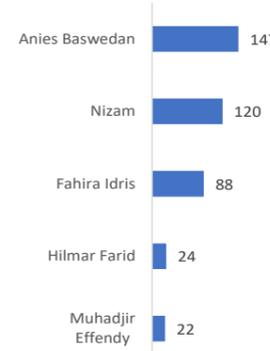
Periode Januari-Maret 2016, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud, Nizam menjadi influencer terbanyak. Nizam berbicara mengenai akan diumumkan sekolah dengan Indeks Integritas terendah. Anies Baswedan menjadi influencer tertinggi kedua. Dirinya berbicara mengenai perkembangan UN yang tidak menakutkan lagi.

Influencer Apr-Juni



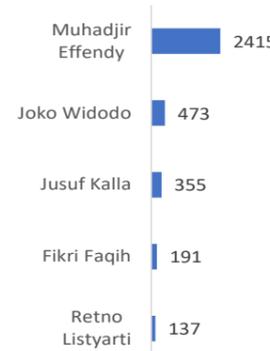
Ada dua (2) figur internal Kemendikbud yang banyak memberikan pernyataan, mereka ialah mantan Mendikbud, Anies Baswedan dengan 43 pernyataan. Lalu ada Kepala Pusat Penelitian Pendidikan, Profesor Nizam dengan 29 pernyataan. Isu yang dibicarakan oleh keduanya salah satunya adalah nilai Indeks Integritas UN (IIUN) yang mengalami peningkatan.

Influencer Jul-Sept



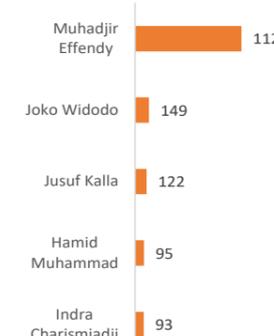
Pada perioden ini mantan Mendikbud Anies Baswedan masih menjadi top influencer dengan 147 pernyataan. Ia berbicara soal pencopotannya dari jabatan Mendikbud. Lalu, ada Mendikbud yang baru dilantik yaitu Muhadjir Effendy dengan 22 pernyataan. Salah satu persoalan yang ia angkat adalah mengenai wacana full day school.

Influencer Okt-Des



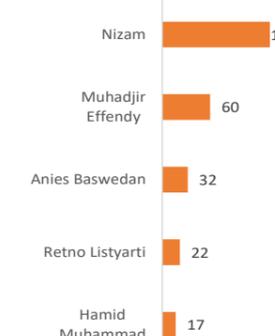
Muhadjir Effendy menjadi top influencer dari Oktober-Desember 2016, dengan 2415 pernyataan. Ia banyak berbicara di terkait kebijakannya yang ingin menghapus Ujian Nasional/UN. Meskipun, pada akhirnya UN tidak jadi dihapus karena mendapat penolakan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Influencer Okt-Des



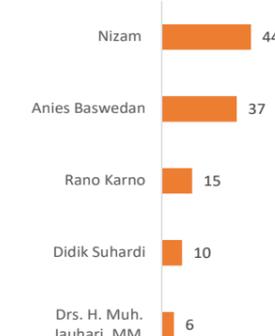
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menjadi top influencer dari Oktober-Desember 2016, dengan 1129 pernyataan. Ia banyak berbicara di terkait kebijakannya yang ingin menghapus Ujian Nasional/UN. Ada Presiden Jokowi, dengan 149 pernyataan diperingkat kedua. Masih dengan pembahasan yang sama terkait wacana penghapusan UN,

Influencer Jul-Sept



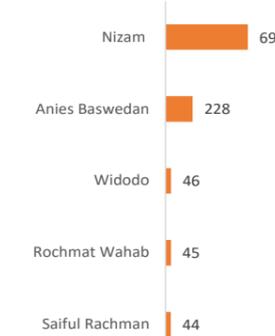
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud, Nizam masih menjadi influencer di periode Juli-September 2016, dengan 135 pernyataan. Pemberitaan banyak muncul mengenai pernyataan Nizam yang mengatakan nilai UN tahun ini melampaui standar dibandingkan tahun lalu.

Influencer Apr-Juni



Selama periode April-Juni 2016, terpantau Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud, Nizam sebagai figur yang paling sering berbicara di media cetak, Salah satu pernyataannya adalah mengenai permintaan Nizam agar kepala daerah tidak memberikan penalti kepada sekolah karena penurunan nilai UN.

Influencer Jan-Maret



Periode Januari-Maret 2016, Nizam mendominasi influencer dengan 691 pernyataan. Ia berbicara mengenai pendistribusian soal UN dan juga mengenai UN yang tidak lagi menakutkan.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. Sekolah siap laksanakan UNBK 2. Indeks Integritas Sekolah	Januari	1. Ujian Nasional Berbasis Komputer UNBK 2. Pemakaian Kurikulum 2013
Februari	1. Siswa Sekolah internasional wajib ikut UN 2. UN tidak dipungut biaya alias gratis	Februari	1. UN tidak dipungut biaya alias gratis 2. Pelaksanaan UN Perbaikan
Maret	1. Pelaksanaan UNBK 2. Sekolah harap PLN tidak matikan listrik	Maret	1. Listrik masalah UN 2. Soal UN Dikrim
April	1. Indeks Integritas Ujian Nasional 2. Hasil UN	April	1. Indeks Integritas Ujian Nasional
Mei	1. Indeks Integritas Ujian Nasional	Mei	1. Kunci jawaban masih bocor
Juni	1. Nilai UN Turun, Indeks Integritas UN Naik 2. UN Perbaikan	Juni	1. Nilai UN Turun
Juli	1. Tantangan Mendikbud baru	Juli	1. Generasi Unggul Masa Depan
Agustus	1. Ujian Nasional Perbaikan	Agustus	1. Ujian Nasional Perbaikan
September	1. Ujian Nasional Perbaikan	September	1. Ujian Nasional Perbaikan
Oktober	1. Kemendikbud tetapkan Sekolah Rujukan	Oktober	1. Kemendikbud tetapkan Sekolah Rujukan
November	1. Mendikbud Canangkan Moratorium UN	November	1. Mendikbud Canangkan Moratorium UN
Desember	1. Moratorium UN Ditolak	Desember	1. Moratorium UN Ditolak

TOP ISSUE CETAK



Kemendikbud: 34 Provinsi Siap Lakukan UN Berbasis Komputer (Republika, Januari 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan sebanyak 400 kabupaten/kota di 34 provinsi siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ini.

“Dengan kata lain, jumlah daerah yang mengikuti UNBK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya,” kata Nizam di Jakarta, Jumat. Pada UN 2015, UNBK diikuti 554 sekolah di 24 provinsi seluruh Tanah Air. Diperkirakan ada tambahan sekitar 400 sekolah yang akan mengikuti UNBK pada tahun 2016.

Nizam mengingatkan Kemendikbud tidak memaksakan sekolah dengan mengadakan perlengkapan

komputer demi pelaksanaan ujian tersebut. “Sekolah hanya perlu memaksimalkan peralatan yang ada di tempatnya,” tambah dia.

Pihak Kemdikbud pun sudah menyosialisasikan bagi sekolah yang fasilitasnya kurang. Kemudian menyosialisasikan agar bisa memanfaatkan fasilitas lengkap yang tersedia di sekolah terdekat, terutama bagi sekolah yang memiliki fasilitas berlebih.

“Misalnya, anak SMP bisa mengikuti ujian di SMA atau SMK jika fasilitasnya belum ada, tidak perlu masing-masing punya,” katanya.

Uji coba soal UN telah dilakukan sebanyak satu kali pada pekan pertama Januari ini. Untuk uji coba selanjutnya direncanakan akan dilakukan di awal Februari mendatang. Bahan ujian juga telah dilelang Kemendikbud pada bulan Desember lalu.

Ujian nasional SMA/ sederajat akan dilaksanakan pada tanggal 4 April, sedangkan peserta didik SMP/ sederajat akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2016.

Tahun Ini Sekolah Internasional Wajib UN (Okezone, Februari 2016)

DEPOK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan sekolah yang tergabung dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) wajib mengikuti Ujian Nasional (UN).

“Sebanyak 350 SPK di seluruh Tanah Air akan mengikuti UN pada tahun ini,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam, dalam konferensi pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 di Depok, Jawa Barat, Senin (22/2/2016). Kemendikbud menyatakan telah mensosialisasikan mengenai kewajiban mengikuti UN tersebut pada SPK.

“Responnya positif, mereka akan mengikuti tiga mata pelajaran yang wajib yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Sisanya tergantung siswanya, karena mereka kurikulumnya berbeda dengan kurikulum nasional,” terang dia.

Siswa di SPK tersebut akan mengikuti UN Berbasis Komputer (UNBK). Nizam juga mengatakan

para SPK itu telah mengikuti uji coba UNBK sekira dua pekan lalu. Sebelumnya, siswa SPK mengikuti UN di sekolah lain. Namun untuk tahun ini, mereka harus mengikuti UN di sekolah mereka sendiri.

“Ini khusus untuk siswa WNI saja. Kemdikbud melayani WNI untuk mengikuti UN,” jelas Nizam. SPK merupakan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum luar negeri dengan pengantar bahasa asing di kelas. Sebelum berganti nama pada akhir 2014, sekolah-sekolah itu menggunakan nama internasional.

UN untuk tingkat SMA/MA/SMK akan diselenggarakan mulai 4 April. Sementara untuk tingkat SMP/MTS akan diselenggarakan 3 Mei. UN diselenggarakan melalui dua metode yakni ujian berbasis kertas dan ujian berbasis komputer. (rfa)



4.402 Sekolah Siap Laksanakan UN Berbasis Komputer

(Beritasatu, Maret 2016)

Jakarta - Pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer (UNBK) 2016 bagi siswa SMP dan SMA pada tahun ini mengalami peningkatan jumlah sekolah.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan, jumlah sekolah yang mengikuti UNBK pada tahun ini tercatat ada 4.402 sekolah. "Sedangkan pada tahun 2015, tercatat hanya 585 sekolah yang menyelenggarakan UNBK," ujar Nizam di Jakarta, Senin (28/3).

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, peningkatan jumlah sekolah pelaksana UNBK, harus didukung oleh kesungguhan sekolah, guru dan siswa. "Sebab, UNBK bukan hanya sekedar mengurangi kertas, hal tersebut bertujuan agar siswa terbiasa menggunakan teknologi," lanjutnya.

Adanya UNBK, kata dia, selain untuk membangun

ekosistem, juga bertujuan agar siswa dan sekolah mulai beralih kepada dunia digital.

"Saya katakan, pelaksanaan UNBK ini penekanannya pada penggunaan teknologi. Siswa harus dapat memanfaatkan teknologi di era digitalisasi, sehingga semua materi pembelajaran dapat diaplikasikan," paparnya.

Untuk tahap persiapan, kata Nizam, UNBK sudah melewati gladi bersih. "Semua berjalan lancar. Penginstalan soal UNBK akan dilakukan pada H-3 sebelum UN dimulai," jelasnya. Untuk pelaksanaan UN di luar negeri, lanjut dia, ada lima sekolah yang menyelenggarakan UNBK, dan sembilan lainnya menggunakan UNPK.

Sebagai informasi, UN 2016 akan berlangsung selama tiga hari. Untuk tingkat SMA akan dilaksanakan pada 3-6 April 2016. Sedangkan UN untuk SMP akan dilaksanakan 7-9 Mei 2016. Maria Fatima Bona/FER

UN Bukan Mengukur Nilai, Tapi Indeks Integritas (Tribun Jogja, April 2016)

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ujian Nasional (UN) bukan sesuatu yang menakutkan, sehingga tidak perlu dicurangi. Siswa yang melakukan kecurangan akan rugi berkali-kali. Pertama, mereka telah membohongi diri sendiri. Kedua, bila bocoran tersebut diambil, maka mereka tidak percaya diri dalam membangun kemampuan.

Selain itu, imbasnya tak hanya dirasakan individu, namun juga sekolah tempat siswa belajar juga akan kecipratan rugi, yakni dengan menurunnya indeks integritas sekolah, yang bisa digunakan Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi kualitas sekolah dan siswanya.

Hal tersebut yang dijelaskan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Litbang Kemendikbud, Prof Ir Nizam MSc PhD, saat berkunjung ke Yogyakarta, Minggu (10/4/2016). "Saya selalu menekankan, benteng untuk mengatasi kecurangan bukanlah memperketat pengamanan dan pengawalan, tapi benteng itu dari anak-anaknya sendiri," jelas pria

yang menjadi pimpinan pelaksana UN 2016 tersebut.

Disinggung tentang kebocoran soal, dirinya menjelaskan bahwa ada proses pembedaan soal yang dilakukan panitia, baik untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Paper Based Test (PBT), namun tetap memberikan bobot soal yang setara.

"Kami membuat soal berbeda. Tidak mungkin menyamakan 'plek' keduanya (antara soal UNBK dan PBT), tapi juga tidak bisa duaduanya beda total. Maka dari itu, antara soal UNBK dan PBT, ada linking, yakni sama seperti irisan atau bagian yang sama," tutur Guru Besar Fakultas Teknik UGM itu.

Dijelaskan Nizam, pada tahun 2015 merilis indeks integritas UN di masing-masing sekolah. Total ada 80.000 sekolah, mulai dari jenjang SMP, MTs, SMA, SMK, MA, yang memiliki indeks integritas di atas 80, atau hampir tidak ada kecurangan di sekolahnya, hanya berjumlah 11.700 sekolah saja.

DIY menjadi satu di antara sekolah yang memperoleh indeks integritas di atas 80. Terhitung sejak 2005 hingga 2015, imbuhnya, angka

kecurangan yang terjadi di DIY relatif kecil.

"Tolonglah, yang sudah baik jangan dirusak, yang sudah jujur jangan diracuni dengan jalan pintas. Bagi adik-adik yang sedang ujian, jangan khawatir, kita punya pemetaan tingkat integritas kecurangan," ujarnya mencoba berpesan kepada pelajar yang menjunjung tinggi kejujuran dalam mengerjakan soal UN. Kurniatul Hidayah (tribunjogja.com)



Kata Pak Anis Baswedan, Pelajar Jogja Paling Jujur Se-Indonesia Saat Mengerjakan UN! (Tribunjogja, Mei 2016)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumumkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi dengan pelajar paling jujur se-Indonesia, berkat raihan Indeks Integritas Ujian

Nasional (IIUN) tertinggi secara nasional dalam UN tingkat SMA dan sederajat 2016.

IIUN diukur untuk sekolah-sekolah yang masih mengadakan UN dengan kertas dan pensil (UNKP). Sementara sekolah yang telah menjalankan UN berbasis komputer (UNBK), tidak diukur IIUN-nya karena dianggap sulit melakukan kecurangan.

Tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menobatkan Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan UN SMA paling berintegritas. Sementara itu, meski tak 'sejujur' Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta meraih hasil IIUN tak jelek-jelek amat dengan masuk lima besar tingkat kejujuran tertinggi nasional.

Untuk Jurusan IPS, tahun ini Yogyakarta meraih skor IIUN tertinggi, yakni 78,21, diikuti Bangka Belitung (76,82), DKI Jakarta (76,02), Bengkulu (74,69), dan Kepulauan Riau (73,48).

Sementara untuk Jurusan IPA, Yogyakarta tetap tertinggi dengan skor IIUN 78,36, diikuti Bangka Belitung (76,69), Banten (73,39), Kalimantan Timur (73,23), serta DKI

Jakarta di peringkat lima (73,18).

"Provinsi-provinsi dengan sekolah yang memiliki IIUN tinggi, tahun ini, terus mempertahankan kejujuran dalam pelaksanaan UN SMA," ujar Anies di Gedung Kemendikbud, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

Di sisi lain, Anies menambahkan, beberapa provinsi mengalami penurunan nilai UN dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain karena beralih ke UNBK yang menyulitkan siswa berbuat curang.

Pada pelaksanaan UN SMA dan sederajat tahun ini, sebanyak 19.952 sekolah menjalani UN, dimana 1.297 di antaranya berbasis komputer (UNBK) dan selebihnya masih menggunakan kertas dan pensil (UNKP).

Indeks Integritas UN SMA rata-rata dihimpun dari sekolah yang masih berbasis UNKP. Hasil UN SMA dan sederajat 2016 sendiri telah diumumkan pada Sabtu (7/5/2016) lalu. Nilai hasil UN diolah dari 1.708.367 siswa SMA, 1.276.245 siswa SMK, 1.435 siswa SMALB, dan 258.921 peserta Paket C.

Seperti telah dijelaskan, capaian

rata-rata nilai UN SMA 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, antara lain karena siswa makin jujur dan makin banyak sekolah yang beralih ke UNBK.

Rata-rata nilai UN SMA 2015 adalah 61,93, sementara rata-rata nilai UN SMA 2016 adalah 55,3, atau terjadi penurunan 6,9 poin.



Nilai UN Turun, Rerata IIUN Naik
(MediaIndonesia, Juni 2016)

HASIL penilaian indeks integritas ujian nasional (IIUN) SMP/MTs tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah yang mendapat rerata nilai IIUN di atas 80 sebanyak 23.634 sekolah (44,03%) dari tahun lalu hanya 12.039 sekolah (23,44%).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud) Anies Baswedan menjelaskan hasil tersebut dan menyatakan kegembiraannya karena sekolah yang sudah jujur di 2015 makin terlihat pada 2016, meski kecenderungannya ialah integritas tinggi seiring dengan nilai UN rendah. "Kenaikan IIUN berarti hasil UN-nya semakin jujur.

Harapannya tentu bisa lebih tepat digunakan untuk memetakan capaian pendidikan agar mutunya semakin baik," ujar Anies dalam jumpa pers hasil UN SMP di Kantor Kemendikbud, Jumat (10/6).

Apalagi, lanjut Anies, secara keseluruhan ada 72% sekolah yang mengalami peningkatan nilai IIUN. Jumlah itu termasuk di antaranya 1,8% SMP/MTs yang baru mengikuti UN berbasis komputer (UNBK) mulai tahun ini. Sekolah dengan sistem UN kertas pensil (UNKP) di 2015 yang memiliki kesungguhan meningkatkan kejujuran dan memperbaiki diri juga patut di apresiasi. Tercatat, tahun ini sebanyak 10.078 sekolah UNKP yang mendapatkan nilai IIUN di atas 80.

Memang diakui masih ada 41,92% siswa yang belum mencapai standar sesuai ketentuan Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP) yakni nilai minimal 55. Rerata nilai UN juga cenderung terkoreksi turun 1,5 hingga 4 poin. "Nilai terkoreksi itu juga lantaran kita sudah memodifikasi desain UN agar dapat memotret lebih banyak kemampuan high order of thinking sesuai kebutuhan abad ke-21," terang dia.

Pantauan dari lapangan, hasil UN di Provinsi Bangka Belitung merosot cukup tajam seperti yang diakui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, M Soleh, Jumat (10/6). "Hasil perhitungan nilai UN di tingkat provinsi hanya mendapatkan nilai 51,27. Artinya kalau di kategorikan, masuk kategori kurang yakni di bawah 55," ujar dia.

Kemampuan nalar

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam menjelaskan nilai terkoreksi meliputi semua mata pelajaran. Bahasa Indonesia paling sedikit terkoreksi (0,31), sebaliknya matematika terkoreksi paling besar (6,04). "Dengan high order of thinking itu matematika memang yang paling terasa, dari tahun ke tahun turun." Di masa mendatang, lanjut Nizam, soal UN akan lebih dititikberatkan pada kemampuan penalaran dan analisis. Pun, bisa diterapkan pada

proses pembelajaran di sekolah agar siswa mampu berkompetisi.

Ketua BSNP Zainal A Hasibuan menegaskan penilaian IIUN juga nantinya akan diterapkan untuk kegiatan riil lain di dunia pendidikan termasuk mempertajam standar yang selama ini dirumuskan. "Soal-soal penalaran itu dibutuhkan, critical thinking, sehingga umpan balik dari UN benar-benar mencerminkan peningkatan kemampuan siswa," tukasnya. (RF/AT/H-1)



Ini Tantangan Mendikbud yang Baru
(Republika, Juli 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paska reshuffle jilid II salah satu tantangan besar bangsa ini adalah pendidikan. Saat ini dunia pendidikan dinakhodai oleh mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhadjir Effendy

yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, tantangan terbesar dunia pendidikan di Indonesia adalah luasnya cakupan wilayah Indonesia. "Selain itu belum sempurnanya kualitas pendidikan seperti sistem belajar mengajar, kompetensi guru, infrastruktur, pemanfaatan teknologi, belum ada sistem nasional yang mampu memacu minat baca," katanya, Kamis (28/7).

Kompleksitas masalah inilah yang mengakibatkan pemerinkatan tingkat pendidikan Indonesia di dunia masih terus berkutat di papan bawah. Fahira menyebut satu persatu persoalan ini mesti diurai oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Untuk sistem pendidikan, Fahira mengatakan tantangan besarnya adalah bagaimana Mendikbud yang baru bisa memformulasi sistem yang mampu menghadirkan proses belajar mengajar menjadi asik, menyenangkan dan berkualitas.

"Jika ingin mengubah wajah pendidikan kita bukan hanya soal mengganti kurikulum namun bagaimana melatih kompetensi

guru agar mampu membuat proses belajar mengajar menjadi asik," katanya.

Sementara itu, terang Fahira, tantangan di bidang infrastruktur pendidikan terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal juga berat. Pemerintah pusat harus mengintervensi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang ada di seluruh Indonesia.

Walau sudah ada otonomi daerah, menurut dia, intervensi dibutuhkan agar ada percepatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah yang geografisnya, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya terbatas. "Membangun Indonesia dari pinggiran sesuai slogan presiden harus diartikan bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan atau jembatan. Namun juga membangun manusianya, ini jauh lebih penting," kata Fahira.

Caranya, terang Fahira, dengan menyempurnakan infrastruktur pendidikan di daerah termasuk penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas. "Ini yang saya lihat

belum maksimal," ujarnya.

Tantangan lainnya adalah melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN), sistem penerimaan siswa baru, dan masa orientasi sekolah (MOS) yang saat ini sudah lebih baik. Menurut dia, saat ini UN sudah tidak lagi jadi momok dan praktik perploncon saat MOS sudah berangsur hilang.

Ia berharap ini lebih dioptimalkan. Mendikbud yang baru juga harus segera memformulasikan materi pendidikan antikekerasan terutama kekerasan seksual secara komprehensif dalam berbagai mata pelajaran.

Harapan yang digantungkan kepada Mendikbud yang baru, adalah peningkatkan kapasitas guru dan fasilitas PAUD. Karena PAUD adalah kawah pembentukan anak-anak Indonesia agar tumbuh jadi pribadi yang mandiri, percaya diri, punya rasa sosial yang tinggi, cepat beradaptasi, berani jujur. Selain itu juga punya rasa ingin tahu yang besar sehingga di masa depan mampu menjalankan negeri ini dengan baik.

"Usia nol hingga enam tahun merupakan tahun emas atau golden

years pembentukan karakter anak. Kemendikbud harus memberi perhatian lebih untuk PAUD," ujar Fahira.



Ujian Nasional Perbaikan Diikuti 88.958 Siswa
(Beritasatu Agustus 2016)

Jakarta - Hari ini, Ujian Nasional Perbaikan (UNP) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) diselenggarakan. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kapuspendik Kemdikbud) Prof Nizam mengatakan, UNP tidak diwajibkan. Hanya siswa yang berniat memperbaiki nilai yang diperkenankan untuk mengikuti UNP.

Prof Nizam menyebut, UNP diikuti ini oleh 88.958 dari 214.692 pendaftar atau 41% yang mendaftar ulang dengan rincian dari SMA/MA sebanyak 57.555 orang, SMK

sebanyak 31.373 orang, dan Program Paket C sebanyak 30 orang. Ujian dilaksanakan dalam bentuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan butir soal ujian yang mengacu pada kisi-kisi UN 2015/2016.

“UNP dilaksanakan dalam bentuk UNBK, selama tujuh hari dengan satu mata pelajaran yang dibagi menjadi tiga sesi,” ucap Nizam melalui pesan singkat yang diterima SP, Senin. (29/8).

Prof Nizam juga menambahkan, ada sembilan daerah yang menyelenggarakan dalam empat sesi meliputi, Kabupaten Pidie, Bireuen, dan Gayo Lues. Ketiganya ada di Provinsi Aceh. Sedangkan Kabupaten Batang Hari, Kota Padang, Kota Tual Maluku, Kabupaten Seram Barat, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong terletak di Sulawesi Tengah (Sulsel)

Dijelaskan Prof Nizam, ada yang menyelenggarakan empat hari karena ada kendala tertentu. Namun secara keseluruhan UNP dilaksanakan mulai dari 29-1 September dan 5-7 September.

Sebagaimana ketahui, peserta yang berhak mengikuti UNP adalah

siswa yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 pada mata pelajaran tertentu. Ini juga berlaku untuk mereka yang belum menempuh UN atau UN Susulan atau belum menempuh UN secara lengkap.

Kata Nizam, selama pelaksanaan UNP, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selalu melakukan pemantauan disatuan pendidikan. Tujuannya untuk memastikan UNP dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan yang ditetapkan BSNP.

Anggota BSNP Ramli Zakaria menuturkan, hasil pemantauan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ujian di masa mendatang.

Ke depan, tambah Ramli, ada wacana untuk menghilangkan istilah perbaikan, sehingga hanya ada istilah UN tahap pertama dan UN tahap kedua. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta UN lebih serius dalam mempersiapkan diri. Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional Perbaikan (SHUNP) yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP.

Maria Fatima Bona/CAH



Nilai Tidak Naik, Boleh Mengulang UNP
(Riaupos, September 2016)

JAKARTA (RIAUPUS.CO) - Sebanyak 88.958 peserta ujian nasional perbaikan (UNP) segera mengetahui hasil ujian mereka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengumumkan hasilnya Sabtu depan (17/9). Siswa bisa mengulang lagi apabila nilainya tidak naik.

UNP jilid kedua diselenggarakan Kemendikbud mulai 29 Agustus lalu. Pesertanya adalah anak-anak yang mendapatkan nilai jelek pada Ujian Nasional (Unas) 2016 lalu. Nilai jelek yang dimaksud adalah skor standar minimal kelulusan 55 poin.

Maria Fatima Bona/CAH

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Nizam menjelaskan, hasil pengumuman UNP jilid kedua ini pasti akan ditunggu peserta. “Apakah nilainya akan naik, tetap, atau justru melorot,” tuturnya saat dihubungi kemarin (12/9).

Guru besar UGM itu menjelaskan, skoring sudah selesai dilaksanakan. Namun, Kemendikbud belum bisa membeberkannya. Rencananya hasil secara umum UNP dipaparkan Jumat (16/9). Nizam memprediksi, jumlah siswa yang mendapatkan perbaikan nilai lebih banyak dibandingkan UNP jilid satu.

Tahun lalu jumlah peserta UNP jilid satu mencapai 18 ribuan orang. Dari jumlah itu, peserta yang nilainya membaik ada 800-an anak. Peserta yang lain nilainya turun atau tetap. Perkiraan Kemendikbud saat itu, banyak peserta yang sekedar coba-coba dan tidak belajar jelang pelaksanaan UNP.

Sementara, untuk UNP jilid kedua, Nizam optimistis banyak siswa yang mempersiapkan diri dengan baik. Jika nanti ada siswa yang nilainya turun dibandingkan nilai UN 2016, boleh ikut UNP kembali. “Tentunya UNP serentak yang ketiga nanti. Bukan UNP sendiri,” tuturnya.

Kesempatan ikut UNP kembali jika nilainya tidak terkontrol, menurut Nizam adalah kebijakan baru.

UNP jilid ketiga dilaksanakan tahun depan. Tepatnya setelah penyelenggaraan UN 2017. Menurut Nizam UNP tetap dilaksanakan meskipun ada yang protes. Sebab bagi dia anak-anak tetap diberi hak untuk melakukan perbaikan nilai UN. “Perkara mau ikut UNP itu hak siswa. Tidak dipaksakan,” jelasnya.

Gelombang penolakan terhadap UNP itu di antaranya disampaikan oleh Rektor UNP Rochmat Wahab. Menurutnya perbaikan nilai UN tidak signifikan fungsinya. Apalagi bagi anak-anak yang sudah terlanjur masuk perguruan tinggi. “Tidak ada perlakuan khusus kepada anak yang nilai UN-nya menjadi lebih baik,” tegas-nya.(wan/rnl)



(foto, Copyright ©2013 SMP Negeri 1 Denpasar)
SMPN 1 Denpasar Ditunjuk Sebagai Sekolah Rujukan
(Antarabali, Oktober 2016)

Denpasar (Antara Bali) - implementasi SNP dan keunggulannya kepada sekolah lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, menunjuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Denpasar, sebagai sekolah rujukan di Bali.

Sekolah yang berdiri di tengah-tengah kota Denpasar itu ditunjuk sebagai sekolah rujukan, karena memenuhi syarat dan kriteria, antara lain satuan pendidikan yang telah terakreditasi A, kata Kepala SMPN 1 Denpasar Drs.A.A.Gede. Agung Rimbya Temaja, M.Ag di ruang kerjanya, Senin.

Ia menjelaskan, Sekolah Menengah Pertama yang menyandang sebagai sekolah pavorit di Pulau Dewata itu, mengembangkan ekosistem pendidikan, budaya mutu, penumbuhkan karakter yang dapat dirujuk sebagai contoh bagi sekolah lain.

Jadi SMPN 1 Denpasar, Sekolah yang memenuhi standar Nasional Pendidikan (SNP) memiliki keunggulan dalam menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan daya saing berperan mengimbaskan

implementasi SNP dan keunggulannya kepada sekolah lain.

Agung Rimbya Temaja menjelaskan, lembaga pendidikan yang dipimpinnya sudah memenuhi SNP ditandai dengan perolehan nilai akreditasi A (sangat baik) sudah banyak lomba yang diikuti dari tingkat provinsi, nasional maupun international.

Sekolah maupun siswa penyandang juara di tingkat nasional, regional dan internasional sudah sering diterimanya, kata Agung Rembya, sambil menunjukkan sejumlah piala dan penghargaan sebagai bukti prestasinya yang berada di ruangan khusus.

Sementara keunggulan yang dimaksud terutama ekosistem pendidikan yang kondusif sudah mendapatkan peringkat satu dalam Ujian Nasional, budaya mutu dan pertumbuhan budi pekerti (karakter) selalu diterapkan dalam lingkungan sekolah.

Agung Rimbya, kepala sekolah yang dinilai sosok yang unik lagi nyentrik itu mengungkapkan SMPN 1 Denpasar siap untuk mengikuti

pelaksanaan Ujian Negara berbasis Komputer (UNBK), karena fasilitas sudah terpenuhi dan cukup memadai.

“Kami siap mengikuti UNBK tahun ini karena fasilitas sudah terpenuhi dan sekarang siswa kelas IX melaksanakan latihan UNBK, dengan komputer tersedia 100 unit, bantuan dari dinas 40 unit dan sisanya swadaya sesuai dengan kesepakatan komite,” katanya Bangga.

Agung Rembya mengatakan pengembangan sekolah rujukan dilandasi oleh semangat peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, untuk mendorong upaya sekolah memenuhi SNP guna meningkatkan dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerjasama dan pengimbasan antara sekolah rujukan dengan sekolah di sekitarnya. (* /ADT)



Mendikbud: Ujian Nasional dikaji ulang
(AntaraneWS, November 2016)

“Keputusannya nanti, kami segera umumkan apakah tahun depan masih ada UN atau tidak. Berdoa saja ya?”
Luwuk (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji, apakah ujian nasional masih diperlukan atau tidak.

“Berdoa saja ya, mudah-mudahan ...,” katanya, tanpa melanjutkan penjelasannya, saat mengunjungi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu.

Saat berkunjung secara mendadak itu, menteri yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhadi dan Bupati Banggai Herwin Yatim itu, Muhadjir langsung memasuki sejumlah ruangan untuk berdialog dengan para siswa.

Saat berada di ruang Kelas XII jurusan, seorang siswa bernama Mohamad Kaharuddin tiba-tiba mengancungkan tangan dan meminta kesempatan untuk bertanya kepada Mendikbud yang sudah mengambil posisi untuk keluar kelas.

“Mohon maaf Pak Menteri, boleh saya bertanya,” ujar Kaharuddin tanpa malu-malu, dan langsung dipersilahkan Mendikbud untuk mengajukan pertanyaan.

“Pak Menteri, apakah ujian nasional itu masih akan dilakukan? Apakah UN tidak menghambur-hamburkan dana saja,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan para siswa dan guru. “Lha, menurut kamu bagaimana?,” kata Muhadjir, balik bertanya.

“Menurut saya Pak, UN tidak perlu lagi. Dihapus saja, karena kalau UN itu siswa pasti meniru-niru temannya. Maksudnya, menyontek. Jadi, UN buang-buang dana saja,” katanya tegas, dan disambut tepuk

tangan riuh para siswa. “Siapa yang suruh kamu bertanya seperti itu?” kata Mendikbud Muhadjir, kembali bertanya sambil tersenyum. “Tidak ada Pak. Ini ide saya sendiri,” ujar Kaharuddin.

“Kalau begitu, saya mau kasih hadiah sama kamu,” kata Muhadjir, sambil mencabut dompetnya dan menyerahkan selebar uang kertas. Para siswa pun menyambut pekik riang. Mendikbud Muhadjir kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan UN sedang dalam pengkajian ulang.

“Keputusannya nanti, kami segera umumkan apakah tahun depan masih ada UN atau tidak. Berdoa saja ya? Mudah-mudahan ...” ujarnya.

Ketika ada pertanyaan Firra Palesa, siswi di kelas yang sama, mengenai bagaimana meningkatkan prestasi siswa? Muhadjir mengatakan bahwa ke masa depan para guru diwajibkan untuk berada di kelas selama delapan jam sehari atau minimal 40 jam seminggu agar siswa betul-betul maksimal dalam belajar.

“Dengan belajar delapan jam sehari di kelas, maka pada hari Sabtu akan

diliburkan sehingga waktu hari Sabtu dan Minggu itu bisa digunakan anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga,” ujarnya, dan lagi-lagi disambut sorak-sorai para siswa dan guru.

Sebelum meninggalkan ruang kelas tersebut, Muhadjir juga memberikan hadiah uang kepada Firra Palesa atas keberaniannya mengajukan pertanyaan kepadanya. Di semua kelas yang dikunjungi, Mendikbud mengecek siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sejumlah siswa yang ditemui mengaku sudah menerima KIP, namun sampai saat ini belum bisa mencairkan uangnya dan belum tahu bagaimana mencairkan dananya.

“Saya minta KIP kalian dikumpulkan kepada kepala sekolah yang akan melaporkannya ke Jakarta, agar bisa diatur pencairannya melalui Bank Rakyat Indonesia,” ujar Mendikbud.

Para siswa penerima KIP di tingkat SMU/SMK akan mendapat bantuan pendidikan senilai Rp1 juta per tahun untuk meringankan beban siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pengadaan

buku tulis dan buku pelajaran serta pembelian pakaian seragam.

Selama dua hari di Luwuk, Mendikbud mengunjungi sejumlah sekolah, antara lain SD Cokroaminoto, Kompleks Pendidikan Muhammadiyah, Kompleks Pendidikan Gereja Kristen Luwuk Banggai, dan Sekolah luar Biasa (SL B) Luwuk.

Muhadjir Effendy dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah juga melantik rektor dan wakil rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk dan memberikan orasi ilmiah pada wisuda sarjana ke-14 Unismuh Luwuk yang diikuti 471 wisudawan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, FISIP, Ekonomi, Hukum, Teknik, Pertanian dan Fakultas Perikanan.

Mendikbud Muhadjir kepada ANTARA News mengatakan bahwa pendidikan di Kabupaten Banggai masih perlu pembenahan dalam banyak hal, baik dari segi sarana dan prasarana.

Tetapi, ia menegaskan, yang paling penting adalah peningkatan kualitas guru, agar mereka bisa kembali bekerja sebagaimana seharusnya.

“Profesionalisme guru di sini harus ditingkatkan,” demikian Muhadjir Effendy.



Mendikbud Tawarkan Tiga Opsi Perbaikan Ujian Nasional
(Harianterbit, Desember 2016)

Jakarta, HanTer - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan tiga opsi terkait UN, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Khusus untuk opsi ketiga, UN untuk tingkat SMA dan sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP dan sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Namun, ketiga opsi yang ditawarkan Mendikbud kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih harus dibahas dalam rapat kabinet terbatas, sebelum diputuskan pemerintah.

“Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden,” kata Muhadjir.

Mendikbud beralasan moratorium UN karena saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

Sedangkan negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah.

Rencana moratorium tersebut juga menyesuaikan dengan peralihan kewenangan pengelolaan sekolah menjadi milik pemerintah daerah.

“Jadi nanti untuk evaluasi nasional itu, SMA/SMK serahkan ke provinsi masing-masing, untuk SD dan SMP

diserahkan ke kabupaten atau kota,” ucap Mendikbud.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menolak atau tidak menyetujui usulan moratorium Ujian Nasional (UN). Penolakan tersebut dengan alasan UN masih dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk pemerataan pendidikan.

“Usulan moratorium itu tidak disetujui tapi diminta kaji ulang. Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah,” kata Wapres di Jakarta, Rabu (7/12/2016) menanggapi hasil sidang paripurna terkait UN.

Menurut dia, UN perlu dievaluasi dan menjadi pembanding dengan negara lain karena hampir semua negara di Asia menerapkan sistem UN seperti China, Korea dan India.

“Jadi usulan tadi tidak diterima tapi dikaji lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutunya,” tambah Wapres.

954 Sekolah Ikuti UN Berbasis Komputer

SEBANYAK 400 kabupaten/kota di 34 provinsi siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ini. Menurut Kapuspendik Kemendikbud Nizam, kemarin, jumlah daerah yang mengikuti UNBK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang diikuti 554 sekolah di 24 provinsi seluruh Tanah Air. "Tahun ini ada tambahan sekitar 400 sekolah yang akan mengikuti UNBK pada," ujarnya.

Nizam mengingatkan Kemendikbud tidak memaksakan sekolah untuk mengadakan perlengkapan komputer demi pelaksanaan ujian tersebut. Sekolah, katanya, hanya perlu memaksimalkan peralatan yang ada di tempatnya. "Misalnya, anak SMP bisa mengikuti ujian di SMA atau SMK jika fasilitasnya belum ada, tidak perlu masing-masing punya," katanya. Uji coba soal UN telah dilakukan sekali pada pekan pertama Januari ini. Uji coba selanjutnya direncanakan dilakukan pada awal Februari mendatang. UN SMA/ sederajat akan dilaksanakan pada 4 April dan SMP/ sederajat pada 7 Mei 2016. (Bay/H-1)

Media Indonesia
Januari 2016

Sumatera Express
Februari 2016



UJI COBA/ Sejumlah siswa SMA usai uji coba Ujian Nasional berbasis komputer, belum lama ini. Kemendikbud menyatakan UNBK gratis alias tidak ada pungutan apa pun.

UN Berbasis Komputer Gratis

PELAKSANAAN ujian nasional berbasis komputer (UNBK) gratis. Untuk menghindari adanya pungutan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melayangkan Surat Edaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Nomor 1356/H/2016 tertanggal 5 Februari 2016.

"Si ini dibuat karena laporan ke Kemendikbud tentang adanya pungutan yang dibebankan kepada orangtua siswa dengan alasan untuk

menyewa atau membeli komputer untuk mengikuti UNBK," kata Kabiditbang Kemendikbud Totok Suprayitno dalam SE-nya.

Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala sekolah pelaksana UN, dan orangtua dan siswa peserta UN seluruh Indonesia.

Adapun isi SE tersebut adalah: Pertama, UNBK harus diselenggarakan pada sekolah yang sudah siap baik dari

segi infrastruktur maupun SDM per November 2015. Infrastruktur sejauh mungkin memisahkan laboratorium komputer yang ada di sekolah.

Kedua, sekolah calon penyelenggara UNBK dilarang memberatkan dan/atau membebani pihak-pihak selain sekolah (termasuk membebani orangtua siswa dengan pungutan dan tenaganya) untuk membeli dan/atau menyewa komputer dari kepentingan pelaksanaan UNBK.

Ketiga, bagi sekolah yang terbukti melanggar ketentuan ini akan dikeluarkan dari daftar sekolah pelaksana UNBK pada tahun 2016 dan harus melaksanakan UN berbasis kertas dan penulisan (UNKP).

Keempat, Sekolah yang tidak bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan BSNP Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2015/2016 harus mengundurkan diri

dari UNBK dan mengikuti UN berbasis kertas dan penulisan dengan batas waktu pengunduran diri tanggal 15 Februari 2016.

Kelima, pihak manapun yang mememakan pemaksaan pelaksanaan UNBK harap melaporkan secara tertulis kepada Pusat Penilaian Pendidikan, Kemendikbud, melalui e-mail, surat, atau SMS. E-mail: cht.puspendik@kemendikbud.go.id dan pengaduan@kemendikbud.go.id. Telepon: 021-5729011. (evy/jpm)

Listrik Diminta tidak Diputus

Jika listrik dipadamkan, persiapan siswa dan pelaksanaan UN terutama UNBK akan terganggu.

RENDY FERDIANSYAH

JELANG ujian nasional (UN) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MS. Gubernur Bangka Belitung Rustam Efendi meminta PLN untuk tidak memadamkan listrik. Ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA akan berlangsung pada 4-6 April 2016. Sementara itu, UN tingkat SMP/MS, 9-12 Mei 2016.

Permintaan yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Indramayu, Jawa Barat, Kasno Hadikusumo.

"Janganlah dimatikan listriknya kasihan siswa yang UN dengan komputer, kan terganggu," ucap Rustam, kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Bangka Belitung M Saleh juga berharap demikian. Saleh berharap saat pelaksanaan UNBK di 50 sekolah yang tersebar di Provinsi Bangka Belitung, pihak PLN tidak melakukan pemadaman listrik sebab itu akan mengganggu proses UNBK.

"Kita harap PLN tidak mematikan aliran listrik sehingga UNBK dapat berjalan lancar," pintanya.

Kepala Disedik Indramayu Kasno Hadikusumo sudah menyurati PLN, kemarin. "Kami sudah membuat surat permohonan ke PLN," kata Kasno. Isi surat tersebut ialah permohonan kepada PLN agar saat pelaksanaan UN nanti tidak ada gangguan atau pemadaman sambungan listrik.

Di Kabupaten Indramayu, terdapat 23 sekolah yang siap

melaksanakan UNBK. Sekolah itu terdiri dari tingkat SMA, SMK, MA, dan MS.

Untuk tingkat SMA, dari 49 SMA yang ikut UN, hanya ada tiga sekolah yang melaksanakan UNBK.

Sementara itu, untuk SMK, dari 100 SMK yang ikut UN, yang menyelenggarakan UNBK ada 18 sekolah. Lalu MA, yang siap melaksanakan UNBK hanya satu, yaitu MA Alzaytun. Sementara itu SMP/MS yang siap menyelenggarakan UNBK hanya MS Negeri Lohbener.

Di Indramayu, terdapat 5.033 siswa SMA dan 10.610 siswa SMK yang akan mengikuti UN. Sementara itu, di tingkat SMP, ada 19.947 siswa yang siap melaksanakan UN.

Persiapan rampung

Kepala Pusat Penelitian Pendidikan (Kapuspemdik), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Nizam mengungkapkan bahwa persiapan menuju UN yang berlangsung pada 4-6

April untuk UN kertas dan pensil jenjang SMA dan sederajat sudah 100%.

Demikian juga dengan naskah UN bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus. "Untuk UNBK juga alhamdulillah sudah siap semua," ungkapnya saat dihubungi, kemarin.

Pengiriman naskah UN ke daerah pedalaman yang sulit dijangkau, lanjutnya, sudah siap di ibu kota kabupaten. Namun, untuk wilayah Jabodetabek, pendistribusian soal-soal UN ke berbagai sekolah akan dilakukan satu hari sebelum ujian berlangsung.

Ia pun mendorong para siswa agar tidak tergoda untuk melakukan kecurangan dengan menerima tawaran dan mencari-cari kunci jawaban.

"Jadilah pemenang, sukses karena belajar sungguh-sungguh bukan karena sontekan. Prestasi penting, tapi jujur pun harus," tegasnya. (UL/Mit/H-2)

rendy
@mediaindonesia.com

Hilangkan Budaya Mencontek UN SMP Diharapkan Lebih Berintegritas

Renon, DenPost

Memperoleh indeks integritas tinggi dalam hal penyelenggaraan ujian nasional (UN) merupakan bagian dari kebanggaan sekolah. Karena itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Daryanto, mengingatkan agar kepala SMP sederajat di Bali melakukan persiapan pelaksanaan UN dengan baik, melaksanakan UN berintegritas, jauh dari kecurangan. UN tingkat SMP sederajat akan dilaksanakan pada 9 sampai 12 Mei 2016.

"Seluruh sekolah agar menerapkan kejujuran dalam pelaksanaan UN. Buat apa nilai UN tinggi tapi integritasnya rendah karena budaya menyontek tinggi. Yang bagus itu nilai UN dan indeks integritas UN-nya tinggi," ujar Daryanto saat acara koordinasi pengawasan UN SMP sederajat Kamis (28/4) kemarin.

Acara koordinasi pengawasan UN SMP sederajat di LPMP Provinsi Bali tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani; Kepala LPMP Provinsi Bali, Made Ait Mariana dan kepala SMP se-Kota Denpasar dan Badung.

Daryanto menegaskan UN tetap digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang sekolah selanjutnya, meski tidak menjadi penentu kelulusan. Guru diimbau agar tidak menakut-nakuti siswa dalam pelaksanaan UN, namun menciptakan suasana yang ceria dan kondusif dalam menyambut UN.

Menurut Daryanto, selama UN berlangsung diperkirakan akan beredar bermacam kunci jawaban yang dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan mendapat keuntungan. Untuk itu siswa diimbau tidak tergiur dengan penyebaran kunci jawaban yang justru menyesatkan.

Para orangtua juga diminta memotivasi putra-putrinya untuk belajar menghadapi UN dengan penuh kejujuran. "Kunci itu dijual untuk mendapat keuntungan. Kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siswa harus percaya dengan kemampuannya dan orangtua harus mendorong," katanya.

Daryanto juga mengimbau siswa SMP sederajat peserta UN tak perlu khawatir berlebihan menjalani UN yang kini tak lagi menentukan kelulusan. Manfaatkan UN ini sebagai kesempatan bercermin tentang apa yang sudah diraih dan apa yang akan dilakukan ke depan.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani, mengatakan UN bukan lagi penentu kelulusan, sehingga jangan lagi dianggap sebagai momok. Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan UN tahun ini adalah terselenggaranya UN yang berintegritas.

"Penentu kelulusan itu nilai dari sekolah masing-masing sesuai indikator yang ditetapkan. Yang harus dicapai tahun ini adalah UN berintegritas. Hasil UN harus setara dengan nilai integritasnya. Jangan sampai hasil UN rata-rata tinggi, namun ternyata hasil mencontek. Berarti integritas sekolah bisa tergolong rendah," katanya.

Wardhani menambahkan, untuk menentukan integritas pelaksanaan UN di sekolah, akan dilakukan analisa serta penilaian dari hasil jawaban siswa oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Selain itu juga penilaian terhadap laporan pelaksanaan UN di masing-masing satuan. Hasil penilaian akan menentukan indeks integritas sekolah masing-masing dan diumumkan secara terbuka.

"Penilaian integritas ini menuntut semua pihak melaksanakan UN dengan jujur. Tidak hanya siswa, pengawas, hingga petugas penjaga naskah soal," tegasnya. (123)

Denpost
April 2016

Kemendikbud Usut Kebocoran Soal UN SMP

Peserta yang membawa kunci jawaban yang diduga cocok baru akan diminta keterangan setelah UN pensil dan kertas (PBT) berakhir hari ini.

SYARIEF OEBADILLAH

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjanji akan mendalami laporan kebocoran soal dan kecurangan pada ujian nasional (UN) pensil dan kertas (PBT) SMP/MS yang dilaporkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Kemendikbud, Daryanto, kemarin.

Menurutnya, Inspektur Jenderal Kemendikbud telah menerima 23 laporan pengaduan terkait dengan adanya kebocoran atau kecurangan UN. "Kami akan tindak lanjut laporan itu dengan saksama dan komprehensif," ujarnya.

"Kami juga akan mendalami laporan FSGI tersebut."

Pada hari ketiga UN SMP/MS, Sekjen FSGI Retno Lisyarti bersama pengurus Serikat Guru Indonesia (Segi) Heru Purnomo melaporkan adanya pengaduan yang dite-

rima Posko FSGI oleh seorang guru pengawas di Jakarta. Guru itu menemukan kunci jawaban dari seorang peserta yang diawasinya. Menurut rekan guru pengawas, yang kebetulan guru bahasa Inggris, kunci jawaban tersebut dinyatakan cocok.

Siswa yang membawa kunci jawaban hingga tadi malam belum diminta keterangan. "Kami ingin siswa itu menuntaskan dulu UN SMP-nya karena ia juga korban oknum pembocor UN," cetus Retno.

Heru menambahkan FSGI telah memfoto soal dan kunci jawaban tersebut yang isinya memang tepat. Ini UN PBT bahasa Inggris SMP. Kami Kamis ini (hari ini) akan melaporkan seluruh pemantauan ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud agar bisa ditindaklanjuti.

Selain itu, FSGI menerima laporan guru bahasa Inggris di Jakarta yang menilai banyak kosakata sulit dalam

soal UN bahasa Inggris SMP 2016. Hal itu, menurut Heru, membuat para siswa kesulitan memahami arti kata tersebut dalam kalimat soal.

Indeks integritas tertinggi

Daerah Istimewa Yogyakarta kembali meraih peringkat indeks integritas ujian nasional (IUN) rerata sekolah tertinggi 2016.

Untuk tingkat SMA pada kelompok IPA, Yogyakarta menempati posisi pertama dengan rerata IUN 78,36. Untuk SMA di kelompok IPS, Yogyakarta juga menempati peringkat pertama dengan rerata IUN 78,21.

"Dengan prestasi IUN ini Yogyakarta telah memiliki ekosistem pendidikan yang baik dan pantas menjadi contoh provinsi lain," kata Mendikbud Anies Baswedan pada konferensi pers di Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Anies didampingi Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin Hasibuan dan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan

(Kapuspendik) Nizam.

Menurut Anies, contoh ekosistem pendidikan yang telah berjalan baik juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. "Untuk wilayah kota dan kabupaten yang mempunyai IUN tinggi, nanti akan kami sampaikan berikutnya."

Di kelompok IPA, setelah Di Yogyakarta, Provinsi Bangka Belitung menempati posisi kedua dengan IUN 76,69, selanjutnya Banten (73,39), Kalimantan Timur (73,23), DKI Jakarta (73,18), Jawa Barat (72,88), Kepulauan Riau (72,29), Bengkulu (71,84), Jawa Tengah (71,06), dan Kalimantan Utara (70,23).

Untuk kelompok IPS, setelah Di Yogyakarta dengan IUN 78,21, diikuti Bangka Belitung (76,82), DKI Jakarta (76,02), Bengkulu (74,69), Kep-ri (73,48), Kaltim (73,26), Banten (73,16), Gorontalo (72,00), Jawa Barat (71,98), dan Kaltara (71,01). (Tim Media/H-2)

oebay
@mediaindonesia.com

Media Indonesia
Mei 2016

Media Indonesia
Juni 2016

Nilai UN Turun, Rerata IIUN Naik

Pemerintah memerlukan pemetaan riil peta kompetensi pendidikan di tingkat SLTP untuk dapat menentukan arah pengajaran yang ideal.

PUPUT MUTIARA

HASIL penilaian indeks integritas ujian nasional (IUN) SMP/MTs tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah yang mendapat rerata nilai IUN di atas 80 sebanyak 23.634 sekolah (44,03%) dari tahun lalu hanya 12.039 sekolah (23,44%).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menjelaskan hasil tersebut dan menyatakan

kegembiraannya karena sekolah yang sudah jujur di 2015 makin terlihat pada 2016, meski kecenderungannya ialah integritas tinggi seiring dengan nilai UN rendah.

"Kenaikan IUN berarti hasil UN-nya semakin jujur. Harapannya tentu bisa lebih tepat digunakan untuk memetakan capaian pendidikan agar matanya semakin baik," ujar Anies dalam jumpa pers hasil UN SMP di Kantor Kemendikbud, kemarin.

Apalagi, lanjut Anies, secara keseluruhan ada 72% sekolah yang mengalami peningkatan nilai IUN. Jumlah itu termasuk di antaranya 1,8% SMP/MTs yang baru mengikuti UN berbasis komputer (UNBK) mulai tahun ini.

Sekolah dengan sistem UN kertas pensil (UNKP) di 2015 yang memiliki kesungguhan meningkatkan kejujuran dan memperbaiki diri juga patut diapresiasi. Tercatat, tahun ini sebanyak 10.078 sekolah UNKP yang mendapatkan nilai IUN di atas 80.

Memang diakui masih ada 41,92% siswa yang belum mencapai standar sesuai ketetapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yakni nilai minimal 55. Berata nilai UN juga cenderung terkoreksi turun 1,5 hingga 4 poin. "Nilai terkoreksi itu juga lantaran kita sudah memodifikasi desain UN agar dapat memotret lebih banyak kemampuan *high order of thinking* sesuai kebutuhan abad ke-21," terang dia.

Pantauan dari lapangan, hasil UN di Provinsi Bangka Belitung merosot cukup tajam seperti yang diakui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, M Soleh, kemarin. "Hasil perhitungan nilai UN di tingkat provinsi hanya mendapatkan nilai 51,27. Artinya kalau di kategorikan, masuk kategori kurang yakni di bawah 55," ujar dia.

Kemampuan nalar

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam menjelaskan nilai terkoreksi meliputi semua mata

pelajaran. Bahasa Indonesia paling sedikit terkoreksi (0,31), sebaliknya matematika terkoreksi paling besar (6,04). "Dengan *high order of thinking* itu matematika memang yang paling terasa, dari tahun ke tahun turun."

Di masa mendatang, lanjut Nizam, soal UN akan lebih dititikberatkan pada kemampuan penalaran dan analisis. Pun, bisa diterapkan pada proses pembelajaran di sekolah agar siswa mampu berkompetisi.

Ketua BSNP Zainal A Hasibuan menegaskan penilaian IUN juga nantinya akan diterapkan untuk kegiatan riil lain di dunia pendidikan termasuk mempertajam standar yang selama ini dirumuskan. "Soal-soal penalaran itu dibutuhkan, *critical thinking*, sehingga umpan balik dari UN benar-benar mencerminkan peningkatan kemampuan siswa," tukasnya. (RF/AT/H-1)

puputmutiara
@mediaindonesia.com

Koran Sindo
Juli 2016

WALIKOTA SIBOLGA SYARFI HUTAURUK

Ciptakan Generasi Unggul untuk Masa Depan Sibolga

Menyiapkan generasi yang unggul dan tangguh melalui program penciptaan siswa-siswi berprestasi untuk menjadi sarjana-sarjana tangguh, berilmu, dan berpengetahuan tinggi merupakan salah satu program inovatif Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk. Program inovatif ini sebagai upaya mengubah Kota Sibolga semakin baik ke depannya.

Program ini dimulai di tahun 2011, saat pertama kali dilaksanakan. Saat itu, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk meluncurkan program ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sibolga. Melalui program ini, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk berharap dapat menciptakan generasi yang unggul dan tangguh untuk masa depan Kota Sibolga.

Program ini dilaksanakan melalui program penciptaan siswa-siswi berprestasi untuk menjadi sarjana-sarjana tangguh, berilmu, dan berpengetahuan tinggi. Program ini dilaksanakan melalui program penciptaan siswa-siswi berprestasi untuk menjadi sarjana-sarjana tangguh, berilmu, dan berpengetahuan tinggi.



Syarfi Hutaeruk
WALIKOTA SIBOLGA

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk, S.Pd., memberikan sambutan. Salah satu sambutan disampaikan oleh Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk, S.Pd., saat pembukaan acara ini di Gedung Pertemuan PTN, Senin (29/8/2015).

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk, S.Pd., memberikan sambutan. Salah satu sambutan disampaikan oleh Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk, S.Pd., saat pembukaan acara ini di Gedung Pertemuan PTN, Senin (29/8/2015).

Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk, S.Pd., memberikan sambutan. Salah satu sambutan disampaikan oleh Wali Kota Sibolga Syarfi Hutaeruk, S.Pd., saat pembukaan acara ini di Gedung Pertemuan PTN, Senin (29/8/2015).

Suara Pembaruan
Agustus 2016

UN Perbaikan Diikuti 88.958 Siswa

[JAKARTA] Ujian Nasional Perbaikan (UNP) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) diselenggarakan kemarin, Senin (29/8). Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kapusendik Kemdikbud), Prof Nizam, mengatakan, UNP tidak diwajibkan, hanya diselenggarakan bagi siswa yang berniat memperbaiki nilai.

Prof Nizam menyebut, UNP diikuti oleh 88.958 dari 214.692 pendaftar atau 41% yang mendaftar ulang, dengan rincian dari SMA/MA sebanyak 57.555 orang, SMK sebanyak 31.373 orang, dan Program Paket C sebanyak 30 orang. Semua dilaksanakan dalam bentuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan ngacu pada kisi-kisi UN 2015/2016.

"UNP dilaksanakan dalam bentuk UNBK selama tujuh hari dengan satu mata pelajaran yang dibagi menja-

lenggarakan empat hari karena ada kendala tertentu. Namun secara keseluruhan UNP dilaksanakan mulai dari 29 Agustus-1 September dan 5-7 September.

Sebagaimana diketahui, peserta yang berhak mengikuti UNP adalah siswa yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 pada mata pelajaran tertentu serta mereka yang belum menempuh UN atau UN Susulan, atau belum menempuh UN secara lengkap.

Kata Nizam, selama pelaksanaan UNP, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selalu melakukan pemantauan di satuan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan UNP dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan yang ditetapkan BSNP.

Anggota BSNP Ramli Zakaria menuturkan, hasil pemantauan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ujian di masa mendatang.

di tiga sesi," ucap Nizam melalui pesan singkat yang diterima SP, Senin (29/8).

Prof Nizam juga menambahkan, ada sembilan kabupaten yang menyelenggarakan dalam empat sesi meliputi, Kabupaten Pidie, Bireuen, Gayo Lues, Batang Hari, Kota Padang, Kota Tul Maluku, Kabupaten Seram Barat, Kota Palu, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Dijelaskan Prof Nizam, ada wilayah yang menye-

Ke depan, tambah Ramli, ada wacana untuk menghilangkan istilah perbaikan, sehingga hanya ada istilah UN tahap pertama dan UN tahap kedua. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta UN lebih serius dalam mempersiapkan diri.

Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional Perbaikan (SHUNP) yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP. [FAT/D-10]

Jawa Pos
September 2016

PENDIDIKAN

Nilai Tidak Naik, Boleh Mengulang UNP

JAKARTA – Sebanyak 88.958 peserta ujian nasional perbaikan (UNP) segera mengetahui hasil ujian mereka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan hasilnya Sabtu mendatang (17/9). Siswa bisa mengulang lagi apabila nilainya tidak naik.

UNP jilid kedua diselenggarakan Kemendikbud mulai 29 Agustus lalu. Pesertanya adalah anak-anak yang mendapat nilai jelek pada Ujian Nasional (Unas) 2016 lalu. Nilai jelek yang dimaksud adalah skor standar minimal kelulusan 55 poin.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Nizam menjelaskan, pengumuman hasil UNP jilid kedua itu pasti ditunggu peserta. "Apakah nilai mereka akan naik, tetap, atau justru melorot," tuturnya saat dihubungi kemarin (12/9).

Guru besar UGM itu menjelaskan, skoring sudah selesai dilaksanakan. Namun, Kemendikbud belum bisa membeberkannya. Rencananya, hasil UNP secara umum dipaparkan Jumat (16/9). Nizam memprediksi, jumlah siswa yang mendapat perbaikan nilai lebih banyak jika dibandingkan dengan UNP jilid pertama.

Tahun lalu peserta UNP jilid pertama mencapai 18 ribu orang. Di antara jumlah itu, peserta yang nilainya membaik sekitar 800 anak. Nilai peserta yang lain turun atau tetap. Kemendikbud saat itu memperkirakan, banyak peserta yang sekadar coba-coba dan tidak belajar menjelang pelaksanaan UNP. (wan/ang)

Radar Surabaya
Oktober 2016

Kemendikbud Tunjuk Lima SMA di Surabaya Jadi Rujukan Nasional

SURABAYA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjuk lima Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya sebagai sekolah rujukan. Kelima sekolah itu adalah SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, SMA Muhammadiyah 2, SMA Al Hikmah dan SMA Khadijah. Sekolah rujukan ini akan dijadikan sekolah percon-

tohan oleh sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.

"Ada beberapa kriteria yang menjadikan kelima sekolah itu masuk jadi sekolah rujukan. Di Indonesia targetnya ada 1.100 sekolah, saat ini ada lima dari Surabaya," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, M.Ikhsan usai kegiatan Kongres Pelajar Surabaya di

Balai Pemuda, Senin (24/10).

Salah satu kriteria yang sudah ditentukan adalah penerapan kurikulum 2013 (K-13), menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hasil Ujian Nasional (UN) di atas rata-rata nasional, integritas dalam lima tahun terakhir rata-rata hasil ujian nasionalnya baik.

"Apabila syarat yang dite-

apkan untuk sekolah negeri yang menjadi sekolah rujukan adalah yang dulunya Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), semua sekolah kawasan di Surabaya bisa jadi sekolah rujukan," kata Ikhsan. Konsep sekolah rujukan ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu ini dilakukan di

bidang akademik maupun non akademik.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Surabaya, Kasnoko mengatakan Kemendikbud akan memberikan dana Rp 200 juta kepada sekolah rujukan.

"Kami sekolah rujukan harus mengikuti pro-program pemerintah secara nasional," kata Kasnoko. (han/rif)

Kajian Moratorium UN Tuntas

● UMI NUR FADHILAH

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan moratorium ujian nasional (UN) di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai, selama ini fungsi UN hanya sebagai pemetaan, bukan kelulusan. Sehingga, menurutnya tidak perlu dilaksanakan setiap tahun.

"(Moratorium UN) sudah tuntas kajiannya. Kita rencana moratorium sudah diajukan ke Presiden Jokowi (Joko Widodo), tinggal tunggu persetujuan presiden," kata Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (24/11).

Muhadjir mempertimbangkan, Kemendikbud ingin mengembalikan kebijakan evaluasi murid, menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif. "Negara cukup mengawasi saja. Membuat regulasi dan mengawasi. Bagaimana supaya standar nasional," ujar dia.

Namun, Muhadjir mengatakan, pemerintah tetap menerapkan standar nasional kelulusan tiap-tiap sekolah provinsi, kabupaten/kota. Kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan adanya peralihan kewenangan SMA/SMK pada pemerintah provinsi.

"Artinya, untuk evaluasi nasional, untuk SMA/SMK diserahkan ke provinsi masing-masing. Sedangkan, untuk SD dan SMP, kita serahkan ke kabupaten/kota," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Disinggung masalah kredibilitas guru dalam memberikan penilaian kelulusan, Mendikbud meminta semua pihak berpikir positif. "Guru jangan dikit-dikit dicurigai, jangan dianggap *nggak* mampu, nanti secara psikologis *nggak* bagus," kata dia.

Muhadjir menjabarkan, berdasarkan pemetaan hasil UN, hanya 30 persen sekolah yang berada di atas standar nasional. Pemerintah, kemudian akan membenahi 70 persen sekolah yang berada di bawah standar nasional.

"Yang 70 persen akan kita beri *treatment* (pembenahan), kita dongkrak bagaimana caranya agar melampaui standar nasional secara bertahap. Kita mulai dari yang paling bawah," ujar dia.

Pembenahan sekolah akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk kualitas guru dan lain-lain. Bahkan, ia mengatakan, pembenahan juga dihubungkan dengan revitalisasi sekolah. Pemerintah akan menggunakan anggaran UN untuk revitalisasi dan pembenahan kualitas sekolah. "Pembenahan fisik, kurikulum, dan lingkungan. Yang dimoratorium seluruh Indonesia (bukan hanya yang 70 persen)," ujar dia.

Ia belum menyebut sampai kapan batas waktu moratorium tersebut. Namun, moratorium akan berlaku mulai 2017. Pun ia menyebut, pemerintah belum menentukan berapa tahun sekali waktu pelaksanaan UN. "(Berlaku) tahun 2017, ini masih mengajukan ke presiden karena harus ada Inpres," ujarnya.

■ ed: hafidz muftisany



Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

UN Dinilai Masih Diperlukan

Pemerintah Akan Segera Mengevaluasi Ujian Nasional

Kompas
Desember 2016

JAKARTA, KOMPAS — Ujian nasional dinilai masih diperlukan untuk dijadikan acuan dalam perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Karirsa itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mempertahankan pelaksanaan ujian nasional di sekolah. Meski demikian, pemerintah berjanji untuk memperbaiki kualitas ujian nasional.

Berita moratorium ujian nasional (UN) yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilulus dalam sidang kabinet, Rabu (23/11), di Istana Presiden, Jakarta. Sidang yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu memutuskan untuk menunda pelaksanaan moratorium.

Sebelum sidang Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan, UN tetap dilaksanakan, tetapi pemerintah akan segera mengevaluasi pelaksanaannya. "Moratorium tidak dibarengi," kata Kalla di Istana Negara, Jakarta.

Pada bulan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan ada tiga opsi yang diajukan terkait UN. Ketiga opsi itu ialah penghapusan UN, penutupan moratorium UN tahun 2017, serta menunda pelaksanaan UN kepada pemerintah daerah.

Muhadjir juga mengatakan, rencana moratorium UN diluluskan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan untuk menghapus kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia agar lebih merata sehingga

kesetaraan seperti UN masih diperlukan di sejumlah negara, terutama di Asia. UN dinilai penting untuk menjamin siswa memiliki semangat belajar. Penghapusan UN dinilai membuat semangat belajar siswa berkurang dan daya saing mereka turun.

Kalla menandatangani, Presiden Jokowi akan menugaskan tugas tersebut. Selama periode waktu itu, sekolah-sekolah siap-siaga

menjadi bagi pelaksanaan UN. Menurut Muhadjir, UN tidak lagi diperlukan, tetapi tetap berfungsi untuk memastikan kondisi pendidikan. Hal itu, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional. "Evaluasi nasional masih diperlukan kepada pemerintah daerah. Kita mau memperbaiki evaluasi sebagai tolak ukur kemampuan guru, baik secara pribadi maupun kolektif. Negara cukup mengawasinya," ucap Muhadjir (Kompas, 23 November 2016).

Jadi acuan
Menurut Kalla, usulan moratorium dinilai karena negara menganggap UN masih dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air. Hasil UN dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan dan dalam negeri.

Selain itu, UN dinilai juga menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain. "Tanpa UN, bagaimana kita tahu Indonesia berada di peringkat berapa," kata Kalla. Ia menambahkan, masih ada

UN, tetapi kelayakannya kualitas pendidikan tetap tidak merata. Rasio ini menurut Kalla sangat signifikan di negara-negara maju.

Menurut dia, siswa masih terus melakukan latihan dengan mengerjakan soal ujian yang berbasis kompetensi. Materi yang disesuaikan dengan materi ujian sekolah dan ujian nasional perguruan tinggi.

"Ada siswa tidak ada UN, pembelajaran tetap mencapai kepada standar kurikulum," ujar Muhadjir. (KOMPAS, 2016/11/23)

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Penguatan Pendidikan Karakter atau disingkat dengan PPK adalah program pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. PPK merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang juga menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Ada lima nilai utama karakter bangsa yang menjadi prioritas PPK, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. PPK berfokus pada tiga struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional, yaitu struktur program, kurikulum dan kegiatan. Dengan fokus tersebut, maka sekolah sebenarnya tidak perlu mengubah kurikulum yang sudah digunakan sebelumnya.

RINGKASAN

Terpantau ada sejumlah isu terkait topik mengenai PPK disekolah selama 2016 yang terekam media daring dan media cetak. Isu-isu tersebut misalnya imbauan Mendikbud mengantar anak pada hari pertama sekolah, wacana sekolah sepanjang hari, moratorium UN, dan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

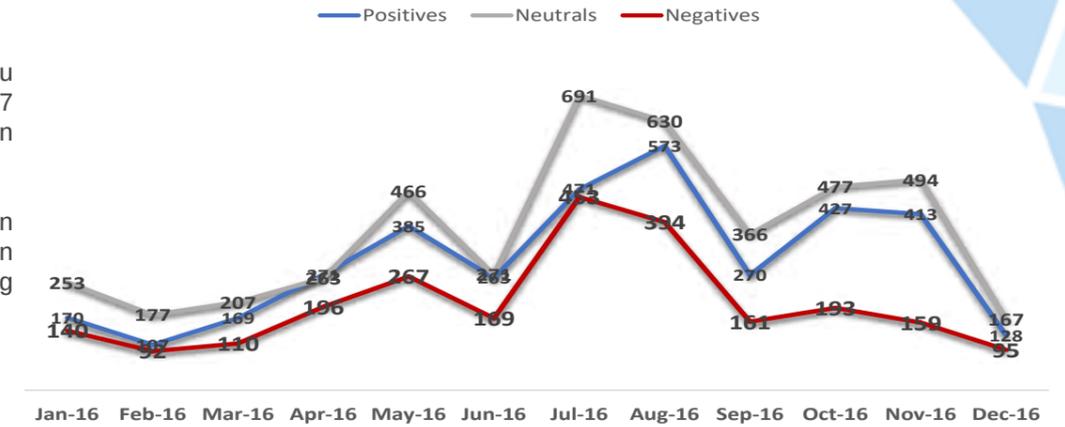
Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy selalu dalam lima influencer teratas selama tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua figur tersebut sama-sama aktif menanggapi isu seputar penguatan pendidikan karakter dalam media pemberitaan. Selain itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad juga tampak konsisten muncul dalam pemberitaan pada tahun ini. Hal tersebut berkenaan dengan keaktifannya menjawab pertanyaan seputar isu-isu pendidikan yang terjadi.

Sentimen pemberitaan pada topik ini cukup terpola. Masing-masing sentimen cenderung beringan satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan wacana yang bergulir selalu menuai pro dan kontra.

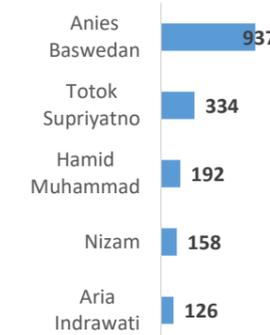
SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Sentimen yang mendominasi adalah sentimen Netral sebesar 42,34% atau 4.462 berita. Disusul dengan sentimen Positif sebesar 24,61 % atau 3.467 berita. Sedangkan sentiment Negatif terpantau cukup rendah, dengan besaran 23,05 % atau 2.429 berita.

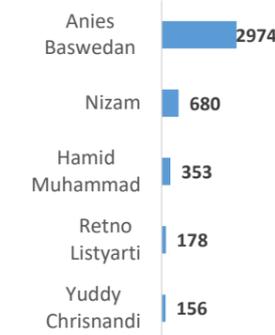
Adapun sentiment Negatif terlihat melonjak pada bulan Juli yang berkenaan dengan upaya Kemendikbud menangani praktik perploncoan dan pungutan liar dalam Masa Orientasi Siswa. Kata perploncoan dan pungutan liar yang terekam negatif dalam mesin sesungguhnya berkonten Positif.



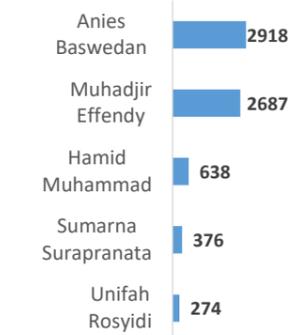
Jan-Mar



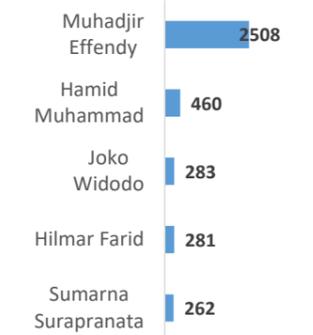
Apr-Jun



Jul-Sep



Okt-Des



Anies Baswedan terpantau sangat aktif berkomentar di periode ini. Adanya isu eksternal di luar agenda Kemendikbud, seperti muatan materi Radikalisme di buku SD & kekerasan terhadap anak, mampu ditangani dengan membuat beberapa regulasi.

Pemberitaan pada periode ini terpusat pada isu penerapan UNBK yang dilaksanakan secara berjenjang. Anies Baswedan dan Kepala Pusat Penilaian Kemendikbud Nizam terekam aktif berkomentar menangani isu tersebut

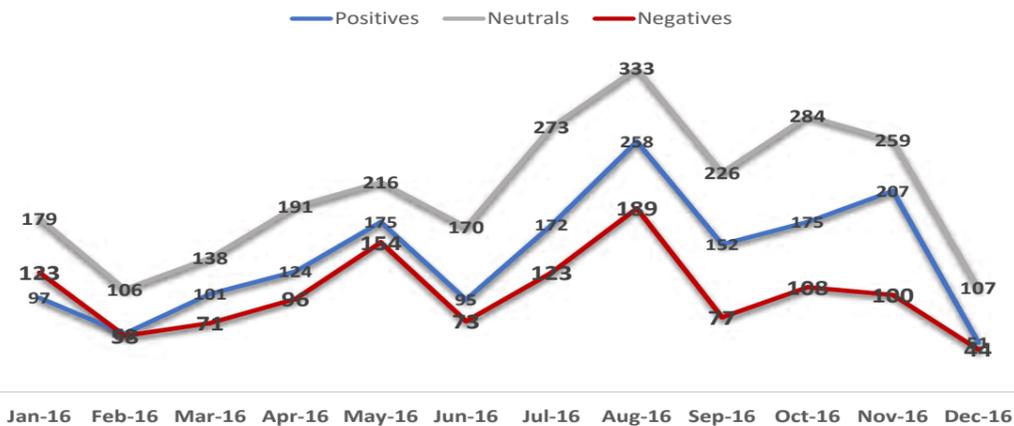
Anies Baswedan & Muhadjir Effendy memiliki ekspos pernyataan yang signifikan dibandingkan dengan figur lainnya dalam lima Influencer teratas. Kedua figur tersebut aktif memberikan pernyataan dalam peralihan Reshuffle Kabinet. Juga Menteri Muhadjir mulai banyak terekam dalam wacana Full day School.

Muhadjir Effendy kembali tercatat dalam lima influencer teratas. Isi pernyataan terkait dengan wacana Moratorium UN yang dilontarkan. Adapun pernyataan yang diberikan Presiden Jokowi adalah menyatakan tidak menyetujui wacana tersebut dan agar diuji kembali.

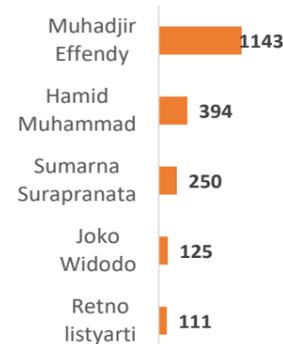
SENTIMEN (MEDIA CETAK)

Sentimen yang mendominasi adalah sentimen Netral sebesar 42,34% atau 4.462 berita. Disusul dengan sentimen Positif sebesar 24,61 % atau 3.467 berita. Sedangkan sentiment Negatif terpantau cukup rendah, dengan besaran 23,05 % atau 2.429 berita.

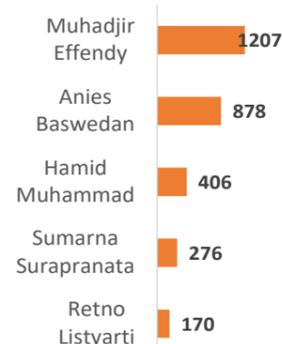
Adapun sentiment Negatif terlihat melonjak pada bulan Juli yang berkenaan dengan upaya Kemendikbud menangani praktik perploncoan dan pungutan liar dalam Masa Orientasi Siswa. Kata perploncoan dan pungutan liar yang terekam negatif dalam mesin sesungguhnya berkonten Positif.



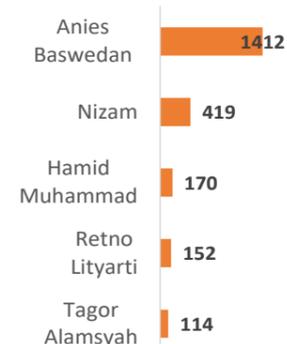
Okt-Des



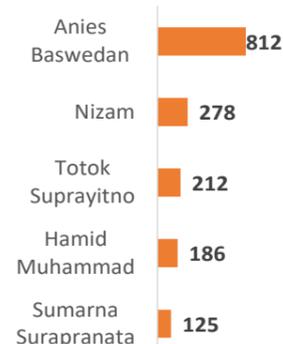
Jul-Sep



Apr-Jun



Jan-Mar



Ekspos pernyataan menteri Muhadjir kembali menduduki posisi pertama dalam lima Influencer teratas. Hasil ratas Kabinet memutuskan wacana Moratorium UN belum disetujui dan masih perlu dikaji kembali. Keberadaan Presiden Jokowi dalam Influencer turut menandakan penolakan wacana tersebut.

Pergantian Mendikbud Anies Baswedan digantikan Muhadjir Effendy cukup menaruh kedua figure tersebut daam lima Influencer teratas. Himbauan Antar Anak di Hari Pertama Sekolah cukup positif diberitakan media. Animo publik dalam pemberitaan turut memberikan tanggapan positif.

Pada periode ini pernyataan Anies Baswedan kembali paling mendapatkan sorotan media. Anies acap mengomentari pelaksanaan UNBK, Indeks integritas, serta praktik Perploncoan pada MOS. UNBK menjadi problema kala terancam lengah oleh upaya hacker. Permasalahan teknis turut serta dijumpai.

Pernyataan Anies Baswedan mendapat sorotan tertinggi.. Isu beredarnya buku bermuatan Radikalisme, Revisi Kurikulum & persiapan pelaksanaan UNBK & persiapan pelaksanaan UNBK turut menjadi isu yang dikomentari oleh figur internal Kemendikbud lainnya dalam lima influencer teratas ini.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu
Januari	1. Buku SD Bermuatan Radikal 2. Revisi Buku Kurikulum 2013
Februari	1. UNBK
Maret	1. UNBK
April	1. UNBK
Mei	1. UNBK 2. Nilai UN SMA Menurun
Juni	1. Nilai UN SMP Menurun
Juli	1. Himbauan Antar Anak Hari Pertama Sekolah 2. Pelantikan Muhadjir Effendy
Agustus	1. Wacana <i>Full Day School</i>
September	1. Wacana <i>Full Day School</i> 2. Wacana Sabtu Hari Libur Sekolah
Oktober	1. KIP Non Siwa 2. Wacana Guru Mengajar 8 Jam
November	1. Moratorium UN 2. Mendikbud Meliburkan SD pada Hari Sabtu dan Minggu
Desember	-

TOP ISSUE CETAK

Bulan	Top Isu
Januari	1. Buku Bermuatan Radikalisme 2. Revisi Kurikulum 2013
Februari	1. UNBK
Maret	1. Pemahaman isi bacaan rendah
April	-
Mei	-
Juni	1. Kekerasan Anak di Sekolah
Juli	1. Antar Anak Hari Pertama Sekolah
Agustus	1. Wacana <i>Full Day School</i>
September	1. Libur Sekolah Nasional 2. Kendala Pendidikan Anak TKI
Oktober	-
November	-
Desember	-



Mendikbud: Sekolah yang Gunakan Buku Berbau Radikalisme, Izinnya Dicabut!
(Suara Pembaruan, Januari 2016)

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang penggunaan buku yang berbau radikalisme dalam proses belajar-mengajar. Jika ada sekolah yang tetap menggunakan buku itu, maka izinnya bisa dicabut.

“Bila (buku berbau radikalisme) tetap digunakan, maka izin (sekolah)nya bisa dicabut. Bila tetap digunakan maka gurunya bisa kedatangan sanksi,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016).

Agar kasus ini tak kembali terulang, Anies berharap perusahaan penerbit buku bisa benar-benar memeriksa bukunya secara serius sebelum dicetak dalam jumlah besar. Selain itu, dia berharap para orang tua juga

menaruh perhatian pada buku-buku pelajaran yang menjadi panduan belajar anaknya.

“Sebetulnya ada 3 lapis nih. Lapis penerbit, lapis pengguna dan lapis regulator. Hanya karena jumlahnya banyak sering kali begitu ada laporan kemudian langsung didalami lebih jauh. Seperti kemarin begitu ada laporan langsung didalami dan itu sebenarnya akhir Desember awal Januari samplenya sudah kita dapat. Begitu dapat lengkap langsung diputuskan dihilangkan,” pungkas.

Buku TK itu dilaporkan masyarakat ke GP Ansor. Wakil ketua umum GP Ansor, Benny Rhamdani, mengatakan penemuan buku tersebut berdasarkan laporan orang tua salah satu murid TK pada 19 Januari lalu. Dia menjelaskan, buku berbau unsur radikalisme itu dikemas dalam bentuk metode belajar membaca praktis.

Di dalam buku tersebut terdapat 32 kalimat yang mengarahkan pada tindakan radikalisme, di antaranya ‘sabotase’, ‘gelora hati ke Saudi’, ‘bom’, ‘Sahid di medan jihad’, hingga ‘cari lokasi di Kota Bekasi’. Kemudian ada juga kalimat dan kata-kata yang mengandung radikalisme seperti ‘rela mati bela

agama’, ‘gegana ada di mana’, ‘bila agama kita dihina kita tiada rela’, ‘basoka dibawa lari’, “selesai raih bantai kyai”, dan ‘kenapa fobia pada agama’.(mnb/rvk)

Nilai UN Turun, Rerata IIUN Naik
(Media Indonesia, Juni 2016)

HASIL penilaian indeks integritas ujian nasional (IIUN) SMP/MTs tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah yang mendapat rerata nilai IIUN di atas 80 sebanyak 23.634 sekolah (44,03%) dari tahun lalu hanya 12.039 sekolah (23,44%).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menjelaskan hasil tersebut dan menyatakan kegembiraannya karena sekolah yang sudah jujur di 2015 makin terlihat pada 2016, meski kecenderungannya ialah integritas tinggi seiring dengan nilai UN rendah.

“Kenaikan IIUN berarti hasil UN-nya semakin jujur. Harapannya tentu bisa lebih tepat digunakan untuk memetakan capaian pendidikan

agar mutunya semakin baik,” ujar Anies dalam jumpa pers hasil UN SMP di Kantor Kemendikbud, Jumat (10/6).

Apalagi, lanjut Anies, secara keseluruhan ada 72% sekolah yang mengalami peningkatan nilai IIUN. Jumlah itu termasuk di antaranya 1,8% SMP/MTs yang baru mengikuti UN berbasis komputer (UNBK) mulai tahun ini. Sekolah dengan sistem UN kertas pensil (UNKP) di 2015 yang memiliki kesungguhan meningkatkan kejujuran dan memperbaiki diri juga patut di apresiasi. Tercatat, tahun ini sebanyak 10.078 sekolah UNKP yang mendapatkan nilai IIUN di atas 80.

Memang diakui masih ada 41,92% siswa yang belum mencapai standar sesuai ketetapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yakni nilai minimal 55. Rerata nilai UN juga cenderung terkoreksi turun 1,5 hingga 4 poin. “Nilai terkoreksi itu juga lantaran kita sudah memodifikasi desain UN agar dapat memotret lebih banyak kemampuan kebutuhan abad ke-21,” terang dia.

Pantauan dari lapangan, hasil UN di Provinsi Bangka Belitung merosot

cukup tajam seperti yang diakui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, M Soleh, Jumat (10/6). “Hasil perhitungan nilai UN di tingkat provinsi hanya mendapatkan nilai 51,27. Artinya kalau di kategorikan, masuk kategori kurang yakni di bawah 55,” ujar dia.

Kemampuan nalar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam menjelaskan nilai terkoreksi meliputi semua mata pelajaran. Bahasa Indonesia paling sedikit terkoreksi (0,31), sebaliknya matematika terkoreksi paling besar (6,04). “Dengan high order of thinking itu matematika memang yang paling terasa, dari tahun ke tahun turun.”

Di masa mendatang, lanjut Nizam, soal UN akan lebih dititikberatkan pada kemampuan penalaran dan analisis. Pun, bisa diterapkan pada proses pembelajaran di sekolah agar siswa mampu berkompetisi. Ketua BSNP Zainal A Hasibuan menegaskan penilaian IIUN juga nantinya akan diterapkan untuk kegiatan riil lain di dunia pendidikan termasuk mempertajam standar yang selama ini dirumuskan. “Soal-soal penalaran itu dibutuhkan, critical thinking, sehingga umpan balik dari UN benar-benar mencerminkan

peningkatan kemampuan siswa,” tukasnya. (RF/AT/H-1)

Mendikbud: Antar Anak Hari Pertama Sekolah Jadi Hari Bersejarah
(Kompas, Juli 2016)

JAKARTA, KOMPAS.com ---- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, mengantarkan anak pada hari pertama sekolah menjadi hal penting bagi pendidikan. Kata dia, hari pertama sekolah merupakan hari bersejarah dalam pelaksanaan pendidikan anak. “Karena hari pertama hari bersejarah. Sepertiga waktu anak dihabiskan di sekolah. Bertahun-tahun mereka ada di sekolah. Jangan kita anggap sekolah jauh dengan anak,” kata Anies di Kompleks Kemdikbud, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Pekan depan, anak-anak Indonesia dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) menjalani hari pertama di sekolah. Anies mengimbau para guru juga dapat mendampingi orangtua yang datang mengantarkan anaknya.

Menurut Anies, menyambut orangtua

merupakan langkah awal guru untuk menjalin interaksi. Guru dapat menjelaskan rencana pembelajaran selama satu tahun, meminta saran kepada orangtua, dan juga meminta kepada para orangtua apa yang harus diperhatikan dari anak mereka.

“Pendidik di sekolah dan orangtua berinteraksi, jadi tidak perlu ada delik aduan. Bangun interaksi sejak hari pertama. Kita ingin ini menjadi pembuka di periode berikutnya. Selama satu tahun ke depan bisa berinteraksi lebih jauh,” tutur Anies.

Anies juga mengimbau kepada para perusahaan, baik negeri maupun swasta, untuk

memberikan waktu kepada karyawannya saat mengantarkan anak. Ia mengakui hal itu tidak akan mengurangi produktivitas perusahaan.

“Ini kan dilakukannya setahun sekali. Cuma makan waktu dua jam. Saya yakin tidak akan kurangi produktivitas. Kalau setiap hari Senin tentu bermasalah,” tutur dia. Penulis: Lutfy Mairizal Putra





“Full Day School” Tak Berarti Belajar Seharian di Sekolah, Ini Penjelasan Mendikbud
(Kompas, Agustus 2016)

JAKARTA, KOMPAS.com— Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Adapun dua aspek pendidikan itu ialah pendidikan karakter dan pengetahuan umum.

Pada jenjang sekolah dasar (SD), siswa mendapatkan pendidikan karakter sebanyak 80 persen dan pengetahuan umum sebanyak 20 persen. Sementara itu, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), pendidikan karakter bagi siswa terpenuhi sebanyak 60 persen dan pengetahuan umum sebanyak 40 persen.

“Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, kami akan memastikan bahwa memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di sekolah,” kata Muhadjir, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8/2016).

Kemudian, guna memenuhi pendidikan karakter di sekolah itu, Kemendikbud akan mengkaji penerapan sistem belajar mengajar dengan full day school. Namun, full day school ini bukan berarti para siswa belajar selama sehari penuh di sekolah. Program ini memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Muhadjir mengatakan, lingkungan sekolah harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler.

“Usai belajar setengah hari, hendaknya para peserta didik (siswa) tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang

menyenangkan dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka,” kata Muhadjir.

Dengan demikian, kata Muhadjir, para siswa dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kegiatan kontraproduktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya. Ia mengatakan, saat ini sistem belajar tersebut masih dalam pengkajian lebih mendalam, termasuk perihal kondisi sosial dan geografis mana saja yang memungkinkan sistem belajar tersebut diterapkan.

“Misalnya di daerah mana saja yang orangtuanya sibuk sehingga tidak punya banyak waktu di rumah,” kata dia.

(Baca: Mendikbud Usul Siswa Bersekolah Seharian Penuh, Wapres Kalla Setuju)

Selain itu, Kemendikbud juga akan mengkaji masukan-masukan dari masyarakat. Ia mengatakan, penerapan full day school juga dapat membantu orangtua dalam membimbing anak tanpa mengurangi hak anak.

Setelah bekerja, para orangtua

dapat menjemput buah hati mereka di sekolah.

(Baca juga: Ini Alasan Mendikbud Usulkan “Full Day School”)

Dengan sistem ini juga, orangtua tidak khawatir atas keamanan anak-anaknya karena mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama orangtuanya berada di tempat kerja.

“Peran orangtua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga. Dengan begitu, komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga dan ikatan emosional juga tetap terjaga,” kata Muhadjir.

Jusuf Kalla setuju program bersekolah sepanjang hari
(Antarnews, Agustus 2016)

“ ... saya diilhami sekolah-sekolah swasta soal ini...”

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyetujui program bersekolah sepanjang hari, yang berarti memperpanjang jam bersekolah bagi siswa, yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bapak wakil presiden setuju. Namun beliau ada saran proyek percontohan dulu untuk menjajaki,”

kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bersekolah sepanjang hari alias full day school sebenarnya sudah dijalankan banyak sekolah, terutama sekolah swasta. “Justru saya diilhami sekolah-sekolah swasta soal ini,” kata dia. Menurut dia, sistem bersekolah sepanjang hari banyak memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik.

“Bahkan nanti kami ciptakan lingkungan sekolah yang lebih menggembirakan. Kalau perlu ngaji, nanti kami undang ustaz ke sekolah,” kata dia.

Selain itu, program itu juga menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar jam sekolah.

Muhadjir menyebutkan jam pulang sekolah akan disamakan dengan jam pulang kerja sehingga anak didik tidak dilepas begitu saja setelah jam sekolah.

“Jadi, anak pulang jam lima sore, orangtuanya bisa jemput

sehingga anak kita tetap ada yang bertanggung jawab setelah dilepas pihak sekolah,” katanya.

Kalau program itu diterapkan, dalam sepekan sekolah akan libur dua hari, yakni Sabtu dan Minggu, sehingga menurut Muhadjir akan memberikan kesempatan bagi peserta didik bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga.

Editor: Ade Marboen



PGRI Dukung Wacana Kebijakan Full Day School
(Suaramerdeka, September 2016)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendukung wacana kebijakan Full Day School. Meski demikian, sistem tersebut harus dikonsepsi secara jelas guna membangun karakter siswa dan jangan sampai program tersebut diseragamkan di seluruh

daerah.

“Kemarin (PGRI) ikut diskusi dengan Kemdikbud, ternyata itu sedang diformulasikan. Yang penting bagi PGRI, agar program Full Day School atau pendidikan karakter itu jangan diseragamkan dari Jakarta sampai Papua,” ujar Plt Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, di sela-sela dialog pendidikan “Peran Strategis Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia, di Gedung Guru, Jakarta, Kamis (8/9).

Pihaknya berharap, jika kebijakan tersebut nantinya benar-benar dilaksanakan dapat diformulasikan dan digunakan untuk pengembangan minat bakat siswa. Selain untuk digunakan untuk pendalaman materi pelajaran.

Dirinya mencontohkan, pola pembelajaran Full Day School tersebut telah dilakukan di sejumlah negara, salah satunya Korea. “Di Korea, waktu penambahan jam di sekolah itu bisa digunakan untuk remedial, pendalaman materi, sehingga sampai rumah para siswa tidak mendapat tugas-tugas. Selain itu juga untuk peningkatkan kapasitas diri, optimalisasi bakat dan minat, contohnya melalui

ekstrakurikuler,” jelasnya.

Menurutnya, pro kontra yang ada di masyarakat terkait dengan wacana kebijakan tersebut terjadi karena belum adanya formula yang lengkap. Pasalnya, hal tersebut masih dalam pembahasan di pemerintah dengan para pihak dan stakeholder terkait. Dikatakan, salah satu opsi kompensasi dari pemberlakuan kebijakan tersebut adalah berkurangnya hari efektif belajar di sekolah dalam satu minggu.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari dan memformulasikan wacana kebijakan tersebut. Karena harus didasari atas dasar yang kuat. “Masih dipelajari dari aspek legalnya. Nanti kalau sudah diperpanjang, hari Sabtu kalau ada persetujuan bisa libur. Sehingga Sabtu bisa kita nyatakan hari keluarga,” ungkapnya. (Satrio Wicaksono/CN38/SM Network)



Mendikbud Kunjungi Papua
(Wartaplus, Oktober 2016)

SENTANI,-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan peninjauan di sekolah rujukan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SDN Inpres Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat (7/10/) siang. Dalam kunjungan tersebut Mendikbud melihat dan bertukar pikiran tentang praktik baik Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah.

“Karakter itu penting, kalau karakternya kuat fondasinya kuat maka di atasnya dibangun apapun akan baik,”kata Mendikbud kepada para guru, anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah SD Inpres Kampung Harapan, Jayapura.

Kunjungan ini merupakan wujud penegasan bahwa pelaksanaan PPK didukung dan dilaksanakan dengan sebaran dari Provinsi Aceh hingga

Provinsi Papua yang berjumlah 42 sekolah di 22 provinsi, menyusul pada bulan November sebanyak 500 sekolah di 34 provinsi. Selain SDN Inpres Kampung Harapan, terdapat sekolah rujukan lain tingkat SMP yakni SMPN Arso Kabupaten Keerom, Papua dan SMPN 19 Manokwari, Papua Barat.

Implementasi PPK dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, budaya, serta keberagaman penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah nusantara, termasuk sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bahkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Terkait dengan kebijakan penguatan pendidikan karakter, Mendikbud menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya revitalisasi manajemen berbasis sekolah, dengan pengembangan kapasitas Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan peran serta aktif Orang Tua siswa.

Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan bahwa PPK lebih memperhatikan harmoni olah hati (etika), olah rasa (estetika), olah raga (kinestetik)

dan olah pikir (literasi baca, tulis, hitung). Harmonisasi tersebut diimplementasikan dalam keterpaduan intra-kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler dan non-kurikuler untuk mewujudkan karakter baik siswa. Nilai-nilai utama karakter yang dapat ditumbuhkan adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta dapat juga disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing-masing.

“Hanya dengan karakter yang kuat, jati diri bangsa menjadi kokoh dan menumbuhkan daya saing bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan era abad 21”, ujar Mendikbud. Program ini harapannya dapat memberikan penguatan karakter siswa dalam mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembelajaran terpadu di dalam dan di luar sekolah dengan kolaborasi sumber-sumber belajar di luar sekolah.

Ia juga menegaskan tidak ada perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, karena implementasi kurikulum tersebut sedang berjalan. “Maka upaya kami adalah bagaimana menambah kandungan K13 dengan prioritas di jenjang pendidikan dasar

dalam bentuk kokurikuler, termasuk di dalamnya pembelajaran berbasis kearifan lokal.

Itulah yang kemudian disebut Program Penguatan Pendidikan Karakter,” tambah Muhadjir. Program ini diharapkan dapat memberikan penguatan karakter siswa dan mewujudkan pembelajaran terpadu di dalam dan di luar sekolah melalui pelibatan publik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah dan menyenangkan. [Levin]

Mendikbud Gagas Guru Wajib 8 Jam di Sekolah (Lampung Post, Oktober 2016)

Solo -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, menggulirkan gagasan guru harus berada di sekolah delapan jam per hari. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan anugerah Kawastara Pawitra di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2016.

“Saya sedang merancang guru wajib di sekolah selama delapan jam. Terutama yang sudah mendapat tunjangan profesi,” ujar Muhadjir. Mendikbud mengatakan profesionalitas guru salah satunya diukur melalui waktu kerja. “Kalau

guru baru 1 atau 2 jam sudah pulang, ya tidak profesional namanya. Apalagi kalau sengaja dicepatkan untuk les, yang membuka les dia sendiri. Itu tidak profesional,” urainya.

Gagasan tersebut mendorong guru untuk tidak mengurangi porsi materi di sekolah. “Belajar harus tuntas di sekolah. Waktu di rumah digunakan anak-anak dengan keluarga. Jangan beban dibawa pulang,” kata dia.

Muhadjir juga mengatakan delapan jam di sekolah tidak melulu dapat dimanfaatkan untuk terus memberikan materi namun juga membimbing siswa-siswi dengan kegiatan lain. “ Misalnya ada bimbingan, pengawasan, kegiatan ekstrakurikuler, dampingi siswa-siswinya,” imbuhnya.

Menurut Muhadjir sudah seharusnya guru memberikan yang terbaik untuk para siswanya. “Gaji guru dan tunjangan profesi itu dari rakyat. Sehingga harus memberikan yang terbaik bagi rakyat,” kata dia. Muhadjir juga mengatakan pekerjaan-pekerjaan administratif yang dilakukan guru harus dikurangi. “Supaya mereka fokus mendidik,” ujarnya.

Gagasan guru berada di sekolah selama delapan jam ini, lanjutnya, masih dalam pembahasan. “Ini masih kita pelajari dari sisi aspek-aspek legalnya,” kata dia.

Di awal kepemimpinannya di Kemendikbud menggantikan Anies Baswedan, Muhadjir pernah membuat gagasan sekolah sehari penuh atau full day school bagi siswa. Namun, gagasan ini banyak ditentang sehingga dikaji ulang. Menurutnya, sekolah sehari penuh bisa memaksimalkan pengawasan anak, terutama bagi orang tua anak yang sibuk bekerja.

Aturan Baru Mendikbud, Liburkan Siswa Sabtu dan Minggu (Radarpena, November 2016)

JAKARTA, RadarPena.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan terobosan baru guna mengoptimalkan pola pendidikan karakter di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menjelaskan, siswa di tingkat SD dan SMP akan diliburkan di hari Sabtu-Minggu.

“Nanti itu hari Sabtu dan Minggu kita

liburkan karena program pendidikan karakter itu waktunya cukup panjang bagi murid dan guru pada hari Senin-Jumat. Sebagai gantinya Sabtu-Minggu akan menjadi hari keluarga,” jelas dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin pagi (7/11).

Menurut Menteri Muhadjir, hal ini merupakan implementasi dari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita. Nantinya guru dan murid diminta untuk lebih aktif dalam pola pembelajaran berbasis, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). “Jadi tidak ada penambahan jam pelajaran yang ada penambahan aktifitas sekolah,” sambungnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, dengan metode pendidikan karakter guru diharapkan bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Tujuannya untuk membangun karakter siswa didik. Misalnya dengan metode role model maupun role playing.

“Guru sekarang itu terlalu menikmati cara mengajar dengan metode ceramah padahal banyak metode lain yang bisa dipakai,” terangnya.

Salah satu contoh yang dilakukan guna memperkuat karakter siswa, lanjut Menteri Muhadjir, guru bisa menampilkan simulasi dagang atau perbankan. “Disitu nanti siswa ada yang jadi manager, ada yang jadi peminjam uang.

Jadi secara otomatis mereka belajar cara matematis dengan menghitung uang, ada pendidikan kejujuran, kecermatan dan berani mengambil resiko, itulah yang dimaksud pendidikan karakter,” ujarnya.

Selain itu siswa tidak akan banyak dibebani oleh pekerjaan rumah dengan sistem yang saat ini menggunakan Lembar Kerja Siswa. Muhadjir mengatakan LKS akan dihapuskan karena tidak banyak memberikan nilai tambah bagi siswa. “Karena setiap murid memiliki kemampuan berkembang sendiri-sendiri, itu tidak bisa disama ratakan dengan LKS,” ujarnya.

Saat ini tahap pola pendidikan karakter telah memasuki tahap persiapan. Sebanyak 541 kepala sekolah tengah mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan metode ini. Tahun depan rencananya 1500 kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan yang sama.(rml)

Mendikbud Ingin Penulis dan Penerbit Buku Radikalisme Diekspose

● DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta agar penulis serta penerbit yang menerbitkan buku berisi paham radikal diekspose. Alasannya, menurut Anies, mereka ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat.

"Hari ini mereka *enggak* kelihatan. Kita *enggak* tahu *nih* merekanya siapa, wajahnya bagaimana. Tunjukkan mereka pada publik dan suruh mereka bertanggung jawab pada publik," kata Anies, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/1).

Anies menjelaskan, Kemendikbud bertugas menyusun kurikulum dan silabus. Buku berdasarkan kurikulum yang telah disiapkan oleh Kemendikbud pun ditulus oleh penulis dan diterbitkan oleh penerbit. Kemudian, buku yang telah selesai disusun diulas kembali oleh Kemendik-

bud. Jika tak sesuai dengan kurikulum dan silabus, Kemendikbud akan memberi peringatan.

"Dan bila seperti kemarin ada yang berisi materi-materi yang jauh dari prinsip-prinsip pendidikan, dilarang," tambah dia. Anies menambahkan, buku untuk anak TK yang berisi paham radikal pun telah dilarang. Namun, jika lembaga pendidikan tetap menggunakan buku yang telah dilarang oleh Kemendikbud, izinnnya akan dicabut. Selain itu, guru juga bisa mendapat sanksi jika masih menggunakan buku tersebut.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti berpendapat, seluruh komponen pendidikan harus bersinergi dalam menangkal paham radikalisme. Guru, orang tua, kepala sekolah, dan jajaran birokrat pendidikan harus beriringan melawan paham radikalisme.

Seperti diketahui, Kejaksaan

Negeri (Kejari) Makassar menyita lima buku di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi, Jalan Landak Baru, karena diduga mengandung unsur paham radikal. Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Fajar Anugerah Setiawan mengatakan, lima buku yang disitanya itu dicetak oleh Cordova di Jalan Abdullah Daeng Sirua.

Fajar menjelaskan, dari pengakuan guru-gurunya, buku itu sudah tidak digunakan lagi sejak 2011. Bahkan, buku itu sifatnya hanya sebagai pegangan guru dan tidak diperjualbelikan kepada murid, apalagi pada tingkatan sekolah terendah seperti TK dan sekolah dasar (SD).

Dalam buku itu berbagai kata yang merujuk ke paham radikal dimunculkan, misalnya bom, granat, rela mati membela agama, laki-laki wajib bela agama, dan lain-lain. "Jadi sudah lama ini buku ditarik peredarannya," kata Andi.

Andi mengaku belum bisa menentukan sanksi atas peredaran buku-buku itu. Alasannya, pihaknya masih mempelajari apakah ada unsur kesengajaan dari pihak percetakan atau seperti apa. Andi menyebutkan, pihaknya turun melakukan pengecekan setelah adanya laporan mengenai dugaan paham radikal dalam buku itu. Hasilnya, buku yang berseri 1-5 itu disita dari tangan guru. Mengenai masih adanya kemungkinan buku itu tersebar, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

Kepala Sekolah TK Pertiwi ST Khadijah Ahmad mengatakan, buku itu sudah tidak dipakai lagi sejak 2011 meski buku itu sempat dijadikan buku pegangan guru-guru. "Jumlahnya sedikit karena hanya buku pegangan. Buku ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2011," kata Khadijah. ■ *antara edo andri saubani*

LANGKAN

Kemampuan Memahami Isi Bacaan Rendah

Tingkat melek huruf di Indonesia sudah cukup baik, tetapi belum diimbangi dengan kemampuan memahami isi bacaan. Hal itu terjadi terutama pada jenjang pendidikan dasar. Penyebabnya, antara lain terbatasnya ketersediaan buku berjenjang yang sesuai dengan usia anak. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wowon Widaryat mengungkapkan hal itu dalam acara penyerahan 1,1 juta eksemplar buku berjenjang dari USAID Prioritas, di Medan, Rabu (30/3). Buku-buku itu akan didistribusikan ke 1.800 sekolah di 15 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Turut ha-

dir Bupati Serdang Bedagai Soekirman dan Direktur USAID Andrew Sisson. Menurut Wowon, untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memahami isi bacaan, pelatihan tenaga pendidik juga perlu dilakukan (NSA)

Pemda Berperan Pacu Minat Baca Anak

Dalam era otonomi daerah, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan budaya baca anak. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wowon Widaryat mengungkapkan hal itu pada acara penyerahan 1,1 juta eksemplar buku berjenjang dari USAID Prioritas, di Medan, Rabu (30/3). Buku-buku itu segera didistribusikan ke 1.800 sekolah di 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Acara tersebut

dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumut Arsyad Lubis, Bupati Serdang Bedagai Soekirman, Direktur USAID Andrew Sisson dan Direktur Program USAID Prioritas Stuart Weston. Pada kesempatan itu, Wowon mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang mewajibkan setiap siswa membaca 15 menit setiap hari sebelum pelajaran dimulai. (NSA)

Kompas
Maret 2016

Republika
Januari 2016

Media Indonesia
Juni 2016

Perpeloncoan Murid Baru Dilarang

Sekolah yang terbukti melakukan perpeloncoan terhadap siswa baru akan diberi sanksi. Sanksinya bisa sampai tahap penutupan sekolah.

SYARIF OSBAIDILLAH

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lingkungan Sekolah (PLS) bagi Siswa Baru.

Permendikbud yang akan diterapkan mulai tahun ajaran

baru Juli mendatang itu melarang perpeloncoan yang biasa dilakukan siswa senior terhadap para murid baru.

Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Purwadi menyatakan Kemendikbud telah melakukan sosialisasi permendikbud tersebut dengan mengumpulkan dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi. Ia menjelaskan PLS lebih menekankan pada pengenalan bagi siswa baru

terhadap lingkungan sekolah, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, misalnya pengenalan perpustakaan sekolah, cara meminjam buku, hingga jumlah dan jenis mata pelajaran yang bakal diterima siswa baru.

"Seperti ditagsakan Mendikbud, sekolah harus menyesuaikan, tidak boleh menjadikan peserta didik baru stres. Tidak boleh meminta siswa baru mencari tanda tangan seniornya, harus lari sana sini. Intinya, PLS ini ingin menyempit perpeloncoan atau bullying yang kerap terjadi dalam orientasi penerimaan siswa baru atau ospek," papar Purwadi kepada pers Jakarta.

"PLS membantu siswa baru mengenali potensi diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah."

Anies Baswedan
Mendikbud

Senin (27/8) petang.

Ia menambahkan, PLS juga digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan tata tertib sekolah. Selain itu, PLS menjadi wadah komunikasi antara sekolah dan orangtua. "PLS melibatkan orangtua, sehingga terbangun komunikasi antara

orangtua dan pihak sekolah."

Purwadi menyatakan tahun ajaran baru 2016 dimulai pada 18 Juli mendatang. Hari-hari pertama masuk sekolah diisi dengan kegiatan PLS bagi murid baru. "Pelaksanaan PLS paling lama tiga hari. Hal itu untuk menjaga agar anak tidak jenuh dan bosan."

Pelaksana PLS ialah para guru di bawah tanggung jawab langsung kepala sekolah. Pelaksanaannya diserahkan penuh ke pihak sekolah. Organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dapat dilibatkan dalam pelaksanaan PLS, misalnya pada sesi pengenalan kegiatan ekstrakurikuler maupun pengenalan OSIS.

"Sekolah yang membandel menerapkan MOS (masa orientasi siswa) yang identik dengan kekerasan akan kita tindak tegas. Kalau (pelakunya) sekolah negeri, akan kita laporkan ke dinas setempat, bila swasta, kita laporkan ke yayasan dan dinas pendidikan. Sanksinya bisa sampai tahap penutupan sekolah," tegasnya.

Gali potensi

Sebelumnya, Mendikbud Anies Baswedan juga menegaskan bahwa pelaksanaan MOS yang rentan dengan kekerasan dilarang. Sebagai gantinya, tahun ini dilaksanakan PLS. Pelaksanaan PLS tidak boleh melibatkan alumni dan siswa

senior. Jika dibutuhkan, keterlibatan mereka hanya boleh sebatas membantu guru yang merupakan pelaksana PLS.

Dalam PLS, hukuman kepada siswa baru yang sifatnya tidak mendidik juga dilarang. Seperti menyiramkan air, hukuman fisik, serta hukuman yang mengarah pada tindak kekerasan.

"PLS mengajak siswa baru mengenali potensi diri, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan menumbuhkan motivasi belajar cara belajar efektif bagi siswa baru," kata Anies. (1-3)

oebay@mediaindonesia.com

Mendikbud Ajak Orangtua Antar Anak ke Sekolah

[JAKARTA] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, seperti tahun ajaran baru tahun lalu, kembali mengajak orangtua untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama masuk sekolah pada ajaran baru 2016/2017.

Anies mengatakan, orangtua mengantar anak pada Hari Pertama Sekolah (HPS), sangat baik untuk membangun kemitraan antara orangtua, siswa, guru, dan sekolah. Pasalnya, sekolah wajib menyampaikan perencanaan kegiatan kepada orang tua pada saat anak terdaftar menjadi siswa baru. Sementara guru wajib berinteraksi dengan orang tua untuk menanyakan apa yang harus diterapkan untuk mendidik siswa baru.

"Yang terjadi pada HPS, orangtua menitikpakan tanggung jawab mendidik anak ke institusi sekolah, maka sangat diperlukan kemitraan. Inilah yang kami ajak ke orang tua untuk hadir mengantar anak-anaknya ke sekolah, karena hari pertama ini adalah hari bersejarah bagi anak," kata Anies pada Dialog Hari Pertama Sekolah di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Senin (11/7) petang.

Lanjut dia, sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Pasalnya, setelah terdaftar, anak akan menggunakan waktunya di sekolah. 1/3 hari anak dihabiskan dengan kegiatan di sekolah. Maka hubungan



Anies Baswedan

orang tua dengan sekolah harus dekat, baik di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Menengah Atas (SMA).

Menurut Anies, mengantar anak ke sekolah merupakan kesempatan membangun hubungan positif antara lingkungan orang tua dengan sekolah. Orang tua dan guru berinteraksi, maka akan tercapai kepercayaan antar keduanya. Persoalan seperti saling melaporkan antar guru, siswa, dan orang tua yang sering terjadi dapat dicegah jika keduanya berinteraksi.

Anies menjelaskan, orangtua dapat memperkuat karakter dan potensi anak, sehingga guru dapat memahami untuk membimbing anak tersebut seperti apa ke depannya.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini juga menuturkan, pada era

ini, dalam mendisiplinkan siswa banyak cara baru yang bisa dipilih. Negara hadir dan menjamin melalui peraturan-peraturan agar tidak terjadi penyimpangan.

Anies mengharapkan, semua institusi dapat mengizinkan karyawannya datang ke kantor setelah mengantarkan anak ke sekolah. Mengantar anak ke sekolah akan menjadi Revolusi Mental di dunia pendidikan terkait orang tua dan peranan sekolah. Pasalnya, dengan suasana baru, dapat menyegarkan iklim belajar mengajar di sekolah. Para siswa pun dapat belajar dengan gembira dan tenang.

Sanksi

Sementara itu, untuk sanksi, alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, jika siswa, guru, dan kepala sekolah terbukti melakukan hal-hal yang dilarang maka Menteri memberikan sanksi rekomendasi penurutan level akreditasi, pemberhentian beasiswa pemerintah, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakhiri, merelokasi atau menutup sekolah yang melanggar peraturan.

Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan selaku yang bertanggung jawab juga berhak memberikan sanksi legiatur tertulis, penundaan atau pengurangan hak pembebasan tugas atau pemberhentian sementara

jabatan kepala sekolah atau guru yang melanggar, dan pemberhentian pemberian bantuan Pemda terhadap sekolah tersebut.

Anies juga mengimbau,

siswa, orang tua dan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran ini ke Layanan Sekolah Aman Kemdikbud di melalui laman pengaduan <http://pelayanan.kemdikbud.go.id> atau telepon melalui

021-57903020/ 0215703303 dan layanan pesan singkat (SMS) 0811976929 serta e-mail di laporkankelompok@kemdikbud.go.id [FAT/D-10]

Suara Pembaruan
Juli 2016

Sekolah Full Day Perkuat Karakter

JAKARTA – Gagasan sekolah sehari penuh (*full day school*) sebaiknya tidak dipahami sebagai penambahan jam pelajaran semata. Inti dari model pembelajaran ini adalah pendidikan dan penguatan karakter siswa agar menjadi generasi terbaik bangsa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, rencana sekolah *full day* sesungguhnya merupakan implementasi dari sistem pendidikan nasional (*sisdiknas*) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20/2003. Konsep ini juga pen-

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, wacana kokurikuler muncul berdasarkan program Nawacita. Dalam program tersebut dijelaskan pentingnya pembangunan karakter dan pengetahuan siswa. "Terasuk kita kembali mendefinisikan (konsep) Tri-

jabaran dari program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Mendikbud menjelaskan, gagasan sekolah *full day* tidak seperti yang dibayangkan sejumlah kalangan tentang penambahan jumlah pelajaran hingga membebani siswa dan memangkas waktu mereka bersama keluarga. Sekolah *full day* lebih pada peningkatan upaya untuk memberikan kegiatan yang positif kepada siswa melalui kegiatan di lingkungan sekolah. "Yang saya maksud (sekolah sepanjang hari) itu pembelajaran yang diperluas, kokurikuler, pembentukan karakter," kata Muhadjir saat berdialog dengan jajaran redaksi MNC Media di Gedung SINDO, Jakarta, tadi malam.

"Terasuk kita kembali mendefinisikan (konsep) Triaksi kebudayaan yang berkepribadian, ya harus kembali ke kearifan lokal."

MUHADJIR EFFENDY
Mendikbud

Menurut Mendikbud, kokurikuler adalah membuat kegiatan agar siswa nyaman berada di sekolah. Kegiatan ini bisa

sakti kebudayaan yang berkepribadian, ya harus kembali ke kearifan lokal," katanya.

Muhadjir melanjutkan, dalam Nawacita juga disinggung mengenai penyiapan tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Itu semua bisa diawali dengan pembentukan karakter, yang penekannya berasal dari pendidikan dasar (*basic education*), yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). "Bahkan di situ (Nawacita) ketika saya baca pembentukan karakter SD 70%, SMP 60%," papar Muhadjir.

Melihat fakta tersebut, Muhadjir memastikan rencana sekolah *full day* akan terus dilanjutkan. Tentu dalam proses awal Kemendikbud akan menetapkan pilot *project* terlebih dulu, sebelum program benar-benar diterapkan di masyarakat luas. "Ini sudah saya pertajam konsep-konsepnya untuk kita mulai detail mana yang bisa disisipkan," jamin Muhadjir.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai gagasan sistem belajar sekolah *full day* merupakan alternatif untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekolah sehari penuh menjadi jalan tengah ketika banyak guru merasa belum dapat menyelenggarakan pendidikan secara maksimal karena keterbatasan jam.

"*Full day school* juga menjadi alternatif ketika banyak di-

disertai dengan menyisipkan kearifan lokal masyarakat setempat. Seperti di Jawa warga lekat dengan musik gamelan, maka berdasarkan kokurikuler siswa akan diberi kegiatan yang berkaitan dengan alat musik tersebut. "Yang Sunda ya angklung, yang (daerah) lain ya lain," tutur Muhadjir.

antara sekolah-sekolah berprestasi mayoritas menerapkan sistem *boarding school*, di mana guru memiliki waktu lebih lama untuk berinteraksi serta memberikan pendidikan kepada anak didik," kata politikus PKS ini.

● dian ramdhani/
kiswondari/ant

Koran Sindo
Agustus 2016

Sabtu Hari Libur Sekolah Nasional

JAKARTA – Waktu anak-anak bersama keluarga bakal semakin banyak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menuntaskan kajian libur sekolah nasional yang baru. Pemerintah bakal menetapkan Sabtu sebagai libur sekolah nasional.

Selama ini sudah banyak pemerintah daerah (pemda) yang menetapkan lama bersekolah Senin-Jumat. Tetapi, masih ada pemda yang menetapkan durasi sekolahnya mulai Senin sampai Sabtu. ▶ *Baca Sabtu... Hal 11*

Jawa Pos
September 2016

Waktu Bersama Keluarga Bertambah

■ **SABTU...**

Sambungan dari hal 1

Bahkan, ada pemda yang menetapkan setiap Sabtu siswa masuk ke sekolah. Namun, diisi kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, keputusan Sabtu sebagai hari libur pendidikan nasional segera dikeluarkan. Dengan keputusan itu, seluruh daerah bakal kompak meliburkan siswa setiap Sabtu dan Minggu.

"Saat ini masih finalisasi. Kami kaji aspek hukumnya," kata Muhadjir setelah menjadi pembicara kunci dialog pendidikan di Kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kemarin (8/9). Menurut dia, keputusan menjadikan Sabtu sebagai hari libur

sekolah nasional juga menunggu restu presiden.

Dengan ditetapkannya Sabtu sebagai hari libur nasional, lanjut dia, ada konsekuensi penambahan jam pada Senin-Jumat. Dengan demikian, beban belajar anak-anak tidak tereduksi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan mengasah minat serta bakat ditempatkan sepanjang Senin sampai Jumat.

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, banyak sekali manfaatnya bila Sabtu ditetapkan sebagai hari libur sekolah nasional. Di antaranya, anak-anak jadi memiliki waktu yang lebih dengan keluarganya. Kemudian, keluarga memiliki banyak waktu untuk berekreasi atau wisata.

"Faktor wisata keluarga ini bisa menggerakkan ekonomi masya-

rakat," kata dia. Muhadjir belum bisa memastikan kapan regulasi Sabtu sebagai libur sekolah nasional itu keluar. Momentum paling pas menerapkan kebijakan itu adalah awal tahun pelajaran baru 2017-2018 pertengahan tahun depan.

Pt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik rencana Kemendikbud menetapkan Sabtu sebagai libur sekolah nasional. "Solusi yang cerdas di tengah keresahan masyarakat selama ini," katanya. Menurut Unifah, kebijakan itu bisa membuat waktu anak-anak berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak.

Dengan begitu, proses pendidikan karakter di tengah-tengah keluarga bisa berjalan dengan baik. Menurut Unifah, bertambahnya waktu anak-anak bersama

keluarga itu bisa diisi dengan beragam kegiatan. Misalnya, berkumpul di rumah, mendo- ngeng, atau bahkan sesekali diisi dengan rekreasi ke tempat wisata.

Dari sisi guru, manfaat kebijakan itu juga banyak. "Waktu bersama keluarga bagi para guru bisa bertambah," jelasnya. Selama ini, meski ada pemda yang menetapkan Sabtu sebagai hari libur, ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Otomatis para guru tetap harus hadir di sekolah.

Unifah menyarankan, kebijakan Sabtu sebagai hari libur sekolah nasional tidak kaku. Maksudnya, sekolah dan orang tua siswa yang ingin melakukan kegiatan saat Sabtu tetap tidak dilarang. Intinya, musyawarah antara orang tua dan sekolah harus terjalin dengan baik. (wan/c10/oki)

Media Indonesia
September 2016

115 Guru Dikirim untuk Didik Anak TKI

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim 115 guru yang bertugas mengajar dan mendidik anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

"Saya yakin dan percaya, Anda semua bisa membangkitkan peserta didik menjadi orang-orang berkarakter mulia dan pembelajar seumur hidup," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat melepas para guru untuk anak TKI di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan para guru tersebut tidak hanya mendidik anak, tapi juga menjaga martabat bangsa Indonesia di mata internasional. "Kami mengharapkan para guru dapat memberikan pendidikan Indonesia di Malaysia," tambah Muhadjir.

Para guru itu akan ditempatkan di Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu, Community Learning Centre (CLC) di Kota Kinabalu dan Tawa, Pusat Belajar Humana, Johor Bahru, Kemangsaan, dan Sarawak.

Berdasarkan data Kemendikbud baru 24.856 anak dari 51.687 anak Indonesia di

Malaysia yang mendapatkan layanan pendidikan. "Masih banyak anak Indonesia di luar negeri yang belum mendapatkan layanan pendidikan. Hingga saat ini baru terdapat 223 guru yang bertugas di Malaysia," imbuh Muhadjir.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan pengiriman guru itu harus memenuhi tiga tujuan. Pertama, memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan di tempat orang tua mereka bekerja.

Kedua, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab," lanjut Pranata.

Serta menumbuhkan nilai-nilai persatuan, membangun rasa kebangsaan, dan menanamkan kepribadian serta kebanggaan sebagai 'WNI' (Bay/An/11-2)



SENI PUBLIK. Orang-orang menikmati makan siang mereka di kafe yang dilatar belakangi foto-foto teras rumah tua pada sebuah karya seni publik oleh James Tiller bergaya bergambar di Sydney, Australia, kemarin.

REVITALISASI SMK / VOKASI

Pendidikan vokasi di Indonesia terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program diploma pada jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ada sebanyak 13.672 SMK di Indonesia dengan beragam bidang keahlian, program studi, dan kompetensi keahlian yang bisa diambil peserta didik.

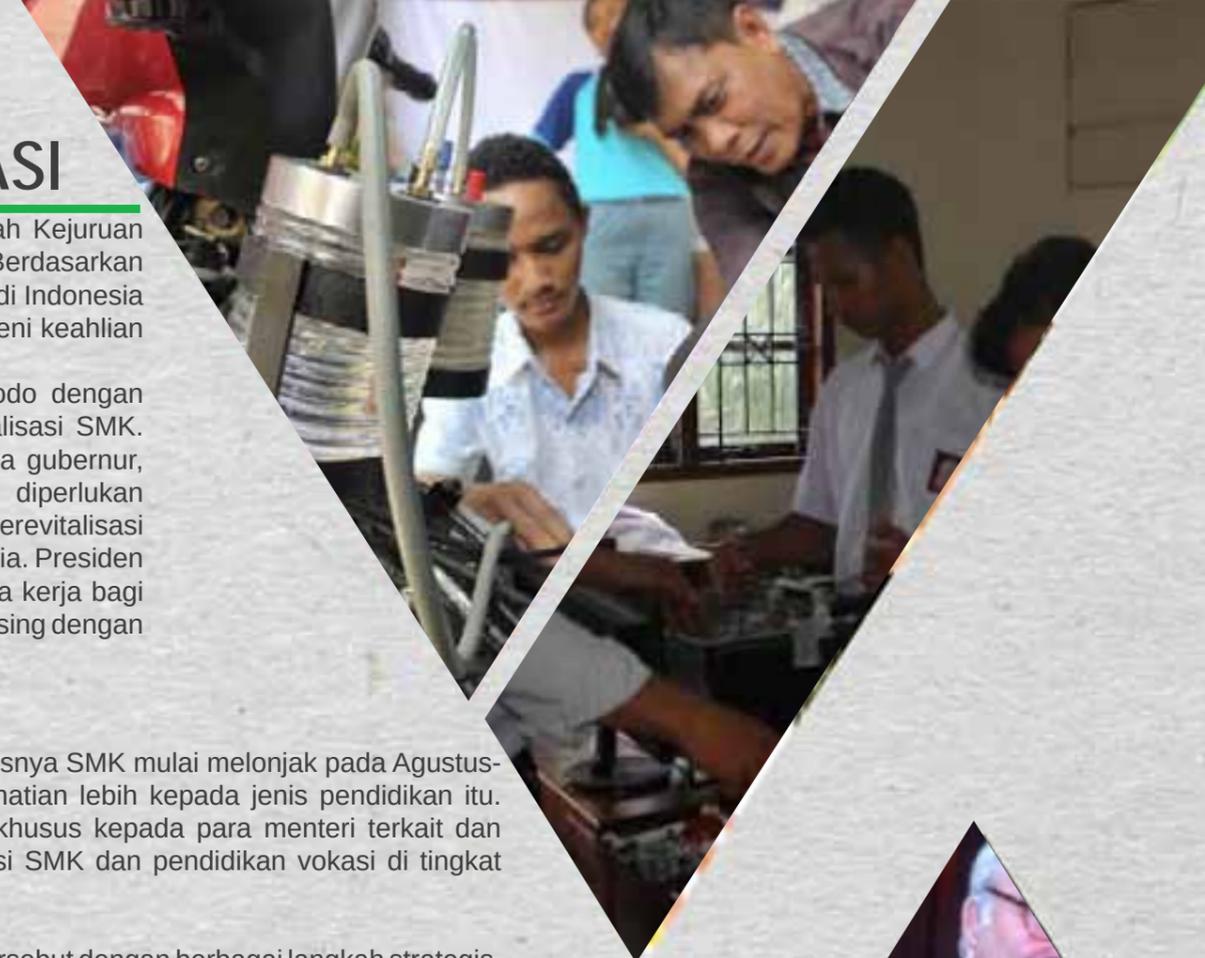
Tahun ini SMK mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Presiden juga menginstruksikan supaya disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

RINGKASAN

Pemberitaan dengan topik mengenai pendidikan vokasi, khususnya SMK mulai melonjak pada Agustus-Desember atau setelah Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih kepada jenis pendidikan itu. Pada jangka waktu itulah, Presiden mengeluarkan instruksi khusus kepada para menteri terkait dan sejumlah kepala lembaga untuk segera melakukan revitalisasi SMK dan pendidikan vokasi di tingkat pendidikan tinggi.

Mendikbud Muhadjir Effendy segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan berbagai langkah strategis. Maka tidak heran, pada topik ini, influencer utama ada pada dua figur tersebut, di samping nama-nama lainnya, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani juga Direktur Pembinaan SMK, Mustagfirin Amin. Topik ini lebih banyak mendapat sentimen positif dan netral, baik di media daring maupun media cetak. Hal ini mengingat revitalisasi SMK dianggap sebagai upaya yang tepat agar lulusan SMK semakin baik dan mampu bersaing global, sehingga disambut cukup baik oleh media maupun masyarakat.

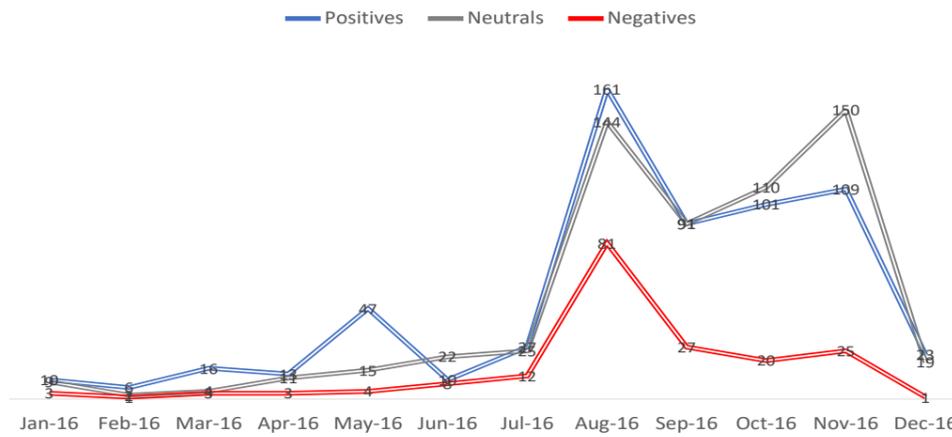
Pada media daring, sentimen sentimen positif sebanyak 614 berita (43,80%) dan netral 602 berita (42,80%). Sementara pada media cetak, pemberitaan dengan sentiment netral mencapai persentase 49,30% dengan 398 berita dan sentimen positif ada di 37,30% dengan 302 pemberitaan.



SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Sentimen yang paling besar adalah sentimen positif dan netral, dengan masing-masing 614 berita (43,80%) dan 602 berita (42,80%). Sedangkan sentimen negatif, jumlahnya jauh di bawah sentimen positif dan netral, yakni 188 pemberitaan (13,40%).

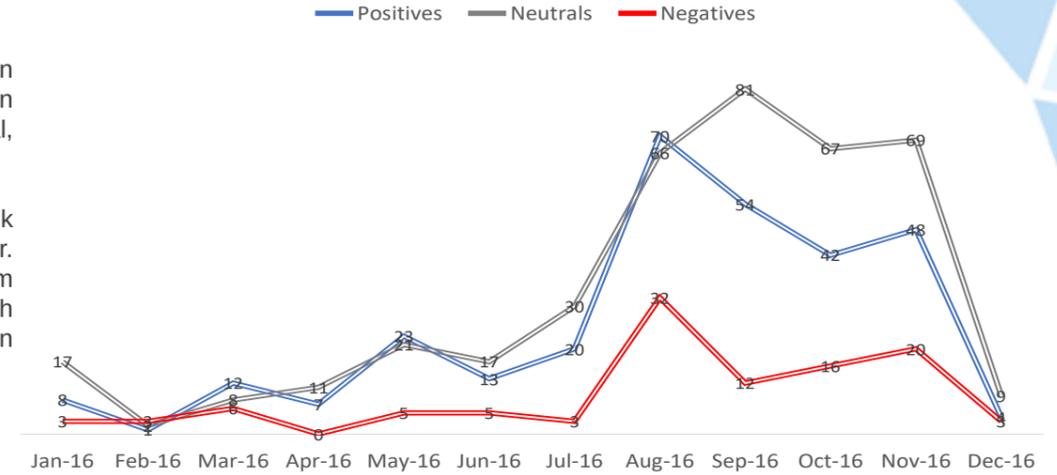
Sentimen negatif yang tinggi pada bulan Agustus, berasal dari polemik wacana full day school yang mengundang banyak komentar stakeholder. Namun hal ini sudah diklarifikasi Menteri Muhadjir bahwa wacana ini belum final, dengan pernyataan “implementasi pendidikan karakter di sekolah masih dalam tahap perumusan dan belum sampai keputusan kebijakan full day school seperti isu yang beredar di masyarakat”.



SENTIMEN (MEDIA CETAK)

Sentimen yang paling besar adalah sentimen positif dan netral, dengan masing-masing 614 berita (43,80%) dan 602 berita (42,80%). Sedangkan sentimen negatif, jumlahnya jauh di bawah sentimen positif dan netral, yakni 188 pemberitaan (13,40%).

Sentimen negatif yang tinggi pada bulan Agustus, berasal dari polemik wacana full day school yang mengundang banyak komentar stakeholder. Namun hal ini sudah diklarifikasi Menteri Muhadjir bahwa wacana ini belum final, dengan pernyataan “implementasi pendidikan karakter di sekolah masih dalam tahap perumusan dan belum sampai keputusan kebijakan full day school seperti isu yang beredar di masyarakat”.



Influencer Jan - Mar



Menteri Anies Baswedan berada di peringkat pertama dari total 53 influencer dengan pernyataan sebanyak 39 pernyataan. Isi pernyataan Menteri Anies terkait penghargaan yang diterima Indonesia dari UNESCO – Japan Prize 2015.

Influencer Apr - Jun



Total influencer pada periode ini berjumlah 99 figur. Direktur Pembinaan SMK, Mustaghfirin Amin lebih banyak berkomentar daripada Menteri Anies terkait pengembangan SMK. Sedangkan Menteri Anies, Presiden Jokowi dan Menteri Saleh Husin seluruhnya memberikan pernyataan yang berhubungan dengan kerjasama Indonesia – Jerman di bidang vokasi.

Influencer Jul - Sept



Menteri Muhadjir terlihat banyak memberikan pernyataan atau berada pada posisi pertama dari total 279 influencer. Selain itu yang menjadi catatan adalah kritik dari anggota DPR Komisi X, Anang Hermansyah yang menilai Kemendikbud belum serius mengembangkan pendidikan vokasi.

Influencer Okt - Des



Pada periode ini jumlah influencer cukup banyak, yaitu 223 figur. Pada posisi lima besar, berasal dari dalam pemerintah. Namun yang menarik, Presiden Jokowi ‘menyentil’ beberapa kementerian, diantaranya Kemendikbud untuk mengembangkan vokasional school atau vokasional training di daerah-daerah dengan membuat regulasi dan menggandeng pihak swasta.

Influencer Okt - Des



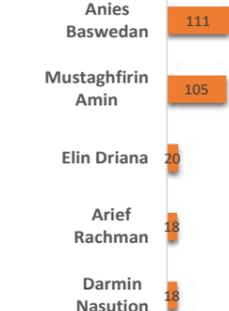
Pada periode ini Menteri Muhadjir kembali berada di posisi pertama dari total 236 influencer. Yang cukup menarik ialah munculnya Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad yang memberikan pernyataan bahwa Guru akan menjadi Duta Anti Korupsi.

Influencer Jul - Sept



Empat peringkat teratas ditempati oleh pihak pemerintah yang banyak memberikan pernyataan positif atau optimis. Sedangkan di posisi kelima, ada Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi yang pernyataannya mendukung full day school, dengan memberi beberapa catatan.

Influencer Apr - Jun



Pada periode ini figur yang banyak memberikan pernyataan ialah Menteri Anies dengan 111 pernyataan dari total 110 influencer. Pernyataan Menteri Anies dan Direktur Pembinaan SMK, Mustaghfirin Amin yang berada di bawahnya, berisi seputar pengembangan SMK atau pendidikan vokasi.

Influencer Jan - Mar



Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid berada di peringkat pertama dari total 66 influencer dengan pernyataan sebanyak 52 pernyataan. Isi pernyataan terkait pengangkatan dirinya yang bukan berasal dari birokrat. Kemudian ada Menteri Anies terkait penghargaan yang diterima Indonesia dari UNESCO – Japan Prize 2015.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. DKI Jakarta Deklarasi Provinsi Literasi 2. Permintaan Presiden Jokowi ke KPI 3. Gerakan Kami Sekolah Jujur	Januari	1. Kualitas SMK
Februari	1. Pendidikan Karakter Anti Kekerasan	Februari	1. Pendidikan Vokasional
Maret	1. Tiga Kementerian Bersinergi Siapkan Tenaga Kerja 2. Indonesia Raih Penghargaan Unesco – Japan Prize 2015	Maret	1. Pendidikan Vokasional
April	1. Kerjasama Indonesia – Jerman untuk Pendidikan Vokasi 2. Karangasem Belajar dari Film Inspiratif 3. Lagu Anak Anti Korupsi	April	1. Pendidikan Vokasional
Mei	1. Kerjasama Indonesia – Jerman untuk Pendidikan Vokasi 2. Pertukaran Pelajar SMK di ASEAN	Mei	1. Pendidikan Vokasional
Juni	1. Jenis Pendidikan Karakter 2. Peningkatan Jumlah SMK	Juni	1. Peningkatan Jumlah SMK
Juli	1. Masa Orientasi Siswa 2. Pelantikan Muhadjir Effendy	Juli	1. Mempertajam Pendidikan Vokasional
Agustus	1. Wacana Full Day School 2. Revitalisasi Peta Pendidikan Vokasional 3. Tambahan Guru SMK	Agustus	1. Revitalisasi Peta Pendidikan Vokasional
September	1. Wacana Full Day School 2. Kritik dari Anang Hermansyah	September	1. Peningkatan Jumlah SMK
Oktober	1. Pendidikan Karakter Melalui Kesenian & Lagu Kebangsaan 2. Wacana Full Day School	Oktober	1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Vokasi
November	1. Wacana Full Day School 2. Hari Guru Nasional	November	1. Kebutuhan Guru SMK
Desember	1. Kebutuhan Banyak Sekolah Vokasional 2. Kerjasama Indonesia – Perancis untuk Pendidikan Vokasi	Desember	1. Kerjasama Pendidikan Vokasi

TOP ISSUE CETAK



Jakarta Jadi Provinsi Literasi Pertama di Indonesia
(JPNN, Januari 2016)

JAKARTA- Pemprovi DKI Jakarta menjadi provinsi literasi pertama di Indonesia. Ini ditandai dengan pendeklarasian oleh Pemprov DKI sebagai bentuk dukungan terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam Permendikbud tersebut, diatur mengenai kegiatan membaca buku nonpelajaran sekitar 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, pendeklarasian DKI Jakarta sebagai provinsi literasi diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi daerah-daerah lain untuk ikut aktif menjadi provinsi literasi.

“Semangatnya adalah bagaimana meningkatkan budaya membaca

dan menulis. Bagaimana menjadikan anak-anak kita sejak di bangku sekolah sudah terbiasa, dan menjadikan membaca dan menulis sebagai budaya,” katanya, Kamis (28/1).

Didik menambahkan, Kemendikbud juga akan membantu meningkatkan budaya membaca dan menulis dengan berbagai upaya, salah satunya melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan fasilitasi buku-buku bermuatan pendidikan karakter.

“Kami juga akan mengupayakan agar perpustakaan ramah anak, sehingga dapat membuat anak-anak betah di perpustakaan untuk membaca,” tuturnya. (esy/jpnn)



Ini Dia Tiga Strategi Kemendikbud Ciptakan Pendidikan Berkarakter
(Nusantara, Februari 2016)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat strategi untuk membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, ada tiga kerangka strategi yang dibuat supaya terbentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang kita harapkan yaitu berkarakter dengan didasari semangat gotong-royong.

“Strategi pertama adalah penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan yakni siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan,” kata dia dalam pemaparan materi pada diskusi panel dengan tema “Revolusi Mental Pres Indonesia Menuju Pers Profesional dan Sejahtera” di Rinjani Ballroom, Hotel Lombok Raya, Lombok, Senin (8/2).

“Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian,” sambung Anis.

Strategi kedua, lanjut dia, peningkatan mutu dan akses.

Dia mengatakan, peningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun.

“Meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan,” katanya.

Sedangkan fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Adapun strategi ketiga, adalah pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Anis mengatakan, melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan.

“Membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. §Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. §Fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi Kemdikbud RI yang menjadi teladan dalam tata kelola

yang bersih, efektif dan efisien serta melibatkan publik;” demikian Anis. [sam]

Menaker, Mendikbud dan Mendag Bersinergi Siapkan Tenaga Kerja Berkualitas
(Tribunners, Maret 2016)

Ditulis oleh : Biro Humas Kemnaker TRIBUNNERS - Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dakhiri menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan dan meningkatkan tenaga kerja yang kompeten sehingga siap memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Sinergisitas tersebut meliputi pengembangan standar kompetensi Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja serta pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai mitra bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun lembaga-lembaga kursus (non formal) di seluruh Indonesia.

“Diperlukan penguatan pelatihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berasal dari lulusan pendidikan, terutama SMK dan pendidikan non formal sehingga

dapat diserap dengan cepat oleh pasar kerja yang membutuhkan,” kata Hanif, sesuai pertemuan dengan Mendikbud Anis Baswedan dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, di kantor Kemdikbud Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Menaker Hanif mengatakan untuk memperkuat kualitas pelatihan kerja dibutuhkan dukungan dari Kemdikbud untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan pasar kerja serta tambahan porsi alokasi anggaran fungsi pendidikan agar pelatihan kerja lebih massif dan berkualitas.

“Kita juga dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan formal kita terutama di SMK dan BLK atau

lembaga-lembaga pelatihan yang lain,” kata Hanif.

Sejatinya kata Menaker pendidikan (khususnya vokasi dan atau non formal) memegang peranan penting agar lulusan pendidikan dapat diserap oleh pasar kerja.

Selama ini pada dasarnya pendidikan vokasi dan/atau non formal yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kemnaker, memiliki kemiripan baik dalam hal proses maupun tujuan.

“Untuk itu kurikulum pendidikan tersebut di desain agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau industri. Perlu juga adanya dukungan terhadap

lembaga pelatihan kerja untuk peningkatan kompetensi lulusan SMK dan nonformal agar kualifikasinya memenuhi standar nasional ataupun internasional,” kata Hanif.

Menaker mengatakan Komitmen terhadap sinergi antar kementerian tersebut, juga dilakukan dalam konteks regulasi sebagaimana tertuang dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan pendidikan non formal atau pelatihan.



Kemenperin-Jerman Kerja Sama Pendidikan Vokasi
(Republika, Mei 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi Indonesia-Jerman semakin erat dengan membangun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri khususnya pada pendidikan vokasi. Empat pendidikan vokasi Kemenperin mendapat dukungan Jerman

Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federasi Jerman, Uwe Beckmeyer bersama Delegasi Bisnis Jerman di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu, (18/5/2016).

“Kita tentunya sama-sama berharap bahwa hubungan bilateral yang telah berjalan baik selama lebih

dari 60 tahun ini dapat terus berlanjut. Upaya kerja sama ini sebagai tindak lanjut kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Berlin pada tanggal 18 April 2016,” ujar Menperin.

Kerja sama pendidikan vokasi antara Kemenperin RI dengan Jerman dipayungi dalam kerangka kerja sama Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia dan tingkat serapan lulusan pada sektor industri.

“Selama tahun 2010 – 2015, program SED-TVET di Indonesia di koordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aktivitas utama dalam kerangka kerja sama SED-TVET antara Kemenperin RI dengan GIZ Jerman adalah pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi industri dari aspek manajemen, pengembangan SDM dan dukungan sarana prasarana,” papar Menperin.

Adapun institusi pendidikan Kemenperin yang mendapat dukungan melalui kerja sama tersebut, meliputi 4 Perguruan Tinggi Vokasi (Politeknik STTT Bandung,

Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATK Yogyakarta, dan Politeknik ATI Makassar) serta 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK-SMAK Bogor, SMK-SMTI Pontianak, SMK-SMAK Makassar, dan SMK-SMTI Makassar).

Implementasi program SED-TVET di Kemenperin, antara lain penyusunan School Development Plan (SDP) sebagai instrumen perencanaan dan monitoring pengembangan lembaga pendidikan vokasi yang efektif dan efisien, pelaksanaan Teaching Factory sebagai konsep pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai persiapan percepatan transisi ke dunia kerja, serta fasilitasi dalam penyusunan aspek hukum implementasi pengelolaan Teaching Factory pada Lembaga Pendidikan.

Selanjutnya, penyediaan tenaga ahli (expert) dari Jerman untuk membantu pengembangan pendidikan vokasi Kemenperin seperti penempatan satu orang expert di Politeknik AKA Bogor, yang dilaksanakan pada awal tahun 2016. Selain itu, pengadaan peralatan pendidikan industri dalam bentuk pinjaman untuk pengembangan Teaching Factory pada lembaga pendidikan vokasi senilai Rp. 75 miliar.

Wakil Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Uwe Beckmeyer mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kerja sama ekonomi yang sudah erat selama ini. Apalagi perusahaan-perusahaan Jerman dikenal fokus pada pengembangan riset, selain itu juga didukung aktivitas pendidikan sains dan teknologi.

“Dalam pengembangan vokasi, melalui kerja sama kami berharap semakin banyak sekolah dan tenaga pendidik vokasi dengan mengirim pengajar vokasi Indonesia ke Jerman atau mengundang tenaga ahli vokasi dari Jerman,” ujarnya. Sumber : antar



Kemdikbud tingkatkan persentase jumlah SMK Negeri
(Antarnews, Juni 2016)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan akan meningkatkan persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dari yang sebelumnya 33 persen menjadi 60 persen pada 2020.

“Saat ini perbandingan antara jumlah SMA negeri dan SMK negeri hanya 67 persen dan 33 persen. Ini yang akan kami tingkatkan menjadi 60 persen pada 2020,” ujar Direktur Pembinaan SMK Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mustaghfirin Amin, di Jakarta, Jumat.

Dia menambahkan pihaknya akan melakukan penataan ulang jumlah SMA dan SMK negeri tersebut. Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan vokasional atau keahlian di level sekolah menengah.

“SMK negeri perlu ditata, sehingga bisa meningkatkan akses masyarakat untuk meraih pendidikan keahlian. Semakin banyak SMK negeri, maka semakin memudahkan masyarakat,” tambah dia.

Selama ini, beban terberat dalam mencapai pendidikan vokasional

adalah sedikitnya SMK negeri yang sampai ke daerah terpencil. Akibatnya beban masyarakat untuk mengecap pendidikan semakin berat. Mustaghfirin menjelaskan dalam waktu dekat akan keluar Inpres mengenai pendidikan vokasional.

“Mudah-mudahan bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden dalam waktu dekat. Kemudian dalam tiga hingga enam bulan ke depan akan disusun rencana ke depannya.” Dalam Inpres tersebut juga tertuang tugas dari kepala daerah khususnya gubernur, untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan vokasional.

“Selama ini, pembukaan SMK hanya berbasis pada kebutuhan kabupaten/kota, padahal secara agregat, provinsi membutuhkan bidang tertentu.”

Sementara untuk guru, Mustaghfirin mengatakan pihaknya bisa memberdayakan guru yang sudah ada maupun kerja sama dengan industri.

“Kami juga memikirkan untuk melakukan penyetaraan dan pengakuan bahwa tidak harus guru SMK yang berasal dari industri itu

sarjana, tetapi bisa disetarakan hingga diberikan kewenangan mengajar di SMK,” cetus dia.

Pada kesempatan tersebut, Mustaghfirin menjelaskan SMK negeri akan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada 2017.

“Tujuan dari dana DAK Penugasan ini untuk meningkatkan mutu SMK. Dana ini nantinya bisa digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana, pembelian alat praktikum dan sebagainya,” tukas dia.
Editor: Unggul Tri Ratomo



Mendikbud Larang Pelaksanaan MOS yang ‘Dipegang’ Siswa
(Republika, Juli 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan secara resmi melarang pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS)

yang dilakukan oleh kalangan siswa atau pelajar.

“Meski pelaksanaannya anggota OSIS akan tetap kita larang. Mulai tahun ini harus dilakukan oleh guru atau pengajar,” tutur Menteri Anies dalam sebuah konferensi pers di kantor Kemdikbud di Jakarta, Senin (11/7).

Dia menjelaskan, hal tersebut dilakukan mengingat rawannya terjadi aksi perplonconan atau “bullying” dan bahkan kekerasan yang dilakukan senior terhadap adik kelasnya yang baru masuk sekolah.

Menurut dia, konsep kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sudah saatnya harus diubah dengan memutus salah satu masalah utama dalam lingkungan sekolah, yaitu kekerasan. Dia menceritakan, keputusan tersebut diambil mengingat banyaknya laporan kekerasan baik psikis maupun fisik yang dialami murid baru saat pertama masuk sekolah.

Bahkan telah terjadi sejumlah kasus kekerasan di lingkungan sekolah di beberapa daerah yang berakibat pada kematian, tuturnya. “Ini tidak bisa lagi dibiarkan, karena tidak ada orang tua yang ingin mengantar anaknya ke sekolah dalam kondisi

bahagia tetapi menjemputnya dengan kondisi yang menyedihkan,” pungkasnya.

Menteri Anies memaparkan, pada konsep baru ini yang akan menjadi pelaksana pengenalan lingkungan sekolah ialah guru di sekolah yang bersangkutan. “Kegiatan tidak ada lagi dilakukan oleh senior, dan MOS hanya dilakukan oleh guru pada jam-jam belajar, serta di dalam lingkungan sekolah,” ujarnya.

Walaupun dilakukan oleh guru, Menteri Anies menekankan bahwa kegiatan pengenalan harus bersifat edukatif dan menyenangkan. “Siswa pun harus pakai seragam seperti belajar sehari-hari. Tidak perlu pakai aksesoris yang aneh-aneh, harus pakai atribut sekolah,” tuturnya.
Sumber : Antara



Pemerintah Butuh 90.000 Guru SMK hingga 2020
(Tribun-Medan, Agustus 2016)

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah membutuhkan 90.000 tenaga guru baru untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diproyeksikan hingga 2020.

Penambahan guru tersebut bertujuan untuk menunjang revitalisasi pendidikan vokasional yang kini tengah dirumuskan oleh pemerintah.

“Kami juga butuh 400 SMK lagi agar bisa menampung 850.000 siswa baru,” kata Muhadjir dalam rapat koordinasi tingkat menteri dalam perumusan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Menurut Muhadjir, pendidikan tinggi yang menyediakan calon guru masih terbatas seiring bertambahnya keahlian baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti kelautan dan kemaritiman.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah tidak hanya merekrut guru dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

(LPTK).“Nanti dari Kemendikbud akan lakukan rekrutmen dari lulusan sarjana murni dari bidang yang relevan,” ucap Muhadjir.

“Kemudian nanti akan kami lakukan flash program untuk diberi bekal teori pembelajaran dan pendidikan plus metodologi mengajar yang kira-kira itu dibutuhkan satu hingga tiga semester,” kata dia.

Untuk lulusan LPTK, Muhadjir menyebut calon guru yang telah lulus tidak langsung menjadi guru di SMK. Calon guru harus menjalani magang di industri yang menjalin kerja sama dengan SMK.

“Mereka mengajar itu bukan hanya ilmu yang dia dapat dari perguruan tinggi tapi juga bawa pengalaman dari perusahaan atau industri sehingga apa yang disampaikan berkaitan langsung, nyata dengan lapangan kerja,” ucap Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, masa magang akan berlangsung minimum satu tahun. Setelah itu, akan diadakan seleksi untuk mengetahui kompetensi guru agar bisa mengajar di SMK. Peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional tengah dirumuskan tim penyusun yang terdiri dari lintas kementerian/

lembaga.

Untuk revitalisasi SMK, ketua penyusunan jalan revitalisasi SMK jadi amanat Kemendikbud dan ketua penyusunan peta jalan revitalisasi politeknik dan akademi dipegang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sementara ketua penyusunan revitalisasi balai latihan kerja dan magang dipegang Kementerian Ketenagakerjaan.

Anggota tim penyusun berasal dari Kemeko PMK, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenaker, Kemenperin, Bappenas, Kemenkeu dan kementerian/lembaga lainnya.

Rapat koordinasi sebelumnya, menyiratkan adanya tiga jalur dalam revitalisasi pendidikan vokasional. Jalur itu adalah revitalisasi SMK, jalur revitalisasi politeknik dan akademi kejuruan, serta revitalisasi balai latihan kerja dan program magang bersertifikat. (Lutfy Mairizal Putra/Kompas.com)

Mendikbud Tetap Ingin Laksanakan Full Day School (Netralitas, September 2016)

JAKARTA (netralitas.com) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy tetap ingin mewujudkan program “full day school” (FDS) bagi anak-anak sekolah. Ia optimistis program FDS mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sehingga mampu bersaing di lingkungan regional maupun internasional.

“Kalau anak-anak cuma belajar sampai jam 12 (siang) maka tidak akan maju, saya berani jamin itu,” ujarnya saat meresmikan gedung baru Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, Kamis, (1/9) dikutip dari antara. Pada prinsipnya untuk memajukan kualitas SDM nasional maka harus dibuat terobosan di bidang pendidikan.

Menurutnya, melalui “full day school” para siswa mampu mendapat pelajaran di luar kelas yang bisa membentuk karakter kuat seperti yang diamanatkan pemerintah melalui Revolusi Mental. “Kalau ini dibiarkan, maka saat Indonesia berumur 100 tahun di tahun 2045

akan menghasilkan generasi yang lemah dan rentan kalah dalam persaingan di Asia,” kata Muhadjir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Muhadjir juga menekankan dalam pembentukan karakter yang lebih berkualitas juga harus diimbangi dengan minat membaca yang tinggi.

Oleh sebab itu, Menteri Muhadjir pun mendukung keputusan mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) no.23 tahun 2015. “Saya sangat mendukung pak Anies yang mengeluarkan kebijakan agar membaca 15 menit sebelum belajar dan saya ingin agar Permen ini tetap dilaksanakan,” tambahnya.



Lima Kementerian Bersinergi Kembangkan Pendidikan Vokasi (Metrotvnews, November 2016)

Metrotvnews.com, Jakarta: Lima kementerian bersinergi untuk mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi. Kelimanya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Lima menteri menandatangani pengembangan tersebut dan disaksikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Menperin Airlangga Hartarto mengatakan, sektor industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung pertumbuhan industri berkelanjutan diperlukan dukungan SDM Industri yang kompeten, salah satunya dibangun melalui pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

“Untuk itu, perlu dibangun kemitraan antara sekolah dengan industri, untuk memastikan bahwa supply tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan vokasi sesuai dengan demand (permintaan) dari dunia usaha industri,” ujar Airlangga di kantor Kemenperin, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).

Baca: Pendidikan Vokasi Harus Lebih Banyak Praktik Ketimbang Teori

Dia menegaskan, penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Selain itu juga implementasi arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi.

“Mewujudkan hal tersebut perlu dibangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kementerian terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya link and match pendidikan dengan industri,” papar dia.

Apalagi menurut Airlangga, dalam menghadapi era industri 4.0 yang melibatkan unsur digital dalam setiap rantai nilai proses manufakturnya, para pekerja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. “Kerja sama dan dukungan dari industri juga menjadi faktor penting terselenggaranya pendidikan kejuruan dan vokasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, industri diharapkan perannya untuk memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi serta menyediakan fasilitas praktek dan pemagangan bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen sehingga baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan teknologi industri terkini.

“Investasi yang dikeluarkan oleh industri untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi, pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan risiko produksi, di samping

meningkatkan daya saing industri,” tegas Airlangga.

Sementara itu, Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat menjelaskan, tujuan dari MoU tersebut adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

“Upaya ini juga untuk menghasilkan calon tenaga kerja industri manufaktur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.

Ruang lingkup MoU ini meliputi upaya untuk membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri.

Selanjutnya, sebagai fasilitasi industri dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen, fasilitasi industri untuk penyediaan workshop/

teaching factory dan instruktur dari industri, peningkatan kompetensi guru/dosen melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan industri, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan vokasi.



RI dan Perancis Kembangkan Pendidikan Vokasi (Terbittop, Desember 2016)

L O N D O N - (T E R B I T T O P . COM)-Indonesia dan Prancis mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan vokasi dan kejuruan melanjutkan kemitraan strategis bidang pendidikan tinggi yang terjalin sejak tahun 2011 menjadi isu utama pengembakan pendidikan di kedua negara.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Paris, Surya Rosa Putra kepada Antara London, Jumat mengatakan KBRI Paris bekerja sama dengan Institut Fran,ais Indonesie (IFI), Kedubes Perancis

di Jakarta, mempertemukan sekitar 50 aktor kerja sama pendidikan vokasional kedua negara dalam acara

“Focus Group Discussion” (FGD) yang diadakan KBRI di Prancis. Dikatakan empat bidang vokasi yang dibahas selama diskusi adalah bidang energi, bidang turisme, bidang pertanian dan bidang maritim.Dubes RI untuk Prancis, Kepangeranan Monaco dan Andora, Hotmangaradja Pandjaitan dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama pendidikan dari

tingkat dasar sampai menengah sebagai bagian dari proses alih inovasi dan riset perguruan tinggi kedalam masyarakat.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta, M. yang juga ketua delegasi RI dalam FGD tersebut, mengatakan pendidikan kejuruan merupakan salah satu kunci dalam pembangunan Indonesia menuju kekuatan ekonomi ke-7 dunia akhir 2030.

Dua pembicara lain, masing-masing Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Paris, Prof. Surya Rosa Putra dan Prof. Emilienne Baneth Nouailhetas, Atase untuk Kerjasama Pendidikan, IFI, Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, sepakat kerja sama bidang pendidikan dasar, menengah dan kejuruan yang sudah dirintis sejak 2015 lalu, berpotensi untuk diperluas.

Pembahasan kerja sama dalam pendidikan kejuruan bidang energi melibatkan Campus des M'tiers et des Qualifications (CMQ – Kampus Kejuruan dan Kualifikasi) Energie et Efficacit' Energ'tique (CMQ3E) dan Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud.

Unggulan CMQ3E merupakan grup unggulan yang terdiri atas beberapa SMK, universitas, pihak perusahaan serta pelaku ekonomi yang bertujuan memfasilitasi masuknya lulusan profesional ke dunia kerja regional Perancis.

Selama ini, kerja sama ditujukan membantu Indonesia meningkatkan kualitas guru dan pengembangan SMK empat tahun di Indonesia. CMQ3E mendatangkan beberapa tenaga ahli dan menerima

beberapa guru magang, serta delapan mahasiswa di BTS (Brevet Technicien Sup'rieur, setara D-2 di Indonesia) di lingkungan CMQ3E sejak tahun 2015.

Diskusi melibatkan, antara lain Inspektur Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Prancis, Catherine Moalic, Direktur PSMK, Drs. Mustaghfirin Amin, MBA, Direktur CMQ3E F,camp, Prancis Didier Pinel, dan Fran'ois Milioni dari Scheneider Elerctric Foundation.

Prancis dan Indonesia sepakat melanjutkan kerja sama ini, antara lain dengan mengembangkan Center of Excellence pengembangan guru vokasional bidang energi di Indonesia. Kerja sama dengan model CMQ3E ini akan dikembangkan bidang kejuruan lain seperti turisme, pertanian dan maritime.

Hal ini disetujui Direktur CMQ di bidang Pariwisata, Perhotelan, dan Kuliner di Provisine Alpes C'te d'Azur, Corinne Clerissi, serta Fran'ois Gasparetto dan Daniel Pezzin dari Kementerian Pertanian Prancis serta Chistophe Molin, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Maritim di F,Camp,

yang juga merupakan anggota komisi kurikulum dari Kementerian Lingkungan, Energi dan Kelautan Perancis.(ant)

Media Indonesia
Januari 2016

Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas SMK

Dua pengajar meninjau modul perikanan yang diberi nama Sky Jump V-1501 di halaman SMK Angkasa Lautur Husin Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Pengembangan pendidikan vokasi kejuruan menjadi tugas Kementerian dalam program Revitalisasi Mental.

PENDIDIKAN memiliki posisi penting dalam gerakan revolusi mental. Pendidik sangat berperan membuat siswa bangga dengan Indonesia sejak usia dini. Dengan demikian, mereka memiliki semangat cinta Tanah Air dan berkehadiran memajukan bangsa.

Sesuai dengan tujuan akhir program Revitalisasi Mental di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setidaknya memiliki tiga tugas penting yang harus diemban untuk memajukan gerakan tersebut. Pertama, mengubah paradigma pendidikan berbasis taqwa menjadi pendidikan yang mandiri dan berkepraktisan.

Kedua, merancang kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah dan latar anak. Ketiga, meningkatkan proses belajar yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak.

Dalam Pendidikan Dasar Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menggunakan revolusi mental di sekolah dilakukan melalui pendidikan karakter, baik melalui kegiatan kurikuler, ekstra, maupun nonkurikuler. Itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 dengan tujuh pilar karakter yang telah dilaksanakan di sebagian besar sekolah di seluruh Tanah Air.

Terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi, khususnya SMK kelautan dan SMK pariwisata, Hamid menyampaikan bahwa ini mendapat program afirmasi berupa revitalisasi, peningkatan mutu, dan pembangunan sekolah baru di sejumlah daerah. "Dengan upaya ini diharapkan, SMK kelautan dan pariwisata dapat berkontribusi terhadap program Nawa Cita Indonesia sebagai poin maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi."

Mengenal kegiatan tenaga pendidik atau guru dalam mengembangkan program revitalisasi mental bidang vokasi, Direktur Pendidikan SMK Dijepi Dikmen Kemendikbud Mustaghfirin Amin mengatakan hal itu merupakan tantangan besar. Permasalahannya ialah beban pekerjaannya telah pertambahan SMK dengan penyediaan sarana guru kejuruan serta terbentarnya pasokan dari perguruan tinggi. Ditambah lagi, permasalahan penemuan guru kejuruan yang jumlahnya tidak ada di lembaga pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK).

Untuk itu, Mustaghfirin menyebutkan pihaknya akan menyiapkan sejumlah strategi terkait dengan hal itu, yakni pembiasaan penemuan Mendikbud yang bersedia raung bagi tenaga profesional dari dunia reformasi dan usaha untuk menjadi guru di SMK. Misalnya, melalui dan kapten kapal yang sudah berpengalaman melaut dengan kapal ukuran tertentu dan berpengalaman lebih dari 8 tahun. "Permendikbud ini menjadi dasar hukum penempatan tenaga profesional kompetensi calon guru kejuruan. Dengan standar ini terbuka luas bagi para profesional dari industri untuk menjadi guru kejuruan di SMK."

Kelua, dilakukan penemuan dari penerbitan ketertarikan guru kejuruan di tingkat provinsi, sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan itu, urusan SMK dan SMA akan dikelola provinsi pada 2017.

Kelua, mengembangkan kompetensi guru kejuruan di SMK sehingga mereka menjadi kompetensi dobel dan terjadi optimalisasi guru kejuruan di SMK. Keempat, mendorong SMK bekerja sama dengan industri agar bisa membantu tenaga profesional mereka menjadi guru baru di SMK. Kelua, SMK mengadopsi alumni yang sukses untuk berbagi ilmu.

Keempat, menggunakan program belajar secara online dengan guru terbaik dari seluruh Indonesia. "Pola ini memotivasi pembelajaran terbaik dirikan dan dianggap di laman Kemendikbud sehingga semua siswa dari seluruh Indonesia bisa belajar secara mandiri." (Daya:2)

PENDIDIKAN VOKASI

SMK Pertanian Kurang Diminati

JAKARTA, KOMPAS — Menarik minat anak muda untuk memilih SMK bidang pertanian tak semudah menarik minat mereka untuk memilih SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, kesehatan, serta pariwisata. Dengan kata lain, pertanian belum menjadi pilihan utama para remaja.

Pengembangan SMK pertanian pun harus mengandalkan pemerintah karena kurang dilirik swasta. Data Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan, pada 2010, ada 782 SMK negeri yang memiliki bidang studi pertanian dan 278 SMK swasta yang mempunyai bidang studi itu. Pada 2013, jumlah ini bertambah menjadi 1.018 SMK negeri dan 421 SMK swasta.

SMK negeri dengan bidang pertanian, yakni Studi Keahlian

Agribisnis dan Agroindustri, merupakan satu-satunya SMK negeri yang jumlahnya lebih banyak ketimbang SMK swasta. Di bidang lain, jumlah SMK swasta lebih banyak daripada SMK negeri.

Di bidang kesehatan, misalnya, pada 2010, hanya ada 39 SMK negeri, tetapi jumlah SMK swasta mencapai 410 sekolah. Jumlah ini bertambah menjadi 98 SMK negeri dan 980 SMK swasta pada 2013. "Hal ini menunjukkan pengembangan studi keahlian agribisnis dan agroindustri tidak menguntungkan swasta. Peminatnya sedikit," kata Ketua Asosiasi Sekolah Keperawatan, Kehutanan, dan Kelautan Priyanto, Senin (22/2), di Jakarta.

Menurut Priyanto, yang juga konsultan Direktorat Pembinaan SMK, harus ada perubahan tata kelola pendidikan SMK bidang

pertanian. Salah satu bentuk yang digagas ialah mewujudkan SMK Usahatani dan Wisata Agro. Program yang bekerja sama dengan Perancis ini dimulai tahun depan, berupa proyek percontohan di lima SMK.

"Siswa SMK belajar empat tahun sambil disiapkan menjadi pengusaha pertanian organik dan dua tahun didampingi dalam pengembangan usaha. Prospek pertanian organik menjanjikan dan ini bisa menjadi keunggulan di SMK pertanian agar diminati," kata Priyanto.

Jumeri, Kepala SMKN 1 Bawen, Jawa Tengah, mengatakan, SMK pertanian belum menjadi favorit. "Biasanya jadi pilihan bagi mereka yang kepepet mencari sekolah murah," ujarnya.

Ia menyambut baik pengembangan SMK pertanian agar memiliki citra lebih modern. (ELN)

Presiden Dorong Pendidikan Kejuruan

Program-program Keahlian di SMK Akan Dipetakan Ulang

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Tahun ini, pemerintah akan membangun banyak tempat pendidikan kejuruan di Indonesia.

JUMLAH SEKOLAH, GURU, DAN PESERTA DIDIK
Rakap Nasional Tahun Ajaran 2015/2016 per 30 Maret 2016



Demi itu diungkapkan Jokowi saat acara Dialog Publik bersama Presiden yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu (20/3), di Jakarta. "Mengenal kegiatan sumber daya manusia kita berkompetisi, memang harus dipersiapkan. Sebab, kalau tidak dipersiapkan, kita akan ketinggalan terus," katanya.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah akan membangun sekolah menengah kejuruan dalam jumlah besar mulai tahun ini. "Kalau dulu ada 50 lulus, mulai tahun ini akan ada SMK lulus. Pendidikan vokasional akan kita gangap besar-besaran, yaitu SMK dan politeknik," tutur Presiden.

Pendidikan kejuruan itu akan menjadi pusat pelatihan bagi siswa yang akan masuk ke dunia kerja. "Ke depan, pelatihan-pelatihan harus lewat institusi-institusi ini," kata Jokowi.

Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin mengatakan, baru pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pembangunan SMK baru. Sebanyak

341 SMK baru bisa dibangun di daerah yang belum memiliki SMK. "Biasanya setiap tahun hanya dianggarkan untuk pembangunannya 40 SMK baru. Karena SMK dipaksa harus dikembangkan akses dan kualitasnya, keberyaban pada pembangunan SMK baru langsung dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini sebagai komitmen untuk melaksanakan pendidikan vokasi menengah berkualitas yang sesuai potensi dengan lokal," ujar Mustaghfirin.

Dalam rangka mendukung program pembangunan pemerintah, Kemdikbud mengizinkan SMK yang memiliki program keahlian di bidang pariwisata, pertanian, dan maritim. Selain itu, dilakukan juga pemetaan ulang mengenai program-program keahlian yang ada di SMK untuk melihat prospeknya terkait perkembangan teknologi dan tantangan perubahan jaman.

"Jika ada program keahlian yang dinilai tidak prospektif, ya kami tutup. Sebaliknya, jika ada kebutuhan untuk program keahlian baru, untuk mengisi ke-

butuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur, misalnya, baru-buru ini SMK bidang konstruksi diperkuat," ujar Mustaghfirin.

Peningkatan daya saing lulusan SMK di pasar kerja juga diprogramkan. Kemdikbud mendukung 1.200 SMK untuk melakukan sertifikasi kompetensi yang diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pendidikan vokasi di SMK diawasi karena jumlah lulusannya yang mengunggul lebih banyak daripada lulusan SMA. Dari data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2015, sebanyak 12,66 persen penganggur berasal dari SMK, 10,32 persen dari SMA, 7,54 persen dari diploma, dan 6,40 persen dari universitas.

Marlock, Koordinator Lapangan Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Memengah Kejuruan Indonesia, mengatakan, penguatan pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi sangat penting bagi masa depan bangsa. "Untuk apa punya banyak sarjana, tetapi tidak terampil dan tidak punya keterampilan," ucap Marlock.

Marlock menyuruti persoalan *link and match* yang belum berjalan baik, tak hanya terkait dengan dunia industri. Lulusan SMK yang banyak melanjutkan ke perguruan tinggi masih dipersulit karena regulasi yang belum terpadu. "Tamatan SMK seharusnya bisa bekerja, melanjutkan kuliah, dan menjadi wirausaha," ujar Marlock. (ATA/ELN)

Kompas
Februari 2016

Kompas
Maret 2016

Media Indonesia
April 2016

Pemerintah Genjot Program Vokasi

Percepatan pembangunan membutuhkan banyak tenaga terampil. Pendidikan SMK maupun politeknik jadi solusi penyedia SDM terlatih.

SYARIF OEBADILLAH

UPAYA pemerintah meningkatkan program pembangunan dengan infrastruktur yang lebih baik memerlukan banyak tenaga terampil. Oleh karena itu, pendidikan vokasi atau SMK dan politeknik harus diafirmasi.

Guna mewujudkan upaya tersebut secara berkesinambungan, mesti ada pelatihan tambahan serta perhatian lebih khusus bagi pelajar yang meng-

ambil bidang kejuruan baik tingkat SMK maupun politeknik.

Demikian dikemukakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat menyambut Hari Pendidikan Nasional (12 Oktober) dan HUT PDI Perjuangan (PDJ) di Gedung MPR/DPR Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, badre juga Mendikbud Anies Baswedan, praktisi pendidikan Indra Charismadji, dan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto.

Pemerintah, kata Puan, berkomitmen mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan tol, jalur kereta api, bendungan, dan pembangkit listrik yang dilakukan secara masif.

"Hal ini memerlukan ketersediaan tenaga kerja terampil. Seheh itu, di masa depan, kita perlu memberikan perhatian dan penguatan yang lebih kepada pendidikan SMK, vokasi, dan

politeknik," cetusnya.

Puan mengungkapkan saat ini terdapat 1,3 juta lulusan SMK dan 70 ribu lulusan politeknik. Mereka mesti diberikan afirmasi, melalui *retooling* bekerja sama dengan industri dan *bolal latihan kerja* (BLK) ataupun *science and techno park* (STP) agar memiliki keterampilan memadai.

Anies menyatakan pengembangan pendidikan vokasi terus ditingkatkan dengan menambah jumlah SMK. Unit sekolah baru digenjut dari 20 SMK per tahun, mulai 2016 ini menjadi 341 SMK. "Jurusan juga akan ditambah, kemampuan siswa SMK ditingkatkan terutama bidang vokasi maritim, pariwisata, dan pertanian," ungkapnya.

Ia mengatakan Kemendikbud akan memindahkan juri pembicaraan tingkat tinggi Presiden Jokowi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. "Kita akan jalan kerja sama dengan Jerman untuk pengembangan SMK," tegasnya.

Butuh SDM siap pakai

Praktisi pendidikan Indra Charismadji menilai langkah Presiden Jokowi tepat mengembangkan vokasi karena wilayah Indonesia yang luas lebih membutuhkan SDM siap pakai.

"Ini langkah pemerintah tepat, sebab negara maju Jerman dan Tiongkok juga genjot vokasi," ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Indra, pemerintah mesti serius menyiapkan SDM guru SMK yang andal agar mampu mencetak lulusan SMK yang siap pakai mengisi pembangunan di Tanah Air.

Ia menyarankan Kemendikbud mengambil guru SMK terampil dari kalangan praktisi perusahaan dan industri agar siswa SMK lebih mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pada lawatannya ke Jerman beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mengunjungi Siemens di Berlin. Jerman dianggap sukses mengembangkan pendidikan vokasi (keterampilan) sehingga tingkat pengangguran di Jerman termasuk paling rendah di Eropa.

Di Jerman, pendidikan diarahkan ke dua jalur, yaitu universitas atau vokasi. Meski pendidikan difokuskan pada keterampilan, siswa dari program vokasi bisa juga melanjutkan ke universitas. (H-2)

oebay@mediaindonesia.com

PENDIDIKAN VOKASI

Selaraskan Program Studi dengan Industri

MALANG, KOMPAS — Jurusan-jurusan di SMK hendaknya beriringan dengan kebutuhan industri dan pembangunan. Oleh karena itu, perusahaan dan sekolah perlu mendekatkan diri agar bisa saling memahami dalam membentuk dan mengembangkan program peminatan.

"SMK jangan membuka program jurusan hanya karena minat pasar, tetapi pikirkan betul kegunaan program itu untuk pembangunan," kata Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mustagfirin Amin dalam seminar nasional mengenai jurusan SMK, di Malang, Jawa Timur, Selasa (24/5). Acara ini adalah bagian dari Lomba Kompetensi Siswa SMK 2016 yang diikuti 1.153 siswa SMK se-Indonesia dan melombakan 52 bidang kejuruan.

Mustagfirin mengingatkan agar jurusan dan materi pembelajaran tidak bersifat monoton, tetapi harus dinamis agar selaras dengan perkembangan teknologi. Di bidang teknik bangunan, misalnya, siswa jangan hanya belajar membangun dengan bata, batu, dan kayu. Kembangkan pu-

la pembelajaran membangun dengan bahan lain, seperti serat karbon, plastik, dan logam.

Menurut dia, pembukaan dan pengembangan program jurusan SMK harus memperhatikan tiga aspek. Aspek pertama, jurusan itu diperlukan oleh masyarakat, industri, dan pembangunan. Kedua, menarik minat siswa. Aspek ketiga adalah jurusan tersebut bisa dipelajari dengan baik di SMK. "Perlu dipertimbangkan melebur dua program untuk membentuk program baru yang relevan. Jurusan desain interior, misalnya, digabung dengan desain perabotan," ujar Mustagfirin.

Guna mencapai mutu sesuai standar internasional, SMK juga perlu mengejar sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hingga 2015, baru 1.100 SMK memiliki sertifikasi level 2 dan 50 SMK bersertifikasi level 3, yakni setara dengan diploma 1. Berdasarkan data Kemendikbud, saat ini terdapat sekitar 12.800 SMK.

Negara-negara Asia Tenggara mengakui kompetensi dengan syarat minimal bersertifikasi level 2. Level tertinggi yang diakui adalah level 6. (DNE)

Kompas
Mei 2016

Perbanyak SMK Milik Pemerintah

Revitalisasi Perkuat Jaringan dengan Industri

JAKARTA, KOMPAS — Revitalisasi pendidikan vokasi di tingkat pendidikan menengah dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja menengah yang terdidik dan terampil. Untuk itu, akses ke sekolah menengah kejuruan juga ditingkatkan dengan menambah sekolah milik pemerintah.

SMK ini semestinya makin memudahkan kerja sama dengan industri. Peluang terbuka bagi industri untuk berinvestasi lewat *teaching factory* di SMK.

Kemertanian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara bertahap segera menambah jumlah SMA negeri yang saat ini komposisinya 67 persen dibandingkan dengan SMK negeri yang komposisinya 33 persen. Komposisi akan dijadikan 60 persen SMK negeri dan 40 persen SMA negeri.

Pada tahun ajaran 2015/2016, terdapat SMK negeri 3.730 sekolah dan swasta 9.339 sekolah. Total siswa SMK berkisar 4,2 juta orang, termasuk siswa baru yang berjumlah sekitar 1,63 juta orang. Adapun lulusan SMK sekitar 1,42 juta siswa.

Tenaga kerja menengah diperkirakan bisa mencapai 90 persen pada 2020-2025. Ini bisa dicapai dengan menyediakan SMK yang berkualitas supaya tenaga kerja kita punya daya saing," ujar Direktur Pembinaan SMK, Kemdikbud, Muataghfirin Amin, Jumat (24/6), di Jakarta.

Menurut dia, penambahan jumlah SMK negeri dibutuhkan untuk membuka akses yang luas bagi lulusan SMP masuk ke SMK. Adapun SMK negeri yang semakin banyak juga memudahkan implementasi perubahan kebijakan oleh pemerintah. "Kalau yang swasta itu, kan, bergantung kondisi masyarakat," ujar Muataghfirin.

Selain itu, ada juga dukungan pemerintah untuk biaya investasi, seperti ruang kelas, laboratorium, dan sarana-prasarana lain melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah. Pada 2017 direncanakan ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Penguasaan yang dipakai untuk membantu peningkatan sarana dan prasarana SMK swasta. Kesejahteraan pendidik pun didukung lewat tunjangan profesi guru.

Terkait dengan penambahan guru produktif, ujar Muataghfirin, bisa ditampung dengan merekrut guru baru. Ada juga rencana mengalihfungsikan guru yang tidak sesuai *competence* dengan memberikan pelatihan. Pemertanian tenaga ahli dari dunia industri juga dimungkinkan untuk menambah jumlah guru produktif.

Menurut dia, SMK jangan puas ketika siswa bisa memproduksi barang/jasa. Tetapi, juga dibekali kemampuan menjual atau memasarkannya sehingga meningkatkan nilai tambah. Utamanya untuk SMK pertanian dan kelautan perlu dibekali kemampuan sesuai pasar.

"Contohnya pendidikan kedokteran. Pengajar dan mahasiswa sama-sama terjerin. Guru dan siswa SMK bersama-sama di tengah-tengah industri melalui *teaching factory* yang dikelola dengan baik," ujar Marlock.

Kedek Budi Sandika, dosen STMIK Bali, dalam ujian terbuka promosi doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, pekan lalu, mengatakan, model kemitraan industri-SMK harus terbangun. Kemampuan adaptasi SMK untuk melakukan perubahan cenderung lambat. Akibatnya, penguasaan teknologi dan kompetensi lulusan menjadi tertinggal jauh dari yang diharapkan pengguna lulusan. Kemitraan diawali dengan pengembangan kurikulum, meliputi identifikasi kebutuhan dunia kerja, potensi daerah, dan daya dukung satuan pendidikan.

Marlock, Koordinator Lapangan Forum Fasilitasi Pendidikan Penelitian Masyarakat Indonesia, berpendapat, revitalisasi

0120

Kompas
Juni 2016



Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anas Sudarso memilih anaknya saat berinteraksi dengan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Rabu (27/6). Anas mengabdikan tugas setelah Presiden Joko Widodo mengangkat Muahadjir Elfidhy sebagai Mendikbud yang baru.

Muhadjir Akan Pertajam Vokasi

Di Bawah Mendikbud Baru, Kurikulum Tidak Berubah secara Mendasar

JAKARTA, KOMPAS — Mulai Kamis (28/7) ini, Muahadjir Elfidhy langsung bekerja sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anas Sudarso. Muahadjir berjanji melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang sudah dibuat Anas dan para menteri sebelumnya.

Menurut dia, pemerintah akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan. "Kurikulum tidak akan ada perubahan mendasar," kata Muahadjir.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muahadjir Elfidhy menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Internasional Kemendikbud. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Internasional Kemendikbud. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Internasional Kemendikbud.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muahadjir Elfidhy menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Internasional Kemendikbud. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Internasional Kemendikbud.

Program utama lainnya adalah meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. "Kita akan meningkatkan jumlah guru yang berkualitas," kata Muahadjir.

Program utama lainnya adalah meningkatkan jumlah guru yang berkualitas. "Kita akan meningkatkan jumlah guru yang berkualitas," kata Muahadjir.

Kompas
Juli 2016

Media Indonesia
Agustus 2016

Ujian Praktik SMK Tiap Dua Semester

Pendidikan vokasional harus selaras kebutuhan kerja di lapangan. Sertifikasi sangat dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja yang kompetitif.

PUPUT MUTIARA

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan merombak kurikulum pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mewajibkan tiap dua semester siswa harus mengikuti ujian praktik yang langsung diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan demikian, jika lulus tes itu, mereka akan langsung mendapatkan sertifikat kompetensi yang berguna untuk melamar pekerjaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan rencana tersebut disesuaikan dengan misi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul di setiap bidang serta memiliki daya saling.

"Kita ingin ada penyesuaian yang bisa mendukung program Nawa Cita. Apalagi pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur yang tentunya membutuhkan banyak SDM

berkualitas," ujarnya sesuai Rapat Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi bersama Kementerian Koordinator Penguatan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMKB) di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan, mengenai masalah pendanaan untuk sementara akan ditanggung pemerintah melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga terkait. Pasalnya perubahan kurikulum secara menyeluruh ikut melibatkan sejumlah pihak termasuk Kementerian Ketenagakerjaan yang menyediakan sarana bagi siswa magang. "Sampai 2020 proyek kami ada tambahan SMK sebanyak 400, yang setidaknya akan menampung sekitar 850 ribu siswa. Guru-gurunya juga kami siapkan," ucapnya.

Lebih lanjut, terang Muhadjir, para guru yang akan mengajar di SMK bukan lagi sekadar sarjana yang relevan di bidangnya, melainkan juga harus memiliki pengalaman kerja di industri. Pun jika guru yang sudah mengajar saat ini belum berpengalaman, nantinya harus menjalani proses magang minimal setahun.

Penguatan vokasi

Raker tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang menyatakan adanya tiga jalur dalam revitalisasi pendidikan vokasional, yakni jalur pertama revitalisasi SMK, kedua revitalisasi politeknik dan akademi kejuruan, ketiga revitalisasi Balai Latihan Kerja dan

program magang bersertifikat. Rapat tersebut juga menekankan perlunya dipertimbangkan 12 sektor prioritas MEA dan kebutuhan industri (dalam negeri) dalam merevitalisasi pendidikan vokasional.

Menteri Koordinator PMK Puan Maharani menegaskan berbagai upaya telah dirancang pemerintah termasuk merumuskan peta jalan pendidikan vokasi. Penekanannya didasari pertimbangan 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN dan industri dalam negeri yang butuh banyak SDM kompetitif. "Kita harus antisipasi supaya jangan sampai tenaga kerja asing yang menguasai pasar kerja kita," ujarnya.

Puan menjabarkan peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional dirumuskan tim penyusun yang terdiri atas lintas kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemendiklat dan Dikti, serta Kemaker. "Kita butuh sinergi untuk merevitalisasi pendidikan vokasional ini sebab *fix and match* itu tidak mudah. Kita butuh roadmap yang jelas untuk menggerakkan semua kementerian dan lembaga sehingga tenaga kerja vokasional bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri," katanya.

Dia berharap sebelum Oktober nanti peta jalan revitalisasi pendidikan vokasional dapat terselesaikan oleh tim penyusun. (*)/H-1)

puput@mediaindonesia.com

Kompas
September 2016

Vokasi Jangan Abaikan Kualitas

Pertumbuhan SMK Perlu Disertai Penjaminan Mutu

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan pendidikan vokasi di jenjang sekolah menengah kejuruan perlu dikendalikan dengan mengutamakan kualitas pembelajaran yang membekali siswa dengan ilmu pengetahuan dasar, keterampilan teknis, dan karakter.

Peningkatan jumlah SMK yang tidak memperhatikan sisi kebutuhan dunia industri hanya akan membuat lulusan SMK

Direktor Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Amich Al-

hazani, di Jakarta, Senin (29/9), mengatakan, pada 2015, jumlah SMK tercatat 12.699. Pada tahun ini, jumlahnya bertambah jadi 13.150 atau dalam setahun bertambah 461 SMK. Adapun SMK dengan kualitas yang dinilai baik dan layak untuk menjadi rujukan hanya sekitar 1.150 institusi.

Dalam lima tahun ke depan, sejak 2015, ditargetkan 1.650 SMK sebagai sekolah rujukan. Sekolah ini menjadi kerja sama dengan minimal 75 dunia usaha/industri, memiliki guru dengan paket keahlian, dan jumlah siswa minimal 1.000.

Direktor Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Mustaghfirin Amich mengatakan, ada 6.000 SMK kecil yang memiliki 100-200 siswa, terutama yang didirikan pihak swasta (Kompas, 29/9/2015).

"Pengembangan SMK, terutama di bawah Kemdikbud, selama ini dengan pendekatan supply

driven. Terlihat bahwa program keahlian yang dibuka lebih banyak tak berdasarkan potensi industri yang ada di daerah. Karena itu, harus ada keberanian dari Kemdikbud untuk meminta pemerintah daerah agar jangan mudah memberi izin pembukaan SMK yang tidak sesuai potensi industri yang ada. Pendekatannya harus bergeser jadi demand driven untuk memenuhi kebutuhan industri," tutur Amich.

Menurut Amich, keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan vokasi di SMK, politeknik, ataupun akademi komunitas jangan sampai menyulitkan masyarakat dengan tidak

mengedepankan mutu. Sebab, lulusan pendidikan vokasi ini mestinya siap bekerja dan terampil ke pasar kerja, bukan menambah jumlah pengangguran terdidik di negeri ini.

Amich mengatakan, industri manufaktur akan berkembang. Pertumbuhan ekonomi utamanya dari sektor industri dan jasa. Hal ini berarti kebutuhan tenaga kerja bidang sains dan teknologi meningkat. Namun, ini belum berarti dalam peningkatan program keahlian di SMK ataupun politeknik.

Penjaminan mutu

Dalam pendidikan di SMK,

agar Amich, dan sistem pendidikan, yakni di dalam kelas dan di industri lewat magang, harus dipertimbangkan berjalan dengan baik. Perlu penjaminan mutu yang disiplin seperti bersama agar sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran yang baik sehingga siswa menguasai ilmu pengetahuan dasar, seperti matematika, sains, teknologi informasi, dan komunikasi, serta bahasa. Selain itu, juga perlu peningkatan kecenderungan kognitif dan berpikir kritis. Demikian pula dengan kompetensi sosial, mulai dari komunikasi, negosiasi, kerja tim, kepemimpinan, pemecahan masalah, etos kerja, karakter, hingga kewirausahaan.

"Jika lulusan pendidikan vokasi menguasai ilmu pengetahuan dasar, keterampilan teknis di bidangnya sesuai standar, serta kompetensi sosial, kita akan punya lulusan vokasi yang berdaya saing. Dibutuhkan ini yang harus dicapai dengan memperkuat relevansi pendidikan vokasi dengan industri," ujar Amich.

Takbisa, di jenjang SMA, jumlah siswa yang memilih bidang ilmu pengetahuan akan jauh lebih banyak daripada ilmu sosial dan humaniora. Sebaliknya, di jenjang perguruan tinggi, program studi yang diminati justru sains-humaniora (ELN)

Republika
Oktober 2016

Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Dinilai tak Jelas

● DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai, perencanaan kebutuhan tenaga kerja saat ini masih belum jelas dan belum dapat dijadikan sebagai patokan. Karena itu, masih banyak lulusan sekolah vokasi yang justru menganggur karena keterampilannya yang tak sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

"Selama ini kita tidak punya perencanaan tenaga kerja yang cukup bisa dijadikan patokan itu. Ya itu. Sehingga, karena tidak jelas ada pesanan kita jahit ya semanya kita jahit. Itu yang jadi masalah sekarang," kata Muhadjir di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/10).

Dia menjelaskan, Kemendikbud hanya mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Namun sayangnya, kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini masih belum jelas. Karena itu, kata dia, diperlukan perencanaan kebutuhan tenaga kerja, sehingga para lulusan sekolah vokasi dapat memiliki kemampuan yang sesuai.

"Misalnya empat tahun yang akan

datang kita butuh ahli apa *sih*? Butuh keterampilan apa *sih*? Sehingga kita mulai mencetak spesifikasi dari keterampilan itu dan berapa jumlah yang akan dibutuhkan, sehingga ada proyeksi kebutuhan tenaga kerja," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja itu pun tak hanya disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri di tingkat nasional, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan di tingkat regional. Hal ini pun dia sampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Lebih lanjut, selain masalah proyeksi rencana kebutuhan tenaga kerja, banyaknya lulusan SMK yang menganggur juga disebabkan oleh terbatasnya jumlah guru produktif yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang studi di sekolah vokasi tersebut. Hingga 2020, Indonesia masih membutuhkan sekitar 91 ribu guru produktif.

"Tapi untuk itu kalau harus melakukan perekrutan PNS tidak mungkin karena langkah kita untuk sementara itu memberikan keahlian tambahan atau keahlian minor untuk guru-guru adaptif. Guru yang selama ini mengajar ilmu-ilmu dasar di

SMK itu akan disekolahkan lagi, terutama di industri, dalam jangka waktu tertentu, sehingga nanti dia punya keahlian ganda," katanya.

Dia menargetkan, terdapat sekitar 15 ribu guru adaptif yang akan disekolahkan kembali, sehingga memiliki keahlian tambahan pada awal tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menyampaikan pemerintah tengah berupaya menciptakan guru produktif sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan vokasi yang berkompetensi dan dibutuhkan dunia kerja. Sebab, selama ini pendidikan vokasi, menurut dia, justru belum menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan profesional.

"Saya ingin melihat guru yang bisa menghasilkan lulusan vokasi di SMA-SMA tidak baik, karena tidak ada guru produktif. Nanti kami akan ciptakan dalam hal ini melalui pendidikan terampil ini. Saya akan jadikan bagaimana menghasilkan guru yang produktif ini," kata M Nasir di gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (24/10).

■ ed | muhammad hahli

Republika
November 2016

SMK Membutuhkan 91 Ribu Tenaga Pengajar

● UMI NUR FADHILAH

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membutuhkan 91 ribu guru SMK untuk melaksanakan program pendidikan vokasi. Mereka nantinya akan mempersiapkan lulusan yang berkompetensi untuk bekerja.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Pranata menjelaskan, pemerintah memiliki empat bidang yang ingin dibidik dari pendidikan vokasi. Yakni, program maritim dan kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, serta industri kreatif. "Proses rekrutmen tidak mudah. Sementara suplai tak ada," kata dia di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (3/11).

Kemendikbud mempunyai dua cara untuk memenuhi kebutuhan guru SMK. Pertama rekrutmen, tetapi suplai guru tidak ada. Kedua, memberikan sertifikat tambahan pada guru-guru adaptif menjadi produktif.

Guru adaptif, yakni yang mengajar pendidikan kewarganegaraan (PKN), matematika, seni budaya, IPA, IPS, kewirausahaan, dan KKPI (keterampilan komputer dan pengelolaan informasi). Ia enggan menyebut penambahan sertifikat tersebut sebagai alih fungsi. Guru SMK terdiri atas tiga tipe, normatif, adaptif, dan produktif.

Pranata menuturkan, pada 2016, Kemendikbud memberikan sertifikat ganda pada 15 ribu guru. Proses pendaftaran dilakukan sejak dua bulan lalu. Hingga Oktober, sudah ada lebih dari 16

ribu guru yang mendaftar. "Contoh guru biologi berminat di pertanian, akan kita seleksi berdasarkan TBS (tes bakat skolastik)," ujar Pranata.

Ia menjelaskan, para guru akan mengikuti pelatihan dan pendampingan selama setahun. Pelatihan menggunakan modal dan praktik di industri. Tenaga pengajar akan mengajar sebagai guru produktif mulai Juli 2017. Pranata mengatakan, pemenuhan kebutuhan 91 ribu guru dilakukan secara bertahap.

Proses awal, Kemendikbud menjangkir 15 ribu guru. "Ini bukan alih fungsi, tapi pemberian sertifikat tambahan. Jadi, guru bisa mengajar dua, tapi bisa pilih salah satu, silakan," katanya.

Pranata mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan tunjangan profesi tambahan pada guru-guru dengan sertifi-

kat tambahan. Kemampuan tambahan mereka akan dimanfaatkan untuk melahirkan lulusan sekolah yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa.

Guru kontrak

Sebanyak 761 guru SMAN/SMKN se-Bali yang berstatus non-PNS ditetapkan menjadi tenaga kontrak. Penetapan ini dilakukan seiring dengan perubahan kewenangan pengelolaan guru dari pemerintah kabupaten/kota ke pemprov setempat.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, mereka akan digaji sesuai dengan upah minimum provinsi. Sebelumnya, ada total 2.505 tenaga pendidik (guru) non-PNS di SMA/SMK negeri se-Bali. Gubernur menambahkan, tidak semuanya otomatis menjadi

tenaga kontrak Pemprov Bali.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru, syarat untuk menjadi guru adalah harus memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan beban mengajar. Dari hasil verifikasi, sebanyak 761 orang memenuhi syarat, sedangkan sisanya 1.744 orang tidak memenuhi syarat.

"Yang tidak memenuhi syarat akan dibayar Rp 50 ribu per tatap muka sepekan," ujar Pastika saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda APBD 2017 di Denpasar.

Semua tenaga pendidik non-PNS yang ada di SMAN/SMKN ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Bali. Honorarium dibayarkan dari APBD Provinsi Bali. ■ www.tribunnews.com

Koran Jakarta
Desember 2016

Pendidikan Kejuruan

Dibutuhkan Jutaan Sekolah Vokasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait dan BUMN bekerjasama untuk mewujudkan jutaan sekolah vokasional dan pelatihan vokasional. Ini perlu dilakukan agar tercipta tenaga kerja terampil dan siap kerja.

"Berkaitan dengan vokasional *school* dan vokasional *training* agar besar-besaran, jangan diceritain kalau hanya 1.000, 2.000, 10.000, yang kita butuhkan jutaan," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/12).

Dalam kesempatan itu, Presiden memerintahkan Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BUMN-BUMN untuk bekerjasama membentuk vokasional *school* dan vokasional *training* di daerah-daerah serta mendorong swasta ikut program tersebut.

"Kalau kita saja, apalagi hanya BLK, nggak mungkin kita bisa menciptakan *training* secara besar-besaran," kata Jokowi.

Menurut Presiden, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan dengan membuat regulasi agar swasta berbondong-bondong masuk ke sini.

"Saya tahu BUMN sudah memiliki, namun tidak sekadar memiliki. Seperti Pelindo punya, tapi juga tidak dalam jumlah yang banyak. Yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak dan jutaan sehingga

dan vokasional *training*.

"Kalau kita saja, apalagi hanya BLK, nggak mungkin kita bisa menciptakan *training* secara besar-besaran," kata Jokowi.

Menurut Presiden, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan dengan membuat regulasi agar swasta berbondong-bondong masuk ke sini.

"Saya tahu BUMN sudah memiliki, namun tidak sekadar memiliki. Seperti Pelindo punya, tapi juga tidak dalam jumlah yang banyak. Yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak dan jutaan sehingga

mendorong swasta untuk masuk ke bidangnya. Untuk itu yang diperlukan adalah regulasinya," kata Presiden.

Revitalisasi SMK

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful mengatakan bahwa pihaknya akan menjadikan revitalisasi pendidikan kejuruan (SMK) sebagai fokus utama pada tahun 2017 dengan menata kembali sebaran program keahlian yang saat ini ada di SMK se-latim.

Menurutnya ada tiga perlakuan untuk sejumlah program keahlian di SMK, di antaranya

ialah moratorium jurusan yang sudah terlalu banyak, mengevaluasi jurusan yang tidak terlalu dibutuhkan industri, dan menutup jurusan yang tidak sesuai dengan potensi daerah serta kebutuhan industri saat ini. "Ada moratorium SMA, juga ada moratorium jurusan SMK. Seperti Jurusan Bismen (Bisnis-manajemen) itu sudah terlalu jenuh. Kita akan moratorium pembukaan jurusan itu," terang Saiful.

Sedangkan jurusan teknologi informasi, lanjut dia, akan dievaluasi karena kebutuhan industri tidak terlalu banyak.

■ fdi/SB/E-3

KARTU INDONESIA PINTAR

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS).

KIP diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan PIP apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah). Atau, lembaga pendidikan nonformal (pondok pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Paket A/B/C, lembaga pelatihan/kursus dan lembaga pendidikan nonformal

RINGKASAN

Ekspos pemberitaan mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP) di media daring maupun media cetak sama-sama memiliki pola yang hampir seragam. Selama enam bulan pertama di 2016, pemberitaan mengenai KIP terpantau minim. Namun mulai mengalami lonjakan pada Juli-November 2016. Ini juga bisa dikatakan bahwa saat Muhadjir Effendy dilantik sebagai Mendikbud, pemberitaan terkait KIP mulai banyak bermunculan di media daring maupun cetak. Hal ini mengingat tugas pertama yang diembankan kepada Muhadjir oleh Presiden Joko Widodo adalah menuntaskan permasalahan distribusi KIP.

Itulah sebabnya, top influencer pada bulan-bulan tersebut banyak mengarah pada Mendikbud Muhadjir Effendy yang secara aktif memberikan pernyataan terkait KIP. Selama setahun, pemberitaan terkait KIP di media daring terpantau sebanyak 912 berita, sementara pada media cetak berjumlah 536 berita.

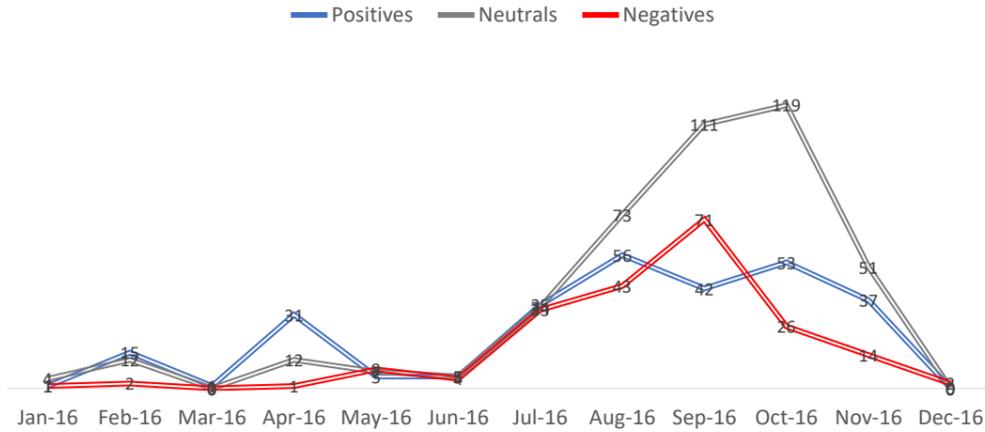
Topik ini juga mendapat sentimen netral serta positif lebih banyak ketimbang sentimen negatif. Sebab konten berita, baik pada media cetak maupun media daring hampir sama yakni seputar penyaluran KIP. Adapun sentimen negatif yang jumlahnya minim berasal dari pemberitaan mengenai penyaluran KIP yang masih bermasalah.

SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Sentimen pemberitaan yang mendominasi adalah sentimen netral dengan 428 berita (47%) dan sentimen positif dengan 281 pemberitaan (31%). Sementara sentimen negatif, jumlahnya jauh lebih kecil dengan 203 pemberitaan (22%).

Tingginya ekspos pemberitaan sentimen netral pada bulan Oktober terkait uji coba penggunaan KIP Elektronik atau KIP Plus di Yogyakarta yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga dua perbankan nasional.

Ekspos media dengan sentimen negatif tertinggi terjadi pada bulan September dimana mayoritas berita berisi masalah dalam penyaluran KIP, seperti tak teraksesnya siswa miskin, KIP yang dinilai tak tepat sasaran hingga pencairan dana KIP yang belum tuntas.

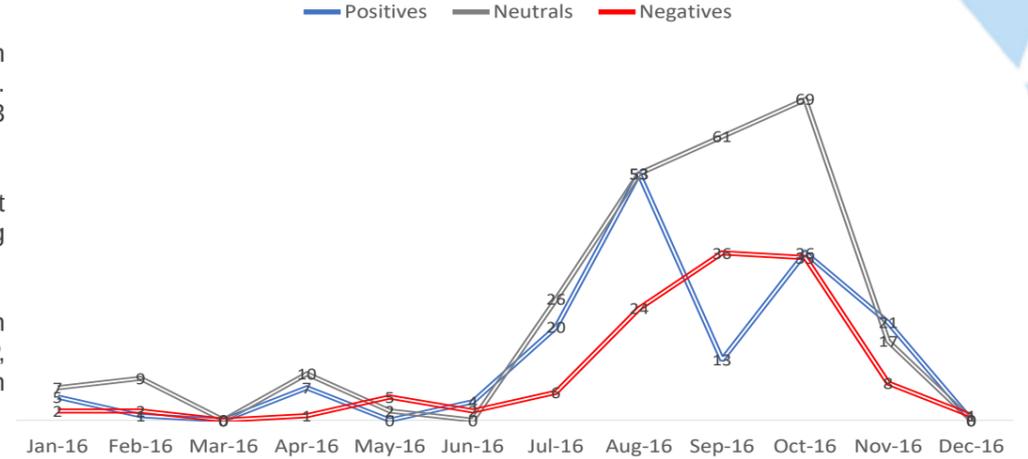


SENTIMEN (MEDIA CETAK)

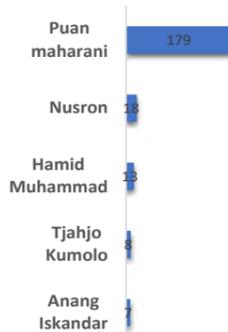
Sentimen pemberitaan yang mendominasi adalah sentimen netral dengan 428 berita (47%) dan sentimen positif dengan 281 pemberitaan (31%). Sementara sentimen negatif, jumlahnya jauh lebih kecil dengan 203 pemberitaan (22%).

Tingginya ekspos pemberitaan sentimen netral pada bulan Oktober terkait uji coba penggunaan KIP Elektronik atau KIP Plus di Yogyakarta yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga dua perbankan nasional.

Ekspos media dengan sentimen negatif tertinggi terjadi pada bulan September dimana mayoritas berita berisi masalah dalam penyaluran KIP, seperti tak teraksesnya siswa miskin, KIP yang dinilai tak tepat sasaran hingga pencairan dana KIP yang belum tuntas.

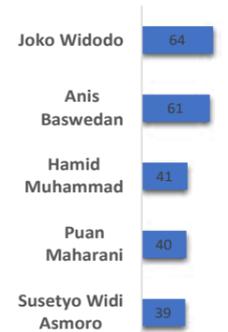


Influencer Jan-Mar



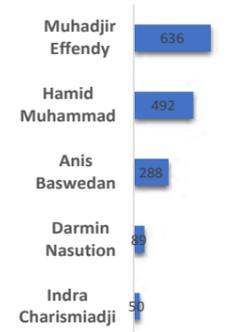
Pada bulan Januari sampai dengan Maret, posisi lima besar figur teratas di tempati oleh figur eksternal Kemendikbud. Menteri PMK, Puan Maharani paling banyak memberikan pernyataan terkait penggunaan KIP untuk menjamin anak-anak eks Gafatar melanjutkan pendidikan.

Influencer Apr - Jun



Pada periode ini, Presiden Joko Widodo paling banyak memberikan pernyataan. Kemudian disusul Menteri Anies dengan 61 pernyataan yang isinya didominasi kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia untuk menyerahkan lima program bantuan pemerintah pada masyarakat, salah satunya adalah KIP.

Influencer Jul - Sept



Pada periode triwulan ke-3, Menteri Muhadjir yang baru menggantikan Anies Baswedan menempati posisi pertama sebagai figur yang paling banyak memberi pernyataan. Isi pernyataan seputar tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo yang diantaranya memaksimalkan penyebaran KIP.

Influencer Okt - Des



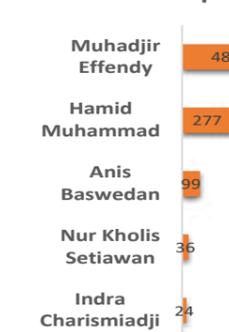
Pada periode ini Menteri Muhadjir kembali berada di posisi pertama dari total 85 influencer. Pernyataan dari empat influencer tertinggi di atas, adalah perkembangan penyaluran KIP untuk SMA yang sudah rampung dan untuk SD serta SMP yang masih berproses.

Influencer Okt - Des



Pada periode ini Menteri Muhadjir kembali berada di posisi pertama dari total 114 influencer. Dan munculnya nama Indra Charismiaji seorang pengamat pendidikan, isi pernyataannya adalah mengkritik pemerintah yang dinilai tidak memiliki Grand Desain Pendidikan.

Influencer Jul - Sept



Nama Menteri Muhadjir menempati peringkat pertama dalam jajaran top influencer. Hal ini disebabkan karena mulai gencarnya program pendistribusian KIP yang digalakkan oleh Kemendikbud. Masih munculnya nama Anies Baswedan setelah reshuffle, disebabkan oleh pernyataannya seputar program KIP pasca serah terima jabatan.

Influencer Apr - Jun



Anies Baswedan menempati posisi pertama dalam jajaran top influencer. Pernyataannya berisi mengenai persiapan penyaluran KIP. Munculnya nama Wakil ketua DPD RI, Farouq Muhammad pada topik KIP, lebih kepada peranannya untuk memfasilitasi pertanyaan masyarakat mengenai KIP.

Influencer Jan - Mar



Puan Maharani menjadi Influencer teratas terkait dengan pemberitaan soal KIP, pernyataannya seputar pengembalian anak eks-Gafatar ke bangku sekolah dengan menggunakan KIP. Selain itu ada posisi Anies Baswedan berada di urutan ke empat, dibawah Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad dan sekjen Kemendikbud Didik Suhardi yang membahas anggaran Dikbud.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. Anggaran Pendidikan 2016 Turun 2. Suksesan Wajar 12 Tahun, Haris Puji Program Bupati Ciamis	Januari	1. 2016, Anggaran KIP Dikelola Kemendikbud 2. Anis Klaim PIPenuhi Target 100%
Februari	1. Anak Eks Gafatar Tetap Sekolah Dengan KIP	Februari	1. Anak Eks Gafatar Tes Ulang Masuk Sekolah 2. Akses Pendidikan dan Orang Miskin
Maret	-	Maret	-
April	1. Penyaluran KIP 2. Pencairan KIP	April	1. Pendistribusian KIP 2. Perbedaan KIS dan KIP
Mei	1. Penyaluran KIP 2. Pelajar Sleman Belum Cairkan KIP	Mei	1. Kadisdik Kab Bogor Kebanjiran Pertanyaan KIP Baru 35 Siswa Cairkan KIP
Juni	1. 12 Juta Paket Uang KIP Belum Bisa Dicairkan 2. Warga Kegingungan Manfaatkan KIP	Juni	1. 12 Juta KIP Tak Jelas
Juli	1. Diatribusi KIP PR Mendikbud Baru 2. Mendikbud Muhadjir Janji Genjot KIP 3. Pencairan KIP	Juli	1. Mendikbud Targetkan Selesaikan KIP 3 Bulan 2. KIP Tak Tepat Sasaran 3. Cara Penggunaan KIP
Agustus	1. Penyaluran KIP 2. Serapan KIP Masih Belum Optimal 3. Mendikbud Minta Bank Aktif Cairkan Dana KIP	Agustus	1. Penyaluran KIP 2. Kendala Penyaluran KIP 3. Penyerapan KIP
September	1. Kurangnya Sosialisasi KIP 2. Dana KIP Siswa Miskin Segera Cair	September	1. 7,2 Juta Pemegang KIP Sudah Daftar Dadodik 2. Penyaluran KIP 3. Pendaftaran KIP Diperpanjang Hingga 30 September
Oktober	1. Penyaluran KIP Mandek di Desa 2. 94 Ribu Kartu Sakti Jokowi Dikembalikan 3. Resmikan KIP Plus	Oktober	1. Kemendikbud Ujicoba KIP Plus 2. Sasaran KIP Dipangkas 1,4 Juta 3. Penyaluran KIP
November	1. Mendukbud KIP Jamin Siswa Sampe SMU 2. Kemendikbud Dorong Anak Usia Sekolah Manfaatkan PIP 3. Kemendikbud Klaim Penyaluran KIP untuk SMA Selesai	November	1. Pemanfaatan PIP 2. 6,2 Juta Siswa Belum Cairkan KIP
Desember	-	Desember	1. KIP Tak Bisa Cair

TOP ISSUE CETAK



Anggaran Pendidikan 2016 Turun (Republika, Januari 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, anggaran pendidikan dan kebudayaan sangat terbatas. Jika tak melibatkan masyarakat tidak bisa mencapai kualitas pendidikan yang baik.

"Tanggung jawab pendidikan bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kemampuan anggaran juga sangat terbatas, makanya kalau tidak melibatkan masyarakat tak bisa mencapai kualitas pendidikan yang baik," kata Didik, Kamis, (7/1).

Kemendikbud, terang dia, sudah melibatkan publik dalam berbagai hal terkait pendidikan. Antara lain membuka peluang melaporkan berbagai pelanggaran pendidikan yang diketahui oleh masyarakat.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, pagu anggaran Kemendikbud sebesar Rp 49,23 triliun. Padahal tahun sebelumnya sebesar Rp 53,27 triliun.

Penurunan anggaran tersebut, terang Didik, disebabkan beberapa faktor. Antara lain fungsi pendidikan tidak hanya berada di pusat, namun juga diaplikasikan pada daerah masing-masing. Sehingga pagu anggaran dimasukkan dalam anggaran transfer daerah.

Anggaran fungsi pendidikan di kementerian, ujar dia, dialokasikan untuk belanja mengikat sebesar Rp 28,62 triliun. "Untuk belanja tidak mengikat atau kegiatan-kegiatan lainnya sebesar Rp 13,75 triliun," katanya, Kamis, (7/1). Anggaran mengikat Kemendikbud yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), gaji dan operasional, tunjangan guru, ujian nasional (UN) dan akreditasi, beasiswa prestasi, sertifikasi, peningkatan mutu PTK, dan lainnya.

Sedangkan anggaran belanja tidak mengikat dalam kegiatan meliputi sarana prasarana wajib belajar 12 tahun, perencanaan melaksanakan kurikulum di sekolah, penelitian, budaya dan bahasa, kursus dan

pelatihan, pendidikan masyarakat, kompetisi dan lomba. (Kemendikbud: SMK Harus Berbasis Kebutuhan Wilayah).

Selain itu, untuk beasiswa guru, uji kompetensi guru, guru berkualifikasi S1/D4, PAUDISASI, beasiswa darmasiswa, pengembangan profesi tenaga didik, hingga sistem informasi pendidikan.



Anak Eks Gafatar Tetap Sekolah Dengan KIP (Suara Pembaruan, Februari 2016)

[JAKARTA] Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan, anak-anak eks anggota Gafatar tidak akan dibiarkan tanpa pendidikan. Pemerintah menjamin mereka tetap melanjutkan sekolah dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Untuk anak-anak kami berusaha untuk mengembalikan mereka ke sekolah. Mereka akan mendapatkan KIP, itu jaminannya," kata Puan usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan para menteri terkait untuk penanganan eks Gafatar di Kantor PMK, Jakarta, Selasa (2/2).

Hadir dalam rakor ini Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumulo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Puan mengatakan telah berkoordinasi dengan Mendikbud Anies Baswedan untuk mencari solusi bagaimana teknis mengembalikan mereka ke sekolah. Mengingat mereka tidak memiliki rapor, kata Puan, pengembalian ke sekolah bukan berdasarkan umur anak melainkan melalui sebuah test.

"Karena mereka yang tidak punya rapor atau data sampai di mana tingkat pendidikannya, sehingga saya minta Mendikbud untuk mencari solusi. Kemdikbud sekarang lagi mengusahakan, mungkin solusinya dengan test untuk mengetahui di tingkatan mana mereka mulai sekolah," kata Puan.

Sedangkan bagi mereka yang mestinya mengikuti ujian kelas akan diberikan kekhususan untuk mengikuti ujian, sehingga bisa lanjut ke tingkat selanjutnya.

Saat ini tercatat 5.764 jiwa eks anggota Gafatar yang masih dalam penampungan sementara. Mereka tersebar di Jakarta sebanyak 3.004 jiwa, Semarang 1.752 jiwa, Surabaya 727, dan 281 ada di Makassar. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 622 di antaranya adalah anak-anak. Mereka segera dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Pemerintah Daerah diminta untuk mempercepat penjemputan eks anggota Gafatar ini. [D-13/L-8]



Kemdikbud Percepat Distribusi dan Permudah Pencairan Dana KIP
(Gatranews, April 2016)

Jakarta, GATRAnews - Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus menyebarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menasar 17,9 juta anak di seluruh Indonesia. "Kemdikbud berupaya mempercepat distribusi kartu KIP dan berkomitmen untuk mempermudah proses pencairan dana KIP agar lebih cepat sampai ke tangan siswa adan anak-anak kita," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad di Jakarta, Kamis (28/4).

Dirjen Dikdasmen Kemdikbud juga telah mengeluarkan surat edaran untuk menyederhanakan proses pencairan dana KIP. Hamid Muhammad berharap KIP dapat digunakan oleh anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. "Sedangkan bagi mereka yang telah lulus, bisa digunakan untuk pendidikan ke jenjang selanjutnya," kata Hamid.

Kemudahan dirasakan oleh siswa dengan adanya surat edaran dari Dirjen Dikdasmen perihal syarat pencairan dana KIP yang kini bisa menggunakan surat keterangan dari sekolah. Sebelumnya siswa merasa harus menyertakan kartu siswa atau kartu keluarga atau akte kelahiran

untuk mencairkan dana KIP di bank. Kini cukup dengan surat pengantar, dana bisa dicairkan.

Para siswa dari berbagai wilayah Indonesia menyambut positif program ini. Ronal Belau, SMA Teruna Bakti, Jayapura mengatakan sangat terbantu dengan program ini. "Uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sekolah dan transportasi sehari-hari," kata Ronal. Begitu pula dengan Intan, siswi SMA Negeri 10 Kemdari, Sulawesi Tenggara yang telah mendapat KIP sejak dibangku SMP. "Sekarang orang tua bisa terbantu untuk membiayai kebutuhan sekolah saya," kata Intan yang berharap program ini bisa selalu ada, agar dia dan teman-temannya bisa terus sekolah.

K I P



adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program unggulan Pemerintahan Presiden Jokowi. Program KIP berupa pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

KIP berbeda dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam program KIS, Pemerintah tidak mengirimkan uang tunai kepada pemegang KIS. Penerima KIS menggunakan kartu untuk mendapatkan

layanan kesehatan. Karena itu dengan data status kemiskinan hasil survei kemiskinan tahun 2011 dan kepastian alamat, maka kartu KIS sudah dapat dikirimkan.

Sementara dalam program KIP Pemerintah memberikan uang tunai secara langsung kepada siswa miskin. Siswa yang berhak menerima KIP ditetapkan berdasarkan usia dan jenjang sekolah. Perubahan jenjang berpengaruh pada besaran dana, sedangkan usia akan berpengaruh kriteria penerima yang ditentukan, yaitu antara usia 6-21 tahun.

Sebagai ilustrasi, pada tahun anggaran yang sama seorang siswa kelas 9 (SMP) menerima Rp 375.000 pada semester 2, lalu lulus dan masuk jenjang SMA hingga besaran yang diterima berubah menjadi Rp 500.000 pada semester 1 di kelas 10. Inilah yang membuat basis data KIP tidak dapat menggunakan data lama, misalnya data hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, yang sudah melewati 5 tahun pelajaran sekolah.

KIP harus menggunakan data hasil survei terbaru BPS yang baru selesai Desember 2015 dan kemudian diterbitkan menjadi

Basis Data Terpadu (BDT) pada Februari 2016. Penyebaran dan Pencairan Hingga kini kartu KIP telah tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Aceh, Riau, Papua, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tim pendistribusian KIP terus mempercepat pembagian kartu ini hingga ditargetkan tuntas akhir Mei 2016. Koordinator Distribusi KIP Wilayah Jawa Tengah Triaji Suryanto mengungkapkan di wilayahnya pembagian kartu KIP tidak terlalu mengalami kendala berarti. "Hanya ada beberapa pertanyaan dari warga di lapangan, seperti apakah mereka yang tidak sekolah juga bisa menerima kartu KIP? Karena namanya terdaftar di kartu tersebut," kata Triaji mengisahkan.

Pihaknya menjelaskan bahwa justru dengan menerima dana KIP anak-anak usia sekolah yang putus sekolah karena alasan ekonomi bisa kembali bersekolah. Di daerah berbeda terdapat tantangan yang dihadapi para petugas dalam mendistribusikan kartu KIP. Terutama di wilayah dengan kondisi transportasi yang sulit seperti di Sulawesi Tenggara. Siswa bahkan harus menyebrang dengan kapal

untuk mencapai cabang bank terdekat untuk mencairkan dana KIP.

Mengantisipasi hal ini Kemdikbud bekerja sama dengan Bank BRI dan BNI untuk mendatangi daerah-daerah yang sulit diakses dengan kapal, sehingga siswa tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk melakukan pencairan. Pencairan yang dilakukan saat ini adalah dana KIP tahun lalu yang belum dicairkan oleh para siswa, yakni 28% dari anak penerima KIP.

Penyaluran dana KIP dilakukan sekaligus dalam setahun, kecuali untuk siswa kelas awal dan kelas akhir, penyaluran hanya satu semester. Pembayaran untuk siswa kelas awal (Semester I) dilakukan pada bulan Agustus atau September dan siswa kelas akhir (semester II) pembayaran dilakukan pada bulan Maret atau April sebesar Rp 225.000 untuk SD, Rp 375.000 SMP dan Rp 500.000 untuk SMA.

Pencairan KIP sudah dilakukan di semua wilayah Indonesia, seperti Papua di kota Jayapura dan Merauke, Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Sulawesi Utara di kota Manado dan Tomohon, Jawa Tengah di Kabupaten Boyolali dan

Wonosobo, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu.



Ribuan Pelajar Kota Magelang Terima KIP
(Suara Merdeka, Mei 2016)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Tidak kurang dari 3600 pelajar di Kota Magelang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat. Program yang dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini dinilai mampu mengurangi beban biaya sekolah yang ditanggung orang tua.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Magelang, Djarwadi mengatakan, data penerima KIP semua sudah ditentukan pemerintah pusat setelah melalui proses pendataan dari tingkat sekolah. Sasaran penerima merupakan anak yang datang dari keluarga tidak

mampu.

“Uang dari pusat pun langsung diterima para pemegang KIP. Pelajar SD mendapat Rp 450.000, SMP Rp 750.000, dan SMA Rp 1 juta. Kami mendapat laporan melalui sekolah masing-masing kalau dana KIP sudah diterima,” ujarnya di kantornya, Kamis (19/5).

Dia menuturkan, program yang menjadi unggulan pemerintah di bawah Presiden Jokowi ini dinilai bisa membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Meskipun memang sudah ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Bantuan BOS memang masih terus berjalan, tapi ternyata masih banyak yang membutuhkan. Soal tepat sasaran atau tidak, karena data sudah dari pusat, kami mengikuti perkembangannya saja,” katanya.

Kabid Pendidikan Dasar Disdik Kota Magelang, Sumardi menambahkan, menurut bidangnya di pendidikan dasar, siswa penerima KIP dari SD sebanyak 1.589. Sementara dari kategori SMP sebanyak 1.628 siswa.

“Alurnya, anak yang berhak

menerima dana mendaftar dulu di sekolah atau lembaga pendidikan non-formal. Oleh dinas, data tersebut diteruskan ke pusat dan pusat akan membuat surat keputusan. Pusat mentransfer dana itu langsung ke penerima dan penerima melapor ke kami,” jelasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina menanggapi positif adanya KIP yang merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014 ini. Menurutnya, pelajar dari keluarga miskin atau tidak mampu memang masih pantas untuk dibantu.



Mendikbud Muhadjir Upayakan Pembagian KIP Tepat Sasaran
(Antara, Juli 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berupaya agar masalah

Kartu Indonesia Pintar (KIP) terkait sinkronisasi data penerima bisa segera terselesaikan. Sebab selama ini dasar penerima KIP ini merujuk ke data kemiskinan di Kementerian Sosial (Kemensos).

“Padahal kita punya Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” katanya di Kemendikbud, Jakarta, Kamis (28/7).

Menurutnya data ini sebenarnya sudah memiliki informasi jumlah siswa yang miskin. Dengan menggunakan data dari Kemensos, Muhadjir menilai ini sebuah kekeliruan.

“Konyolnya jadi kita akan beri bantuan ke siswa di sekolah yang datanya dari Kemensos sementara anak miskin itu kan gak semuanya di sekolah,” ucapnya.

Karena itu, ia menegaskan, data dasar dari Dapodik menjadi upaya yang perlu dilakukan ke depannya demi pemerataan KIP. Untuk menyelesaikan sinkronisasi data ini, Muhadjir mengatakan, ini tentu memerlukan persetujuan dalam rapat gabungan terlebih dahulu. Jika disetujui, dia yakin permasalahan ini dapat terselesaikan selama satu bulan. Sebab, data siswa miskin

sudah tertera dan hanya langsung diberikan saja.

“Satu bulan selesai dengan catatan disetujui pakai Dapodik bukan data dari Kemensos. Jadi memang masih banyak yang tidak nyambung,” jelasnya.

Berdasarkan Dapodik 18 juta dari 50 juta siswa di seluruh tingkatan berada dalam kondisi miskin. Di data Kemendikbud perihal status KIP per 21 Juli 2016 disebutkan, KIP yang dipesan dan dicetak sebanyak 17.927.308.

Selanjutnya, KIP yang telah diterima sebanyak 16.746.518 dan jumlah yang dalam pengiriman sebesar 1.020.576. Sementara jumlah KIP retur sebanyak 160.214.



Sekolah Diminta Aktif Ambil KIP yang Belum Tersalurkan

(Suaramerdeka, Agustus 2016)
JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata berharap kepada pihak sekolah untuk aktif melakukan pengecekan ke kelurahan guna mencari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum sampai ke tangan para siswa.

Hal tersebut ditegaskan karena masih banyak KIP yang belum tersalurkan. “Sekolah harus aktif meminta ke kelurahan atau desa untuk segera mencarikan dan menyebarkan KIP yang masih nyangkut, karena para siswa membutuhkan,” ujar Pranata, sapaan akrabnya.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki sasaran terkait dengan program KIP tersebut. Namun, yang masih perlu didorong lagi adalah terkait dengan percepatan

penyaluran KIP tersebut. “KIP sebetulnya sudah ada sasarannya, tinggal mendorong. Kalau yang sudah di tangan siswa itu sudah 40 persen,” jelasnya.

Dirinya juga membeberkan, ada kendala lain yang dihadapi dilapangan terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Di mana para siswa yang telah memegang KIP namun belum mencairkan.

“Bank harusnya ikut aktif memberikan pengarahan soal pencairan KIP. Bank jangan menunggu para siswa ambil duit, harus proaktif. Sebab, siswa-siswa itu belum tahu cara penggunaan KIP,” katanya.

Dana KIP 10,7 Juta Siswa Miskin Segera Cair
(JPNN, September 2016)

JAKARTA--Kabar gembira bagi siswa miskin. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan segera mencairkan dana Kartu Indonesia Pintar (PIP).

Ini setelah data 10,7 juta siswa miskin di Indonesia telah masuk dalam daftar pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodik).

“Per 19 September data siswa miskin baik yang sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun belum tapi orangtuanya punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang masuk ke Dapodik ada 10,7 juta siswa.

Begitu masuk daftar, siswa sudah bisa menerima dana KIP-nya,” tutur Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, Minggu (25/9).

Dia memaparkan, dari 7,9 juta siswa penerima KIP, sudah 7,2 juta orang yang terdaftar ke Dapodik. Sedangkan yang orangtuanya pemegang KKS tapi anaknya belum dapat KIP sebanyak 3,5 juta orang. “Untuk penerima KIP yang terdaftar Dapodik angkanya 55 persen atau tinggal lima persen memenuhi target yang ditetapkan Mendikbud,” papar Hamid.

Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya menargetkan penyaluran KIP di bulan ini mencapai 60 persen. Hamid optimistis, target Mendikbud ini bisa tercapai bahkan melebihi 60 persen.

Kemendikbud minta Kadis Pendidikan proaktif salurkan KIP
(AntaraneWS, Oktober 2016)

Palu (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta para Kepala Dinas Pendidikan untuk proaktif menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tidak ada anak yang putus sekolah.

“Dinas harus proaktif. Selain melalui surat, kami kumpulkan kepala dinas agar harus aktif sisir ke desa-desa,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Harris Iskandar usai peringatan Hari Aksara Internasional di Kota Palu, Kamis.

Ia mengatakan Dinas Pendidikan seharusnya mempertemukan antara KIP dengan anak yang namanya ada di KIP lalu membujuknya agar bisa kembali ke sekolah atau setidaknya belajar di lembaga kursus.

Dia mengatakan jika Dinas Pendidikan aktif turun ke desa-desa maka distribusi KIP akan lancar sebab di Mamuju, Sulawesi Barat mampu mendistribusikan KIP tiga ribu hanya dalam seminggu bahkan di Parigi Moutong, Sulteng bisa 10

ribu.

Kemendikbud telah mencetak KIP untuk anak tidak mampu usia 6-21 tahun dengan tujuan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan atau bagi anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah/lembaga kursus. Dari jumlah itu, sebanyak 4,1 KIP alokasikan untuk anak putus sekolah. Untuk penyaluran KIP di sekolah-sekolah formal, relatif lancar namun penyaluran KIP anak putus sekolah masih belum maksimal.

Untuk mempercepat distribusi KIP bagi anak utus sekolah itu, Kemendikbud mengumpulkan para Kepala Dinas Pendidikan dan pimpinan lembaga kursus dengan menggelar rapat Koordinasi Percepatan KIP Pendidikan Nonformal, di Palu, 19-21 Oktober 2016.

Harris dalam rapat itu berharap Dinas Pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan dan para penggiat pendidikan lainnya melakukan verifikasi data anak tidak sekolah di masyarakat.

“Jika sudah terverifikasi diharapkan penggiat pendidikan dapat memberikan motivasi dan mengajak anak tidak sekolah tersebut untuk

kembali ke sekolah, atau mengikuti program kesetaraan, serta mengikuti kursus dan pelatihan,” katanya.

Dalam rapat itu, beberapa kepala Dinas Pendidikan menyampaikan perkembangan penyaluran KIP di daerah masing-masing. Dinas Pendidikan Deli serdang, Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa sebanyak 1.544 anak penerima KIP telah melanjutkan ke pendidikan formal, dan 198 anak melanjutkan ke pendidikan nonformal.



Kemendikbud Klaim Penyaluran KIP untuk SMA Selesai
(Republika, November 2016)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) tingkat SMA/

SMK selesai pada Senin (14/11) lalu. “Iya, SMA/SMK habis sudah penyalurannya,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad di kantor Kemdikbud, Jakarta, Senin (14/11).

Sementara untuk SD dan SMP, ia melanjutkan, proses penyaluran masih berlangsung hingga dua pekan mendatang. Ia menjelaskan, berdasarkan data Kemdikbud, sekira 11,7 juta dari 17,9 juta total KIP, sudah tersalurkan.

“Jadi masih ada sekitar enam juta lagi yang akan kita proses dalam satu sampai dua minggu ini. Selambat-lambatnya sampai akhir bulan, tapi kita harap pertengahan bulan ini selesai semua,” tutur Hamid.

Ia mengatakan, sudah banyak data anak yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik). Namun, belum semua anak bisa mencairkan. Alasannya, proses pencairan manfaat KIP butuh proses panjang.

“Kan masih ada proses, di SK-kan dulu, setelah SK, keluar SPP. Mengajukan SPP, ada SPM, SD2D dan itu kira-kira masing-masing lima hari kerja,” ujar dia.

Hamid mengatakan, kendati Kemdikbud pernah menargetkan penyaluran selesai pada 31 Oktober 2016. Namun, tidak ada batasan untuk memproses data siswa ke Dapodik.

“(Yang diproses November dan Desember pencairannya) iya tahun depan, apa boleh buat. Kita kan sekarang update yang memasukkan sehari 2.000-an KIP. Masih jalan terus, saya tak batasi itu,” tutur Hamid.

IndoPos
Januari 2016

2016, Anggaran KIP Dikelola Kemendikbud

Cetak Kartu Dilakukan Sendiri

JAKARTA-Setelah sebelumnya dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tahun ini anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan dikelola secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Anies Baswedan mengatakan, untuk memenuhi program KIP, Kemendikbud pada 2016 ini akan mencetak langsung KIP. “Sebelumnya untuk cetak KIP dilaksanakan oleh Kemensos dengan dukungan

data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah Kantor Wakil Presiden,” ujar Anies usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin. Anies menyebutkan, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2015 Kemendikbud berhasil melampaui target 100 persen, dengan penerima manfaat dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 17,9 juta siswa seluruh Indonesia. Dia menambahkan, untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran Kemendikbud 2016 dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun, pihaknya melakukan Rapim yang dihadiri oleh pe-

jabat eselon 1 dan 2, serta staf khusus di lingkungan Kemendikbud. “Kami ingin pastikan bahwa semua unit kerja di lingkungan Kemendikbud siap untuk memasuki tahun anggaran 2016 dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang cermat, tepat dan cepat,” ungkapnya. Dengan kesiapan di awal tahun, Anies berharap serapan anggaran Kemendikbud 2016 akan lebih efektif dan lebih baik lagi. Dia melanjutkan, serapan anggaran Kemendikbud pada tahun anggaran 2015 kedua paling efektif di antara kementerian dan lembaga dengan 93 persen. Oleh karenanya, lanjut Anies pelaksanaan program

dan anggaran 2016 ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan kerangka strategis Kemendikbud 2014-2019, yakni terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Tentunya, menurut Anies semua dapat diterjemahkan ke dalam tiga strategi yakni, penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, peningkatan mutu dan akses dan peningkatan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. “Dengan begitu, dalam laporan 2016 nanti dapat ditorehkan catatan sejarah baru, seperti hal-hal baru yang berhasil dicapai, diraih, dan dihasilkan,” tutupnya. (nas)

Republika
Februari 2016

Pendidikan Anak Eks Gafatar Dikhususkan

● HASANUL RIZQA, RAHMAT FAJAR

JAKARTA — Sejumlah kementerian melakukan rapat koordinasi terkait nasib para eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Selasa (2/2). Langkah-langkah penanganan terhadap eks anggota Gafatar yang mencapai ribuan orang diputuskan dalam rapat tersebut.

Salah satunya terkait pendidikan anak-anak eks Gafatar. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah menjamin keberlangsungan pendidikan mereka. Tiap anak eks Gafatar akan mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pendidikan Anak Eks Gafatar Dikhususkan..... dari him 1

maraknya laporan kehilangan sejumlah anggota keluarga yang mengikuti organisasi tersebut, sejak akhir 2015. Sebagian anggota keluarga tersebut kemudian diketahui berangkat untuk menandatangani komitmen keanggotaan di Kalimantan ketika organisasi telah resmi membubarkan diri sejak Agustus 2015.

Pada 19 Januari lalu, sebuah kamp Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat, diserbu warga. Peristiwa itu memicu penangkapan besar-besaran eks anggota Gafatar ke daerah masing-masing, terutama di Jawa.

Rapat juga memutuskan agar semua warga eks Gafatar selanjutnya dijamin pemenuhan kebutuhan dasar (pencapaian masing-masing). "Pemenuhan dasar harus dapat memperoleh pendidikan dan memastikan kehidupan sosial di daerah asal eks anggota Gafatar," kata Puan.

Puan dari mantan presiden Megawati Sekeloa Supri ini memastikan, ada sebanyak 5.714 warga eks Gafatar yang ditampung di sejumlah kota transit, sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal. Mereka diharapkan di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. "Seluruh eks Gafatar tersebut tak bisa tetap sebagai pengungsi. Hal-hal mereka sebagai masyarakat akan segera dipulihkan."

Korban insing-ising
Menteri Dalam Negeri (Menkumham) Tjahjoe Komala mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua pemerintah daerah (pantula) terkait penjemputan ribuan warga eks Gafatar. Pihaknya juga dibarengkan melakukan dialog dengan masyarakatnya sehingga para eks Gafatar itu bisa diterima dan berinteraksi sosial lagi secara wajar. "Yang perlu mereka (eks Gafatar) lakukan di penampungannya, mereka kembali para eks Gafatar. Kementerian juga sudah menginstruksikan kepada semua bupati/walikota, untuk memperlakukan keramahan para eks Gafatar atau penerima masyarakatnya sehingga para eks Gafatar di daerah masing-masing. Terkait keinginan sebagian eks Gafatar untuk transmigrasi, menurut dia, hal itu akan dibantu selanjutnya dalam bentuk bantuan. Namun, dia menilai opsi transmigrasi tak akan efektif. "Dengan transmigrasi, tentu saja masalah pada lama akan dikembalikan."

Sebaliknya, Kementerian Sosial (Kemensos) merekomendasikan agar mantan anggota Gafatar yang tidak memiliki keluarga dan kartu tanda di daerah asalnya dikembalikan dalam program transmigrasi insidental. "Keuangannya, karena mereka tidak bisa eksekusi di dalam komunitasnya saja," kata Menteri Sosial Kholidah Indar Prasanna.

Perindahan hukum
Sementara itu, Kabareskrim Polri Kasjen Agung Iskandar mengatakan, Bareskrim menginstruksikan ke Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menindaklanjuti kasus Gafatar. Di sana, aparat akan melakukan observasi terkait Gafatar.

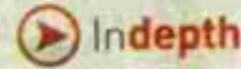
Terkait Gafatar, Polri sejauh ini menangani empat kasus, di antaranya pembunuhan terhadap Dokter Hiss Tri Hardeyoni yang ditangani Polda DIY. Sementara, Polda Kalbar menangani kasus penangkapan kendaraan dan penarikan bantuan milik mantan anggota Gafatar di Mempawah. Bareskrim juga menangani dugaan penyalahgunaan. Untuk kasus di Kalbar, menurut Agung, yang paling penting saat ini adalah mencari cara agar konflik sosial tersebut tidak meluas.

Kasus yang ditangani Bareskrim, lanjutnya, juga dalam proses penyelidikan. Saat ini Bareskrim sedang berfokus pada pemerkasaan terhadap saksi-saksi. "Di antaranya dari MUI. Sekarang fokus ke itu," kata dia.

Persoalannya, kata Puan, kebanyakan dari anak-anak itu tak lagi memegang data belajar, semisal rapor. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyiapkan tes tersendiri bagi anak-anak eks Gafatar. Hasil tes itu akan menentukan mereka melanjutkan sekolah pada kelas berapa serta di tingkat sekolah apa di daerah asalnya nanti.

Untuk anak-anak eks Gafatar yang sedang menjalani kelas akhir tingkat SD, SMP, atau SMA, akan ada ujian nasional (UN) khusus. "Jadi mereka nanti dikembalikan ke sekolah tidak berdasarkan umur, tapi kemampuan cara berpikir mereka, sesuai dengan tingkatannya," kata Puan selepas rapat koordinasi, di kantor Kemenko PMK, kemarin.

Ormas Gafatar mengemuka menyusul



Pro Kontra

Jangan Musuh Eks Gafatar

Hlm- 8

Koran Sindo
April 2016

PROGRAM INDONESIA PINTAR

Distribusi KIP Tuntas Mei

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menuntaskan pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Mei mendatang. Dengan demikian, siswa penerima KIP bisa mencairkan dana bantuan tersebut pada tahun ajaran baru.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, kartu KIP telah dicetak dan secara bertahap didistribusikan untuk menjangkau anak-anak usia sekolah di seluruh wilayah Tanah Air. "Setelah proses pencetakan KIP, proses distribusi KIP secara bertahap juga telah dilakukan dan akan tuntas semua pada Mei nanti," katanya di Jakarta kemarin.

Pada 2016 ditargetkan sebanyak 17.927.758 penerima

KIP. Dengan kapasitas cetak 500.000 per hari per 20 April 2016 nanti maka KIP sudah tercetak sebanyak 9.987.366 dan sebagian telah dikirimkan ke daerah. Bersamaan dengan proses percetakan dan pengiriman KIP, Kemendikbud juga sedang menyiapkan proses surat keputusan (SK) untuk penerima dana KIP 2016 yang difokuskan ke siswa tingkat akhir agar masih bisa menerima dana KIP sebelum tahun ajaran berakhir.

"Diharapkan pada akhir April 2016, siswa tingkat akhir dapat menerima dana KIP dan menggunakannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Setelah itu di tahun ajaran baru, semua siswa

yang masuk kategori penerima KIP sudah bisa mencairkan dana KIP 2016," tutur mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.

KIP adalah bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan target penerima manfaat dana KIP sebanyak 19 juta siswa. Terhitung per 17 April 2016, sebanyak 13.625.936 siswa sudah mencairkan dana KIP tahun 2015 dari berbagai jenjang pendidikan.

Untuk mengakomodasi siswa yang belum mencairkan dana pada 2015, tenggat waktu pencairan diperpanjang sampai Juni 2016. Dalam rangka meningkatkan pencairan, Anies mengajak bank penyalur, yaitu BNI dan BRI serta pemerintah daerah untuk mengadakan kegiatan pencairan bersama manfaat PIP hingga 31 Mei 2016.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR Jefri Riwu Kore berpendapat pemerintah perlu mewaspadai kesalahan data karena banyak laporan kepadanya bahwa selama ini data yang diberikan tidak akurat sehingga KIP pun tidak tepat sasaran. "Yang mestinya dapat beasiswa yang tidak mendapat, sebaliknya yang tidak mendapat malah mendapatkan," tuturnya.

Evaluasi perlu dilakukan agar data-data siswa miskin diperbarui sehingga bukan data yang ngawur.

● neneng zubaidah

Koran Sindo
Juli 2016

Mendikbud Butuh 3 Bulan Selesaikan KIP

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membutuhkan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Wacananya, KIP juga akan diberikan kepada siswa mampu.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, KIP saat ini bermasalah terkait peraturan perundangan dan validasi data KIP yang saat ini memakai berbagai macam data. Muhadjir menjelaskan, Kemendikbud akan melihat data mana yang paling baik agar KIP tepat sasaran. "Kalau sudah *clear* maka bisa dipisahkan mana yang bisa ditangani Kemendikbud, kementerian lain, dan mana yang menjadi kebijakan presiden. Paling lama kita membutuhkan waktu tiga bulan," katanya di kantor Kemendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengungkapkan, data KIP yang dipakai sebelumnya me-

lalui Kementerian Sosial (Kemensos) ternyata bias. Pasalnya, Kemensos memakai basis data kemiskinan di masyarakat. Data Kemensos, ujarnya, hanya berisi anak tidak mampu dan tidak sekolah. Jika memungkinkan, Kemendikbud ingin KIP memakai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang lebih valid, sebab Dapodik mempunyai data siswa yang tidak mampu dan bersekolah.

Selain itu, guru besar sosiologi ini mempunyai gagasan KIP diberikan ke semua siswa baik miskin maupun yang kaya. Total siswa yang aktif bersekolah, terangnya, mencapai 50 jutaan siswa. Manfaat bagi KIP untuk siswa tidak mampu ialah untuk membelik keperluan sekolah dari dana yang diberi pemerintah. Sementara untuk siswa kaya, kartu tersebut bisa digunakan untuk menabung dan membelanja kebutuhan sekolah. "Kita ingin siswa itu kenal dengan sistem perbankan. Bisa membeli

barang dengan kartu itu. Jadi, tidak ada transaksi yang bisa menguap," tuturnya.

Dia mengungkapkan, amanah presiden selain sukseskan Program Indonesia Pintar (PIP) dan juga mempertajam pendidikan vokasi yang sudah dirintis. Menurut dia, kedua kebijakan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh Kemendikbud, tetapi juga harus lintas kementerian.

Pengamat pendidikan dari Eduspec Indra Charismiadi menyambut baik wacana yang disampaikan Muhadjir terkait pendistribusian KIP dengan menggunakan Dapodik. Indra memandang lebih baik Kemendikbud langsung saja menjalankan KIP tanpa menunggu sinkronisasi data yang bisa memakan waktu lama. Penggunaan Dapodik itu pun nantinya pasti akan timbul masalah, seperti ketidakakuratan data siswa miskin.

● neneng zubaidah

Percepat KIP, Kemendikbud Panggil Kepala Daerah

● DIAN ERIKA NUGRAHENY
WILDA FIZRIANY

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, akan berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk memaksimalkan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kemendikbud tengah mempersiapkan program kembali masuk sekolah sebagai tindak lanjut distribusi KIP.

Muhadjir berencana mengundang para bupati dan gubernur seluruh Indonesia untuk membicarakan hal ini. Kemendikbud akan menggandeng Kemendagri untuk memanggil para kepala daerah tersebut. "Distribusi KIP ini *kan* bukan tugas Kemendikbud saja. Akan kami bicarakan dalam waktu dekat," kata Muhadjir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/8).

Belum lama ini, Muhadjir bersama timnya melakukan survei dan menemukan kejanggalan pendistribusian KIP. Fakta di lapangan membuktikan, masih banyak KIP yang belum sampai ke tangan siswa dan sekolah. Dengan demikian, peserta didik

pun belum bisa mendapatkan dana bantuannya. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendikbud menyatakan akan memaksimalkan kembali distribusi KIP. Menurut Muhadjir, beberapa daerah sudah menyambut baik inisiatif Kemendikbud.

Setelah pemaksimalan distribusi KIP, Kemendikbud nantinya akan melakukan gerakan kembali masuk sekolah. "Nantinya, siswa yang sebelumnya keluar, akan kami dorong bisa sekolah kembali dengan KIP ini," tegas Muhadjir.

Pemerintah menargetkan penerima KIP adalah sebanyak 17.927.308 siswa. Sejauh ini, 60 persen dari target tersebut sudah menerima KIP. Berdasarkan validasi tim Kemendikbud, sebanyak 20 persen KIP saat ini masih berada di kantor desa atau kelurahan. Akibatnya, para siswa yang belum menerima KIP itu belum dapat mencairkan dana.

Sementara itu, Muhadjir juga mengatakan, batas penyelesaian masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) diundur hingga awal Desember 2016. Batas waktu yang sebelumnya ditentukan pada akhir Agustus ini bukan berarti penyelesaian masalah KIP.

"Itu *deadline* akhir Agustus bukan selesainya masalah, tapi *deadline* kartu itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Kalau tadi sudah saya rapatkan lagi, kita ulur sampai awal Desember," ujar Muhadjir, saat berkunjung ke Kantor *Republika*, Rabu (24/8).

Dengan diundurinya batas waktu ini, Muhadjir tidak menampik adanya risiko bahaya. Sebab, batas waktu tersebut berdekatan dengan penutupan anggaran akhir tahun. Hal itu memang tidak bisa dihindari, apalagi pihaknya baru mengundang pimpinan daerah pekan depan untuk membantu menyelesaikan KIP ini.

Muhadjir menerangkan, pihaknya memang memiliki rencana lain dalam menghadapi permasalahan KIP ini, yakni dengan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Jadi, kalau dulu pakai Dapodik itu bisa selesai, karena Dapodik punya data keluarga miskin," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Sejauh ini, jumlah penerima KIP mengacu pada data Kementerian Sosial (Kemensos). Dia juga mengaku, acuan Dapodik ini tidak akan mampu menggiring anak yang tidak sekolah untuk mengenyam pendidikan kembali. Dengan kata lain, Dapodik hanya berfungsi agar anak tidak berhenti sekolah. ■ ed: stevy maradona

Republika
Agustus 2016

Banten Pos
September 2016

7,2 Juta Pemegang KIP Sudah Daftar Dapodik

JAKARTA, BANPOS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melansir sudah ada 7,2 juta pemegang kartu Indonesia pintar (KIP) daftar di data pokok pendidikan (dapodik). Pendaftaran ini berlangsung hingga 30 September besok.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan tingkat pendaftaran itu setara dengan 60 persen hingga 70 persen. Dia mengatakan Kemendikbud terus menunggu sampai perkembangan terakhir per 30 September besok.

"Jika masih ada yang belum daftar,

kita sudah siapkan antisipasinya," katanya di Jakarta kemarin.

Langkah antisipasinya adalah dengan menggunakan data dapodik. Dengan cara ini, Kemendikbud tidak perlu lagi menunggu kartu sampai di tangan siswa.

Intinya dengan data dapodik, bisa diketahui dengan cepat anak-anak sekolah kurang mampu yang berhak mendapatkan uang KIP.

Muhadjir belum bersedia menjelaskan secara detail skenario penanganan KIP jika masih belum terdistribusi

sampai 30 September nanti.

Dia masih optimis distribusi KIP bisa maksimal. Kemudian tinggal entri data pemegang KIP ke dapodik.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad hingga 19 September sebanyak 90 persen KIP sudah sampai ke tangan siswa.

"Laporan distributor sudah 95 persen. Tapi hasil monitoring sekitar 81 persen," tuturnya.

Hamid menjelaskan di lapangan banyak sekali temuan distribusi KIP. Di-

antaranya ada 3,5 juta anak yang orangtuanya terima kartu keluarga sejahtera (KKS) tapi tidak terima KIP.

Hamid menegaskan anak dari keluarga pemegang KKS otomatis menerima KIP. "Cuma kartunya masih dimana. Apakah di kantor desa atau di tempat lain," jelasnya.

Hamid sampai sekarang masih fokus pada distribusi dan pendaftaran dapodik.

Kemendikbud belum berbicara soal pencairan uangnya. Setelah urusan distribusi dan registrasi KIP di dapodik benar, baru pencairan uangnya. (SAMHAS/PH)

Media Indonesia
Oktober 2016

KIP Plus Diuji Coba di Yogyakarta

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan memilih Kota Yogyakarta untuk uji coba penggunaan Kartu Indonesia Pintar Plus yang merupakan pengembangan penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) secara nontunai.

"Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus adalah upaya kami menjawab berbagai masalah dan pertanyaan mengenai penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar. Jika uji coba ini bisa berjalan dengan baik, akan dilanjutkan ke daerah lain," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad di sela pemberian KIP Plus di SMA Negeri 9 Yogyakarta, kemarin.

Menurut Hamid, siswa yang memperoleh KIP Plus dipastikan sudah melalui verifikasi yang valid dan merupakan siswa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan. Di Kota Yogyakarta terdapat 1.295 siswa penerima KIP Plus yang terdiri dari 629 siswa SMP, 142 siswa SMA, dan 524 siswa SMK. Kemendikbud bekerja sama de-

"KIP Plus merupakan kartu elektronik yang di dalamnya ditanam dua fungsi sekaligus, yaitu untuk mengakses rekening Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan rekening *e-wallet*."

Anggoro Eko Cahyo

Direktur Consumer Banking BNI

ngan BRI dalam penyaluran bantuan di jenjang SMP dan SMK, sedangkan bantuan untuk SMA dilakukan melalui BNI.

Besaran dana bantuan yang diterima siswa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Rp375 ribu per semester untuk siswa SMP, dan Rp500 ribu per semester untuk SMA/SMK. Adapun untuk siswa SD diberikan sebesar Rp225 ribu per semester. Dengan memanfaatkan KIP Plus, siswa dipermudah dalam menggunakan bantuan karena sebagian dari dana yang masuk bisa

ditarik tunai dan kartu bisa digunakan berbelanja di *merchant* tertentu yang sudah ditunjuk.

Uji coba penggunaan KIP Plus di Kota Yogyakarta dilakukan hingga 31 Desember dan pada tahun depan akan dilanjutkan di 44 kota/kabupaten lain yang sudah memiliki jaringan perbankan yang baik. Direktur Consumer Banking BNI Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan KIP Plus merupakan kartu elektronik yang di dalamnya ditanam dua fungsi sekaligus, yaitu untuk mengakses rekening Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan rekening *e-wallet*.

Sebagai tabungan, Tabungan Simpel dan KIP akan menjadi sarana penyimpanan dana PIP dan dapat ditarik dan ditransaksikan kapan pun sesuai kebutuhan siswa penerima KIP. Adapun sebagai *e-wallet*, dana PIP dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah secara nontunai, di koperasi sekolah, toko perlengkapan sekolah, toko buku atau *merchant* yang bertanda khusus menerima KIP, dan sudah menjadi agen Laku Pandai BNI. (RO/H-1)

Radar Sumedang
November 2016

Kemendikbud Dorong Anak Usia Sekolah Manfaatkan PIP

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya mendorong anak usia sekolah bisa memanfaatkan Program Indonesia Pintar (PIP), untuk penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Sesditjen Dikdasmen), Thamrin Kasman mengatakan, PIP merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk membantu peserta didik berlatar ekonomi tidak mampu melanjutkan pendidikannya.

"Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan bisa membantu peserta didik yang kesulitan dalam biaya pendidikannya. Selain itu bagi mereka yang putus sekolah bisa kembali

masuk sekolah formal maupun nonformal. Tidak ada alasan bagi anak usia sekolah untuk tidak bersekolah karena alasan biaya," tutur Thamrin, Minggu (20/11).

Thamrin menambahkan, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pendataan ulang jumlah penerima KIP, sehingga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Dia juga berharap tidak ada anak Indonesia yang berusia sekolah tidak mendapatkan pendidikan. Karena dengan KIP mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah, baik di sekolah formal maupun non formal. Calon penerima PIP anak usia 6-21 tahun yang berasal dari peserta didik Penerima Kartu Harapan (PKH). (esy/jpnn)



KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013 pertama kali diterapkan secara terbatas pada tahun pelajaran 2013/2014. Sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 saat itu disebut sekolah inti.

Sepanjang 2015, Kurikulum 2013 dievaluasi dan mengalami sejumlah perbaikan. Hasil perbaikan itu diterapkan pada tahun pelajaran 2016/2017 pada 25 persen sekolah atau sekitar 52 ribu sekolah di Indonesia. Kurikulum 2013 mengarahkan peserta didik pada kompetensi abad 21 yang meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, literasi, kecakapan hidup, dan karakter.

Kurikulum 2013 tetap digunakan sebagai kurikulum nasional saat ini mengingat sifatnya yang dinamis. Artinya Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang tumbuh, membuka peluang untuk diadakan perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan

RINGKASAN

Pada topik ini terdapat perbedaan ekspos pemberitaan antara media daring dan media cetak. Di media daring, ekspos pemberitaan lebih tinggi terjadi pada masa Anies Baswedan dan pergerakannya cukup fluktuatif dibandingkan setelah Muhadjir Effendy dilantik sebagai Mendikbud. Sementara pada media cetak, pemberitaan terkait Kurikulum 2013 terjadi cukup fluktuatif sepanjang tahun.

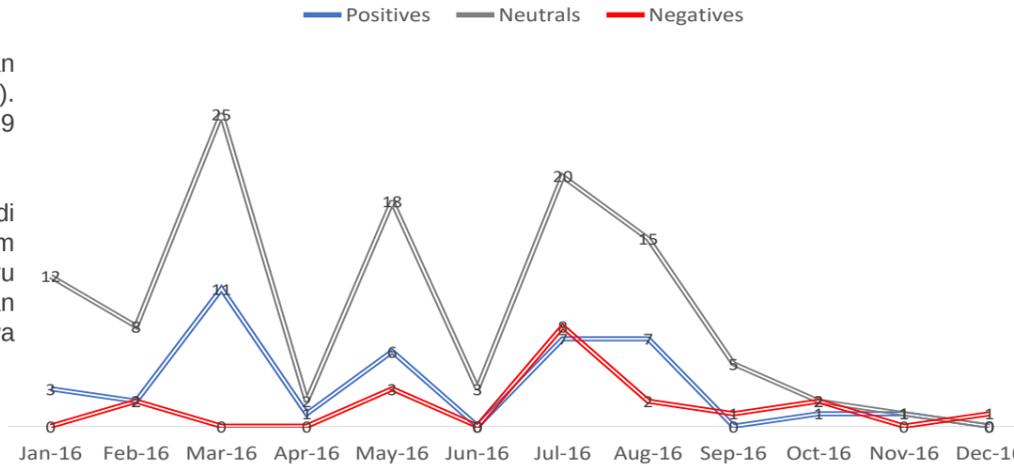
Isu utama pada media daring dan media cetak sebelum Menteri Muhadjir dilantik, fokus pada pembahasan penerapan Kurikulum 2013 (K-13) hasil evaluasi dan perbaikan. Fokus pemberitaan kemudian beralih pada kepemimpinan Menteri Muhadjir yang terjadi di Juli hingga Desember. Pada media daring, fokus pemberitaan terkait pelatihan guru di daerah untuk K-13. Sementara pada media cetak, pemberitaan lebih banyak menyoroti kurang maksimalnya penerapan K-13.

Terkait influencer, terpantau masih sedikitnya pernyataan yang disampaikan oleh Mendikbud baik pada masa Anies Baswedan maupun periode Mendikbud Muhadjir, namun pada tiga bulan terakhir Menteri Muhadjir banyak memberikan pernyataan. Influencer internal Kemendikbud mendominasi dengan banyak memberikan pernyataan terkait penerapan K-13. Sepanjang 2016, sentimen netral dan positif mendominasi pemberitaan media daripada sentimen negatif, baik di media daring maupun media cetak. Persentase berita dengan sentimen netral lebih dari 50%, sementara sentimen positif lebih dari 20%. Berita dengan sentimen negatif jumlahnya tidak lebih dari 20% dari jumlah keseluruhan berita.

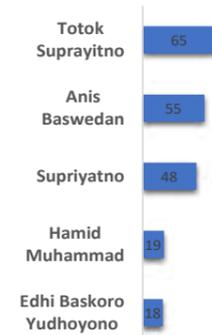
SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Sentimen pemberitaan yang mendominasi adalah sentimen netral dengan 111 berita (66%) dan sentimen positif dengan 38 pemberitaan (23%). Sementara sentimen negatif, jumlahnya jauh lebih kecil dengan 19 pemberitaan (11%).

Ekspos media yang memberitakan sentimen negatif paling tinggi terjadi pada bulan Juli. Isi berita terkait kebingungan sejumlah Guru dalam penerapan K-13, Sekjen FSGI Retno Listyarti menyatakan banyak guru yang kebingungan dalam penerapan K-13 dikarenakan penerapan tersebut di lapangan tidak dijalankan sesuai aturan Kemendikbud, bahwa di sekolah baru, K-13 diajarkan di kelas I, IV dan X.

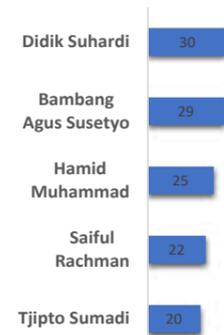


Influencer Jan - Mar



Lima Influencer tertinggi dari total 23 influencer yang ada di periode ini, didominasi oleh internal Kemendikbud. Hanya ada satu influencer eksternal yang memberikan pernyataan, yakni Anggota Komisi II DPR, Edhi Baskoro Yudhoyono, yang menyatakan optimistis dengan penerapan K-13.

Influencer Apr - Jun



Pada periode pemberitaan didominasi empat influencer internal Kemendikbud yang memberikan pernyataan terkait kenaikan harga buku pelajaran K-13 pada bulan Juli.

Influencer Jul - Sept



Pada kurun waktu tiga bulan, terdapat tiga influencer internal Kemendikbud yang memberikan pernyataan seputar K-13. Nama Anang Hermansyah sebagai anggota komisi X, menempati posisi dua, lebih banyak memberikan statemen mengenai tugas baru Muhadjir sebagai Mendikbud.

Influencer Okt - Des



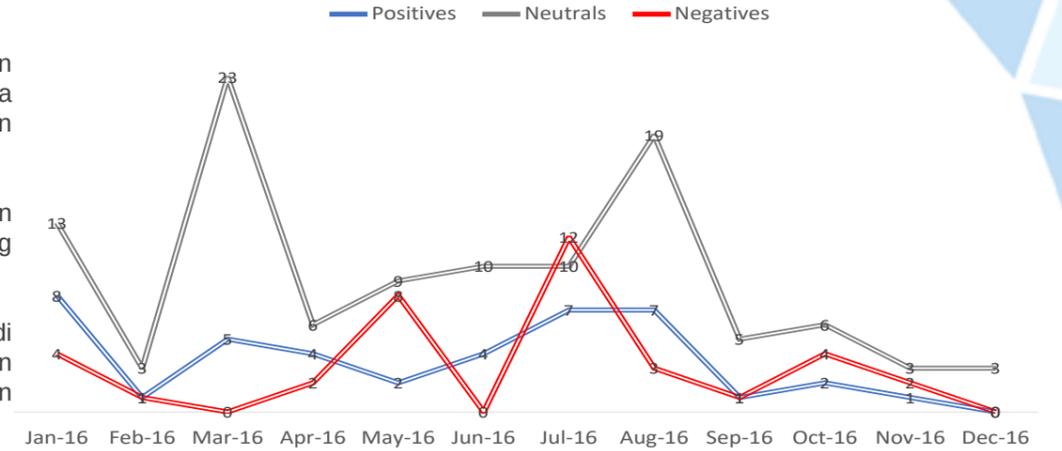
Sejumlah influencer figur eksternal Kemendikbud mendominasi pemberitaan. Mereka banyak memberikan pernyataan terkait sejumlah isu, yaitu permasalahan kekurangan Guru Agama, serta persiapan pelaksanaan K-13 di sejumlah daerah.

SENTIMEN (MEDIA CETAK)

Sentimen pemberitaan yang mendominasi topik K-13 adalah sentimen netral dengan 110 berita (58%) dan sentimen positif dengan 42 berita (22%). Sementara sentimen negatif, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sentimen positif dengan 37 berita (20%).

Lonjakan pemberitaan sentimen netral terjadi pada bulan Maret, berkaitan dengan pemberlakuan K-13 secara bertahap pada bulan Juli, yang sebelumnya revisi K-13 sudah dilakukan Desember 2015.

Ekspos media yang memberitakan sentimen negatif paling tinggi terjadi pada bulan Juli. konten berita terkait masih banyaknya Guru yang kesulitan dalam menerapkan (K-13) khususnya bagi sekolah yang baru menerapkan (K-13) seperti yang diungkapkan Sekjen FSGI Retno Listiarty.



Influencer Okt - Des



Pada periode ini nama Mendikbud Muhadjir baru muncul sebagai figur yang banyak memberikan pernyataan. Yang di periode sebelumnya Mendikbud sedikit memberikan pernyataan terkait K-13.

Influencer Jul - Sept



Terdapat 4 figur internal Kemendikbud yang menempati lima posisi teratas, yang banyak memberikan pernyataan positif terkait penerapan K-13, adapun di posisi teratas ditempati figur eksternal yaitu Sekjen FSGI Retno Listiyarti yang terkait banyaknya keluhan guru yang masuk dalam pelayanan pengaduan FSGI terkait kesulitan para guru di sekolah yang baru menerapkan K-13.

Influencer Apr - Jun



Pada periode ini figur yang memberikan pernyataan berjumlah 11 figur. Pada peringkat lima teratas, para figur banyak memberikan pernyataan positif terkait penerapan K-13. Yang menarik, sejumlah influencer eksternal Kemendikbud menyambut baik dan mendukung peenerapan K-13 di setiap sekolah.

Influencer Jan - Mar



Nama Anies Baswedan menempati posisi teratas dengan pernyataan mengenai penerapan K-13 pada Bulan Juli.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. Jogja dan Sleman Siap Terapkan K-13 2. Revisi Buku K-13	Januari	1. Penerapan K - 13 2. Revisi Buku K - 13
Februari	1. Penerapan K-13 2. Ujian Nasional 2016 Putuskan Berbasis Dua Kurikulum	Februari	1. Buku Pelajaran K - 13 Masih Berlaku 2. Yogya Siap Terima Kuota Tambahan Sekolah Yang Menerapkan K - 13 3. Unas Perbaikan Sepi Peminat 4. Pelajar WNI Wajib Ikut UNBK
Maret	1. Penerapan K-13 2. Mendikbud Kukuhkan 153 Narasumber K-13 3. Revisi Buku K-13	Maret	1. Penerapan K - 13 2. Sosialisasi K-13 3. Kemendikbud Awasi Guru dan Kepsek
April	1. Pemerintah Diminta Percepat Proses Pelaksanaan K-13 2. Walkot Malang Keberatan Pengelolaan SMA/SMK Dialihkan ke Pemprov	April	1. Penerapan K - 13 2. Revisi K - 13
Mei	1. Buku Pelajaran Makin Mahal 2. Penerapan K-13	Mei	1. Buku Pelajaran Makin Mahal 2. Revisi K -13
Juni	1. Penerapan K-13 2. SMK Diajari Simulasi Digital 3. Hiruk Pikuk Penilaian K-13	Juni	1. Penerapan K - 13 2. Hiruk Pikuk Penilaian K - 13
Juli	1. Mendikbud Muhadjir Diminta Tintaskan K-13 2. Pelatihan K-13 3. Guru Bingung Terapkan K-13 4. Pengiriman Buku K-13 Terlambat	Juli	1. Banyak Guru Kesulitan Terapkan K - 13 2. Pengiriman Buku K - 13 Terlambat 3. Penerapan K - 13
Agustus	1. Penerapan K-13 2. Pengadaan Buku K-13	Agustus	1. Penerapan K-13
September	1. Penerapan K-13 2. Permasalahan K-13	September	1. Penerapan K - 13 2. 500 Sekolah Terapkan Full Day School
Oktober	1. Daerah Krisis Guru Agama 2. Pusbidik Ciranjang Genjot Kualitas Pendidikan	Oktober	1. Buku K-13
November	1. Pendampingan K-13 Amburadul di Situbondo 2. Penambahan Sekolah Terapkan K-13	November	1. Penerapan Kurikulum 2013
Desember		Desember	1. K-13 Isyaratkan Penilaian Siswa Setiap Saat

TOP ISSUE CETAK



Jogja & Sleman Siap Terapkan
(Solopos, Januari 2016)

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja mengusulkan pemakaian kurikulum 2013 (K13) diseluruh sekolah negeri di Kota Jogja. Sementara untuk sekolah swasta masih dalam konfirmasi pihak yayasan, meskipun beberapa sudah menjalankan K13.

Kepala Disdik Kota Jogja, Edy Heri Suasana mengatakan usulan ini menanggapi permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar menjalankan K13 bagi 20% sekolah di tiap daerah. "Target kami memang ajaran 2016/2017 semua sekolah negeri di Jogja bisa menjalankan K13. Kami sudah mengusulkan semuanya dan berharap bisa disetujui nantinya," kata Edy saat dihubungi Harianjogja.com, Rabu (13/1/2016)

Edy memperinci di Kota Jogja

memiliki sekolah negeri 89 SD, 16 SMP, 11 SMA dan tujuh SMK. Dan pada tahun ini ada sekitar serta 16 SD negeri dan dua swasta yang sudah menjalankan K13, sekolah SMP ada empat sekolah negeri dan dua swasta.

"Kalau SMA sudah ada delapan yang memberlakukan K13, terdiri dari empat sekolah negeri dan empat sekolah swasta. Sementara SMK ada enam sekolah, yakni terdiri dari lima SMK negeri dan satu SMK swasta," kata Edy. Edy menuturkan untuk sekolah yang di bawah Kementerian Agama (Kemenag) juga sudah diusulkan untuk menjalankan K13 pada tahun ajaran 2016/2017.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman, Arif Haryono menuturkan pihaknya belum mengusulkan seluruh sekolah negeri untuk menjalankan K13 pada tahun ajaran 2016/2017.

"Kami hanya mengusulkan adanya penambahan sebanyak 179 sekolah. Ini sesuai dengan instruksi Kemendikbud 25% sekolah harus menjalankan K13. Target kami 2019 sudah 100% sekolah di Sleman memakai K-13," kata Arif saat

dihubungi Harianjogja.com.

Arif menambahkan sekolah di Kabupaten Sleman sebanyak 527 SD, 133 SMP, 58 SMK dan 56 SMA. Tahun ini yang diusulkan menjalankan K13 sebanyak 133 SD, 19 SMP, 13 SMA, dan 14 SMK. Angka ini di luar madrasah. "Kalau sekolah yang sudah menggunakan K-13 sejak 2015 lalu sebanyak 33 unit. Perinciannya ada 14 SD, enam SMP, delapan SMA dan lima SMK," kata Arif.



'Beda Kurikulum, Beda Pemahaman Soal UN'
(Republika, Februari 2016)

Penerapan dua kurikulum yang berbeda berdampak negatif terhadap pemahaman materi kisi-kisi UN (Ujian Nasional) 2016. Terjadi perbedaan pemahaman materi diantara guru mata pelajaran (Mapel) yang diujikan. Ketua

Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Kota Solo, Liestyani Dhamayanti, Selasa (9/2), menyoal hal ini. Ia mengakui, memang terjadi perbedaan pemahaman terhadap kisi-kisi Mapel Bahasa Indonesia yang dipakai sebagai soal Ujian Nasional (UN) 2016.

Memang, dampak penerapan dua kurikulum yang berbeda saat ini, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K-13) berdampak pada perbedaan pemahaman diantara guru Mapel materi kisi-kisi soal UN 2016.

"Perbedaan pemahaman itu, sejauh ini masih wajar," ujarnya.

Munculnya pemahaman yang berbeda, Liestyani menunjukkan sebuah contoh. Guru dari K-13, misalnya, ketika membaca kisi-kisi tentang menentukan bagian-bagian teks, mereka langsung membuat soal yang di situ ada struktur teksnya. Sementara, dari guru KTSP yakin kalau siswa KTSP tidak akan bisa mengerjakan soal tersebut, karena hanya diajarkan di sekolah K-13.

Contoh lain, kata Liestyani, ada beberapa sekolah KTSP yang gurunya justru mengajarkan materi

struktur yang sebenarnya tidak masuk dalam pembelajaran KTSP. Namun, sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), UN 2016 bakal dilaksanakan dalam satu konsep. Tim pembuat soal UN 2016 akan menerapkan sistem irisan dari kedua kurikulum tersebut.

Ujian Nasional Perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Solo ditunjuk sebagai lokasi Ujian Nasional Perbaikan (UNP) yang akan berlangsung Februari 2016 ini. "Sejauh ini yang telah mendaftar sebanyak 66 orang SMK, SMA Kota Solo," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Aryo Widyandoko.

UNP diperuntukkan bagi mereka yang sudah lulus SMK, SMA yang Ujian Nasional (UN)-nya rendah, maka bisa mengulang lagi dengan mengikuti UNP.

Ditunjuk SMKN 2 Solo sebagai lokasi UNP lantaran untuk sarana dan prasarana, serta fasilitas lain termasuk komputer siap. Kemudian dari sisi lokasi, keberadaan SMKN 2 Solo, sangat strategis. Sehingga peserta UNP dari luar kota bisa menjangkau. Kemudian dari teknis,

SMKN 2 Solo juga sudah ada.

Terkait persiapan pelaksanaan UNP, menurut Aryo, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Solo. Sedang untuk struktur kepanitiaan, masih nunggu dari pusat. Jadi, untuk siapa yang ditunjuk jadi panitia UNP belum ada.

"Sehingga kita masih menunggu dari pusat," ujarnya. Pelaksanaan UNP menggunakan Computer Based Test (CBT). Bagi yang dulunya mengikuti UN belum menggunakan CBT, maka untuk UNP tetap menggunakan CBT.

Pemerintah Diminta Percepat Proses Pelaksanaan K-13

(Kalimantan News, April 2016)

Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat mendesak pemerintah menetapkan satu kurikulum, jangan ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali harus satu yaitu Kurikulum tahun 2013 (K-13) sehingga proses percepatannya menjadi penting.

"Jangan sampai satu periode ini hanya mengislahkan.

Jangan sampai islah K-13 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) nggak rampung-rampung, itu hal yang tidak bagus sama sekali. Kalau pemerintah menargetkan 2019, menurut saya sebelum 2019 harus selesai," tandas Mujib Rohmat di sela-sela acara Kunker Spesifik Tim Komisi X DPR ke Jawa Timur, Sabtu (9/4) lalu.

Fokus kunker spesifik ke Jawa Timur kali ini selain soal persiapan UN SMP, evaluasi UN SMA/SMK juga memantau implementasi Kurikulum 2013. Untuk itu Tim Komisi X selain mengunjungi SMA Negeri I dan SMP Negeri I dan IV Gresik serta

berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Gresik dan Blitar, Kepala Sekolah dan Guru-guru serta tokoh pendidikan pendidikan setempat.

Dari dialog terungkap bahwa umumnya mereka telah siap melaksanakan K-13, Kepala Sekolah SMA Negeri I Gresik menyatakan telah 3 tahun melaksanakan K-13. Roh K-13 adalah pendidikan karakter dan entrepreneurship.

"Bagi kami K-13 adalah luar biasa. Sebelumnya karakter anak didik kami sangat rendah, termasuk sopan santun, budi pekerti dan tertib disiplin. Dengan K-13 kami punya payung, punya ruang



untuk bisa menerapkan ke anak-anak," jelasnya.

Wabil khusus, katanya, kalau Bung Karno dengan semboyan Nation Building, Pak Jokowi dengan revolusi mental itu, sudah bisa masuk ke sana. Pihaknya di Gresik, untuk menjalankan K-13 tidak ada kesulitan. "Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa menjadi bangsa besar kembali di tingkat Asean, syukur-syukur bisa di tingkat Asia, bahkan dunia," tambahnya.

Dari SMP Negeri IV Gresik tahun lalu sudah menandatangani dan siap melaksanakan K-13 sesuai arahan pusat. Namun karena adanya edaran Kemendikbud supaya dikembalikan ke kurikulum sebelumnya sehingga semua persiapan yang dilakukan guru dan buku yang ada menjadi sia-sia.

Kepada Tim Komisi X dia berharap, segera laksanakan K-13. "Tidak ada percobaan yang tanpa cacat. Kurikulum itu harus dianalisa 10 tahun sekali. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah 10 tahun lebih sudah waktunya diganti. Penggantian kurikulum pasti ada kekurangan, kekurangan inilah yang diperbaiki sambil berjalan. Gresik siap melaksanakan K-13," ia

menambahkan. (mp)

Kemendikbud Keluarkan Harga Eceran Buku Sekolah

(Padang Ekspres, Mei 2016)

Orang tua murid tak perlu tergesa-gesa beli buku sekolah untuk tahun ajaran baru 2016/2017. Apalagi bagi yang kerap mengeluhkan soal harga. Sebab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera merilis harga eceran tertinggi (HET) buku sekolah.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Tjipto Sumardi mengatakan, kemungkinan HET seluruh buku pelajaran bakal keluar pekan depan. "Sebagian besar HET buku sudah kita tentukan. Hanya belum ditetapkan, karena menunggu komplet semuanya," katanya di Jakarta kemarin.

Tjipto menjelaskan, HET yang baru nanti berlaku untuk buku-buku Kurikulum 2013 (K-13) maupun Kurikulum 2006 (KTSP). Untuk daftar HET buku K-13 sudah beres.

Sekarang tinggal penyusunan HET buku KTSP yang terdiri dari sekitar 1.670 judul buku. Tapi, Tjipto masih

menutup rapat informasi rentang harga buku dari yang termurah sampai paling mahal. Ia hanya mengatakan, Kemendikbud ingin mnghidupkan ekosistem pendidikan, khususnya di urusan buku pelajaran. "Intinya, kita tidak bisa menguntungkan perusahaan buku saja, nanti kasihan masyarakatnya," jelasnya.

Tapi, lanjutnya, di sisi lain, Kemendikbud juga tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebab, bisa membahayakan kelangsungan hidup industri buku mati.

Terkait tuntutan dari Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) supaya HET buku secepatnya ditetapkan, Tjipto berharap semua pihak bersabar. Yang pasti, Ikapi juga dilibatkan dalam pembahasan HET buku sekolah. Kalau penetapannya butuh waktu, tambah Tjipto, itu untuk menghindari potensi-potensi penyimpangan.

Dari Ikapi, Ketua Umum Rosidayati Rozalina berharap, Kemendikbud juga memikirkan aspek bisnis dalam penetapan HET buku. "Kami percaya Kemendikbud bakal mengeluarkan keputusan yang saling menguntungkan antara

masyarakat konsumen buku dengan percetakan atau penerbit," katanya.

Ia mengatakan, buku tahun ajaran baru nanti harus sudah sampai di sekolah pada 22 Juli. Ia berharap keputusan HET segera keluar supaya perusahaan bisa segera bekerja menggandakan buku.



Hiruk Pikuk Penilaian Kurikulum 2013

(Jawa Pos, Juni 2016)

TAHUN 2016 ini adalah tahun pertama ujian nasional (unas) dengan menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) dilakukan. Mengutip Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, kisi-kisi unas disusun dan ditetapkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) berdasar kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku.

Mengingat kurikulum yang berlaku sekarang –untuk jenjang SMP/MTs sederajat maupun SMA/MA/SMK sederajat– adalah dua kurikulum, yakni Kurikulum 2006 dan K–13, dalam Peraturan BSNP Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015 dijelaskan bahwa kisi–kisi unas tahun pelajaran 2015–2016 adalah interseksi atau irisan dari Kurikulum 2006 dan K–13. Sekalipun tidak lagi dipergunakan sebagai penentu kelulusan, unas wajib diikuti peserta didik.

Sebab, berdasar pasal 27 Permendikbud 57/2015 tersebut, dinyatakan bahwa kelulusan peserta didik dari SMP/MTs/SMA/MA/SMK sederajat ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang bersangkutan dalam rapat dewan guru setelah pengumuman hasil unas.

Kelulusan Peserta Didik Berdasar pasal 24 Permendikbud 57/2015, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh sejumlah kriteria. Yaitu, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, dan lulus US/M/PK.

Menyelesaikan seluruh program pembelajaran bagi SMP/MTs

sederajat yang dimaksud adalah telah menyelesaikan pembelajaran mulai kelas VII sampai dengan kelas IX dengan bukti nilai rapor. Sementara itu, untuk SMA/MA/SMK sederajat, dibuktikan dengan nilai rapor kelas X sampai dengan kelas XII.

Mengingat satuan pendidikan, terutama sekolah, telah menjalankan dua kurikulum –Kurikulum 2006 dan K–13–, dari sinilah awal persoalan itu muncul. Penilaian pada Kurikulum 2006 berdasar Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 menggunakan skala 0–100.

Sementara itu, pada awal berlakunya K–13, berdasar Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 dan diperbarui dengan Nomor 104 Tahun 2014, penilaian terhadap peserta didik menggunakan skala 1–4 sebagaimana penilaian pada mahasiswa di perguruan tinggi. Skala penilaian 1–4 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah belum familier.

Perlusosialisasidalamimplementasi. Baik kepada siswa, guru, maupun orang tua/wali di samping pihak lain yang berkepentingan. Regulasi tentang skala penilaian 1–4 itu tidak berumur panjang. Dalam praktiknya

di lapangan, banyak ditemui kendala.

Hingga keluarlah Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencabut Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014. Alasannya, tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hasil belajar peserta didik.

Hiruk Pikuk Penilaian Hiruk pikuk penilaian K–13 menemukan klimaksnya setelah keluar panduan penilaian untuk SMP/SMA/SMK sebagai penjelasan teknis dari Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Dengan keluarnya Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 saja, sekolah dibuat kelabakan.

Bagaimana tidak, guru, siswa, dan orang tua/wali murid belum jenak untuk mengadaptasikan diri dengan perubahan skala penilaian, dari skala 0–100 ke skala penilaian 1–4, sejak 15 Desember 2015 –tanggal diundangkannya Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015– harus kembali kepada skala penilaian 0–100 lagi. Perubahan tersebut oleh penentu kebijakan di tingkat pusat bisa saja dianggap biasa dan tidak

berdampak.

Bagi sekolah, terutama wali kelas dan guru, implikasi perubahan itu tidak bisa dikatakan kecil. Sebab, secara administratif pengaruhnya menjangar ke pengisian buku induk, buku legger, dan rapor.

Hiruk pikuk atau kegaduhan penilaian di sekolah itu juga terjadi karena beberapa hal. Pertama, terbitnya panduan penilaian jauh mendahului, sedangkan keluarnya Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 begitu terlambat.

Kedua, salah satu latar belakang keluarnya panduan penilaian adalah pendidik mengalami kesulitan dalam penilaian menggunakan angka dengan skala 1–4 dan masyarakat kurang memahami makna nilai hasil belajar. Ketiga, panduan penilaian disusun secara tidak cermat, kurang koordinasi antardirektorat, dan terkesan sekadar memenuhi target proyek.

Panduan penilaian SMP tidak mencantumkan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 sebagai dasar utama. Panduan penilaian SMK mencantumkan, tapi tidak lengkap dengan nomornya. Panduan penilaian SMP dan SMK tidak

mencantumkan tanggal legalisasi dikeluarkannya suatu regulasi. Hanya panduan penilaian SMA yang lengkap.

Meski panduan penilaian SMP, SMA, dan SMK ditandatangani oleh Dirjen Dikdasmen yang sama (Hamid Muhammad PhD), ada substansi isi yang cukup berbeda, bahkan berlawanan. Penentuan KKM (kriteria ketuntasan minimal) berbeda antara jenjang SMP/SMK dan SMA.

Di panduan penilaian SMP/SMK, KKM ditentukan oleh satuan pendidikan (sekolah/madrasah) dengan batas minimal yang sama, yakni 60. Hal ini tentu tidak logis karena KKM ditentukan berdasar kemampuan awal siswa, kerumitan kompetensi, dan keadaan sumber daya pendidikan di satuan pendidikan.

Tiap mata pelajaran memiliki karakter yang beda dan yang paham kerumitan kompetensi (materi ajar) adalah guru. Pada panduan penilaian SMA, nilai KKM merupakan nilai minimal untuk predikat cukup.

Penetapan interval predikat untuk KKM yang berbeda dibuat tabel

interval predikat yang nisbi (sangat baik, baik, cukup, dan kurang), sehingga fleksibel dan aplikatif. Sebab, KKM menjadi patokan bagi naik kelas atau tidaknya siswa.

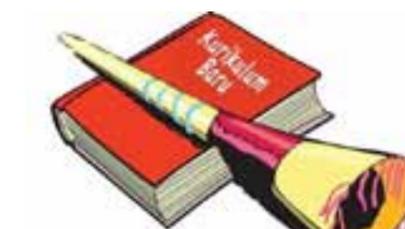
Sementara itu, panduan penilaian SMP dan SMK, capaian kompetensi diberi predikat absolut: sangat baik – A (86–100); baik – B (71–85); cukup – C (56–70); dan kurang – D (≤ 55) yang dalam praksisnya tidak logis dan unfungsiional. Karena dengan predikat yang absolut itu, siswa dengan kategori baik (karena KKM–nya 75, misalnya) bisa tidak naik kelas. Dan, itu menjadi tidak rasional.

Untuk itulah, dalam menyusun suatu regulasi, diperlukan pemikir dan penentu kebijakan visioner yang realistis, berwawasan luas, dan menguasai konten secara paripurna. Itu dilakukan agar regulasi yang dikeluarkan tidak membingungkan.

Sebab, regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di tingkat pusat akan dipedomani oleh jajaran yang ada di bawah. Janganlah mengeluarkan regulasi yang membuat pelaksana di tingkat sekolah kebingungan dan kehilangan arah. (*)

*) Doktor manajemen pendidikan,

alumnus Universitas Negeri Malang, dosen program pascasarjana Unipa Surabaya



Mendikbud diminta tuntaskan persoalan Kurikulum 13 (Elshinta, Juli 2016)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy diminta untuk menuntaskan persoalan Kurikulum 13 yang masih belum terselesaikan pada periode menteri sebelumnya. “Tunggakan persoalan di era menteri lama harus segera dituntaskan oleh Mendikbud baru,” kata Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah dalam keterangan pers yang diterima Antara, Jakarta, Sabtu (30/7).

Pada Rabu (27/7), Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinetnya di Istana Kepresidenan. Dalam susunan kabinet yang baru itu, Muhadjir Effendy menjadi Mendikbud

menggantikan Anies Baswedan.

Anang mengatakan persoalan Kurikulum 13 (K–13) menjadi salah satu dari sejumlah persoalan lama yang belum dibereskan oleh menteri sebelumnya.

“Semestinya, kebijakan menteri menyelaraskan dengan visi misi presiden yang di antaranya ingin memajukan ekonomi kreatif. Penerjemahan dalam konteks pendidikan yakni dengan mendorong aspek afektif terhadap anak didik dengan memperkuat seni dalam kurikulum pendidikan,” tutur Anang yang terkenal sebagai musisi asal Jember, Jawa Timur, itu.

Selain persoalan K–13, Anang juga meminta Mendikbud baru untuk mengubah empat peraturan menteri yang telah ditandatangani Anies saat menjadi menteri namun tidak sesuai dengan rekomendasi Panja Perfilman Komisi X DPR RI.

“Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) yang ditandatangani Anies Baswedan masih menonjolkan sisi ego sektoral kelembagaan dalam urusan perfilman yakni Pusat Pengembangan Film Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan). Padahal, Panja (Panitia Kerja) Perfilman jelas mendorong agar urusan perfilman dapat dilakukan bersama-sama dengan Pusbang (Pusat Pengembangan) Film, Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta Mendikbud Muhadjir agar memenuhi ketersediaan sekolah dasar di 10.985 desa yang hingga kini tidak memiliki bangunan sekolah dasar.

“Indonesia telah 71 tahun merdeka, namun ketersediaan infrastruktur sekolah dasar belum tersedia pada 10.985 desa di Indonesia. Mendikbud harus memiliki keinginan kuat untuk memenuhi ketersediaan sekolah dasar,” ujar Anang.

Dia juga meminta Mendikbud agar memiliki kepedulian yang lebih terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mendorong alokasi anggaran yang ideal karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia.



Pengadaan Buku K-13 Harus Transparan

(Media Indonesia, Agustus 2016)

PENGADAAN buku teks pelajaran dalam Kurikulum 2013 (K-13) tahun pelajaran 2016/2017 dilakukan melalui sistem e-katalog atau online shop untuk menjamin transparansi.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengadaan buku dilakukan dengan lelang di pusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pihak sekolah bisa memanfaatkan dana BOS buku.

Dengan mengakses laman https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/buku_kurikulum_2013, pihak sekolah dapat langsung memilih buku yang digunakan.

Menurut Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, ada sekitar 105 judul buku dengan total 40 juta eksemplar yang

dapat dibeli lewat laman itu.

“Kita ingin transparansi ada di atas meja. Harganya lebih rendah daripada harga eceran tertinggi (HET),” ujar Didik usai membuka acara Dialog Pendidikan: Kurikulum 2013 dan Permasalahannya di Daerah, di Denpasar, Bali.

Hadir sebagai narasumber anggota Komisi X (F PDI Perjuangan) Wayan Koster, Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Purwadi, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusumawardhani, serta para guru di lingkungan Provinsi Bali.

Menurut Didik, pembelian buku lewat e-katalog bisa meminimalkan kemungkinan masalah yang muncul akibat pengadaan yang dilakukan terpusat.

Misalnya, sekolah sudah membayar buku yang disiapkan, tapi bukti tidak dapat dikirim karena masalah teknis, atau sebaliknya. Dengan e-katalog, transaksi menjadi lebih mudah.

Guru atau sekolah cukup membuka laman e-katalog, melakukan pemesanan, buku dikirim, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana BOS buku. Didik mengatakan, untuk pengadaan buku

K-13, sebanyak 10 perusahaan telah menandatangani kontrak.

Kemendikbud juga telah mengeluarkan surat edaran melalui Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor: 10/D/KR/2016 Tanggal 1 Juli 2016 mengenai Buku K-13.

Kepala sekolah menugasi operator data pokok pendidikan (Dapodik) untuk memesan buku pada halaman daring penyedia dengan menggunakan user ID dan password dapodik.

Sepanjang 2016, sekolah (SD-SMA) yang melaksanakan K-13 ada 71 ribu (25%). “Tahun 2017 akan ditingkatkan menjadi 60% dan 2019 semua sekolah melaksanakan K-13,” tegas Didik.

Purwadi Sutanto menambahkan buku yang disediakan e-katalog terdiri atas semua mata pelajaran inti, seperti matematika, agama, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, prakarya, dan kewirausahaan.

Pembayaran buku teks pelajaran K-13 melalui dana BOS bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pembayaran nontunai melalui payment gateway yang disediakan tiap-tiap penyedia atau melalui

transfer langsung kepada penyedia. Saat ditanya apakah dengan dana BOS siswa tidak lagi membayar biaya buku K-13, Purwadi menjawab, “Mestinya siswa yang miskin gratis, siswa yang kaya membayar. Itu namanya berkeadilan.”

Perhatikan konten Selain masalah pengadaan, pemerhati pendidikan Totok Amien Soefijanto menilai isi buku teks K-13 masih belum ideal karena masih berisi seputar informasi sehingga kurang mendalam.

Menurut dia, buku teks K-13 seharusnya lebih mengutamakan konten sehingga membuat siswa lebih cepat memahami bidang studi yang diajarkan.

Sementara itu, Wayan Koster mengingatkan, Mendikbud yang baru mesti dapat menjalankan K-13 secara integratif dan komprehensif. “Implementasi K-13 pernah tersendat dan menelan dana anggaran besar. Makanya K-13 jangan sampai gagal dilakukan secara bertahap.



Tahun ini, 53 SD Terapkan K-13 (Radar Palembang, September 2016)

Penerapan Kurikulum 2013 memang masih menuai kendala, namun untuk tahun ajaran 2016/2017 ada 53 SD lagi yang akan menerapkan k-13 di tahun pelajaran ini.

Kepala bidang (Kabid) taman kanak-kanak dan sekolah dasar (TK/SD) Disdikpora kota Palembang, Sutriana mengatakan pemahaman dan pola pikir tenaga pendidik dan orangtua mengenai kurikulum, masih menjadi kendala utama. “Tahun ini pelaksana K-13 jenjang SD di Palembang bertambah. Yang sebelumnya hanya 47 telah menerapkan K-13 pada tahun lalu,” jelasnya kemarin.

Dia mengatakan dari total 376 sekolah dasar negeri dan swasta se-kota Palembang, hanya ada 76 Sekolah Dasar negeri (SDN) yang melaksanakan K13, sedangkan

untuk SD swasta berjumlah 26 sekolah. Tentunya ini belum mencukupi setengah sekolah penyelenggara K-13. Padahal di awal tahun lalu kita usulkan sebanyak 124 SD negeri/swasta ke pusat, namun berdasarkan surat keputusan balitbang kemendikbud nomor 305 tahun 2016, hanya meluluskan 53 sekolah saja.

Dia mengatakan saat ini masih mengalami kendala dalam penerapan kurikulum 2013 (K-13). Salah satu penyebab utamanya yaitu karena mainset (pola pikir) kepala sekolah, guru dan orang tua yang masih berkuat pada konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuju ke K-13.

Lanjutnya, guna mendorong pemahaman K-13, pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk melatih para guru.

Diakuiinya, pihaknya melalui sekolah gugus inti akan m e n g i m p l e m e n t a s i k a n penerapannya ke sekolah-sekolah lain yang melaksanakan K-13 agar lebih paham. “Faktor anggaran yang minim menjadi permasalahan utama

kemungkinan sekolah lainnya tidak lolos. Pasalnya, dalam penerapan K-13 tidak hanya sekedar pada persiapan akan fasilitas pembelajaran seperti buku, namun juga pelatihan bagi tenaga pendidik dalam hal ini guru,” pungkasnya.



Waahh.. di Sini Krisis Guru Agama Islam (JPNN, Oktober 2016)

Kota Madiun mengalami kekurangan guru pendidikan agama Islam (PAI) yang cukup kronis. Defisit guru tersebut tidak hanya terjadi di jenjang SMA/SMK, tapi juga di SD dan SMP.

Kondisi itu memaksa disdikbudpora memeras otak agar kebutuhan siswa beragama Islam terlayani. Langkah yang ditempuh adalah memberikan tugas tambahan kepada guru PAI. Upaya yang lebih ekstrem, mengalihfungsikan guru kelas taman kanak-kanak (TK) ke sejumlah sekolah yang mengalami krisis.

“Tahun ini ada sembilan guru TK yang dialihfungsikan menjadi pengajar PAI,” jelas Kepala Disdikbudpora Kota Madiun Gandhi Hatmoko. Dia mengungkapkan, hal itu terpaksa dilakukan setelah upaya memberi tugas tambahan kepada guru PAI menimbulkan persoalan baru.

Yakni, kelebihan jam sertifikasi yang ditoleransi (40 jam tatap muka per minggu). Apalagi, banyak guru kelas TK yang memiliki kualifikasi pendidikan strata satu PAI maupun sarjana agama.

“Mereka (sembilan guru kelas TK, Red) sudah kami sebar ke SD dan SMP. Pertimbangannya, pola pikir anak TK dan SD secara psikologis lebih dekat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madiun.

Gandhi memerinci, sesuai dengan catatan bagian tenaga dinas, 11 SMAN/SMKN mengalami krisis guru PAI. Guru mata pelajaran tersebut di SMAN 6 bahkan nihil saat ini karena setelah satu-satunya guru PAI pensiun.

Sementara itu, SMKN 1 mencatat defisit terbanyak, yakni empat guru. “Total dibutuhkan 39 guru. Yang tersedia hanya 18 guru,” ungkapnya.

Selain faktor pensiun, lanjut dia, krisis guru di SMA/SMK dipengaruhi pergantian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ke kurikulum 2013 (K-13). “Dalam K-13, PAI diberi porsi tiga jam per minggu, sebelumnya hanya dua jam,” ucapnya.

Gandhi juga menuturkan, langkah mengatasi krisis guru PAI dengan alih fungsi membuat guru yang diperbantukan di sekolah swasta beralih ke sekolah negeri. Pemberian tugas tambahan pun hanya bersifat sementara. Sebab, pihaknya tidak bisa menghalangi guru yang akan pensiun. Dia menyatakan, hingga empat tahun ke depan, ada delapan guru PAI yang purnatugas. Mayoritas diangkat pada 1980-an. Persoalannya, hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda pemerintah untuk mengadakan rekrutmen.

“Kebijakan rekrutmen itu berada di tingkat pusat. Daerah hanya melaporkan jumlah formasi yang lowong,” ucapnya. Gandhi menegaskan, terkait dengan krisis guru PAI, pihaknya sudah menyurati Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud pada 25 Februari.

Langkah serupa ditujukan ke Kemenag Madiun Kota Madiun meski belum mendapat jawaban yang memuaskan.

Disdik Usulkan Penambahan Sekolah Terapkan K-13

(Harian Bhirawa, November 2016)
Dinas Pendidikan (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro mengusulkan ke pusat penambahan sejumlah sekolah yang akan menerapkan kurikulum 2013 (K-13) tahun ini dalam proses belajar mengajar peserta didik.

Kepala Bidang SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Bojonegoro Puji Widodo mengatakan tahun ini Disdik mengusulkan 89 sekolah untuk menerapkan K-13. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang menerapkan tahun ini yaitu 53 sekolah.

“Penerapan K-13 sebelumnya mengalami banyak kendala. Salah satunya pengadaan buku. Saat ini buku dipesan sendiri oleh sekolah. Hal itu untuk memudahkan pengiriman. Jika sekolah lambat memesan maka siswa juga akan lama tidak memakai buku,” kata Puji kepada Bhirawa, Senin (7/11).

Menurut Puji, banyak sekolah yang siap menerapkan K-13. Sebab K-13 sebelumnya pernah diterapkan sebelum akhirnya dihentikan pada 2014. Puji menambahkan, pihaknya akan kembali menanyakan ke sekolah mengenai kesiapan penerapan K13 itu. Sebab pihaknya harus segera melaporkannya ke Kemendikbud. “Sehingga nanti Kemendikbud akan mendata sekolah-sekolah yang sudah menerapkan K-13,” katanya.

Disdik Bojonegoro optimis Kementrian Pendidikan RI dapat menyetujui usulan penambahan sekolah penerapan K-13 ini karena sudah dipersiapkan dan untuk menunjang kualitas proses belajar mengajar.

Kurikulum 2013 diyakini akan lebih merangsang cara berpikir anak didik lebih luas dan kreatif dalam belajar karena materi dalam sistem tersebut dianggap lebih bagus dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. “Pola pembelajaran dengan kurikulum 2013 akan merangsang anak untuk berpikir lebih luas dan sangat berbeda dengan sistem sebelumnya,” ungkap dia.

Tetap Pakai Kurikulum K-13

Anies: Sekolah Akan Diverifikasi

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan, tidak ada perubahan nama dalam kurikulum 2013. Kurikulum nasional bukan merupakan nama, dan tetap dipakai K-13.

“Kami tetap pakai K-13 sebagai nama kurikulum,” kata Anies dalam refleksi akhir tahun di Kantor Kemendikbud, Jakarta.

Bekas Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, setelah melaksanakan serangkaian evaluasi, rapat konsolidasi dan diskusi dengan berbagai pihak, Kemendikbud memastikan proses penerapan K-13 adalah benar dan akan ada penilaian komprehensif di setiap prosesnya.

“Standar bekerja yang harus dimiliki adalah mendekati nol kesalahan dan mendekati sempurna. Kesalahan satu saja dapat mengganggu proses pendidikan Indonesia,” tegas Anies.

Adapun pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13) ini, lanjut dia, akan mulai dilaksanakan

dulu. Tahun ajaran 2019/2020 kami targetkan 60 persen sekolah menjalankan K-13 di semua kelas sehingga tinggal 40 persen sekolah yang hanya menjalankan kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan,” katanya.

Dia berharap, pada tahun pelajaran 2019/2020 seluruh kelas di setiap sekolah menerapkan K-13. Pada 2015, Kemendikbud menetapkan enam ribu sekolah yang telah menjalankan K-13 selama tiga semester tetap melanjutkan penerapannya. Mereka inilah yang menjadi sekolah rintisan dan model bagi sekolah lainnya untuk menerapkan K-13 secara ideal.

Kemendikbud tetap membuka kemungkinan bagi sekolah lain yang hendak menerapkan setelah sekolah tersebut mengajukan verifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM).

Anies juga membantah kabar bahwa pihaknya akan meng-

tahun depan secara bertahap. Alasannya, tidak semua sekolah siap menerapkan Kurikulum 2013. Begitu juga tenaga pendidiknya masih perlu dipersiapkan dengan matang.

“Jadi kami terapkan secara bertahap. Tahun ini 25 persen, kemudian bertambah 60 persen, dan tahun berikutnya (2017) selesai,” ujarnya.

Adapun sekolah yang menerapkan K-13, kata Anies, harus diverifikasi lebih dulu.

“Sekolah yang menerapkan K-13 harus lolos verifikasi

gunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau biasa dikenal dengan Kurikulum 2006 pada tahun depan.

Soal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada 2016 nanti, Anies mengaku tidak ada permasalahan. Sebab, materi di Kurikulum 2013 dan KTSP 90 persen memiliki kesamaan.

“Kurikulum 2013 dan KTSP 90 persen sama. Jadi standar kompetensi lulus (SKL) sama. Kisi-kisi sudah disusun dan mencakup hal yang sama,”

tambah dia. ■ KAL/NET

Rakyat Merdeka
Januari 2016

Banten Post
Februari 2016

Buku Pelajaran Kurikulum 2013 Masih Berlaku

JAKARTA, BANPOS - Buku pelajaran Kurikulum 2013 untuk tingkat SD, SMP dan SMA/SMK yang sebelumnya telah dipakai sebagai bahan ajar di beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum tersebut, pada tahun ajaran mendatang masih berlaku.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tjipto Sumardi mengatakan buku pelajar-

an lama masih dapat terpakai karena secara substansi tidak salah dan masih dapat digunakan sebagai bahan ajar meskipun saat ini Kemendikbud tengah menggodok Kurikulum 2013 yang disempurnakan.

"Namun mengingat ada penataan ulang pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD), maka pembelajaran dengan buku lama perlu disesuaikan dengan perubahan Kompetensi Dasar-nya," kata Tjipto kepada

Bisnis di Jakarta, Kamis (25/2).

Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah dalam proses akhir penyelesaian pembuatan buku baru sesuai dengan perubahan kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam Kurikulum 2013 yang direvisi.

Sebelumnya, buku pelajaran Kurikulum 2013 yang tengah direvisi nantinya akan terlebih dulu diuji coba sebelum dilakukan pencetakan massal. Buku akan diuji coba dengan sistem terba-

tas.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menuturkan uji coba tersebut dilakukan untuk melihat keterbacaannya, terutama oleh para guru yang nantinya akan menjadi pengguna sekaligus pengantar materi dari buku tersebut kepada para siswa.

"Kami setuju dengan usulan terkait buku K-13 ini untuk diujicobakan terlebih dulu. Kami

akan lakukan uji coba terbatas untuk melihat keterbacaannya, agar pemanfaatan buku ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan," ujarnya. Sistem uji coba terbatas untuk buku Kurikulum 2013 tersebut, menurut dia, rencananya akan dilakukan dengan mengundang sejumlah guru dari berbagai daerah di Indonesia. Adapun waktu pelaksanaan uji coba tersebut masih menunggu proses revisi buku tuntas. (MAHAS/JPN)

Kurtilas Diberlakukan Nasional

Dimulai pada Tahun Ajaran Baru, Juli 2016 Ini

JAKARTA, (PR)-

Kurikulum 2013 (Kurtilas) akan mulai diberlakukan nasional secara bertahap mulai tahun ajaran baru, Juli 2016 mendatang. Ini setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tuntas merevisi Kurikulum 2013 pada Desember 2015 lalu, dan juga buku Kurikulum 2013, Februari 2016 lalu.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, penerapan Kurikulum 2013 secara nasional tidak mengubah nama kurikulum tersebut. Menurut dia, perubahan dari revisi yang telah dilakukan adalah terutama dalam hal penyederhanaan penilaian siswa oleh guru.

"Penilaian ganda tidak diberlakukan lagi. Sebagai contoh penilaian spiritual, yang sebelumnya juga diwajibkan bagi guru matematika dan ba-

hasa, kini tidak lagi. Penilaian spiritual diserahkan kepada guru agama dan PPKn. Itu pun penilaiannya secara deskriptif dan tidak berupa angka," ujarnya di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Dia menuturkan, pada tahun ajaran lalu guru mengeluhkan penilaian siswa yang sangat kompleks. Dengan cara penilaian dalam Kurikulum 2013 yang telah direvisi ini, menurut dia, akan mengurangi beban guru. "Penilaian spiritual kami kembalikan ke kitabahnya. K-13 juga mengedepankan pembelajaran aktif, jadi tidak pemaparan slide saja. Antara guru dan murid saling interaktif," katanya.

Selain itu, menurut dia, dalam Kurikulum 2013 yang telah direvisi ini Kemendikbud juga melakukan perubahan dalam penerapan tiga kemampuan untuk di semua jenjang. Sebelumnya siswa SD hanya akan diajari sebatas kemampuan memahami. SMP menganalisis dan siswa SMP harus sudah bisa mencipta. "Sekarang ketiga kemampuan itu di semua jenjang. Jadi anak SD pun boleh mencipta sesuatu karena mereka akan terbiasa berpikir ilmiah," ungkapnya.

Pelatihan Instruktur

Persiapan untuk menghadapi penerapan Kurikulum 2013 secara nasional di tahun ajaran baru nanti, Totok menuturkan, pihaknya telah mengukuhkan 156 narasumber dan 761 instruktur nasional kurikulum baru pada Minggu (20/3/2016). Ditargetkan, pada tahun ajaran mendatang sebanyak 285.000 guru dan kepala sekolah sudah berhasil dilatih oleh para instruktur tersebut.

Dia menjelaskan, 761 instruktur nasional itu terdiri atas 148 instruktur untuk jenjang SD, 187 SMP, 232 SMA, 194 SMK. "Dan jumlah itu masih akan ditambah lagi dengan 171 instruktur SLB," katanya.

Adapun 156 narasumber nasional yang dilantik terdiri atas narasumber SD 21, SMA 47, SMK 31, dan SMP 40 orang, dan 2 peserta umum. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menuturkan, para instruktur dinilai dalam tiga aspek, yaitu paradigma, kemampuan fasilitasi dan sikap. Pelatihan instruktur nasional tingkat provinsi akan dilakukan pada minggu kedua hingga April 2016 mendatang.

"Pelatihan instruktur nasional

tingkat provinsi sebanyak 3.600 orang. Mereka selanjutnya akan melatih 66.000 instruktur kabupaten/kota. Kemudian berakhir pelatihan tingkat sekolah yang akan melibatkan 285.000 guru dan kepala sekolah. Pelatihan diperkirakan akan selesai pada akhir Juni sehingga pada tahun ajaran baru sekolah pun bisa menerapkan kurikulum yang telah direvisi," ujarnya.

Pelatihan instruktur nasional kurikulum dimaknai untuk menghasilkan instruktur nasional yang memiliki pemikiran terbuka. Selain itu juga diharapkan instruktur menguasai ilmu pengetahuan sekaligus mampu menyampulkannya. "Dan, instruktur yang mampu menggunakan orang lain untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan Indonesia," katanya.

Pada 2015, terdapat sekitar 6.000 sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah tersebut menjadi perintis dan model dalam penerapan kurikulum baru. Dari jumlah tersebut, Kemendikbud akan mengembangkannya ke berbagai sekolah secara nasional yang dilakukan bertahap sampai tahun pelajaran 2019/2020. (Siska Nirmala)-

Pikiran Rakyat
Maret 2016

Satelit News
April 2016

DPR Optimis K13 Lahirkan Generasi Berkarakter

JAKARTA, SN—Kurikulum 2013 diberlakukan secara nasional mulai Juli mendatang. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan sekolah sasaran akan mulai menerapkan Kurikulum 2013 (K-13) yang telah direvisi.

Pemerintah pun optimistis, seluruh sekolah yang menerapkan K-13 akan mudah mengimplementasikannya karena metodenya kini telah disederhanakan dan diringkas.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyambut baik penerapan sistem pendidikan Indonesia yang telah disempurnakan tersebut.

"Kami optimis K-13 yang mulai diterapkan di era pemerintahan SBY dapat mewujudkan siswa-siswi menjadi Indonesianist yang berbudaya, berkarakter serta terampil. Metode pembelajaran yang tematik dan terpadu semakin membuka peluang Indonesia menyambut terciptanya generasi emas Indonesia," kata Ibas di sela Penataran Pimpinan dan Kader Utama Partai Demokrat di Bogor beberapa waktu lalu.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini menegaskan bahwa Indonesia harus terus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air seiring dengan berkembangnya dinamika ilmu pengetahuan global.

Dengan demikian, lanjut Ibas,

Indonesia bisa terus mencetak generasi penerus yang berkualitas internasional serta memiliki daya saing. "Dunia terus berubah, Indonesia harus menyesuaikan. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita terus bangun generasi berdaya saing global," imbuhnya.

Menurut Ibas, banyak tantangan dunia pendidikan Indonesia yang harus dihadapi generasi penerus bangsa. Implementasi K13 memuat aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku anak didik.

"Semoga mereka bisa terus mengembangkan berbagai penelitian strategis untuk membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan energi, formula transportasi publik, farmasi dan

bidang lain yang dibutuhkan masyarakat Indonesia," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi meluncurkan Revisi Kurikulum 2013 untuk diterapkan di tahun pelajaran 2016/2017 di Depok kemarin (20/3). Tak banyak perubahan dalam kurikulum yang "baru" itu dibandingkan versi sebelumnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menuturkan, secara keseluruhan ada lima poin hasil revisi kurikulum. "Untuk nama, kami sepakati tetap menggunakan nama Kurikulum 2013," katanya usai pengukuhan 156 orang Narasumber Nasional K13 di Pusdiklat Kemendikbud Depok. (fas/jpn)

Jawa Pos
Mei 2016

Segera Keluarkan Harga Eceran

JAKARTA – Orang tua murid tak perlu tergesa-gesa membeli buku sekolah untuk tahun pelajaran baru 2016–2017. Apalagi bagi yang kerap mengeluhkan soal harga. Sebab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan merilis harga eceran tertinggi (HET) buku sekolah.

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Tjipto Sumardi menyatakan, HET seluruh buku pelajaran sangat mungkin keluar pekan depan. "Sebagian besar HET buku sudah kita tentukan. Hanya belum ditetapkan karena menunggu komplet semuanya," katanya kemarin.

Tjipto menjelaskan, HET yang baru nanti berlaku untuk buku-buku Kurikulum 2013 (K-13) maupun Kurikulum 2006 (KTSP). Daftar HET buku K-13 sudah beres, sekarang tinggal penyusunan HET buku KTSP yang terdiri atas sekitar 1.670 judul buku. Namun, Tjipto masih menutup rapat informasi rentang harga buku mulai yang termurah sampai yang paling mahal.

Dia hanya mengatakan bahwa Kemendikbud ingin menghidupkan ekosistem pendidikan, khususnya di urusan buku pelajaran. "Intinya, kita tidak bisa menguntungkan perusahaan buku saja, nanti kasihan masyarakat," jelasnya.

Namun, lanjut Tjipto, di sisi lain, Kemendikbud juga tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebab, hal itu bisa membahayakan kelangsungan hidup industri buku.

Terkait dengan tuntutan dari Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) supaya HET buku secepatnya ditetapkan, Tjipto berharap semua pihak bersabar. (wan/c17/ttg)

Jawa Pos
Juni 2016

Gencarkan Penerapan Kurikulum 2013

90 Persen Sekolah di DKI Sudah Siap

KEBAYORAN LAMA - Penerapan Kurikulum 2013 (K-13) makin digencarkan sekolah di wilayah DKI Jakarta. Sebab, pada 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan seluruh sekolah dapat menerapkan kurikulum tersebut. Hal itu juga menjadi target Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada tahun ajaran 2016-2017, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan mengesahkan lebih dari 500 sekolah di wilayah DKI Jakarta untuk menerapkan Kurikulum 2013. "Sebanyak 90 persen sekolah di DKI Jakarta sudah siap menerapkan Kurikulum 2013. Tetapi, langkah menuju K-13 itu bertahap," jelas Sopan Adrianto.

Salah satu sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2016-2017 adalah SMPN 177 Jakarta. "Kami sudah disahkan Kemendikbud. Dan, akan berjalan di Juli," papar Kepala SMPN 177 Yoyo Sukaryo kemarin (20/6).

Untuk menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah, guru-guru di SMPN 177 telah mendapat pelatihan Kurikulum 2013. Sarana dan prasarana sekolah pun sudah lengkap untuk pemenuhan kebutuhan penerapan Kurikulum 2013 di SMPN 177.

Namun, Yoyo mengakui, buku untuk Kurikulum 2013 belum dimiliki sekolah. "Kami menunggu apa akan disiapkan kementerian atau pihak sekolah yang membeli," ujarnya. Dia melanjutkan, bila pihak sekolah yang menyiapkan, disediakan buku-buku ajar dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Yoyo menambahkan, Kurikulum 2013 di SMP 177 akan diterapkan untuk siswa kelas VII. Sementara itu, siswa kelas VIII dan IX masih menggunakan Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). "Jadi, berjenjang dari kelas VII dulu. Targetnya, semua bisa ikut menerapkan Kurikulum 2013 dalam waktu dekat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Jakarta Masayu Yuliana menyatakan, Kurikulum 2013 di SMAN 1 sudah berjalan selama tiga tahun. Dalam tiga tahun tersebut, guru-guru di sekolah itu

masih terus diberi pelatihan hingga saat ini. Pelatihan tersebut diberikan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), terutama tentang revisi Kurikulum 2013. "Ada pula pendampingan guru. Kemudian, untuk penguatan materi guru, dilakukan di musyawarah guru mata pelajaran," papar Masayu.

Dia menambahkan, meskipun telah berjalan tiga tahun di sekolah, dampak penerapan Kurikulum 2013 belum begitu terlihat. "Belum bisa terukur karena baru melubaskan satu angkatan," tandas Masayu. (gin/co4/all)

Banten Post
Juli 2016

Banyak Guru Kesulitan Terapkan Kurikulum 13

JAKARTA, BANPOS - Di sejumlah daerah, guru-guru mengeluh kesulitan menerapkan Kurikulum 2013 (K-13). Keluhan guru menjalankan K-13 itu banyak masuk ke layanan pengaduan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Sekjen FSGI Retno Listyarti menjelaskan, masalah tersebut muncul di sekolah-sekolah yang baru mulai menerapkan K-13 tahun ini.

"Aturan Kemendikbud jelas. K-13 di sekolah yang baru melaksanakan diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X," katanya di Jakarta, Minggu (24/7).

Namun, di lapangan, sebut Retno,

ada sekolah yang menerapkan K-13 untuk kelas lain. Itu membuat guru yang belum dilatih K-13 menjadi bingung. Buku pembelajaran berbasis K-13 juga belum ada.

Perempuan yang juga guru di Jakarta tersebut mengatakan, dinas pendidikan seharusnya mengikuti arahan Kemendikbud. Kelas-kelas yang belum waktunya menerapkan K-13 tetap memakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut dia, guru tetap butuh pelatihan K-13 supaya tidak bingung dalam mengajar.

Kepala Badan Penelitian dan Pe-

ngembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno membenarkan bahwa tidak semua kelas di sekolah yang baru menjalankan K-13 diajar menggunakan K-13. Dia menerangkan, di sekolah baru itu, K-13 baru diajarkan di kelas I, IV, VII, dan X.

"Ditjen Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) Kemendikbud sudah melakukan sosialisasi kepada daerah," ujarnya.

Totok berharap implementasi K-13 di sekolah yang baru menerapkan tahun ini mengikuti program Kemendikbud. Tidak ada yang mendahului de-

ngan menerapkan K-13 di semua tingkat kelas. Kecuali sekolah yang sudah tiga tahun menjalankan K-13, seluruh tingkat sudah memakai K-13.

Tahun ini Kemendikbud menambah cukup banyak sekolah pelaksana K-13. Total di semua jenjang, ada 38 ribuan unit sekolah yang baru menjalankan K-13.

Sebelumnya jumlah sekolah yang telah menjalankan K-13 sekitar 17 ribu. Jadi, secara keseluruhan, tahun ini ada 55 ribu sekolah -mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK- yang memberlakukan K-13. (WANHASUPN)

Media Indonesia
Agustus 2016

Kurikulum 2013 Tetap Berlanjut dan Bertahap

DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, sejak K-13 diimplementasikan pada 2013, terdapat 5% persen sekolah yang menyelenggarakan secara bertahap, yakni di 17 ribu sekolah senilai 6.000 lebih diwujudkan Mendikbud dan 11 ribu sekolah secara mandiri.

Tahapan tersebut sempat berjalan tiga semester. Kemudian, pada era Mendikbud Anies Baswedan direvisi dan terus dilanjutkan bertahap ditambah 10%, atau sekitar 38 ribu sekolah.

"Jadi, progres implementasi K-13 seperti itu, hingga tahun ini saya kira ada 33 ribu sekolah yang menerapkannya bertahap," ungkap Hamid.

Untuk 2017, lanjut dia, bertahap lagi sebanyak 35%, atau sekitar 82 ribu sekolah dengan total guru yang dilatih 400 ribuan.

Berikutnya, pada 2018, K-13 diterapkan di 25% sekolah dan sisanya pada 2019 sebanyak 10% terus.

Namun, Hamid memperkirakan, 2018 mendekati tuntas banyak daerah telah mengadakan penerapan K-13. "Untuk 2018 kabupaten ada tiga sekolah SD, sedangkan SMA dan SMK akan terus," ujarnya.

Meninggung kendala yang dihadapi dalam implementasi K-13 yang awalnya terkesan dipaksakan, Hamid mengakui hal tersebut. Dia menceritakan dalam pelatihan guru K-13, jika dulu masih menggunakan sistem satu arah atau ceramah sehingga banyak guru kurang paham.

"Ya saat itu memang waktunya terburu-buru, dan jumlahnya masih. Sekarang lebih terencana sehingga kita bisa mendesain pelatihan itu lebih bagus dan kita desain berdasarkan itu hanya 30% yang utamanya penitiasan akademik, dan 70% basisnya (dasar) aktivitas," cetusnya.



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

Misalnya, dipelekan masalah konten K-13, peserta membedah hingga mengetahui tuntutan tentang metodologi pembelajarannya, penyempaiannya, hingga sistem penilaian, lalu menyusun langsung Rencana Program Pembelajaran (RPP).

"Ini langsung dilatih, termasuk bagaimana cara mengajarnya dan sumber bukunya karena buku itu tidak lagi terikat seperti dulu. Kalau dulu, ketika pertama bukunya harus ditiliskan pemerintah. Kalau sekarang, sepanjang itu sesuai dengan topiknya, itu boleh pakai sumber mana saja, kemudian cara memilikinya," paparnya.

Berikutnya, sistem penilaian K-13 sekarang sudah diinstruksikan. Dulu indikator yang diralat ratusan, sekarang sudah sederhana sekali. Dengan menilai anak, harus dengan kata-kata positif yang disampaikan, itu sudah tidak ada keluhan lagi, sedangkan masalah buku, jika konsep awal harus menggunakan buku yang diterbitkan pemerintah, sekarang sekolah dan guru diberi keleluasaan dengan membeli buku di e-commerce secara online yang lebih terjangkau dengan harga yang sudah dipatok atau harga eceran terendah (HET) (Bayu/25)

Tribun Sumsel
September 2016

75 Persen Sekolah Gunakan K13

PALEMBANG, TRIBUN — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang menargetkan tahun ajaran mendatang 75 persen sekolah negeri maupun swasta siap menerapkan Kurikulum 2013. Angka ini melebihi target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni tahun 2016 sebanyak 25 persen sekolah menerapkan K-13.

Kepala Bidang SMP, SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Lukman Haris men-

BENTUK KLASTER PENDAMPING

- Penguatan K13 diberikan bagi siswa kelas VII
- Disdikpora bentuk delapan klaster di antaranya SMPN 3, SMPN 1, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 17, SMPN 36 dan SMPN 33
- Sekolah klaster beri pendampingan ke sekolah lain.

■ KE HALAMAN 19

75 Persen...

■ DARI HALAMAN 9

gatakan pihaknya akan terus melakukan penguatan K13 di sekolah-sekolah. "Saat ini memang Kemendikbud telah membentuk kelompok-kelompok disetiap Kabupaten/kota dan Palembang sendiri memiliki delapan kelompok/klaster," jelasnya kemarin.

Dia mengatakan dari delapan klaster tersebut di antaranya SMPN 3, SMPN 1, SMPN 8 SMPN 9, SMPN 17, SMPN 36 dan SMPN 33. "Setiap guru dari klaster akan di kumpulkan terkhusus untuk kelas VII agar diberikan pemahaman tentang penguatan K 13 selama satu hari, nantinya setelah pemahaman ini sudah dilakukan maka sekolah tersebut akan langsung mempraktekkan Program K13 selama satu hari," katanya.

Setelah sukses dipraktikkan selama satu hari maka pihak sekolah akan dikumpulkan kembali untuk memperbaiki jika ada yang kurang dari penerapan program K13. Palembang memiliki 199 SMP negeri serta swasta dan 50 persen di antaranya sudah menerapkan K13.

Kepala SMPN 3 Palembang, Ansyori mengatakan pihaknya sudah sejak 2013 lalu menerapkan kurikulum 2013. "Saat ini SMPN 3 sudah menjadi sekolah percontohan K13 dan kami sudah sangat siap menerapkan K13," ujarnya.

Dia mengakui dalam penerapan program K13 tentunya menemui kendala namun kendala tersebut sama sekali tidak menjadi masalah untuk terus menerapkan K13. "Kami tetap menjalankan program K13 dan kami mau merubah sekolah ke arah yang lebih baik lagi," tutupnya. (mg20)

Jawa Pos
Oktober 2016

Tambah Buku Kurikulum 2013 di E-RKAS

Dispendik
Sesuaikan Katalog
Kemendikbud

SETIABUDI - Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI terus memperbaiki sistem pengisian form rencana kegiatan anggaran sekolah secara elektronik (e-RKAS). Salah satunya, menambah jenis buku untuk mata pelajaran dengan Kurikulum 2013 (K-13) dalam komponen e-RKAS. Hal itu dilakukan setelah Dispendik menerima banyak masukan dari pihak sekolah tentang ketiadaan pilihan buku K-13 dalam e-RKAS.

Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dispendik DKI Gusna Mahidiana menyatakan, masih ada beberapa komponen kebutuhan sekolah dalam form pengisian e-RKAS yang

Penambahan Jenis Buku Kurikulum 2013

MATEMATIKA

- Buku guru matematika kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa matematika kelas VII edisi revisi 2016

IPA

- Buku guru IPA kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa IPA kelas VII edisi revisi 2016

IPS

- Buku guru IPS kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa IPS kelas VII edisi revisi 2016

BAHASA INDONESIA

- Buku guru bahasa Indonesia kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa bahasa Indonesia kelas VII edisi revisi 2016

BAHASA INGGRIS

- Buku guru bahasa Inggris kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa bahasa Inggris kelas VII edisi revisi 2016

PPKn

- Buku guru PPKn kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa PPKn kelas VII edisi revisi 2016

PENURUKAN

- Buku guru penurukan kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa penurukan kelas VII edisi revisi 2016

PELAKSANA

- Buku guru pelaksana kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa pelaksana kelas VII edisi revisi 2016

PENINGKATAN AGAMA ISLAM

- Buku guru PAK kelas VII edisi revisi 2016
- Buku siswa PAK kelas VII edisi revisi 2016



mentarian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, setiap pengadaan buku untuk pembelajaran di sekolah harus yang sudah terdaftar di katalog Kemendikbud. Terutama buku-buku pelajaran K-13. "Ada beberapa yang di katalog Kemendikbud belum ter-input ke form e-RKAS" serangnya.

Meski begitu, lanjut Gusna, penambahan komponen buku tidak akan berpengaruh pada jadwal pengisian form e-RKAS oleh sekolah. Menurut dia, sekolah harus tetap menyelesaikan form bulan ini. Jika masih ada yang tertinggal, pihak sekolah dapat mengisi ulang form buku yang telah diposting. "Pengisian form tetap sampai akhir Oktober. Tapi, nanti sambil berjalan, buku K-13 kami tambah," paparnya.

Gusna berharap pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah berbasis

komputer tersebut terus dikembangkan. Sebab saat ini adalah masa transisi dari manual ke e-RKAS. Dengan demikian, masih ada beberapa komponen yang belum tercatat dalam e-RKAS. "Kami masih terus memperbarui. Tapi, secara keseluruhan, sudah berjalan dengan baik. Bahkan, ada wacana akan ditetapkan secara nasional," terangnya.

Kepala SMAN 54 Jakarta Aceh Mahidin menyambut baik rencana penambahan komponen buku tersebut. Menurut dia, sekolah harus menaruh perhatian yang lebih banyak untuk memajang proses belajar-mengajar akan lebih baik. "Saya rasa perlu variasi di semua mata pelajaran, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, bahasa, dan lainnya. Kalau bisa, ditambah lagi jenisnya," paparnya. (rel/cn1/fat)

Jawa Pos
November 2016

89 Sekolah Siap Terapkan K-13

BOJONEGORO - Sudah ada kejelasan soal jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 (K-13) tahun depan. Sebanyak 89 sekolah sudah menyatakan siap menerapkan kurikulum tersebut. Terdiri atas 49 SMPN, 20 SMAN, dan 20 SMKN. Itu adalah sekolah-sekolah yang ditawarkan dinas pendidikan (dispendik) untuk menerapkan K-13 mulai tahun pelajaran depan.

Kasi Kurikulum Dispendik Bojonegoro Suwanto menjelaskan, pihaknya sudah menyerahkan blangko kesediaan kepada se-

kolah tersebut sebulan lalu. Tujuannya ialah mendata sekolah-sekolah yang siap menerapkan K-13 mulai tahun depan.

Pengembalian blangko itu agak terlambat. Seharusnya blangko tersebut diserahkan kepada dispendik akhir Oktober lalu. Tapi baru diterima dispendik minggu lalu. "Semua sekolah yang ditawarkan siap menerapkan K-13," ucapnya.

Suwanto menjelaskan, sekolah-sekolah yang bisa menerapkan K-13 harus mencukupi syarat. Di antaranya, sekolah harus

terakreditasi minimal A, B, atau C. Selain itu, sekolah harus menyatakan siap menerapkan K-13. "Syaratnya itu saja," ucapnya.

Kemendikbud, terang Suwanto, sudah membuat program secara terstruktur mengenai penerapan kembali K-13 tersebut. Berdasar program itu, K-13 akan kembali diterapkan di seluruh sekolah pada 2019.

Tahun ini sekolah yang menerapkan K-13 berjumlah 44. Terdiri atas 18 SMP, 15 SMA, dan 21 SMK. Tahun depan jumlahnya terus ditingkatkan. Sebab, pemerintah

pusat menghendaki jumlah sekolah yang menerapkan K-13 mencapai 60 persen tahun depan.

Penerapan K-13 pada 2014 dihentikan karena Kemendikbud ingin memperbaiki berbagai komponennya. Sebab, ada beberapa komponen yang dinilai rumit dan menyulitkan guru selama proses pembelajaran.

Setelah perbaikan selesai dilakukan, Kemendikbud mulai menerapkan K-13 secara bertahap. Suwanto berharap semua jenjang bisa kembali menerapkan K-13. (zim/c9/diq)

Bali Post
Desember 2016

Kurikulum 2013 Isyaratkan Penilaian Setiap Saat

KABAR soal adanya rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapuskan Ujian Nasional (UN) mulai 2017 mendatang, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Sebagian besar mendukung rencana tersebut namun tak sedikit juga yang menyayangkan kalau UN dihapuskan. Meski sudah tidak jadi penentu kelulusan, UN masih dibutuhkan untuk melakukan pemetaan.

Ketua PGRI Kabupaten Bangli Wayan Sadia menjadi salah satu pihak yang cukup menyayangkan jika UN dihapuskan. Menurutnya, UN masih dibutuhkan sebagai pemetaan. "Kalau menurut saya sebenarnya kalau UN dihapuskan itu tidak pas. UN masih dibutuhkan sebagai pemetaan. Bukan sebagai penentu kelulusan," kata Sadia saat diwawancara belum lama ini. Menurut Sadia, sebagai pemetaan UN bisa dijadikan alat untuk mengevaluasi keberhasilan sekolah dalam melaksanakan kurikulum sesuai standar nasional.

Hal. 19
Bukan Penentu Kelulusan

Bukan Penentu Kelulusan

Dari Hal. 1

Apa kendala dan permasalahannya yang dihadapi sekolah akan diketahui dari hasil UN. "Asal jangan sebagai penentu kelulusan menurut saya UN perlu tetap dilaksanakan," ujarnya.

Serupa dengan Sadia, Kepala SMPN 1 Bangli Wayan Widiana Sandi berpendapat rencana penghapusan UN perlu mendapat sebuah kajian yang matang. Kalaupun pemerintah memutuskan penghapusan UN, maka satuan pendidikan di masing-masing kabupaten atau provinsi menurutnya harus memiliki standar untuk melaksanakan penilaian akhir sebagai dasar pemetaan kemampuan akademik peserta didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabu-

paten Bangli Nyoman Suteja saat ditemui dalam suatu kesempatan belum lama ini mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait rencana dihapusnya Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2017 mendatang. Pihaknya sejauh ini hanya mengetahui kabar UN dihapuskan dari media massa. "Sementara surat resmi dari Kemendikbud belum ada," kata Suteja.

Namun, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi jika UN dihapuskan. Menurut Suteja, dengan latar belakang Kurikulum 2013 (K-13) yang dilaksanakan di sekolah, evaluasi terhadap siswa sudah dilakukan setiap saat. "Setiap kali tatap muka, guru-guru tidak banya belajar tapi secara rutin dilakukan evaluasi terhadap anak-anak kita," terangnya. (ina)

KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bidang kebudayaan yang diampu Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui lima direktoratnya, diterjemahkan melalui berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari program Kemendikbud.

Setidaknya selama 2016 ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan menjalankan 14 program prioritas, di antaranya program-program yang berkaitan dengan revitalisasi museum, taman budaya, dan desa adat; pembangunan museum; pengembangan rumah budaya di luar negeri; belajar bersama maestro; dan seniman masuk sekolah.

Kebijakan pemerintah dalam bidang kebudayaan diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang langsung menysasar masyarakat. Seperti "Belajar Bersama Maestro" yang dikhususkan bagi siswa sekolah menengah yang memiliki bakat dalam bidang seni.

RINGKASAN

Pergerakan ekspos pemberitaan terkait topik kebudayaan yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cenderung fluktuatif selama tahun 2016, baik di media daring maupun media cetak. Pada media daring, ekspos berita kebudayaan pada April-Juni cenderung menurun, namun kembali meningkat pada September-Oktober. Sementara pada media cetak, tren berita pada Januari-Juli terpantau dinamis, kemudian melonjak pada Agustus dan Oktober.

Penyelenggaraan World Culture Forum (WCF) atau Forum Budaya Dunia menjadi isu pemberitaan yang cukup banyak mendapat ekspos, baik oleh media daring maupun cetak. Ini dikarenakan WCF merupakan forum internasional yang membahas mengenai isu-isu kebudayaan.

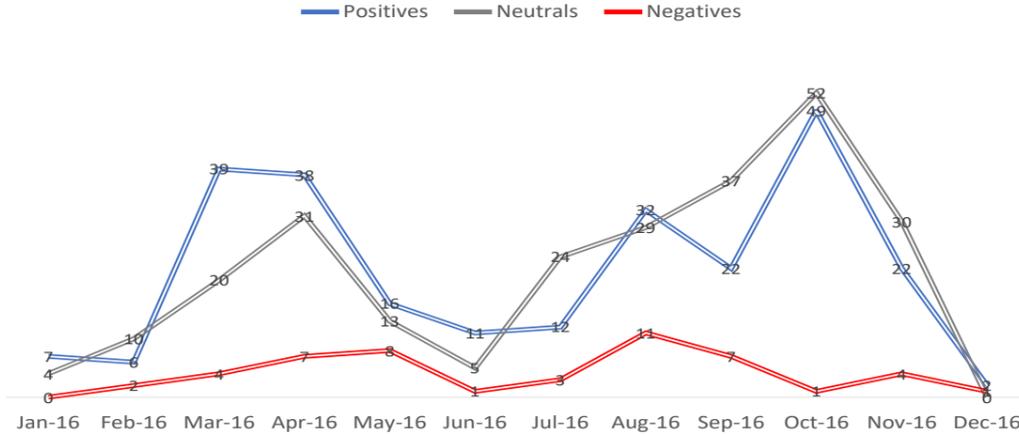
Berkenaan dengan influencer, Mendikbud Muhadjir Effendy, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, serta beberapa figur internal Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi lima influencer teratas. Berita dengan sentimen netral dan positif cukup mendominasi di dua jenis media ini. Namun, ada pula berita dengan sentimen negatif yang terekam di media cetak, yaitu saat media memberitakan mengenai isu korupsi Dana Bantuan Pelestarian Rumah Budaya Kemendikbud Tahun Anggaran 2013. Isu ini menjadi pembeda pada pemberitaan kebudayaan Kemendikbud di media cetak dengan media daring.



SENTIMEN (MEDIA ONLINE)

Sentimen Netral dan Positif Nampak berimbang pada pemberitaan kebudayaan Kemendikbud. Terpantau masing-masing sebesar 45,62% dengan 255 berita. Sedangkan sentimen Negatif hanya sebesar 8,77% atau 49 berita.

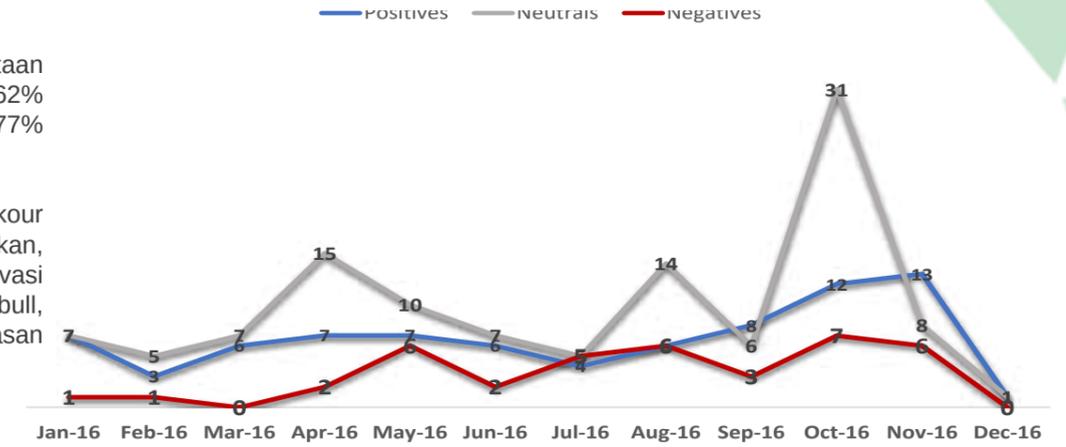
Adapun sentiment Negatif salah satunya berasal dari berita video parkour Borobudur yang dirilis Redbull. Walau ekspos tidak begitu signifikan, namun hal tersebut telah ditangani oleh kepala Badan Konservasi Borobudur (BKB) Marsis Sutopo untuk memberi teguran terhadap Redbull, yang kemudian insiden tersebut turut menghasilkan wacana pembatasan jumlah pengunjung wisata candi Borobudur.



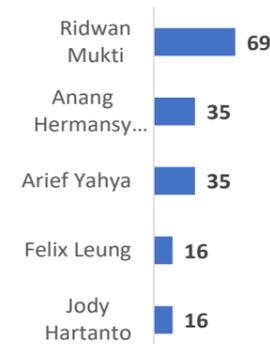
SENTIMEN (MEDIA CETAK)

Sentimen Netral dan Positif Nampak berimbang pada pemberitaan kebudayaan Kemendikbud. Terpantau masing-masing sebesar 45,62% dengan 255 berita. Sedangkan sentimen Negatif hanya sebesar 8,77% atau 49 berita.

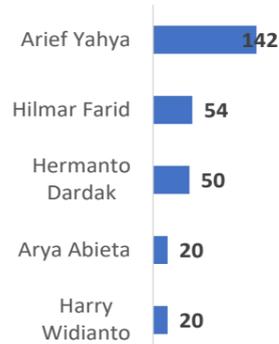
Adapun sentiment Negatif salah satunya berasal dari berita video parkour Borobudur yang dirilis Redbull. Walau ekspos tidak begitu signifikan, namun hal tersebut telah ditangani oleh kepala Badan Konservasi Borobudur (BKB) Marsis Sutopo untuk memberi teguran terhadap Redbull, yang kemudian insiden tersebut turut menghasilkan wacana pembatasan jumlah pengunjung wisata candi Borobudur.



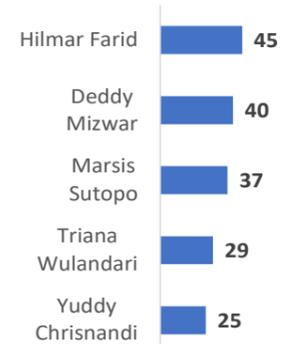
Jan-Mar



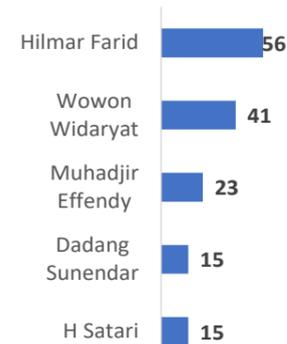
Apr-Jun



Jul-Sep



Okt-Des



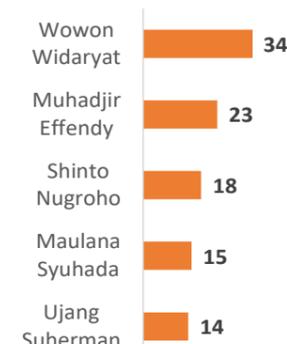
Dalam pantauan Influencer di periode ini, figur Kemendikbud sama sekali tidak menduduki posisi lima teratas. Keberadaan Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Mukti dan Menpar Arief Yahya menunjukkan wacana program pariwisata mendominasi pemberitaan dibandingkan dengan wacana program pendidikan dan kebudayaan.

Ekspos pernyataan Menpar Arief Yahya nampak meningkat pesat. Pemberitaan terpusat pada rencana program Kemenpar terkait restorasi kota tua Semarang dan China Town Magelang. Sedangkan figur Kemendikbud banyak dikutip pada pertemuan Nasional Museum se-Indonesia.

Hilmar Farid menduduki posisi Influencer teratas dalam periode ini. Hal tersebut berkenaan dengan UU Kebudayaan. Nampak serta kepala BKB Marsis Sutopo menindak video Redbull dan Direktur Sejarah Kemendikbud Triana Wulandari dalam agenda Kemah Budaya Nasional (KBN).

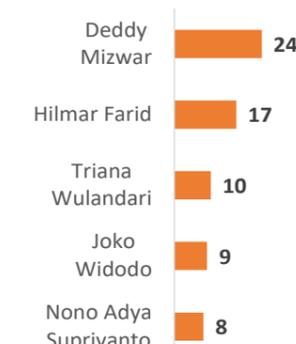
Menteri Muhadjir muncul dalam lima Influencer teratas. Keberadaannya dengan Hilmar Farid banyak dikutip terkait tanggapan positif pengembalian artefak dari Belanda.

Okt-Des



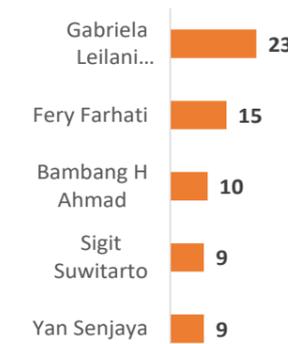
Menteri Muhadjir cukup aktif berkomentar di periode ini. Mendikbud aktif menanggapi rencana pengembalian artefak dari Belanda. Begitu pula Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Wowon Widaryat terekam paling aktif dikutip media pada periode ini.

Jul-Sep



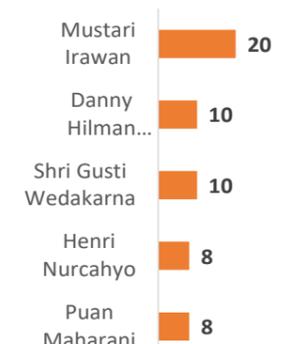
Peranan dari figur internal Kemendikbud mulai nampak pada periode ini, Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid cukup menaruh perhatiannya pada pernyataannya terkait persiapan penyelenggaraan WCF 2016.

Apr-Jun



Figur internal Kemendikbud kembali tidak tercatat dalam lima influencer teratas. Gabriela Leilani mendapatkan banyak sorotan terkait penerimaan penghargaan kejuaraan OSN 2015 dari Kemendikbud.

Jan-Mar



Pada periode ini, Influencer Internal Kemendikbud tidak tercatat dalam lima Influencer teratas. Namun, figur di atas memberi catatan kepada peranan Kemendikbud dalam melestarikan Budaya. Peneliti UPI, Danny Hilman mempertanyakan kelanjutan penelitian situs Gunung Padang.

TOP ISSUE ONLINE

Bulan	Top Isu	Bulan	Top Isu
Januari	1. Provinsi Banten Jadi Kantong Bahasa Jawa 2. Peresmian Sert Pai sebagai Makanan Tradisional Bandar Lampung	Januari	1. Terobosan Dirjen Kebudayaan
Februari	1. Revisi DNI Industri Perfilman	Februari	1. Kearifan Budaya Lokal
Maret	1. Bahasa Indonesia Diminati di Inggris 2. Bengkulu Didorong Menjadi Destinasi Wisata	Maret	1. Pengakuan Reog Ponorogo oleh UNESCO
April	1. Restorasi Kota Tua Semarang 2. China Town Terbesar akan ada di Magelang	April	1. Pengembangan Karakter Anak Melalui Kompetisi Seni 2. Iklan Redbull di Candi Borobudur
Mei	1. Pertemuan Museum Nasional Indonesia 2. Buku Pahlawan Santri	Mei	1. Ekspedisi Bhakti Nasional 2016
Juni	1. Target 10 Juta Turis Asing	Juni	1. Penghematan Anggaran Kementerian Lembaga
Juli	1. Redbull Rilis Video Kontroversi Borobudur 2. Kebijakan Hari Pertama Antar Anak Sekolah	Juli	1. Korupsi Dana Hibah Rumah Budaya Nusantara Kemendikbud TA 2013
Agustus	1. Kongres Bahasa Daerah Nusantara 2. Pencegahan Radikalisasi	Agustus	1. Kongres Bahasa Daerah Nusantara 2016
September	1. International Bookfair 2. UU Kebudayaan	September	1. Persiapan Penyelenggaraan <i>World Culture Forum</i> (WCF) 2016
Oktober	1. World Culture Forum 2016 2. Google Art's and Culture	Oktober	1. WCF 2016 2. Google Art's and Culture
November	1. Pengembalian Artefak dari Belanda	November	1. SMAN Payakumbuh Juara Festival Film Dokumenter Kebudayaan 2. Pengakuan Pancak Silat sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO
Desember	1. Pemerintah Ingin Pancak Silat Diakui UNESCO	Desember	1. Bahasa Daerah Perkuat Bahasa Indonesia

TOP ISSUE CETAK



Peneliti Kemendikbud Tegaskan Provinsi Banten Jadi Kantong Bahasa Jawa (KabarNusa, Januari 2016)

Peneliti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Yeyen Maryani (foto:Humas UGM) Kabarnusa.com – Meski bukan merupakan tanah asal Bahasa Jawa namun di Provinsi Banten ternyata merupakan kantong Bahasa Jawa (enklave) dengan ciri tersendiri.

Bahasa Jawa baik di Indonesia maupun mancanegara dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda dapat dipastikan tumbuh dan berkembang di daerah sebarannya tersebut yang pada akhirnya membentuk kantong bahasa (enklave) dengan ciri tersendiri.

Tahukah Anda, salah satu kantong bahasa Jawa berada di Provinsi Banten. Padahal, Provinsi Banten bukan merupakan tanah asal

bahasa Jawa tetapi di dalamnya ada bahasa yang oleh penuturnya diakui sebagai bahasa Jawa.

“Terbentuknya kantong bahasa Jawa di provinsi itu memunculkan variasi kebahasaan yang berbeda antara kantong bahasa yang satu dengan yang lainnya,” tutur peneliti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Yeyen Maryani dalam ujian terbuka program doktor di Fakultas Ilmu Budaya UGM, Jumat (8/1/2015).

Kata Yeyen, ada empat dialek bahasa Jawa di pesisir utara dan pesisir selatan provinsi Banten, yakni Dialek Warung Jaud, Dialek Sobang, Dialek Rancasenang dan dialek Darmasari.

“Dari hasil perhitungan kuantitatif memperlihatkan hubungan kekerabatan yang lebih erat antara Dialek Sobang dengan Dialek Rancasenang dibandingkan dengan Dialek Warung Jaud dan Dialek Darmasari,” sebutnya dikutip dari Laman UGM.

Keberadaan empat kantong bahasa yang diterapkan sebagai dialek dari bahasa Jawa–Banten dikuatkan dengan simbol–simbol budaya yang bersifat material seperti bentuk

arsitektur bangunan, pakaian, gamelan. Juga adanya peninggalan sejarah yang berupa reruntuhan bangunan Keraton Kesultanan Banten.

Disamping itu, keberadaan bahasa Jawa–Banten yang dituturkan oleh masyarakat di empat kantong bahasa ini didukung oleh adanya kesenian Jawa atau Cirebon yang masih ada di kalangan masyarakat.



Mencicipi Kuliner Khas Lampung di Hotel Emersia: Mulai Seruit, Taboh Iwa hingga Bebat Rebung (TribunNews, Januari 2016)

Kelangkaan menemukan panganan tradisional Lampung perlahan mendapatkan solusi.

Kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan pengelola hotel untuk menghadirkan kuliner Lampung berbuah manis.

Salah satu hotel di Bandar Lampung yang bergerak cepat menggulirkan panganan khas Lampung ini adalah Hotel Emersia.

Maka bagi anda pengunjung Hotel Emersia yang penasaran seperti apa masakan khas orang Lampung sambangilah pojok kuliner tradisional yang menyajikan menu bertajuk Seruit Pai. Paket hidangan seruit. (Tribun Lampung/Heru) Seruit Pai diresmikan oleh Penjabat Wali Kota Bandar Lampung Sulpakar di Hotel Emersia belum lama ini.

Turut hadir, perwakilan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, Kadis Pariwisata Kota Bandar Lampung Yus Amri Agus, perwakilan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dan perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lampung.

General Manager Hotel Emersia Budi Rahman mengatakan, menu Seruit Pai merupakan wujud kepedulian pihak manajemen akan lestari tradisi kuliner masyarakat Lampung.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya mengakomodir Perwali Bandar Lampung No 19 Tahun 2011 tentang

penyajian kuliner dan juga suguhan musik tradisional.

“Esensinya bukan hanya tentang aturan pemerintah, tapi kami ingin masakan khas Lampung ini menjadi familiar di masyarakat. Sehingga kelak anak cucu bisa tetap kenal dengan masakan tradisi leluhurnya,” ujar Budi menjelaskan. Hotel Emersia. (Tribun Lampung/Heru) Di pojok kuliner Seruit Pai Hotel Emersia, chef andal Emersia menyajikan tidak kurang tujuh menu khas Lampung.

Ketujuh menu tersebut adalah Taboh Iwa, Pepes Iwa Baung, Pindang Baung, Bebat Rebung, Khetak Belulang, dan Botok Lampung. Selain itu, tersedia pula Serbat Kweni dan kopi khas Lampung yang diracik oleh chef andalan Emersia, Asep Iswanto.

“Sebelum ada menu Seruit Pai, Emersia sebenarnya sudah memasukkan menu khas Lampung seperti sekubal di menu sarapan pagi. Itu posisinya sebagai menu pelengkap, tetapi sekarang sudah menjadi menu khusus di paket dinner dan lunch yang lumayan lengkap,” jelasnya.

Terkait citarasa, Budi mengatakan, Emersia menjanjikan pengalaman berbeda dari tempat lainnya.

“Chef kami, Asep Iswanto telah meningkatkan citarasa masakan tradisional ini menjadi sajian yang lezat. Berbekal bumbu yang berani dan kuat makan ini akan mengena di hati pengunjung,” tambahnya. Terkait harga, menu Taboh Iwa yang merupakan gulai dari ikan baung asap yang dibanderol dengan harga Rp55 ribu (termasuk nasi).

Ada pula menu Pepes Iwa Baung yang merupakan ikan baung yang dipepes dan menggunakan rampai yang menimbulkan rasa asam yang menggigit dan menghilangkan rasa amis dari ikan.

Menu tersebut dibanderol dengan harga Rp70 ribu (termasuk nasi). Ada pula menu khas Lampung lain yang serupa dengan masakan Palembang yaitu menu pindang baung dengan rasa

kuah yang kuat dan dibanderol dengan harga Rp55 ribu (termasuk nasi).

Tersedia pula menu Bebat Rebung yakni tumis rebung dengan santan yang dibanderol dengan harga Rp25 ribu dan menu Khetak Belulang yakni kerupuk kulit dimasak dengan santan dan kacang merah yang dibanderol dengan harga Rp30 ribu. Dari ketujuh masakan tadi, citarasa pedas dan asam akan menjadi rasa dominan yang anda temukan.

Sebab kedua rasa ini merupakan ciri khas tersendiri dari masakan Lampung yang telah turun temurun lestari di masyarakat pendukungnya. Sedangkan untuk minuman, Serbat kweni tak lupa hadir menemani deretan panganan yang disebutkan tadi.

“Minuman serbat kweni kami sajikan dalam dua versi, pertama serbat kweni yang diblender dan serbat kweni dicacah, dua-duanya punya cita rasa yang segar,” ujarnya seraya mengatakan panganan ini dibanderol Rp 15.000 per gelas.

Dengan hadirnya Seruit Pai, Budi berharap masyarakat luas yang ingin mencicipi menu khas Sai Bumi Ruwa Jurai tidak perlu bingung. “Seruit Pai yang ada di Emersia ini bisa diakses siapa saja dan semoga menjadi primadona bagi tamu Emersia. Kami sangat bangga bisa menghadirkan Seruit di Emersia,” pungkasnya.

Pegiat Film Indonesia Desak Pemerintah Hapus Industri Perfilman dari Daftar Negatif Investasi
(Gatra, Fberuari 2016)

Para pegiat perfilman mendesak pemerintah untuk meninjau ulang Daftar Negatif Investasi (DNI) industri film. Sebanyak 11 kelompok yang bercokol di industri film nasional, mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menekan revisi Peraturan Presiden Tentang Pembukaan DNI.

Kelompok yang terdiri dari Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Gabungan Studio Film Indonesia (GASFI), Indonesian Film Directors Club (IFDC), Rumah Aktor Indonesia (RAI), Indonesia Motion Picture and Audio Association (IMPAct), Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR), Sinematografer Indonesia (SI), Indonesian Film Editors (INAFEd), Indonesian Production Designer (IPD), dan Asosiasi Casting Indonesia (ACI) ini, menyetujui adanya pembukaan investasi di sektor perfilman yang akan berdampak positif bagi perkembangan film Indonesia.

Investor asing dinilai akan mempengaruhi perkembangan bioskop di daerah-daerah. Dibukanya DNI akan mempermudah ketersediaan infrastruktur bioskop.

“Industri perfilman harus bebas dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Lewat cara ini, perfilman kita bisa lebih diterima di dunia internasional. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sineas nasional,” ujar Ketua Indonesian Film Director Club (IFDC) Lasja Soesatyo, di Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/2).

Hasil penyatuan kesepakatan para pegiat perfilman ini dituangkan ke dalam lima poin utama, antara lain:

1. Mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani revisi Peraturan Presiden tentang pembukaan DNI bidang usaha film sektor eksibisi, distribusi, produksi dan teknik.

2. Sebagai pelaku industri film, kami melihat revisi ini sebagai sebuah peluang besar untuk memajukan industri perfilman nasional. Revisi DNI dalam bidang usaha film bukan hanya akan memberikan akses permodalan dan penambahan layar, tetapi juga peningkatan standar dan kapasitas kompetensi pekerja film kreatif Tanah Air.

3. Meminta pemerintah melalui Kemendikbud dan BEKRAF untuk segera menyiapkan kebijakan-kebijakan pendukung agar pembukaan DNI ini menjadi efektif dan memberikan jaring pengaman bagi pengusaha lokal.

4. Mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbud untuk segera menetapkan tata edar film sesuai amanat Pasal (29) UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan membuat integrated box office

system yang berlaku untuk film asing dan film nasional yang dapat diakses datanya secara harian berisikan data penonton, jumlah layar yang didapat dan jumlah jam tayang yang diterima setiap film.

5. Meminta eksibitor untuk lebih memberikan kesempatan kepada Film Indonesia. Mengingat Pasal 32 UU No 33 Tahun 2009 tentang Film yang menyatakan pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 bulan berturut-turut.



Bahasa Indonesia diminati di Inggris
(Antara, Maret 2016)

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI Exeter) bersama dengan Indonesian Society (Indosoc) di University of

Exeter menyelenggarakan kelas bahasa dan budaya Indonesia mengingat banyaknya permintaan cari masyarakat di Exeter, Inggris.

Sebanyak 37 peserta mengikuti kelas bahasa dan budaya Indonesia yang dibagi menjadi enam pekan pertemuan selama enam pekan sejak akhir Januari hingga Maret, demikian koordinator kegiatan Fitri Yantin mahasiswa PhD Education di University of Exeter, kepada Antara London, Selasa.

Peserta terdiri dari mahasiswa S1, S2, dan juga S3, bahkan beberapa di antaranya adalah dosen dengan pengajar utama Dr. Syahrul Hidayat, yang juga alumnus dan research fellow di universitas yang sama.

Dr Syahrul yang terkejut dengan tingginya minat, menyebutkan berbeda dengan kelas bahasa yang secara reguler ditawarkan di University of Exeter, kegiatan ini lebih menekankan kepada pengenalan bahasa Indonesia yang sederhana.

Diharapkan peserta mengenal bahwa belajar bahasa Indonesia tidak sulit dan dapat digunakan untuk percakapan sederhana, terutama saat berkunjung ke Indonesia.

Tidak hanya itu, di sela pertemuan, peserta juga diperkenalkan dengan budaya masyarakat Indonesia.

Pendekatan ini cukup efektif dalam mendorong minat peserta untuk berkunjung ke Indonesia. Felix Leung, salah satu mahasiswa doktoral dari jurusan Geografi . Leung mengungkapkan dia berminat mengikuti kelas bahasa ini karena budaya Indonesia yang menarik dan ingin sekali berkunjung. Selain itu, Thomas Howes–Ward salah satu peserta lain mengungkapkan semangatnya untuk mendalami bahasa Indonesia. Sejak pertemuan pertama dia menyadari ternyata bahasa Indonesia tidaklah sesulit yang dibayangkan.

Salah satu alasannya karena bahasa Indonesia tidak mempunyai kata kerja masa lalu. Selain itu, keterlibatan mahasiswa Indonesia di kelas untuk mendampingi peserta juga membuat mereka menjadi nyaman dan percaya diri.

Kegiatan belajar peserta sangat dinamis terutama pada saat praktek percakapan, peserta di bagi ke dalam beberapa kelompok. Stella Laurence dan Jody Hartanto, mahasiswa BSc Business School, yang turut mendampingi kegiatan belajar

mengungkapkan keharuannya melihat semangat peserta dan berharap dapat berjumpa dengan sebagian dari mereka di Indonesia. Pada pertemuan terakhir sebagian peserta yang hadir mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Indonesia.

Sementara itu Amelia Hosea, ketua Indosoc di Exeter memberikan informasi mengenai beberapa program pemerintah Indonesia yang dapat diikuti untuk dapat berkunjung ke Indonesia sekaligus belajar bahasa dan budaya Indonesia, seperti Darmasiswa dari Kemdikbud dan Beasiswa Seni Budaya dari Kemenlu.

Michelle Ho, mahasiswa BSc Economics and Finance University of Exeter menyebutkan pada pertemuan terakhir yang berlangsung akhir pekan ini peserta dipersilakan mencicipi ragam makanan Indonesia seperti nasi goreng, mi goreng, bolu pandan, kolak, dan pastel.



Restorasi Kota Tua Semarang, Gandeng Group Paradores Spanyol (JPNN, April 2016)

SOAL Kota Tua Semarang rupanya cukup mengusik pikiran Menpar Arief Yahya. Apalagi Gubernur Ganjar Pranowo dalam kelakarnya di pidato saat Launching Semarang Great Sale 2016, Rabu malam 13 April 2016 itu menyebut pemilik gedung itu adalah “demit.” Banyak yang tidak kelihatan, tidak diketahui juntrung dan alamatnya. Semacam tidak bertuan, berpuluh–puluh tahun, dan menjadi pemandangan yang tidak sedap di mata.

Menpar Arief Yahya langsung menjanjikan untuk menghidupkan Kota Lama itu dengan menggandeng konsultan asal Negeri Negeri Flamingo, Spanyol. Namanya, Group Paradores de Turismo de Espana di Madrid, yang

sudah memiliki 94 jaringan hotel berbasis heritage building dan situs bersejarah itu. Tahun ini jumlah itu akan bertambah satu lagi, jadi mereka akan memiliki 95 amenitas bersejarah. “Kami akan kerjasama dengan mereka,” kata dia.

Mengapa? Bukankah Indonesia banyak ahli planologi? Jagoan landscape? Pintar mendesain kawasan urban? “Oke, saya tahu, saya menghargai itu. Tetapi, kita butuh expertice yang sudah kenyang dengan pengalaman dan pengetahuan dari berbagai lini.

Paradores Group itu sendiri sudah lahir sejak 1928, persis saat negeri kita masih Sumpah Pemuda. Mereka sudah berbisnis di perhotelan dari reruntuhan peninggalan bangunan sejarah,” ungkap Arief Yahya.

Arief pernah bertemu dan berdialog panjang dengan CEO Group Paradores Angela Alarco Canosa di Madrid. Dia sendiri orang yang cukup punya reputasi. Sebelumnya dia pernah menjabat Dirjen Pariwisata Kota Madrid, Direktur Eksekutif dan SEO Badan Promosi Pariwisata Kota Madrid, dan Wakil Presiden Madrid Convention Bureau atau Kepala Tourism Cluster of Madrid. Paradores dalam membangun

hotel chain seperti sekarang itu juga bermitra dengan World Heritage Cities dan Real Academia de Gastronomía serta pemerintah daerah setempat.

“Misalnya, di Kota Lama itu bangunan utamanya sudah 75 cm lebih rendah dibandingkan jalan. Nah, saya saja tidak bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, mereka pasti sudah lebih punya pengalaman. Termasuk soal kepemilikan, saya kira sama, di Spanyol juga menghadapi problem dalam hal kepemilikan itu,” kata Menpar Arief Yahya.

Restorasi itu memang tidak mudah. Lebih gampang membuat dan membangun dari nol, hotel atau desain bangunan yang banyak lengkungan itu. Paradores sudah punya experience dalam mengubah castile, bekas kerajaan, bekas penjara, bekas kompleks istana, dan lainnya menjadi bagus. “Bentuk luarnya tidak berubah, tetapi konstruksi dalamnya dikembalikan ke aslinya,” tutur dia.

Menpar juga menjawab pertanyaan Gubernur Ganjar, apa progress yang dikerjasakan oleh Kemenpar. Pertama, soal 4 DPN, yakni Borobudur–Jogja, Karimunjawa–Semarang, Sangiran–Solo dan

Dieng, sudah disetujui semua. “Semua usulan Jawa Tengah kami sudah setuju dan tinggal menunggu proses yang terus dikawal oleh Tim 10 Top Destinasi Prioritas,” ungkap Arief.

Khusus Borobudur, Arief Yahya mengingatkan agar tidak menyentuh Zone 1 yang dikuasai Kemendikbud, Zone 2 yang ada 4.000–5.000 UMKM, Zone 3 yang digarap oleh PT Taman Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko.

“Jangan menyentuh di red ocean, tapi tidak di semua zone itu. KEK Pariwisata Borobudur jauh dari tiga zone itu, dan sama sekali tidak mengutak–atik. Kalau kami ciptakan lampu, pasti laronnya datang. Itu hukum alam. Jangan bertarung di red ocean, energinya besar, hasilnya tidak happy,” kata dia.



AMI Sebut Ratusan Museum di Indonesia Butuh Perhatian (Republika, Mei 2016)

Pertemuan Nasional Museum Seluruh Indonesia digelar di Hotel Sanur Paradise Plaza, Denpasar, Bali, Senin malam, (30/5). Acara di dibuka melalui tari–tarian khas Bali dan pemukulan kul–kul sebagai tanda yang melambangkan semangat persatuan dan kekeluargaan.

Selain Pemerintah, hampir seluruh tokoh–tokoh permuseuman, budayawan, seniman dan maestro seluruh Indonesia hadir untuk memeriahkan pertemuan yang bertema “Mewujudkan Ekosistem Museum yang Berkarakter dan Berkepribadian Nasional”.

Pagelaran tiap tahunan ini diselenggarakan atas kerja sama Kemendikbud, Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Asosiasi

Museum Daerah (Amida), serta Pemerintah Provinsi dan Kota Bali untuk membahas permasalahan–permasalahan museum yang ada.

Selain itu juga mencari solusi dengan beberapa opsi seperti teknologi digital untuk pengembangan museum, peningkatan citra museum, SDM cerdas serta kreatif dan pelibatan publik dalam pengembangan museum.

Sekretaris direktorat jenderal kebudayaan Nono Adya Supriyatno mengapresiasi kepada seluruh kepala museum nasional atas terselenggaranya acara ini. “Lewat forum pertemuan nasional museum ini, mari kita bangun komunikasi membahas isu strategis untuk memperluas informasi bagi masyarakat, karena museum menjadi tanggung jawab keseluruhan,” katanya. Pemerintah, ujar Nono, saat ini sedang membangun museum agar menjadi sumber belajar, tempat penelitian, pengembangan bagi suatu peradaban yang pernah terjadi.

Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mengatakan, museum–museum di

Indonesia harus segera direvitalisasi untuk menarik minat pengunjung. Sebanyak 426 Museum di Indonesia ini sangat membutuhkan perhatian yang komprehensif.

“Pertemuan ini diadakan untuk membahas dan berdiskusi mengenai masa depan museum agar lebih berkembang dan berkualitas dalam melayani masyarakat. Selain itu juga menjawab tantangan museum di skala internasional,” ujarnya.

AMI juga berharap agar Pemerintah dan DPR segera membentuk badan permuseuman Indonesia karena sinkron dengan undang–undang ekonomi kreatif yang telah diusulkan pemerintah.

“Museum ini memegang peran penting dalam kebudayaan, jati diri bangsa dan destinasi utama pariwisata. Kami berharap, aksi perubahan museum ke yang lebih baik segera terealisasi,” kata Putu Rudana.



Dukung Target 20 Juta Turis Asing, PUPR Bangun Infrastruktur Kawasan Wisata
(Detik, Juni 2016)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pencapaian target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menghadiri rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5).

Hermanto mengakui bahwa akses menuju tempat wisata menjadi salah satu permasalahan yang perlu di atasi. Untuk itu, lanjut Dardak, sejak 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur jalan untuk akses menuju destinasi wisata, seperti di Tanjung Lesung.

Pembangunan infrastruktur yang

dilakukan PUPR menurutnya juga diiringi dengan pengembangan wilayah. “Jadi kami sampaikan di sini bahwa kawasan–kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan di beberapa daerah, kita padukan dalam suatu wilayah. Jadi di antara kawasan tadi kita interkoneksi supaya betul–betul terjadi sinergi di kawasan itu,” kata Dardak.

Program pembangunan infrastruktur untuk 2017 menurut Dardak, telah dikomunikasikan dengan daerah melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Program prioritas terkait pariwisata juga telah dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Dardak menuturkan bahwa Kementerian PUPR juga telah membuat program dukungan terhadap 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo–Tengger–Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Dalam paparannya, Dardak menyebutkan beberapa dukungan infrastruktur terutama untuk 2017

seperti program preservasi dan pelebaran Jalan Tele–Pangururan–Nainggolan–Onan Runggu untuk kawasan Pariwisata Danau Toba, dan Preservasi rehab Minor Jalan Tj Ru–Tj Pandan–Tj Tinggi sepanjang 73,58 kilometer, untuk mendukung pariwisata di Tanjung Kelayang Provinsi Bangka Belitung. Selain itu pelebaran Jalan Urip Sumoharjo Magelang untuk mendukung Pariwisata Candi Borobudur dan penataan bangunan Strategis Nasional Sukarno Hatta untuk mendukung pengembangan pariwisata di Gunung Bromo.

Dardak juga mengatakan perencanaan pengembangan kawasan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) terbagi dalam lima langkah yang dilakukan. Pertama, membuat konsensus antar stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (pemerintah, swasta, dan masyarakat).

Kedua, lanjutnya, menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Ketiga, identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau,

dan anjungan cerdas.

Keempat, optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis dan terakhir, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu (master plan) untuk Kawasan Pariwisata Strategis. Dalam kesempatan itu, Dardak juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional.

Selain BPIW Kementerian PUPR, paparan juga dilakukan pejabat dari instansi lain, seperti Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas, Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kementerian Pariwisata, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, dan Direktur Perencanaan PLN.



Manajemen ‘Red Bull’ Minta Maaf Secara Terbuka Soal Video Kontroversi Borobudur
(Tribun News Pontianak, Juli 2016)

Perusahaan minuman energi “Red Bull” akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia terkait aksi parkour atau free running yang dilakukan satu di antara atletnya di Candi Borobudur, Maret lalu.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui surat terbuka yang diterbitkan di beberapa media cetak nasional dan lokal selama tiga hari sejak 29 Juni – 1 Juli 2016.

Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Marsis Sutopo menyambut baik permintaan maaf perusahaan minuman berenergi itu. Hal itu menunjukkan Red Bull menyadari jika aksi salah satu atletnya telah mencederai upaya pelestarian cagar budaya peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia.

“Candi Borobudur itu bukan hanya milik BKB, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga permintaan maaf itu memang sepatasnya ditujukan kepada rakyat Indonesia,” kata Marsis, Sabtu (2/7/2016).

Marsis tidak memperlakukan meski permohonan maaf itu baru disampaikan beberapa bulan setelah kejadian. Sebab, teguran kepada perusahaan yang berbasis di Austria itu juga melalui proses dan birokrasi yang tidak singkat.

“Kami melakukan protes melalui akun facebook Red Bull setelah video itu ditayangkan dan menjadi perbincangan publik di media sosial. Kami kemudian melakukan penyelidikan yang hasilnya dilaporkan ke pusat (Dirjen Kebudayaan Kemendikbud). Pusat yang melakukan protes dan menegur resmi ke pihak Red Bull,” papar Marsis.

Marsis menyebut, aksi parkour di candi Borobudur dinilai telah melanggar UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang–undang itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian–bagiannya, dari

kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Adanya kejadian tersebut, lanjut Marsis, menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak berbuat semaunya di situs warisan dunia dan tempat yang disakralkan oleh umat Buddha itu.

“Bagaimana pun juga kita harus menghargai dan menghormati candi Borobudur sebagai karya luhur nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia serta bangunan suci bagi umat Buddha,” tambah dia.

Marsis kembali menegaskan bahwa pemanfaatan candi Borobudur harus sejalan dengan upaya-upaya pelestarian, baik wujud fisik maupun nilai yang terkandung di dalamnya.

Sebelumnya, sebuah video yang diduga iklan minuman berenergi “Red Bull” ramai dibicarakan netizen dan warga Borobudur karena mempertontonkan aksi-aksi melompat, memanjat hingga menginjak dinding stupa candi Borobudur.

Aksi yang diperankan seorang atlet parkour internasional itu dinilai telah merendahkan situs seindah dan

sesakral Candi Borobudur.

Video yang diunggah akun Facebook Red Bull pada Kamis (17/3/2016) malam itu sempat dilihat oleh lebih dari 18.000 pemirsa.

Hanya saja, setelah menuai kecaman netizen, video dengan setting Candi Borobudur dan Hotel Manohara itu hilang dari laman Facebook Red Bull. (Ika Fitriana)

Dirjen Kebudayaan Akan Sertifikasi Profesi Kebudayaan
(Malang Today, September 2016)

Direktorat Jenderal Kebudayaan akan melakukan sertifikasi di berbagai bidang kerja, profesi dan keahlian di ranah kebudayaan. Hal itu dilakukan untuk membantu pengembangan career banding system di berbagai sektor.

Sebagai langkah awal, Dirjen Kebudayaan akan membentul Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), lembaga profesi dan perguruan tinggi.

“LSP inilah yang akan mengelola dan

menetapkan standar kompetensi bidang kerja, profesi dan keahlian di ranah kebudayaan” kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid di Universitas Negeri Malang, Minggu (4/9).

Hilmar menuturkan standar kompetensi ini tidak dimaksudkan untuk kategori yang sangat umum seperti sejarawan, seniman atau budayawan. Tetapi hanya untuk bidang kerja yang spesifik di sektor tertentu, seperti guru, tenaga ahli, konsultan, penulis dan peneliti.

Sedangkan penerapan sistem ini pertama kali akan dilakukan di Dirjen Kebudayaan dan bekerjasama dengan dengan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti misalnya pejabat eselon dinas yang membidangi kebudayaan, pengelola taman budaya, tenaga peneliti dan lainnya. “Kita ingin jabatan yang berkaitan di ranah kebudayaan sesuai dengan kompetensinya, memiliki pengetahuan dan kapasitas yang memadai tentang kebudayaan” jelasnya.

Hilmar menegaskan bahwa penerapan standar kompetensi bersumber pada

pengakuan dari para lembaga yang menggunakan (konsumen) dan bukan atas kewenangan lembaga yang menetapkan. “Jadi tidak ada konsekuensi hukumnya, hanya saja sertifikasi akan memberikan penilaian lebih karena sudah teruji” tutupnya.



Target Kemdikbud dalam UU Kebudayaan
(Okezone, September 2016)

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan bahasa dan budaya. Karena itulah perlu kebijakan yang bisa melindungi kebudayaan tersebut supaya bisa tetap terjaga. DPR RI sendiri sedang membahas RUU tentang kebudayaan.

“Ini inisiatif dari DPR RI dan sudah dibuatkan draf-nya,” ungkap Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid dalam acara Seminar Nasional Kebudayaan “Pemajuan

Kebudayaan Sebagai Pelaksanaan Amanat Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945” di Hotel Atlet Century, Selasa (7/9/2016).

Seminar itu sendiri sebagai bagian dari pembahasan ini juga menjadi bagian dari rujukan. “Target ambisius itu Oktober dengan DPR RI tapi kita sama-sama melihat keadaan,” imbuhnya.

Kegiatan kebudayaan sendiri mengalami pengurangan anggaran, hal itu pun berdampak pada sejumlah hal. “Pengurangan anggaran kebudayaan itu umumnya yang bersifat fisik seperti pembangunan fisik, pusat kesenian sampai kesenian cagar budaya,” ujarnya. Hilmar menambahkan di masa mendatang nantinya daerah bisa ditalangi oleh daerah masing-masing. “Tapi tetap dianggarkan secara nasional,” tambahnya.



Forum Budaya Dunia Digelar di Bali

(Koran Makassar Online, Oktober 2016)
KoMa Online, Bali — Forum budaya dunia atau world culture forum (WCF) 2016 digelar di Bali, 10-14 Oktober 2016. Kegiatan yang digelar untuk kedua kalinya ini mengambil tema “Culture For Inclusive Sustainable Planet” atau kebudayaan untuk pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 900 peserta yang berasal dari 47 negara.

Acara utama WCF 2016 berupa serangkaian symposium terkait isu penting dalam dunia berkelanjutan yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali

Enam tema symposium dibahas dalam WCF 2016 yang diharapkan menjadi platform atau rencana

kerja bidang kebudayaan. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid mengatakan, saat ini dirasakan sangat kurang koneksi dan kolaborasi di bidang budaya. “Sekarang waktunya kita duduk bersama, merumuskan rencana kerja untuk mengembangkan fungsi kebudayaan di dalam pembangunan. Jadi, rencana kerja itulah resolusi WCF 016,” tandas Hilmar kepada KoMa Online, Selasa (11/10/16).

Pada symposium hari pertama, 11 Oktober 2016, saya mengikuti sub tema ketiga “Interweaving History, Urban Space and Culture Movement”. Hadir pembicara Arief Azis sebagai Direktur Change.Org Indonesia, Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil, Ahli Seni rupa, Nyoman Nuarta dan pembahas Direktur UNESCO kantor Jakarta, Shahbaz Khan. Dalam sesi ini peserta diajak mendiskusikan peran penting budaya dalam koridor sosio politik serta mengartikulasikan pembangunan yang memberi ruang untuk sejarah dan kota sejarah.

Selain tema di atas, berbagai tema lainnya dibahas antara lain, air untuk kehidupan : merekonsiliasi pertumbuhan sosio ekonomi dan etika lingkungan; Membangkitkan

Kembali kebudayaan untuk keberlanjutan pedesaan; kebudayaan dalam dunia digital baru; merekonsiliasi negara, masyarakat dan kebudayaan yang terpecah dan keragaman budaya untuk pembangunan yang bertanggungjawab.

Selain symposium, WCF 2016 juga diisi dengan kegiatan kunjungan budaya ke subak Jatiluwuh, karnaval budaya pameran kebudayaan dan forum pemuda internasional. Meskipun acara berlangsung sejak tanggal 10 Oktober 2016, Acara WCF 2016 akan dibuka secara resmi pada tanggal 13 Oktober 2016 oleh presiden RI, Ir. Joko Widodo. (bahrul)



Malam Puncak Apresiasi Film Indonesia 2016 Siap Digelar Hari Ini
(Detik, Oktober 2016)

Manado - Malam puncak Apresiasi Film Indonesia (AFI) 2016 siap digelar hari ini. Acara tersebut akan digelar di Grand Kawana Convention Center, Manado, Sulawesi Utara.

Mulai pukul 19.00 WITA acara yang diketuai oleh aktor Donny Damara itu akan dimulai. Sebelumnya, Jumat (7/10), para juri sekaligus tamu undangan AFI, yang terdiri dari beberapa artis dan aktor Indonesia sudah tiba di Manado untuk melakukan pawai sepanjang jembatan Soekarno.

Donny Damara sendiri mengatakan ini adalah kali kelima acara AFI digelar. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Donny mengaku sangat bersemangat saat acara tersebut digelar.

Malam Puncak Apresiasi Film Indonesia 2016 Siap Digelar Hari Ini

“Kegiatan seperti ini tidak harus melulu di Jakarta. Di luar Jakarta justru lebih besar peminatnya, dan itu terbukti seperti sekarang ini sangat besar peminatnya di Manado,” ujar Donny, Sabtu (8/10/2016).

Sebelumnya, panitia beserta juri

sudah mengumumkan nominasi AFI 2016. Ingin tahu siapa saja yang akan keluar mendapatkan apresiasi tahun ini? Simak terus beritanya di detikHOT.



Gelaran Festival Film Indonesia 2016 Malam Ini Berkonsep Restorasi

(Tribunnews, November 2016)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) digelar Minggu (6/11/2016) malam. Bertempat di Gedung Teater Taman Ismail Marzuki (TIM), FFI akan ditayangkan di stasiun televisi, RCTI.

Puluhan Piala Citra akan diberikan kepada para pemenang nominasi yang telah ditentukan sejak beberapa bulan lalu. Tahun ini, FFI mengusung tema 'Restorasi', selaku ketua Panitia FFI 2016, Lukman Sardi berharap dapat merubah FFI

agar berkembang menjadi lebih baik lagi.

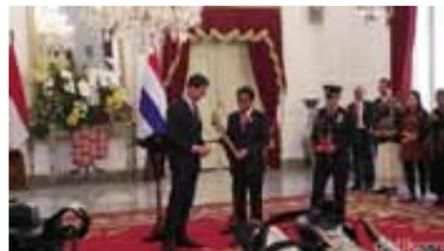
“Mengambil tema restorasi, harapannya me-restore semua yang ada, start lagi dari awal supaya perkembangan jadi lebih baik, ini momentum yang baik ada 8 film Indonesia yang punya jumlah penonton hingga lebih dari 1 juta, terakhir 6.9 juta,” ujar Lukman Sardi, dikonferensi pers FFI, di TIM, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2016)

Menurut Lukman Sardi pergelaran FFI bertepatan dengan berkembangnya film nasional, yang diharapkan dapat merambah ke kancah film internasional. “Ini menjadi titik awal bertambahnya layar bioskop dan tambah banyak stimulus film maker agar jadi titik awal adanya harapan ke internasional,” tutur Lukman Sardi.

Tidak hanya Lukman Sardi, ada juga insan film ternama yang ikut menjadi panitia FFI 2016, seperti Olga Lidya (Ketua Bidang Penjurian), Reza Rahadian (Ketua Acara), Wulan Guritno (Bidang Marketing).

Mulai dari pukul 17.30, para nominasi dan para pengisi acara nampak hadir dengan balutan busana yang mempesona.

Gedung teater TIM pun menjadi pusat berkumpulnya pelaku film Indonesia mulai dari aktor cilik, Sinyo, aktor muda yang tengah melambung namanya seperti Chelsea Islan, Demny Sumargo, Rio Dewanto, hingga aktor kawakan yaitu Roy Marten serta Titiek Puspa. Penulis: Apfia Tioconny Billy Editor: Hasiolan Eko P Gultom



1.500 Artefak yang Akan Dikembalikan Belanda Nantinya Dimuseumkan
(Detik, November 2016)

Pemerintah Belanda akan mengembalikan 1.500 artefak peninggalan Nusantara. Artefak- artefak itu tadinya tersimpan di Museum Nusantara yang terletak di Delft, Belanda.

“Jadi kan ada museum, Museum Nusantara di Delft yang akan ditutup. Oleh karena itu Belanda memang berniat untuk menyumbangkan

berapa item, tadi disebutkan ada 1.500 item kepada pemerintah Indonesia,” ujar Menlu Retno Marsudi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Sebelumnya PM Belanda Mark Rutte memberikan sebuah keris kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Istana Merdeka tadi siang. Pemberian itu merupakan simbolisasi bahwa Belanda akan mengembalikan 1.500 artefak.

Diwawancara terpisah, Mendikbud Muhadjir Effendi mengapresiasi niat pemerintah Belanda mengembalikan artefak. Benda- benda tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. “Saya belum dapat info yang cukup, tapi itu suatu hal yang bagus, memang banyak artefak yang disimpan di sana,” kata Muhadjir.

Meski hal ini berkaitan dengan Ditjen Kebudayaan yang ada di bawah Kemdikbud, tetapi Muhadjir belum tahu bagaimana teknis nantinya. Dia akan melakukan kunjungan ke Belanda dahulu untuk pembahasan lebih lanjut. “(Disimpan) di museum nantinya, museum yang sesuai dengan artefaknya. Misal di Perpustakaan Nasional kalau itu dalam bentuk buku- buku lama, kan

banyak sekali dari Leiden segala itu,” kata Muhadjir.



Indonesia Ingin Pencak Silat Diakui UNESCO
(CNN Indonesia, Desember 2016)

Denpasar, CNN Indonesia -- Indonesia berupaya mendaftarkan seni bela diri pencak silat sebagai salah satu budaya bangsa di UNESCO, lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa- bangsa yang bertujuan merawat kebudayaan dunia.

Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Suwarno, mengakui bahwa mewujudkan hal itu bukan pekerjaan yang mudah tapi mereka akan terus memperjuangkannya agar tak diklaim negara lain.

“Pencak silat berada di UNESCO itu kan keinginan dari para anggota pengurus pencak silat di Indonesia itu sendiri. Untuk menuju ke UNESCO, harus menyiapkan

banyak hal. Yang pertama terkait dengan bukti-bukti peninggalan sejarah yang akan digunakan untuk meyakinkan pihak UNESCO bahwa pencak silat ini benar-benar milik bangsa Indonesia,” kata mantan ketua Satlak Prima tersebut kepada para wartawan di Inna Grand Bali Beach Hotel, Minggu (4/12) siang.

“Meyakinkan orang kan perlu ada bukti, tanda, jejak, dan sebagainya. Lalu persyaratan-persyaratan administrasi lain yang perlu dipenuhi bisa dikomunikasikan dengan Kemdikbud, Kementerian Pariwisata. Perkembangannya sekarang yang tahu dari pencak silat itu sendiri,” katanya menambahkan.

Saat ini, Indonesia sendiri baru memiliki empat budaya yang resmi terdaftar di UNESCO yaitu wayang, keris, batik, dan angklung. Indonesia jauh tertinggal dari Jepang yang telah mendaftarkan 22 budayanya di UNESCO atau Iran yang memiliki delapan.

Lebih lanjut, Suwarno menyarankan agar mendatang para pengurus pencak silat di Indonesia dapat menyatukan pikiran untuk membuat ensiklopedi atau sejarah pencak silat di Indonesia.

“Ditulis dalam satu buku, sehingga

itu akan dapat dibaca generasi penerus. Jangan sampai Indonesia kehilangan sejarah dan sebagainya,” ucapnya melanjutkan.

Saat ini di Bali berlangsung Kejuaraan Dunia Pencak Silat yang diikuti atlet 40 negara. Dibuka pada Sabtu (3/12) malam,. (vws)

Lampung Pos
Januari 2016

Dirjen Kebudayaan Harus Lakukan Terobosan

DIRJEN Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid yang baru dilantik menggantikan Kacung Marijan diharapkan mampu membuat terobosan dan melanjutkan program yang sudah dicapai pejabat sebelumnya.

"Pak Kacung mewariskan sejumlah program besar, yakni Indonesia akan menjadi *guest country* dalam Festival Europalia tahun 2017 dan World Culture Forum (WCF) beberapa bulan mendatang. Selain itu,

komunitas kebudayaan di seluruh Indonesia mengharapkan fasilitasi pemerintah untuk dapat tumbuh," kata Mendikbud Anies Baswedan pada sambutan acara pelantikan pejabat eselon I dan eselon II di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, Kamis (31/12).

Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan pesan khusus kepada pejabat yang dilantik. Kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ia berpesan

agar mengutamakan program meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik.

Sedangkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Maman, Mendikbud berharap film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kacung Marijan yang usai purnatugasnya itu mengaku akan kembali ke almamaternya dan bertugas sebagai dosen dan guru besar di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Saat

ditanya tentang harapannya pada Dirjen Kebudayaan yang baru, Kacung mengatakan fondasi pembangunan kebudayaan sudah dilakukan. Sejumlah proyek pembangunan, seperti museum, tinggal membutuhkan sentuhan penyelesaian.

"Saya yakin Pak Hilmar mampu menyelesaikan banyak kegiatan yang telah kami lakukan, selain melakukan terobosan baru lainnya," kata Kacung.

Budayawan kondang, Rid-

wan Saidi, menilai kiprah Hilmar Farid belum ia kenal. "Siapa dia dan apa kiprahnya dalam kebudayaan saya belum melihatnya," kata Ridwan. Ia juga menyayangkan jabatan Dirjen Kebudayaan bukan berasal dari pejabat karier atau non-PNS.

Seperti diketahui, Hilmar Farid merupakan salah seorang sukarelawan Joko Widodo yang masih menjabat sebagai komisaris PT Krakatau Steel. (M/L2)

Harian Bangsa
Februari 2016

Kesadaran Merawat Kearifan Lokal di Madura Minim

Sumenep-HARIAN BANGSA

Kesadaran masyarakat Madura untuk menghargai dan merawat kearifan lokal dinilai masih minim. Terbukti, banyak orang tidak tahu tentang beragam kearifan lokal yang sudah ada sejak nenek moyang. Ditambah lagi kurangnya masyarakat lokal melakukan penelitian dan mendokumentasikan kearifan lokal yang ada. Hal itu tercermin dalam dialog forum kajian sastra dan budaya "Bias".

Budayawan dan pemerhati kearifan lokal, Henri Nurcahyo, membenarkan bahwa secara umum masyarakat Madura memiliki kepedulian yang sedikit terhadap kearifan lokal. Hal itu bisa dilihat dari kepedulian melakukan penelitian dan dokumentasi terhadap pertunjukan seni Madura yang merupakan



Suasana diskusi santai forum Bias yang menghadirkan budayawan dan sastrawan.

salah satu bentuk kearifan lokal. Nyaris bukan orang Madura yang selama ini melakukan penelitian dan dokumentasi, tapi justru orang Perancis.

"Kenapa kok kita seperti

enggannya untuk melakukan penelitian ini? Padahal sumber dari penelitian bangsa asing itu ya memang orang sini juga," papar Henri saat menghadiri diskusi santai Forum BIAS di Kabu-

paten Sumenep, seperti dilansir dari bangsaonline.com, Senin (8/2).

Menurut Henri, akhir-akhir ini sebenarnya sudah mulai ada geliat merawat kearifan lokal, di antaranya dengan menggelar pertunjukan kesenian lokal. Tapi itu masih perlu ditopang dengan usaha lainnya, sehingga kearifan lokal tetap terpelihara hingga akhir zaman.

"Kenapa kita perlu mempertahankan kearifan lokal ini? Karena ada filosofi yang cukup tinggi. Sangat disayangkan ketika salah satu kekayaan seni saja punah," ungkap dia.

Henri berharap, ada sinergitas antara pemerintah dengan seniman untuk mempertahankan kearifan lokal. Sinergitas keduanya diyakini gampang untuk mempertahankan

kan kearifan lokal itu. Saat ini, kata Henri, pemerintah melalui Kemendikbud tengah mengencangkan deskripsi terkait pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PT-EBT). Dan PT-EBT itu sudah berjalan di Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan. Yang tercakup dalam PT-EBT itu di antaranya upacara tradisional, cerita rakyat, permainan rakyat, ungkapan tradisional, pengobatan tradisional, senjata, pakaian, arsitektur, kesenian dan beberapa bentuk kearifan lokal lain.

"Seniman memiliki peran strategis. Posisi seniman jangan di awang-awang. Seperti kata Rendra, jangan bersajak tentang rembulan dan matahari, tapi tidak kenal lingkungan sendiri," pungkas dia. (bo/ns)

Kompas Bandung
Februari 2016

Dari Garut Tak Hanya Dodol

Memperkenalkan Tenun Ikat Sutra Khas Garut | oleh Widya Putri

Tahukah Anda mengenai tenun ikat sutra yang berasal dari Garut? Pernahkah Anda menggunakannya? Pertanyaan inilah yang saya tanyakan kepada sejumlah warga Bandung dan Jakarta. Ternyata 80 persen dari jumlah responden tidak mengetahui bahwa Garut memiliki kain tenun ikat sutra. Masyarakat lebih mengenal Garut dengan dodol, batik tulis, kerajinan kulit, dan pemandian air panasnya, padahal tenun ikat sutra khas Garut ini bernilai seni tinggi dan patut dikenal oleh masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan fakta ini, saya pun tertarik untuk mengunjungi langsung tempat pembuatan tenun ikat sutra yaitu Sutra Alam Family, di Kampung Panawuan, Garut. Saya juga mendapat kesempatan bertemu dan mewawancarai Bapak Hendar Rogesta, pemilik Sutra Alam Family.

Beliau menceritakan bahwa usaha tenun ikat sutra di Kampung Panawuan ini didirikan pada tahun 2010. Berawal dari usaha kecil yang akhirnya menjadi mitra binaan Cita Tenun Indonesia dan Perusahaan Cita Negara. Selain mendapat pembinaan, mereka juga diberi fasilitas dalam hal pemasaran, alat-alat dan mesin tenun, dan juga dibantu dalam urusan pemasarannya. Cukup mengesankan, tenun ikat sutra ini ternyata sudah cukup dikenal di beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok, Inggris, bahkan Amerika. Namun di Indonesia sendiri rupanya belum dikenal luas, kebanyakan konsumen hanya berasal dari wilayah Jawa Barat dan Bali.

Ciri khas dari kain tenun Garut ini antara lain jenis tenunnya yaitu tenun ikat dan juga karena berbahan dasar sutra. Bukan hanya kainnya, benang sutranya pun merupakan hasil

olahan sendiri. Sutra Alam Family mengolah kepompong sutra hingga menjadi benang, yang kemudian diolah menjadi kain tenun ikat. Motif utama dari kain tenun ini adalah bunga-bunga besar dan motif geometris yang kemudian dimodifikasi menjadi berbagai corak lainnya. Warna kain didominasi oleh warna-warna cerah dan sangat beragam. Menurut saya secara pribadi, hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dan menjadikan kain tenun ikat sutra Garut dapat dipakai oleh semua kalangan usia, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis acara.

Pembuatan kain tenun ikat ini sangat menarik, dan membutuhkan proses panjang yang terdiri dari proses *ponggandungan*, *pongeturan*, *pengeluan*, *penghunan*, *pelungdan*, *pengikatan*, *penchupan*, *penolehan*, *poncucian*, *penjemuran*, *penincaran*, *pematikan*, hingga akhirnya pe-

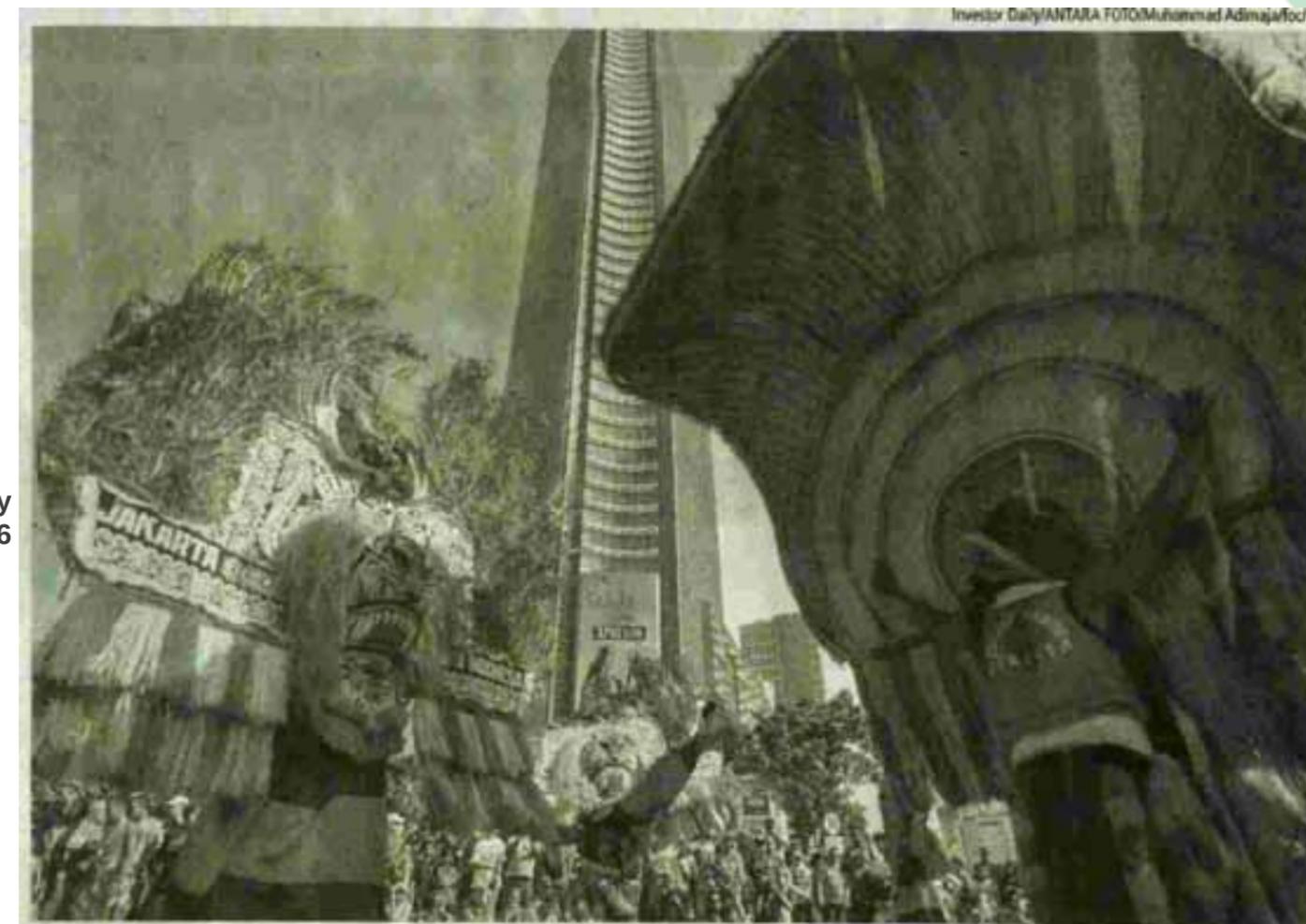
nenan. Banyaknya proses yang harus dilalui mulai dari mengabuh kepompong sutra menjadi benang sutra, lalu menjadi kain tenun sutra, menjadikan proses pembuatan 10 meter kain membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Hal ini pun menjadi kendala tersendiri bagi penjualan kain tenun ikat sutra. Selain itu juga, bahan baku kepompong sutra untuk membuat benangnya pun harus diimpor langsung dari Tiongkok. Dari total kebutuhan bahan baku, hanya lima persen yang bisa diperoleh secara lokal.

Melihat fenomena ini, saya pun merasa sudah menjadi kewajiban saya khususnya sebagai mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan dari Kemendikbud, untuk mengangkat tenun ikat sutra Garut sebagai tema tugas akhir, sebagai salah satu aksi melestarikan dan memperkenalkan tenun ikat sutra Garut secara lebih

luas. Minimal saya dapat mulai memperkenalkan kain ini di lingkungan saya, dari kalangan dosen dan teman di kampus, juga lingkungan keluarga. Sebagai salah satu pendukung tugas akhir, saya juga membuat pakaian dengan menggunakan kain tenun ini. Lalu setelah saya melalui proses sidang akhir, saya pun meminta ibu saya memakai pakaian tersebut ke acara undangan. Saat beliau memakainya, banyak sekali orang yang menanyakan "Bajanya beli di mana?", "Ini bahannya apa, ya?", dan dengan bangga saya ceritakan tentang kain tenun ikat sutra Garut. Dengan begitu, kain ini pun mendapat banyak penggemar baru. Hal ini juga menjadi bukti bahwa sebenarnya kain tenun ikat sutra Garut memiliki potensi besar untuk menjadi kain tradisi yang banyak digunakan masyarakat selain batik.

Ditulis oleh:
Widya Putri
Mahasiswa Program Studi S-1
Desain Komunikasi Visual
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Universitas Kristen Maranatha

Investor Daily
Maret 2016



Reog Menuju Pengakuan PBB

Seniman Reog Ponorogo beratraksi saat hari bebas kendaraan (Car Free Day) di kawasan bunderan HI, Jakarta, Minggu (13/3). Setelah kesenian Reog Ponorogo mendapatkan hak cipta dari Kemenkumham serta pengakuan Kemendikbud sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, saat ini kesenian tersebut sedang diproses untuk mendapatkan pengakuan sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO.

Kompetisi Seni Bantu Kembangkan Karakter Anak

JAKARTA - Kompetisi seni sangat membantu pengembangan karakter anak-anak. Sebab, yang dibutuhkan bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga unggul dalam bidang estetika, kinestika dan spiritual.

"Melalui lomba melukis, misalnya, tanpa disadari anak-anak menumbuhkan nilai-nilai positif seperti sportivitas jika tidak menjadi juara. Di saat yang sama, mereka juga menghayati dan mengamalkan kekayaan budaya dan lingkungan hidup Nusantara," kata kata Kepala Subdirektorat Peserta Didik Ditjen Dikdasmen Kemdikbud, Gusmayadi Muharmansyah di sela-sela kegiatan pameran seni "Kreatifitas Tanpa Batas" di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut dia, berbagai kompetisi seni membantu pengembangan kreatifitas anak dan dengan jiwa sportifitas yang dimiliki nantinya seorang anak akan lebih mampu mengubah kegagalan menjadi peluang menuju keberhasilan. "Jiwa kreatif harus disiapkan sejak dini sehingga benar-benar tumbuh dari hati yang paling dalam. Jika sudah demikian maka peluang untuk ikut memajukan negara akan terbuka luas," katanya.

Sementara itu, Managing Director PT Faber-Castell International Indonesia, Yandramin Halim mengatakan perkembangan di negara maju menunjukkan proses kreatif telah berubah dari *creative thinking* ke *creative making*, artinya kreativitas bukan lagi diukur dari ide tetapi produk secara nyata. ■ **cit/E-3**

Koran Jakarta
April 2016

Radar Bogor
April 2016

Diduga Libatkan Orang Dalam

JAKARTA-Ditjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid marah besar terkait insiden pengambilan gambar iklan Redbull di Candi Borobudur. Iklan itu menampilkan Pavel Pedkuns, bintang iklan Redbull, sedang beratraksi parkour di antara stupa. Ia menginvestigasi keterlibatan orang Kemendikbud sampai kegiatan melanggar hukum ini terjadi.

Hilmar menuturkan, sudah melayangkan nota protes ke Redbull dan organisasi parkour internasional. Meskipun dalam iklan itu tidak berisi ajakan menggunakan produk Redbull, namun dia bisa mencium aroma iklan. Si Pavel mengenakan baju berlogo Redbull.

Kemudian pengambilan gambar begitu rapi, menunjukkan rencana yang matang dan dilakukan oleh studio profesional.

"Pihak Redbull sudah resmi minta maaf dan menghapus video itu dari website mereka," katanya di kantor Kemendikbud kemarin.

Hilmar juga berharap organisasi parkour memberikan sanksi kepada Pavel. Sebab, Hilmar meyakini organisasi parkour memiliki kode etik yang tegas. Seperti tidak boleh sembarangan mengambil lokasi olahraga melompat-lompat itu.

Selain menysasar pihak Redbull dan Pavel, Hilmar mengatakan juga sedang

melakukan investigasi internal. Dia tidak yakin jika tim Redbull itu tiba-tiba masuk ke Borobudur lantas mengambil gambar. "Pegawai Kemendikbud atau satker Borobudur kalau ada yang terlibat, saya sanksi tegas," tuturnya.

Mantan relawan Joko Widodo saat pilpres itu menjelaskan, kegiatan pengambilan gambar iklan Redbull di Borobudur itu dipastikan ilegal. Sebab setiap pengambilan gambar untuk keperluan film maupun iklan di cagar budaya, wajib mengantongi izin darinya.

Hilmar mengatakan dampak terburuk dari iklan itu adalah, publik mengira bisa

seenaknya berada di Candi Borobudur. Khususnya di bagian stupa yang juga menjadi tempat ibadah. Dia khawatir jika ke depan banyak kegiatan serupa yang dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.

Sementara, Ketua Parkour Indonesia Syarif Pontoh menuturkan, komunitasnya sama sekali tidak terkait dengan kegiatan parkour nekat di Borobudur itu. Dia mengatakan secara alamiah mereka menjaga hubungan baik dengan lingkungan tempat latihan. "Memang tidak ada aturan tertulisnya," kata pria yang akrab disapa Ais itu. (wan)

Suara NTB
Mei 2016

Bajo Pulo akan Dikunjungi Tim Ekspedisi

Bima (Suara NTB) –

Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape Kabupaten Bima, akan didatangi tim Ekspedisi Bhakti Nasional 2016, di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), pada Rabu (3/5). "Alhamdulillah, tahun ini desa Bajo terpilih sebagai salah satu tujuan ekspedisi bhakti nasional PMK," ucap Kepala Desa Bajo Pulo, Bambang H. Ahmad, kepada *Suara NTB*, Sabtu.

Kata Bambang, tim yang akan hadir tersebut antara lain, dari Kementerian Pariwisata, Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemen-PUPR, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes, Perwakilan IPB, Unpad dan BII. "Tim ini akan tiba di pelabuhan Sape pada Selasa (2/5) sore," katanya.

Menurutnya, kedatangan tim bertujuan untuk mengunjungi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terpencil. Juga melakukan

penelitian mengeksplorasi wilayah yang akan dikunjungi. "Membawa misi pembangunan pulau terluar," akunya.

Menurut Bambang, di desa setempat terdapat tiga dusun yang berada di satu pulau dan di sekitarnya dua kepulauan yang tidak dihuni oleh masyarakat. Sementara hasil bumi yang akan ditawarkan kepada tim tersebut antara lain sarang burung walet (SBW), udang, kerapu dan ikan tuna semuanya akan diekspor ke luar negeri.

"Semua hasil ini, merupakan penghasilan andalan masyarakat kami," terangnya. Bambang mengaku, warga desa Bajo Pulo sangat antusias menanti kedatangan tim tersebut. Dengan harapan kehadiran tim itu dapat membawa perubahan bagi masyarakat desa setempat.

"Kehadiran tim ini merupakan momen terbaik untuk masyarakat desa Bajo pulo. Mudah – mudahan membawa harapan khususnya bagi para nelayan," pungkasnya. (uki)

Kompas
Juni 2016

139 Desa Adat Akan Direvitalisasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan merevitalisasi 139 desa adat di sejumlah daerah di Indonesia pada 2016. Selain itu, 334 komunitas budaya juga difasilitasi agar berkembang makin kreatif.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi Kemdikbud Sri Hartini mengatakan, revitalisasi desa adat merupakan satu program prioritas Kemdikbud. Bukan sekadar memberikan bantuan untuk pembangunan fisik rumah adat, melainkan juga menghidupkan lingkungan budaya di desa itu. Rumah adat sebagai pusat kegiatan masyarakat harus hidup dan menghidupkan warganya.

"Untuk rumah adat yang sudah rusak atau bahkan musnah, warga bergotong-royong. Di sini nilai gotongroyongan ditumbuhkan lagi. Yang lebih penting bagaimana dampak setelah diberikan bantuan ini. Bagaimana desa adat ini melestarikan budayanya, nilai-nilai kearifan lokal. Rumah adat sangat penting sebagai pusat kegiatan mereka," ujar Sri, Kamis (16/6), di Jakarta.

Sementara fasilitasi komunitas budaya, antara lain, untuk pembuatan kostum dan alat kesenian serta perbaikan sanggar sesuai kebutuhan. Tujuannya, mening-

katkan potensi yang dimiliki anggota komunitas. "Kreativitas muncul, ekspresi makin banyak, budaya tetap lestari, dan pada akhirnya kesejahteraan mereka meningkat juga," ujar Sri.

Jumlah komunitas dan desa adat yang akan direvitalisasi pada 2016 itu belum sepenuhnya pasti. Masih dibutuhkan verifikasi sejauh mana kebutuhan masyarakat adat serta potensi pengembangannya. Se jauh ini, hingga 2015, ada 1.226 komunitas budaya, 156 desa adat, dan 110 rumah budaya Nusantara yang difasilitasi.

Dievaluasi

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan mengatakan, AMAN sedang menyusun evaluasi untuk pemerintah dalam pendudukan desa adat. "AMAN mendesak Dirjen Kebudayaan untuk mengevaluasi juga cara kerja selama ini. Setelah dibantu, lalu apa? Bagaimana agar masyarakat adat tetap hidup dengan lingkungan budayanya dan lain-lain," kata Abdon.

Direktur Dukungan Komunitas AMAN Annas Hadin Syarif menambahkan, hal yang perlu juga dievaluasi adalah kerja lintas kementerian yang belum berjalan. (IVV)

Revitalisasi Desa Adat Belum Sentuh Akar Tradisi

JAKARTA, (PR).-

Revitalisasi desa Adat (RDA) yang telah berlangsung secara rutin sejak 2012 lalu dinilai belum memberikan hasil yang signifikan. Peserta RDA dan juga penerima Fasilitas Komunitas Budaya di Masyarakat (FKBM) dinilai masih sebatas menjalankan program bantuan pemerintah itu di permukaan, belum menyentuh interpretasi makna yang sebenarnya, yakni soal akar tradisi.

Hal ini diutarakan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Dia menuturkan, dari pembinaan ulang yang dilakukan Direktorat Jenderal Kebudayaan terhadap FKBM dan RDA memang belum terlihat hasil yang menggembirakan. Dia menjelaskan, revitalisasi rumah adat masih diterjemahkan pada perbaikan kondisi fisik.

"Tidak mau masuk terlalu jauh seperti bersusah payah melihat kembali akar tradisi. Berhenti pada memperbaiki apa yang rusak. Padahal, revitalisasi bukan hanya soal fisik, melainkan kesadaran. Karena masalah fisik (bangunan) adalah konsekuensi dari kesadaran," ujarnya saat membuka Workshop FKBM dan RDA di Hotel Ciputra Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan data Kemendikbud, hingga 2015 lalu telah terdapat 1.226 komunitas budaya dan 156 desa adat yang telah difasilitasi dan direvitalisasi oleh pemerintah. Bentuk fasilitasi dan revitalisasi tersebut adalah pemberian bantuan yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya maupun desa adat.

Dia mengingatkan, orientasi RDA adalah untuk menghidupkan kembali akar budaya yang selama ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat yang tinggal di era modern. Diharapkan, revitalisasi

desa adat memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat untuk ikut melestarikan budaya di era teknologi seperti sekarang.

Hilmar menuturkan, revitalisasi desa adat juga tidak lantas diartikan sebagai keinginan untuk hidup di masa lalu. Justru lebih dari itu, menjadi upaya untuk mengembangkan bangsa menuju modernitas, tetapi dengan tradisi yang dimiliki tanah air.

"Upaya merevitalisasi rumah adat dan menghidupkan kembali komunitas budaya ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu peran dari lembaga dan kementerian lain, seperti misalnya Kemendagri dalam urusan administrasi desa. Karena hal ini di luar tugas dan fungsi Kemendikbud," tuturnya. **(Siska Nirmala)*****

”

Upaya merevitalisasi rumah adat dan menghidupkan kembali komunitas budaya ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri

”

Pikiran Rakyat
Juli 2016

Radar Bali
Juli 2016

Jaksa Tahan Koruptor Pelestari Rumah Budaya

SINGARAJA - Tersangka dugaan korupsi dana pelestarian rumah budaya akhirnya ditahan kejaksaan negeri Buleleng. Yakni Ketut Swandita, 60, dan Made Sudarisma, 56. Keduanya resmi ditahan, Rabu (20/7) kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Sumarjo yang di dampingi Kasi Pidsus Indra Harvianto mengatakan jika kasus tersebut berawal saat adanya kurcuan dana APBN dari Kemendikbud tentang pelestarian rumah budaya pada 2013 silam. Saat itu Swandita yang menjabat selaku Ketua organisasi pelestarian seni budaya Buleleng Banda Sawitra di Desa Kedis mengajukan proposal senilai Rp 495 juta. Selanjutnya dana tersebut pun cair dengan SK No. 3045/SK/SNB/BUD/X/2013 yang disimpan di salah satu Bank pemerintah. "Kemudian penarikan dana ini pun bertahap selama dua kali, Swandita meminta bendaharannya yakni Sudarisma menarik di tahap pertama senilai Rp 100 juta pada

tanggal 21 November 2013, selanjutnya pada 25 November kembali divarikan sebanyak Rp 395 juta," ujarnya.

Setelah proyek berjalan, pada 2015 BPKP menemukan kejanggalan dalam hal pertanggungjawaban proposal tersebut. Di mana dana yang terpakai hanya Rp 319 juta lebih. Sedangkan sisa dari anggaran senilai Rp 175 juta lebih tidak jelas peruntukannya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejari Buleleng, ditemukan jika dana senilai Rp 69 juta ini digunakan untuk kepentingan pribadi Swandita yang juga menjabat sebagai bendesa adat Desa Kedis. Sedangkan Sudarisma selaku bendahara yang bertugas sebagai pemindahan uang dari rekening rumah budaya ke rekening pribadi milik Swandita menikmati keuntungan senilai Rp 3 juta. "Sisa dari anggaran itu tidak jelas pertanggung jawabannya. Saat ini kasus tersebut sudah berstatus



TAK BERKUTIK: Ketut Swandita, tersangka dugaan korupsi dana pelestarian rumah budaya ditahan Kejaksaan Negeri Buleleng kemarin.

P21 dan keduanya resmi ditahan," jelas Sumarjo kepada awak media. Diakuinya, jika ada pengembalian

dana dari para tersangka senilai Rp 82 juta. Namun, itu tidak menghentikan proses hukum. **(zul/gup)**

Bumikan Bahasa Daerah

Perlu Upaya Revitalisasi Bahasa yang Terancam Punah

BANDUNG, KOMPAS — Setelah adu argumen dan gagasan, 2-4 Agustus, para peserta Kongres Bahasa Daerah Nusantara akhirnya sepakat menelorkan deklarasi. Sebanyak 14 butir deklarasi itu memuat semangat yang kuat untuk membumikan kembali bahasa daerah sebagai bahasa ibu di negeri sendiri.

Butir pertama deklarasi, meminta UNESCO menetapkan secara tegas bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 belum mengatur perlindungan bahasa daerah sehingga pemerintah perlu segera membuat UU Perlindungan Bahasa Daerah yang komprehensif, mengingat, dan mengimplementasikannya.

Butir-butir berikutnya memuat desakan untuk membuat aturan atau panduan perlindungan bahasa daerah. Bentuk perlindungan itu di antaranya menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah, me-

ningkatkan kompetensi guru bahasa daerah, dan menyusun buku-buku berbahasa daerah.

Deklarasi yang dibacakan oleh mantan Rektor Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia, itu diharapkan mampu (minimal) menggugah pemerintah dan wakil rakyat untuk peduli pada kejayaan warisan budaya bangsa. Sastrawan dan Ketua Yayasan Kebudayaan Rancage, Ajip Rosidi, berharap segala upaya penyelamatan bahasa daerah dapat membuahkan hasil meski ia sendiri kurang yakin deklarasi bisa membawa perubahan.

Badan Bahasa telah memveri-

fikasi 617 bahasa daerah di Indonesia, akhir 2014. Dari jumlah itu, 178 terancam punah. Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Multania Lauder mencatat, 13 bahasa telah punah.

"Bahasa ibu adalah warisan budaya yang sangat kaya. Bisa-bisa punah. UU tentang bahasa yang sekarang harus diubah, atau direvisi. Bahasa dianggap sebagai media komunikasi semata. Padahal, bahasa adalah ekspresi batin bangsa penggunanya," tutur Ajip.

Ia prihatin mencermati bahasa yang dipergunakan di televisi swasta nasional. Bukan bahasa Indonesia yang baik, melainkan bahasa gaul. Celakanya, bahasa gaulnya sebatas Jakarta. Orang-orang di luar Jakarta harus menyesuaikan diri, menjadikan bahasa minoritas di pelosok Indonesia makin tergerus.

Revitalisasi

Pengajar dan peneliti dari Uni-

versitas Napoli Orientale Italia, Antonia Soriente, menduga pengaruh globalisasi sebagai salah satu penyebab makin merananya bahasa daerah. Pengaruh bahasa nasional Indonesia dan bahasa daerah yang lebih kuat, seperti Sunda, Jawa, dan Betawi, juga turut andil. Harus ada upaya aktif dari semua pihak untuk merevitalisasi bahasa-bahasa daerah yang terancam punah, seperti bahasa Keryah dan Punan di Kalimantan.

Kongres nasional tentang bahasa daerah di Bandung ini adalah hajatan yang pertama, hasil kerja sama Yayasan Kebudayaan Rancage, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, dan Badan Bahasa Kemdikbud. Kongres menghadirkan para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi serta praktisi, unsur pemerintah, budayawan, dan pemerhati bahasa dari hampir semua provinsi di Indonesia. (IV)

Lagi Bali Tuan Rumah WCF



Raka Santeri

WORLD Culture Forum (WCF) akan dilaksanakan lagi di Bali pada 10-14 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Kamis (15/9) lalu.

Pertemuan persiapan penyelenggaraan WCF itu juga telah berlangsung di Denpasar. Sekitar 1.500 delegasi dari berbagai negara diperkirakan akan menghadiri pertemuan kebudayaan dunia itu tahun 2016 ini. WCF sebelumnya telah dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2013.

WCF menandai semakin pentingnya kebudayaan sebagai pendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pembukaan WCF yang lalu, Presiden SBY telah memberikan ceramahnya bersama tiga pembicara lain, yakni Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, pemenang Nobel Amartya Sen, dan tokoh media internasional Fareed Zakaria.

■ *Bersambung ke hal. 15*

Pos Bali
September 2016

Lagi Bali Tuan...

Sambungan hal. 1

SBY yang mencetuskan ide WCF itu juga telah mengukuhkan peran Indonesia melestarikan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan berbasis budaya. Sebagai tempat diselenggarakannya pertemuan ini, Bali dengan sendirinya akan ditantang pula menjadi pusat perhatian dunia dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan budaya dan lingkungan. "Sejumlah konsep pembangunan Bali yang berlandaskan budaya bakal diterjemahkan ke dalam bahasa global. Artinya, kearifan lokal yang ada di Bali bakal diajukan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan internasional," ujar Kepala Bagian Umum dan Kerjasama Dirjen Kemdikbud RI, Wawan Yogaswara menambahkan seperti dikutip pers.

Pertanyaannya sekarang tentu: apakah kita di Bali telah mampu menjawab tantangan tersebut? Sebelum menjawabnya, mari kita lihat, apa tantangan terbesar dunia saat ini, dan apa yang telah kita miliki sebagai modal untuk menjawab tantangan tersebut.

Dalam kaitan ini UNESCO telah berkali-kali menyatakan bahwa ketidakseimbangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia, disamping antara manusia dengan alam. Sementara di Bali kita memiliki falsafah Tri Hita Karana (THK) yang menegaskan bahwa kesejahteraan dan keharmonisan hidup hanya bisa dicapai jika terjadi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan mereka.

Karena itu jawaban atas pertanyaan yang akan semakin menantang setelah diselenggarakannya kembali WCF di Bali ini adalah pelaksanaan THK secara nyata, bukan hanya dalam tataran filosofis dan teoritis. Hal itu misalnya telah dilakukan oleh Yayasan THK yang secara periodik menyelenggarakan perlombaan antar hotel, kantor dan sekolah untuk memperebutkan "THK Awards & Accredita-

tion". Bahkan dalam menyongsong WCF di Bali tiga tahun lalu, Yayasan THK telah menerbitkan buku prestisius "Tri Hita Karana, The Spirit of Bali", karya Jan Hendrik Peters, LL.M, Ph.D., dan Ir. Wisnu Wardana.

Menjadikan kebudayaan sebagai motor penggerak pembangunan juga bukan hal baru bagi masyarakat Bali. Air, tanah, api, dan udara, merupakan komponen-komponen pembangunan yang dianggap "hidup" oleh masyarakat Bali. Bukan sekedar barang mati! Setelah tergabung menjadi sebuah bangunan, juga dihidupkan kembali menjadi "pribadi" yang memiliki "jiwa". Tetapi harus diakui, peran budaya (bahkan spiritual) itu di Bali semakin lama telah semakin lemah. Tanah-tanah di pulau dewata ini telah dicaplok oleh para investor yang lebih mementingkan materi daripada jiwa, lebih mementingkan profit daripada benefit. Pelan-pelan wajah Bali pun semakin kabur dibalik sangarnya pembangunan yang berwujud "modern".

Akankah Bali akhirnya menjadi seperti Betawi di Jakarta? Jawabannya tergantung diri kita sendiri. Tetapi perlu diingat, membangun Bali tidak bisa hanya dengan "materi", tanpa menghiraukan lagi "misteri"-nya. Karena dalam "misteri" itulah justru letak "taksu"-nya Bali. Suatu "kekuatan dalam", yang memancar bersama berkat Tuhan.

Juga membangun Bali tidak bisa lagi dengan rasa takut penuh curiga, akibat terjadinya perubahan yang harus dihadapi. Apalagi "misteri" yang menjadi kekuatan Bali, sama sekali tidak irasional. Misteri itu pada dasarnya ilmiah, sama dengan gelombang dan vibrasi itu juga ilmiah. Hanya menangkapnya tidak bisa dengan mata telanjang yang kita anggap ilmiah ini. Misteri harus ditangkap dengan mata hati, mata batin, dan rasa yang dipecah kasih sayang. Karena itu mari kita hidupkan intelektualitas kita lewat fungsi-sungsi otak, dan mari kita hidupkan jiwa kita melalui fungsi-fungsi hati dan rasa. Semoga kita berhasil.***

Republika
September 2016

Menunggu Museum Alam yang Atraktif dan Interaktif

● GLEH SANTI SOPHA

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem serta kebudayaan lokal. Sejak setahun silam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah memikirkan bagaimana agar sejarah kekayaan Tanah Air ini bisa terwadahi dengan baik, salah satunya dengan menciptakan museum. Di beberapa negara maju, museum alam telah dibuat secara komprehensif.

Selama ini berkembang pola pikir di masyarakat bahwa museum identik dengan monoton, gelap, dan seram. Untuk mengubah pola pikir seperti itu, masyarakat mau tidak mau perlu "dipaksa" untuk menyukai museum. Dengan catatan, museum dikemas menarik dan membuat orang betah berlama-lama di dalamnya.

LIPI pun memperkenalkan Museum Sejarah Alam Indonesia pada Rabu (3/8) di gedung eks Herbarium Bogoriense, Jalan Juanda, Bogor.

Museum yang belum resmi diluncurkan ini direncanakan dibangun dengan lima lantai. Penyelesaiannya diperkirakan memakan waktu hingga 2019.

Masalah alam ini bukan hanya soal tumbuhan, melainkan juga ada hewan, bakteri. Artinya, semua yang terkait dengan alam. Jadi, nanti pengunjung tak hanya bisa melihat jamur, misalnya, tetapi sekaligus bisa melihat jamur mengandung bakteri apa dan lain-lain," ujar Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmanowati.

LIPI mengharapkan, nantinya museum ini dapat mencerminkan alam Indonesia. Yang akan menjadi kejutan, museum akan dibuat tidak monoton, tetapi interaktif dengan berbagai polesan teknologi hi-tech. "Akan pakai teknologi simpel sampai modern. Di depan gedung, kami ingin pintu kaca," lanjut Enny.

Museum tersebut, sambung Enny, akan dibuat interaktif. Sehingga, pengunjung bisa terhubung langsung

dengan berbagai koleksi yang ada. Museum juga tak akan terkesan monoton atau "seram" seperti pada umumnya. Berbagai rencana pun dirancang untuk menghidupkan museum, seperti pagelaran mini konser, night museum, dan berbagai acara lainnya.

Kesan museum yang monoton memang tak terlihat. Berbagai koleksi artefak pemanfaatan tumbuhan tropis Indonesia tampak tertata rapi di lantai dasar museum. Tak lupa, koleksi hewan nusantara, pengetahuan, dan teknologi lokal, seperti batik, obat tradisional, dan pangan lokal, melengkapi koleksi di lantai berikutnya.

Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain menjelaskan, museum akan memuat tentang sejarah alam berupa interaksi komponen kehidupan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. "Termasuk, meliputi pengetahuan etnobiologi yang di dalamnya termasuk pemanfaatan jenis hayati tropis Indonesia hingga pengetahuan

modern," kata dia.

Museum akan memamerkan pengetahuan masyarakat Indonesia atau mengelola sumber daya alam, khususnya hayati dan ekosistemnya. Lantai dasar masih dipertahakan sebagai wahana memamerkan pengetahuan etnobotani masyarakat Indonesia dengan tema "Pemanfaatan Tumbuhan Tropika Indonesia", meliputi pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal di Indonesia.

Lantai satu digunakan untuk wahana pameran temporer dan perkantoran karyawan museum dan peneliti. Adapun, lantai dua dan tiga mempresentasikan perkembangan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistemnya dari yang masih tradisional hingga pemanfaatan modern.

Untuk mengawali, memperkenalkan, dan mempromosikan museum ini kepada masyarakat, baik kepada

para siswa sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum, telah dilakukan pameran temporer selama satu tahun secara gratis yang memamerkan berbagai koleksi.

Koleksi keekaragaman hayati dengan kehidupan modern masyarakat yang dipamerkan itu telah dimiliki oleh LIPI dari hasil eksplorasi di seluruh kawasan nusantara. Hasilnya cukup menggembirakan, jumlah pengunjung yang hanya 5.000 per enam bulan, naik menjadi 15 ribu.

Saat ini, kerja sama untuk pembangunan museum dilakukan dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dirjen Kebudayaan, dan juga Kemendikbud, BUMN, dan pihak swasta. Agar lebih efektif, tiket museum akan dibuat terusan antara Kebun Raya Bogor, Museum Sejarah Alam Indonesia, dan Museum Balai Kirti. "Setiap tahun ada dana Rp 4 miliar untuk pengembangan iptek, tentu akan ada juga dari pihak swasta," jelas Enny. ■ *edi andri purnomo*

Republika
Oktober 2016



JELANG WORLD CULTURE FORUM Panitia pengarah World Culture Forum (WCF) 2016 Azyumardi Azra (dari kiri) dan Dirjen Kebudayaan Mendikbud Hilmar Farid saat konferensi pers di Kemendikbud, Jakarta, Selasa (4/10). Konferensi pers ini terkait pelaksanaan WCF ke-2 di Bali. Pada acara ini akan dibahas isu-isu strategis dan dapat merekomendasikan kebijakan pengembangan budaya. Terutama yang berkaitan dengan perdamaian, kemakmuran, pelestarian, dan pengembangan kualitas hidup bagi peradaban global.

Bali Post
Oktober 2016

WCF 2016 dan Gejar Budaya

Oleh

Ribut Luplyanto

INDONESIA baru saja menyelenggarakan *World Culture Forum* (WCF) pada 10-14 Oktober 2016 di Bali. WCF kedua sejak 2013 ini mengusung tema "Culture for an Inclusive Sustainable Planet" atau "Budaya bagi Dunia yang Inklusif Berkelanjutan". WCF 2016 dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo di Nusa Dua, Badung, Bali. Berbagai acara seni dan budaya menyemarakkan jalanan WCF 2016. Kegiatan yang ada mulai dari pertunjukan panggung, pameran kesenian, kunjungan budaya, dan ragam budaya lainnya dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh dari dalam dan luar negeri juga turut serta dalam acara tersebut. Di antaranya Raja Jordanis King Abdullah II dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan lainnya.

WCF membuka kesadaran bahwa budaya dunia di era globalisasi ini sudah sangat terbuka. Salah satu implikasi yang mungkin terjadi adalah terjadinya gejar budaya. Tantangannya adalah perlunya adaptasi dan saling toleransi. Keterbukaan budaya semua mesti memberikan sumbangsan kontributif bagi pembangunan berkelanjutan.

Gejar budaya atau *culture shock* pertama kali diperkenalkan oleh antropologi bernama Oberg (Irwin, 2007). Gejar budaya secara sederhana dapat dimaknai sebagai kondisi ketidaksiapan menerima budaya yang baru pada kehidupan. Manika (2014) memberikan kesimpulan atas berbagai definisi gejar budaya yaitu kondisi kecemasan yang dialami seseorang dalam rangka penyesuaian dalam lingkungan yang baru di mana nilai budaya yang ada tidak sesuai dengan nilai budaya yang dimilikinya sejak lama.

Fenomena gejar budaya bersifat kontekstual dan dialami dengan berbeda-beda dari generasi ke generasi berikutnya (Lan, 2007). Faktor yang mendorong munculnya gejar budaya tergantung pada di daerah mana individu tersebut berasal, di daerah mana individu berada, serta pada tahun

atau masa seperti apa.

Samovar (2000) menyatakan bahwa orang biasanya melewati empat tingkatan gejar budaya. Keempat tingkatan ini dapat digambarkan dalam bentuk kurva U, sehingga disebut *u-curve*.

Pertama, fase optimis, fase pertama yang digambarkan berada pada bagian kiri atas dari kurva U. Fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan, dan euforia sebagai antisipasi individu sebelum memasuki budaya baru.

Kedua, masalah kultur. Fase di mana masalah dengan lingkungan baru mulai berkembang, misalnya karena kesulitan bahasa, sistem lalu lintas baru, sekolah baru, dll. Fase ini biasanya ditandai dengan rasa kecewa dan ketidakpuasan. Ini adalah periode krisis dalam *culture shock*.

Fase ketiga adalah *recovery*. Orang mulai mengerti mengenai budaya barunya. Pada tahap ini, orang secara bertahap membuat penyesuaian dan perubahan dalam caranya menanggulangi budaya baru. Fase terakhir adalah penyesuaian. Fase ini merupakan puncak kurva U. Orang telah mengerti elemen kunci dari budaya barunya berupa nilai-nilai, adaptasi khusus, pola komunikasi, keyakinan, dan lainnya.

Interaksi lintas budaya tidak dapat dihindarkan oleh siapa pun. Interaksi tersebut dapat aktif atau pasif, sengaja atau tidak sengaja, maupun langsung atau tidak langsung. Berbagai media di era teknologi informasi membantu percepatan interaksi tersebut. Implikasinya sekaligus cepat menyebarkan gejar budaya.

Masalahnya saja fenomena budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini berpotensi menyebabkan multi-efek. Budaya Barat tentunya tidak selamanya lebih unggul, karena beberapa di antaranya tidak sesuai dengan budaya Timur (Baluhanto, 2012). Nilai-nilai yang tidak sesuai

tersebut seperti individualisme, hedonisme, sekularisme, konsumerisme, dan lainnya.

Efek terburuknya adalah degradasi hingga punahnya khazanah budaya nusantara. Kepunahan sudah melanda bahasa daerah. Sebanyak 139 bahasa daerah terancam punah dan 15 bahasa daerah sudah dinyatakan punah (BPPB Kemendikbud, 2016).

Kondisi gejar budaya membutuhkan penangan atau terapi yang tepat sasaran. Budaya nusantara perlu ditonjolkan dalam pergaulan internasional. Indonesia penting terbuka dalam interaksi dunia. Konsekuensinya perlu disusun dan dijalankan strategi guna mencegah sekaligus terapi terhadap gejar budaya yang telah terjadi.

Pertama melalui internalisasi budaya lokal atau budaya nusantara. Setiap WNI penting bahkan wajib mengetahui hingga memahami filosofi serta nilai-nilai yang terkandung dalam budayanya. Rasa memiliki terhadap budaya mesti dimiliki dan diformalkan kuat. Budaya nusantara mesti menjadi jati diri setiap individu. Hal ini menjadi modal sekaligus benteng interaksi dengan budaya asing. Berbekal internalisasi dapat mewarisi dalam interaksi, bukan justru terwarisi hingga tergeser budayanya.

Kedua adalah pentingnya penyaringan atau filtering budaya. Setiap melakukan interaksi, maka perlu disaring mana saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan budaya nusantara. Semakin rapat saringannya, maka akan semakin minimal bahkan terhindar dari gejar budaya.

Ketiga dengan keterbukaan sekaligus toleransi. Interaksi dengan pihak luar mesti dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Jika ada norma yang tidak sesuai dengan budaya nusantara, maka sebaiknya diungkapkan tanpa harus menyinggung pihak luar. Toleransi tetap harus dijunjung tinggi. Ketidaksiapan budaya mesti tidak diungkapkan dengan merendahkan budaya lain.

Penulis, Deputy Direktur C-PubliCA
(Center for Public Capacity Acceleration)

POJOK

Pemesanan 10 ton beras Bulog untuk dikirim ke Buleleng terkesan mendadak.

-Ada kepentingan politik rupanya.

PPATK laporkan 20 kepala daerah yang memiliki rekening gendut.

-Tak terpantau lebih banyak.

Warga di sejumlah desa di Buleleng sudah mendapat "kado beras".

-Kado uang menyusul?

Bang Podjok

Pikiran Rakyat
November 2016

Pencak Silat Disalip Pencak Melayu

BANDUNG - Pemerintah Indonesia harus segera mendaftarkan pencak silat ke UNESCO karena Malaysia telah kembali mendaftarkan pencak Melayu sebagai bela diri Malaysia. "Baru beberapa hari kita paparkan tentang pencak silat kepada Dirjen Kebudayaan, tersiar kabar jika Malaysia mendaftarkan kembali pencak silat dengan nama pencak Melayu sebagai seni bela diri Malaysia ke UNESCO," kata Ketua Tim Kerja Persiapan Pendaftaran Pencak Silat Menuju UNESCO Wachdat Mardi Yuana, pada pertemuan "Masamohan Pendekar Silat Jawa Barat", di Perpustakaan Taman Budaya Jawa Barat, Kamis (17/11/2016). Wachdat berharap pemerintah melalui Kemendikbud segera menetapkan pencak silat untuk didaftarkan ke UNESCO. "Saya sudah melaporkan hal ini kepada Pembina Pencak Silat Bapak Eddy Nalapraya, dan mudah-mudahan dari empat karya budaya Indonesia yang masuk nominasi untuk didaftarkan ke UNESCO, pencak silat termasuk di dalamnya," ujarnya. Dia menambahkan, rencana pendaftaran pencak silat ke UNESCO berupa nilai-nilai filosofi dan budaya. Pertimbangan lainnya, pencak silat sudah menyebar dan dikenal di 52 negara, serta diakui dari Indonesia. Selain itu, terpenuhinya masalah gender karena pencak silat mengenal banyak tokoh wanita. **(RHY)*****

Galamedia
Desember 2016

Bahasa Daerah Per kaya Bahasa Indonesia

"MENJUNJUNG bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Itulah bunyi sumpah ketiga dari para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sungguh merupakan suatu anugerah yang tak terhingga bangsa Indonesia dikaruniai bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa sehingga semua suku yang berbeda di seluruh Indonesia dapat saling berkomunikasi. Oleh karena itu, sangatlah wajar dan berkesan kalau 88 tahun lalu para pemuda pendahulu kita mengucapkan sumpahnya dan hingga kini kita harus tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia.

Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antarsuku bangsa di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Bahasa, di Indonesia terdapat 746 bahasa dan hingga tahun 2011 baru 514 bahasa yang berhasil diidentifikasi. Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena masih ada beberapa daerah yang belum diteliti.

Namun, hal tersebut justru bertolak belakang dengan kondisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masih kekurangan kosakata sehingga ketika tidak menemukan kosakata bahasa Indonesia yang tepat, pengguna bahasa tidak sedikit yang menggunakan bahasa asing untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Akibatnya, bahasa asing menjadi tersebar luas dalam penggunaan bahasa Indonesia.

Di dalam *Komis Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* edisi terakhir (V), bahasa In-

donesia memiliki 127.036 lema. Jumlah tersebut tentu sangat jauh tertinggal dari bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional. *Oxford English Dictionary* memuat daftar lebih dari 250.000 kata berbeda, tidak termasuk istilah-istilah teknis, sains, dan bahasa gaul yang jumlahnya juga sangat banyak. Bahkan, menurut tim riset gabungan peneliti Harvard University dan Google, jumlah total kata dalam bahasa Inggris telah mencapai 1.022.000 kata.

Jadi modal

Bahasa Indonesia hingga kini terus berupaya untuk menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi secara cepat agar pembaca atau pendengar dapat memahami dan menguasai ilmu tersebut. Untuk itu, kosakata bahasa Indonesia harus diperkaya disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, Badan Bahasa Kemendikbud menargetkan lema KBBI mencapai 200.000 pada tahun 2019. Kekayaan bahasa daerah yang kita miliki tentu dapat dijadikan modal untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Penyerapan kosakata bahasa daerah merupakan suatu cara yang

Oleh: DINDIN SAMSUDIN



sangat tepat dalam usaha pengembangan bahasa Indonesia. Cara tersebut layak dilakukan karena ternyata banyak konsep yang berasal dari kosakata bahasa daerah yang tidak dapat ditemukan dalam konsep bahasa Indonesia. Kalapun ada, bentuknya masih berupa frasa, bukan berupa satu kata yang lebih efisien.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Peningkatan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pasal 12 ayat 1 mengamatkan pengembangan bahasa daerah untuk meningkatkan fungsinya, antara lain sebagai sarana pendukung bahasa Indonesia dan sumber pengembangan bahasa Indonesia. Peraturan ini menegaskan fungsi bahasa daerah sebagai sumber pemer kaya bahasa Indonesia.

Besarnya jumlah penutur memang berkorelasi dengan jumlah kosakata bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makin besar jumlah penuturnya, makin besar kecenderungan kosakata yang diserap. Faktor penyerapan bahasa daerah juga ditentukan oleh kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh wartawan di media massa, kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh penulis atau sastrawan dalam karangan-

nya, kekerapan penggunaan kosakata bahasa daerah oleh tokoh publik, dan ketersediaan konsep baru pada kosakata bahasa daerah yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia.

Tidak efisien

Bahasa Sunda sudah menyumbang 249 kata kepada KBBI Edisi V. Akan tetapi, sebenarnya masih terdapat banyak lekseikon bahasa Sunda yang dapat kembali memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia karena beberapa kata bahasa Sunda ternyata belum ada konsepnya dalam bahasa Indonesia, seperti *melehin*, *angsaról*, *baleuy*, *bakakak*, *baricukuan*, *calacah*, *mangkikun*, dan *rengkop*. Seandainya sudah ada pun, konsep dalam bahasa Indonesia tidak efisien karena masih berupa frasa. Dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, salah satu syarat penyerapan kosakata dalam bahasa Indonesia, yaitu kata yang diserap lebih singkat daripada yang lain yang berujukan sama.

Penyerapan kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia juga tentu merupakan salah satu upaya dalam konservasi (penambahan pengguna dan penggunaan) dan revitalisasi (pencatatan kekayaan) bahasa daerah. Demi melestarikan bahasa daerah dan menghindari terjadinya kepunahan, konservasi dan revitalisasi bahasa sangat perlu dilakukan. Ketika kosakata atau istilah bahasa daerah diserap dan digunakan dalam bahasa Indonesia, kosakata tersebut akan tetap lestari dan terjaga dari kepunahan. Marilah kita menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan tetap melestarikan bahasa daerah, sebagai kekayaan budaya bangsa.

(Penulis, Peneliti di Balai Bahasa Jawa Barat)**

“Aku titipkan **INDONESIA** kepadamu,
jika engkau bisa menjaganya.”

(Ir. Soekarno, 1955)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2016